



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

**“PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR,
SERTA EKONOMI PRODUKTIF DAN INKLUSIF SEBAGAI
PONDASI KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa telah ada hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.8.2.6/3548/Bangda Tanggal 25 Juni 2025;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 terdiri atas:
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB VIII. Penutup.

- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 selanjutnya menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026; dan
- c. acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	8
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	8
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	8
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	88
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum	131
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	245
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	275
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.....	275
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Lainnya yang Berhubungan dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah.....	284
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	306
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	306
3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global	306
3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional	308

3.1.3	Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah	309
3.1.4	Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026	320
3.1.5	Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026	321
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	324
3.2.1	Pendapatan Daerah.....	324
3.2.2	Belanja Wajib dan Mengikat Daerah.....	332
3.2.3	Belanja Daerah	335
3.2.4	Pembiayaan Daerah	342
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		343
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	343
4.1.1	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	343
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	348
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	348
4.2.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	350
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026	351
4.2.4	Program Unggulan	375
4.2.5	Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2026...	389
4.3	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	414
4.4	Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD)	417
4.5	Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung	419
4.6	Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD	422

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	425
5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026	425
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	425
5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	427
5.1.3 PDRB per Kapita	430
5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	432
5.1.5 Persentase Penduduk Miskin	435
5.1.6 Indeks Gini	438
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	440
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	455
6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah	456
6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah	458
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	897
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	897
7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	898
BAB VIII P E N U T U P.....	910
8.1 Kaidah Pelaksanaan	910

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur	10
Tabel 2.2 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024...	15
Tabel 2.3 Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan....	16
Tabel 2.4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2.5 Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023	20
Tabel 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.7 Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024	23
Tabel 2.8 Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	24
Tabel 2.9 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)	26
Tabel 2.10 Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.11 Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen).....	27
Tabel 2.12 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ...	28
Tabel 2.13 Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 2.14 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	33

Tabel 2.17 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 2.18 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%).....	43
Tabel 2.20 Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	44
Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	46
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)	46
Tabel 2.23 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	48
Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	50
Tabel 2.25 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa)	53
Tabel 2.26 Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)	56
Tabel 2.27 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)	58
Tabel 2.28 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	59
Tabel 2.29 Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Persen)	60
Tabel 2.30 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun)	65

Tabel 2.31 Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)	67
Tabel 2.32 Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024.....	68
Tabel 2.33 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	70
Tabel 2.34 Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024 Kalimantan Timur	71
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	73
Tabel 2.36 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	84
Tabel 2.37 Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024	84
Tabel 2.38 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024	86
Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun).....	86
Tabel 2.40 <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (persen)	100
Tabel 2.41 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024	106
Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	112
Tabel 2.43 Data Backlog Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	115
Tabel 2.44 Capaian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024	116
Tabel 2.45 Capaian SPM Bidang Perumahan Dan Permukiman 2023 - 2024.....	117
Tabel 2.46 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan	118

Tabel 2.47 Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024.....	120
Tabel 2.48 Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2024.....	128
Tabel 2.49 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	134
Tabel 2.50 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	138
Tabel 2.51 Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	139
Tabel 2.52 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	144
Tabel 2.53 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	145
Tabel 2.54 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kalimantan Timur	147
Tabel 2.55 Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Di Kalimantan Timur	148
Tabel 2.56 Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur	149
Tabel 2.57 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur	149
Tabel 2.58 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	150
Tabel 2.59 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	151
Tabel 2.60 Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	152
Tabel 2.61 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	152
Tabel 2.62 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	153
Tabel 2.63 Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2024.....	154

Tabel 2.64 Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	155
Tabel 2.65 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)	159
Tabel 2.66 Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen).....	160
Tabel 2.67 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	161
Tabel 2.68 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas Permen PU No,14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan Fungsional	164
Tabel 2.69 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan	167
Tabel 2.70 Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	168
Tabel 2.71 Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	169
Tabel 2.72 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021 – 2023 (Jiwa)	170
Tabel 2.73 Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024.....	171
Tabel 2.74 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	173
Tabel 2.75 Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	174
Tabel 2.76 Jumlah Penduduk Disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2024.....	176
Tabel 2.77 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024.....	177
Tabel 2.78 Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023.....	178

Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	180
Tabel 2.80 Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur	182
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	183
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024.....	184
Tabel 2.83 Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037.....	186
Tabel 2.84 Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022.....	187
Tabel 2.85 Data Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2020–2024	188
Tabel 2.86 Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020– 2024	190
Tabel 2.87 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Unit).....	191
Tabel 2.88 Jumlah Proyek PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	193
Tabel 2.89 Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024	196
Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur	197
Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur	197

Tabel 2.92 Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024.....	198
Tabel 2.93 Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	200
Tabel 2.94 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	200
Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	202
Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur	202
Tabel 2.97 Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim	203
Tabel 2.98 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2020–2024	206
Tabel 2.99 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020–2024.....	206
Tabel 2.100 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	211
Tabel 2.101 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	214
Tabel 2.102 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	215
Tabel 2.103 Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	216
Tabel 2.104 Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	218
Tabel 2.105 Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	219
Tabel 2.106 Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	220
Tabel 2.107 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024*	221

Tabel 2.108 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024* (ton).....	221
Tabel 2.109 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (ekor)	223
Tabel 2.110 Populasi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	224
Tabel 2.111 Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	224
Tabel 2.112 Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	225
Tabel 2.113 Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	226
Tabel 2.114 Produksi Kayu Bulat Tahun 2020-2024 (M ³)	228
Tabel 2.115 Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	228
Tabel 2.116 Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2020 - 2024.....	229
Tabel 2.117 Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri Di Kalimantan Timur	230
Tabel 2.118 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024	232
Tabel 2.119 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024 (Juta US\$)	234
Tabel 2.120 Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur	237
Tabel 2.121 Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	238
Tabel 2.122 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	239
Tabel 2.123 Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024	240
Tabel 2.124 Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023	241

Tabel 2.125 Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	244
Tabel 2.126 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	245
Tabel 2.127 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	246
Tabel 2.128 Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	273
Tabel 2.129 Permasalahan Lainnya yang Berhubungan dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	285
Tabel 3.1 Jumlah Proyek dan Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	318
Tabel 3.2 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026.....	320
Tabel 3.3 Sasaran Ekonomi Makro Daerah.....	322
Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025.....	327
Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025 (persen)	329
Tabel 3.6 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027	331
Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	332
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025	338
Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025	339
Tabel 3.10 Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027	341
Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Mandatori (<i>Mandatory Spending</i>) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	342

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027	342
Tabel 4.1 Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	343
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	345
Tabel 4.3 Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029	349
Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKP Tahun 2026	350
Tabel 4.5 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	356
Tabel 4.6 Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	359
Tabel 4.7 Indikasi Kegiatan Unggulan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	386
Tabel 4.8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026.....	390
Tabel 4.9 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026	391
Tabel 4.10 Keselarasan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Program Prioritas PN dalam RKP Tahun 2026..	395
Tabel 4.11 Penyelarasan Kegiatan Utama RKP Tahun 2026 dan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	400
Tabel 4.12 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.....	406
Tabel 4.13 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional	409
Tabel 4.14 Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	415

Tabel 4.15 Jumlah Entry Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota	417
Tabel 4.16 Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD	417
Tabel 4.17 Status Entry Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang Kabupaten/Kota) Berdasarkan Jenis Belanja	418
Tabel 4.18 Status Entry Usulan Aspirasi Langsung Masyarakat (Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/ Kelompok Masyarakat)	418
Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota	425
Tabel 5.2 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Tahun 2026	427
Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota	428
Tabel 5.4 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026	430
Tabel 5.5 Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota	430
Tabel 5.6 Penetapan Target PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2026	432
Tabel 5.7 Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota	433
Tabel 5.8 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Tahun 2026	435
Tabel 5.9 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota	435
Tabel 5.10 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2026	437
Tabel 5.11 Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota	438
Tabel 5.12 Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2026	440

Tabel 5.13 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2026.....	440
Tabel 5.14 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026	442
Tabel 5.15 <i>Highlight</i> Intervensi Indikasi Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026	443
Tabel 6.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026	456
Tabel 6.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	459
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	897
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	898

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....	2
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah .	5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur	9
Gambar 2.2 Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional	11
Gambar 2.3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	11
Gambar 2.4 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur.....	12
Gambar 2.5 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur.....	13
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur	14
Gambar 2.7 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur.....	15
Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur.....	16
Gambar 2.9 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Kalimantan Timur	17
Gambar 2.10 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur	18
Gambar 2.11 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024	22
Gambar 2.12 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen)	25
Gambar 2.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 2.14 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.15 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	32
Gambar 2.16 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen).....	34

Gambar 2.17	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	35
Gambar 2.18	Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	41
Gambar 2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	42
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)	44
Gambar 2.21	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	45
Gambar 2.22	Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024	47
Gambar 2.23	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	48
Gambar 2.24	PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	49
Gambar 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	50
Gambar 2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia	51
Gambar 2.27	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	52
Gambar 2.28	Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024	54
Gambar 2.29	Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	55
Gambar 2.30	Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024	56

Gambar 2.31	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	57
Gambar 2.32	Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)	58
Gambar 2.33	Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	60
Gambar 2.34	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024	61
Gambar 2.35	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024	62
Gambar 2.36	Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	63
Gambar 2.37	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	64
Gambar 2.38	Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia	66
Gambar 2.39	Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	66
Gambar 2.40	Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia	68
Gambar 2.41	Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022	74
Gambar 2.42	Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa)	76
Gambar 2.43	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	77
Gambar 2.44	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2023	78
Gambar 2.45	Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023	79

Gambar 2.46	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023	80
Gambar 2.47	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023	81
Gambar 2.48	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	82
Gambar 2.49	Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	83
Gambar 2.50	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	85
Gambar 2.51	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023	88
Gambar 2.52	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	89
Gambar 2.53	Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	90
Gambar 2.54	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	91
Gambar 2.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	93
Gambar 2.56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	93
Gambar 2.57	Jumlah dan Rasio Pekerja Formal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	95
Gambar 2.58	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	96
Gambar 2.59	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	97
Gambar 2.60	Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	98

Gambar 2.61	Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	99
Gambar 2.62	Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	100
Gambar 2.63	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	102
Gambar 2.64	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	103
Gambar 2.65	Analisa Kuadran IBEI 2023.....	105
Gambar 2.66	Capaian Sub Pilar Penyusun IBEI Provinsi Kalimantan Timur 2023.....	106
Gambar 2.67	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	107
Gambar 2.68	Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen).....	108
Gambar 2.69	Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen).....	109
Gambar 2.70	Disparitas Harga Antar Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)	110
Gambar 2.71	Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024	113
Gambar 2.72	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ...	114
Gambar 2.73	Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024	119
Gambar 2.74	Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	121
Gambar 2.75	Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)	122

Gambar 2.76	Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	123
Gambar 2.77	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	124
Gambar 2.78	Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	125
Gambar 2.79	Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	126
Gambar 2.80	Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022	127
Gambar 2.81	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)	130
Gambar 2.82	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur...	133
Gambar 2.83	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	135
Gambar 2.84	Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024	137
Gambar 2.85	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	140
Gambar 2.86	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020	142
Gambar 2.87	Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2024	143
Gambar 2.88	Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (persen)	146
Gambar 2.89	Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	153
Gambar 2.90	Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	154

Gambar 2.91 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024	156
Gambar 2.92 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2020-2024	157
Gambar 2.93 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2020-2024 (%)	158
Gambar 2.94 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim.....	159
Gambar 2.95 Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024	162
Gambar 2.96 Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha).....	165
Gambar 2.97 Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	166
Gambar 2.98 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%)	172
Gambar 2.99 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (orang)	175
Gambar 2.100 Indeks Pencemaran Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	179
Gambar 2.101 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2020-2024	185
Gambar 2.102 Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	191
Gambar 2.103 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (triliun Rp)	194
Gambar 2.104 Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (US\$)	195

Gambar 2.105 Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Triliun Rp).....	195
Gambar 2.106 Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024.....	204
Gambar 2.107 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun).....	205
Gambar 2.108 Jumlah Objek Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	208
Gambar 2.109 Desa Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	208
Gambar 2.110 Jumlah Kelompok Sadar Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	209
Gambar 2.111 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	211
Gambar 2.112 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)	213
Gambar 2.113 Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	217
Gambar 2.114 Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur	222
Gambar 2.115 Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Ton)	233
Gambar 2.116 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	234
Gambar 2.117 Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar US\$).....	235
Gambar 2.118 Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	236
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%).....	309

Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (persen)	310
Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (Persen).....	311
Gambar 3.4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%)	312
Gambar 3.5 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%).....	312
Gambar 3.6 Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$)	313
Gambar 3.7 Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$)	314
Gambar 3.8 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$)	315
Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen)	316
Gambar 3.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2020–2024	317
Gambar 4.1 Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....	344
Gambar 4.2 Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Daerah	375
Gambar 4.3 Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer) .	420
Gambar 4.4 Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	421
Gambar 4.5 Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan.....	422
Gambar 4.6 Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Fraksi	423

Gambar 4.7 Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan	424
Gambar 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024	426
Gambar 5.2 Analisis Kuadran Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten/Kota Tahun 2024	429
Gambar 5.3 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024	431
Gambar 5.4 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	434
Gambar 5.5 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	437
Gambar 5.6 Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024	439

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

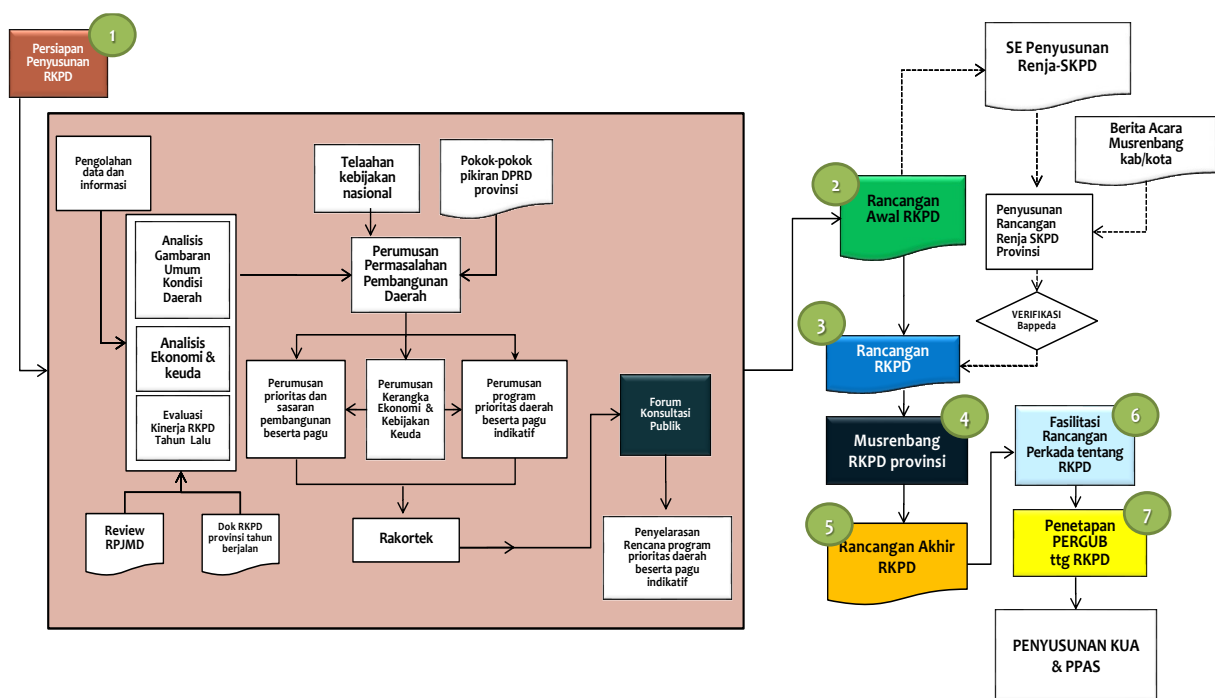
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan pelaksanaan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), Pemerintah Daerah diminta untuk mulai menyusun Rancangan Awal RKPD sejak Bulan Desember tahun (n-2) perencanaan untuk selanjutnya menjadi bahan Konsultasi Publik. Sedangkan pada masa tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 masih belum ditetapkan. Terhadap hal tersebut, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 untuk sementara masih berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah memuat penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memiliki kedudukan yang strategis sebagai tahun dasar pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan sebagai berikut

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- 4) Penyusunan Rancangan RKPD;
- 5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 6) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- 7) Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- 8) Penetapan RKPD.

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11).

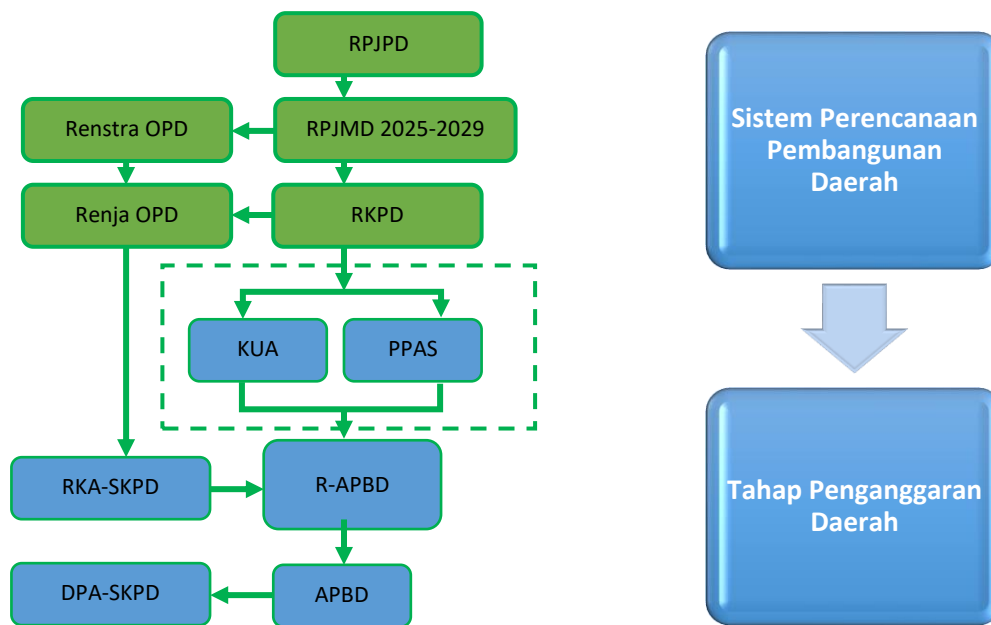
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berpedoman pada :

- a. Arah kebijakan pentahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama;
- b. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2026.

Selanjutnya RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA PD), serta menjadi

pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan Rancangan APBD. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah :

- a. Mewujudkan keselarasan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yang berkualitas untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan (dengan sementara mempedomani Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029), tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian indikasi kamus usulan aspirasi tahun 2026.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi

pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalan dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

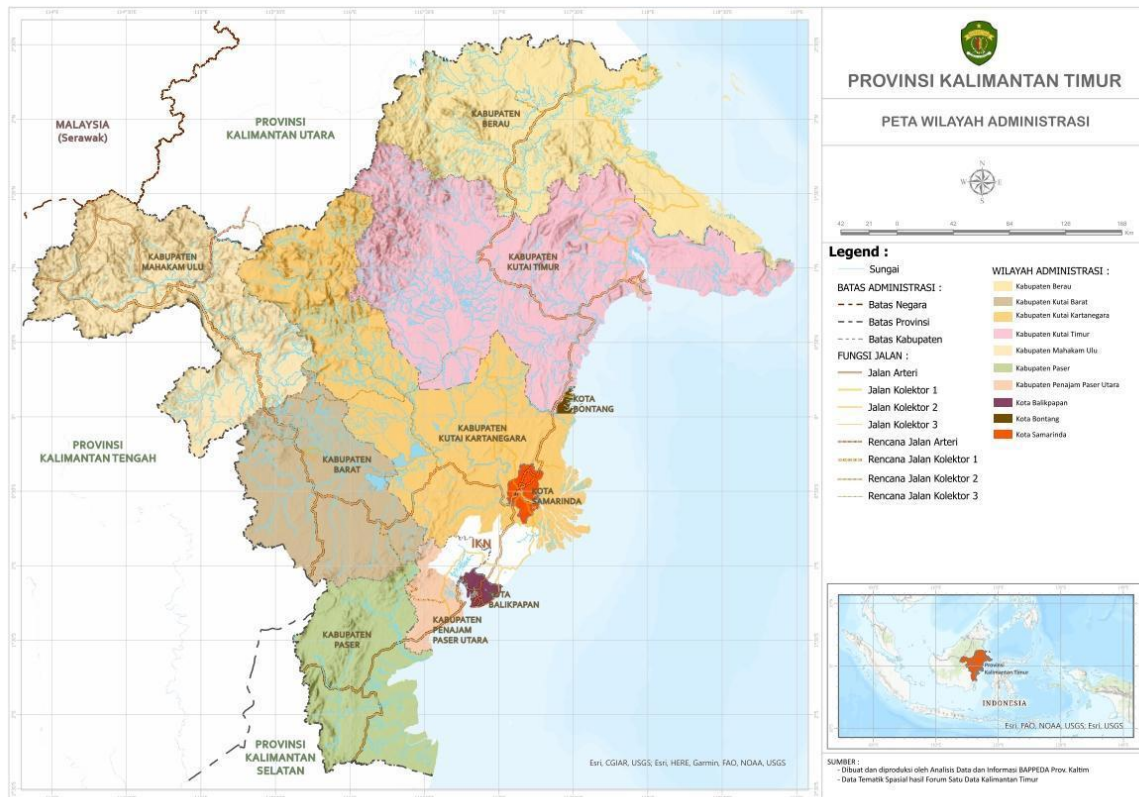
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri atas 105 kecamatan yang terbagi kedalam 1.038 desa dan kelurahan. Sebagai catatan bahwa jumlah kecamatan, desa dan kelurahan ini masih melingkupi delineasi wilayah IKN. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

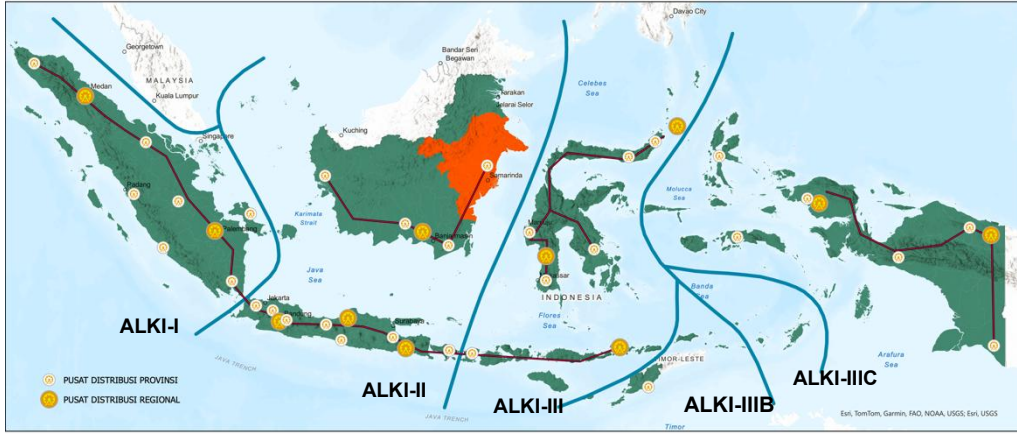
No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
Kalimantan Timur		15.344.552	105	1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Luas wilayah tersebut telah disesuaikan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang sebesar 322.429 Ha.

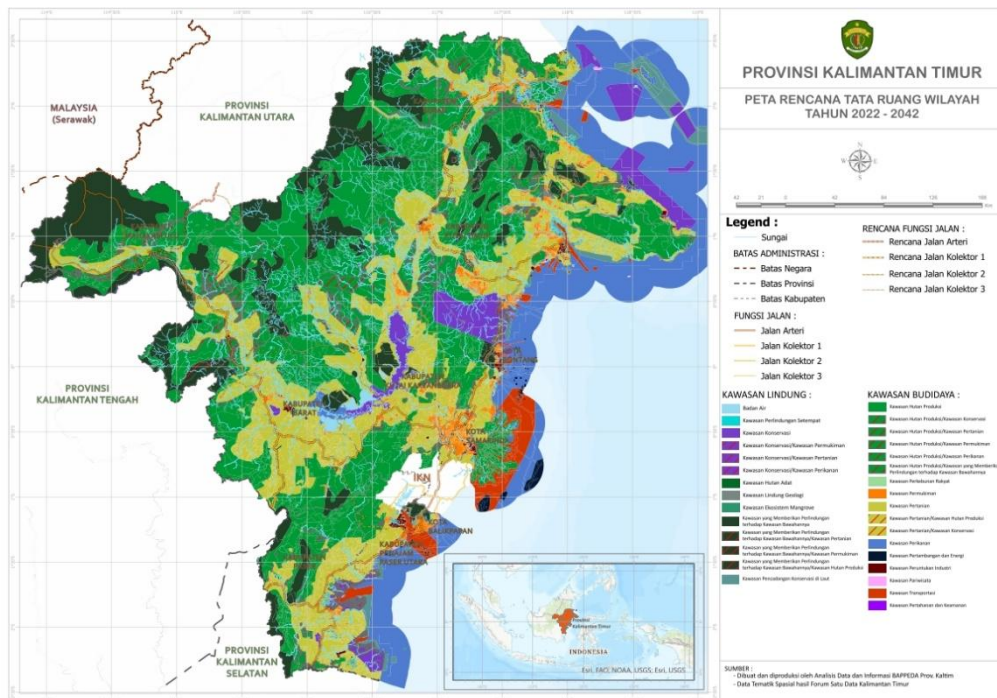
Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDRB Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap nasional mencapai 4,12 persen dan pada tahun 2024 sebesar 3,09 persen. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki peran geostrategis terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana Kalimantan Timur berperan sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok dan rantai nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia yang berperan sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis ini potensial meningkatkan peran Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa ke berbagai penjuru nusantara. Selain itu, letaknya yang jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang aman dan ideal untuk pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.



Gambar 2.2. Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024)

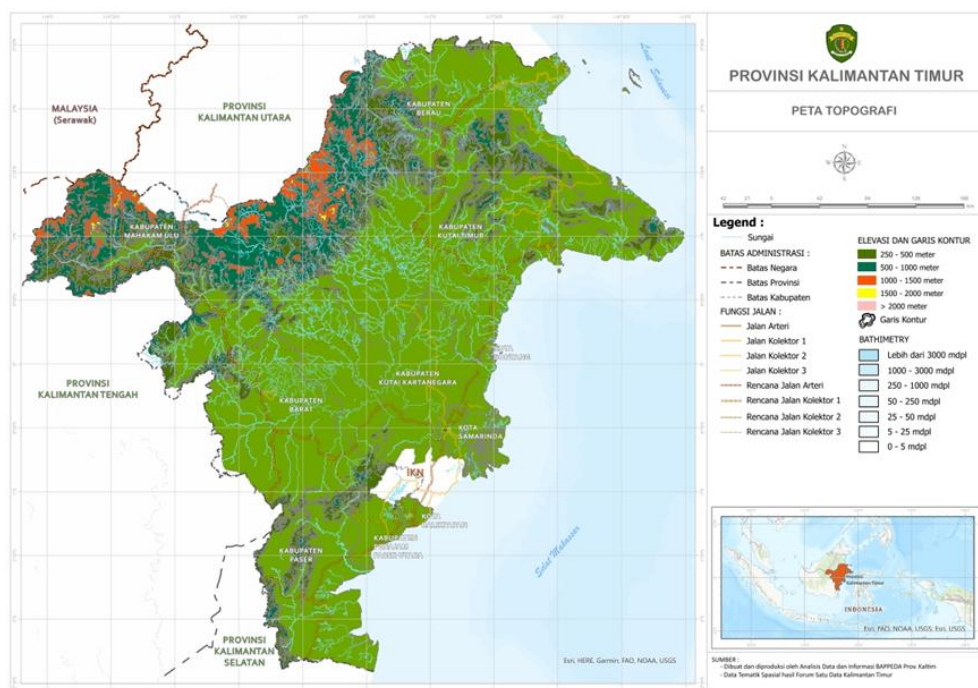
Peran geostrategis Kalimantan Timur juga cukup besar dalam konteks keamanan nasional. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan Selat Makassar yang juga menjadi jalur pelayaran internasional ALKI II. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam alur perdagangan nasional dan internasional, serta dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia dan memperkuat pengawasan terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan penjabaran peran geostrategis dimaksud, Kalimantan Timur berperan besar dalam upaya perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.



Gambar 2.3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

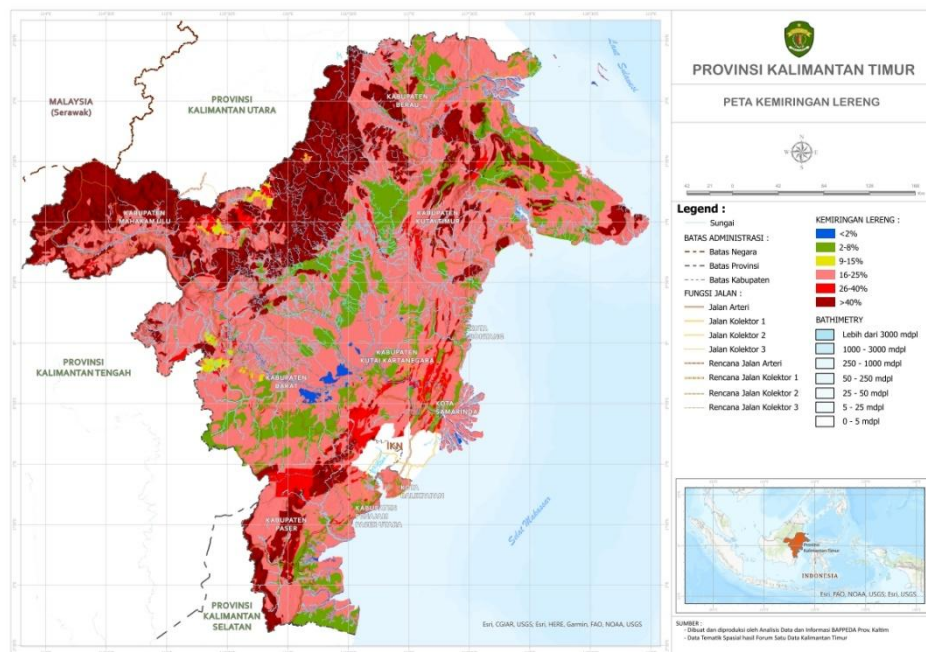
Jika dilihat dari peruntukan kewasannya, Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



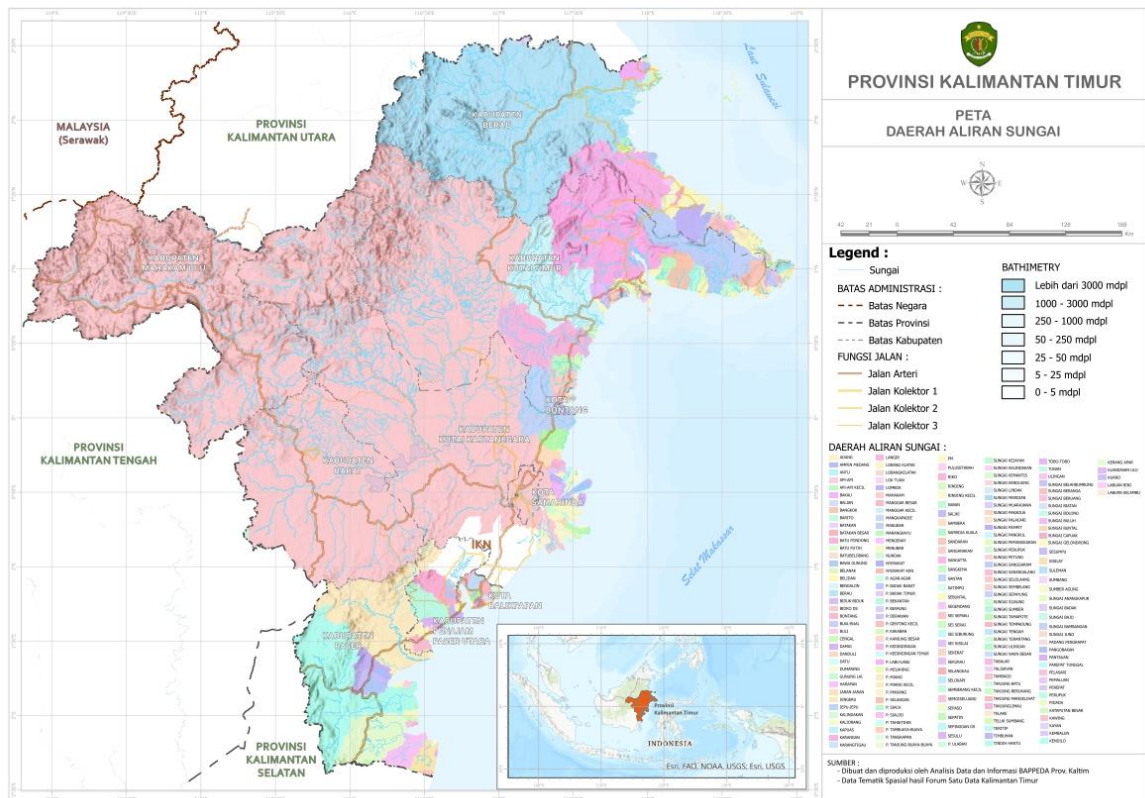
Gambar 2.4. Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



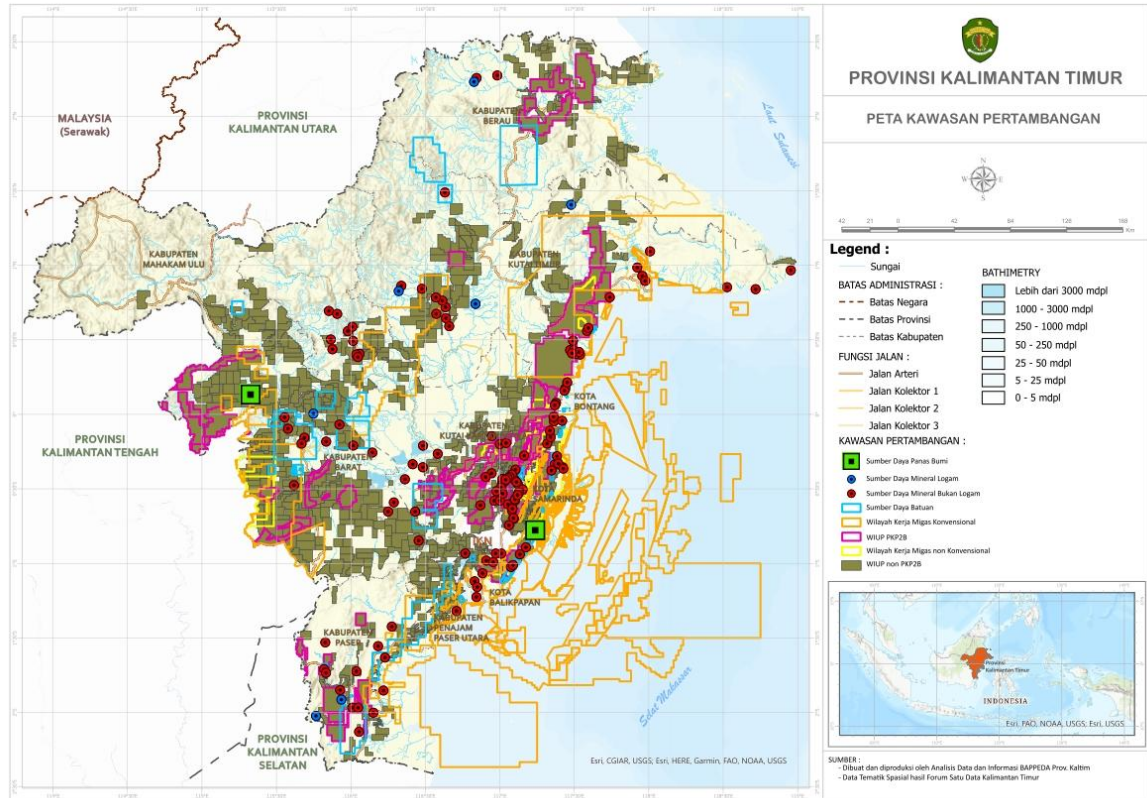
Gambar 2.5. Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelay, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.



Gambar 2.6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar dibawah ini.



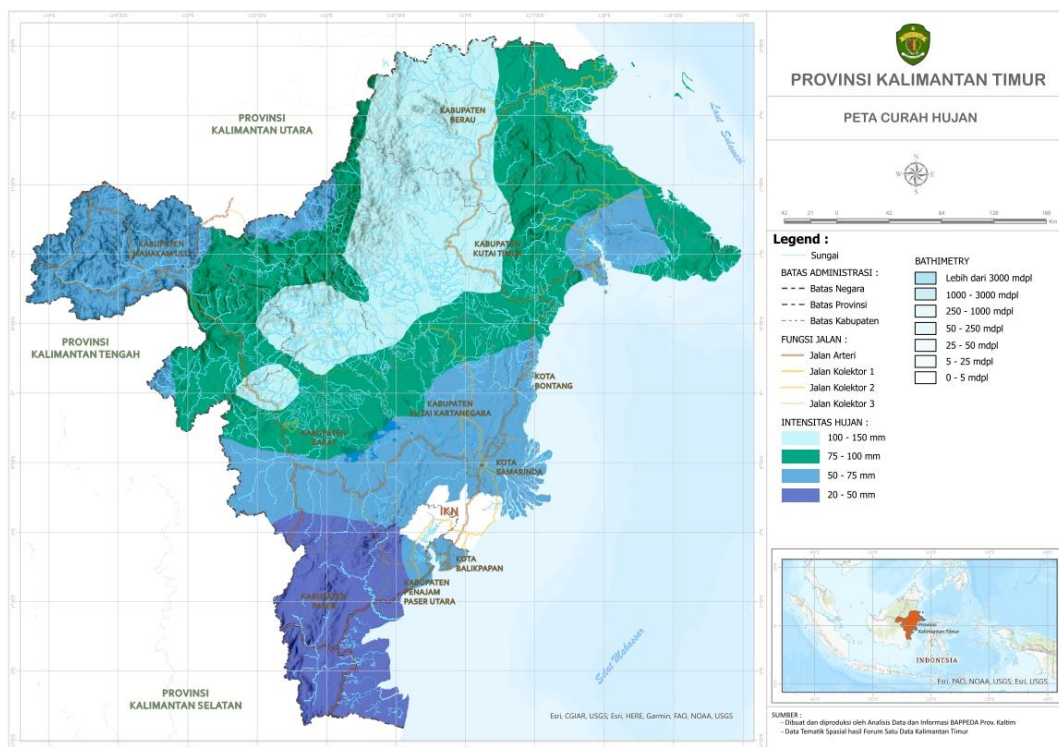
Gambar 2.7. Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 2.2. Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	22,00	22,90	21,80
	- Maksimum	35,60	35,60	36,90
2	Kelembaban (%)	85,25	81,03	86,80
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.007,97	1.014,80	1.009,82
4	Kecepatan Angin (Knot)	1,66	1,67	0,68
5	Curah Hujan (mm)	2.147,50	3.411,70	2.767
6	Penyinaran Matahari (%)	5,65	4,73	3,72

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2025



Gambar 2.8. Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kalimantan Timur memiliki ragam potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Diantaranya wilayah pesisir dan laut sangat potensial untuk budidaya perikanan tangkap dan budidaya laut untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari. Sementara itu, kawasan daratan dengan tanah subur di beberapa kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, perkebunan kelapa sawit, kakao, karet, dan tanaman pangan. Kawasan tertentu juga telah ditetapkan sebagai pusat industri, termasuk hilirisasi produk tambang dan perkebunan, sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi Kaltim yang mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.

Pengembangan potensi pengembangan wilayah di Kalimantan Timur didukung dengan sumber daya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan.

Tabel 2.3. Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan

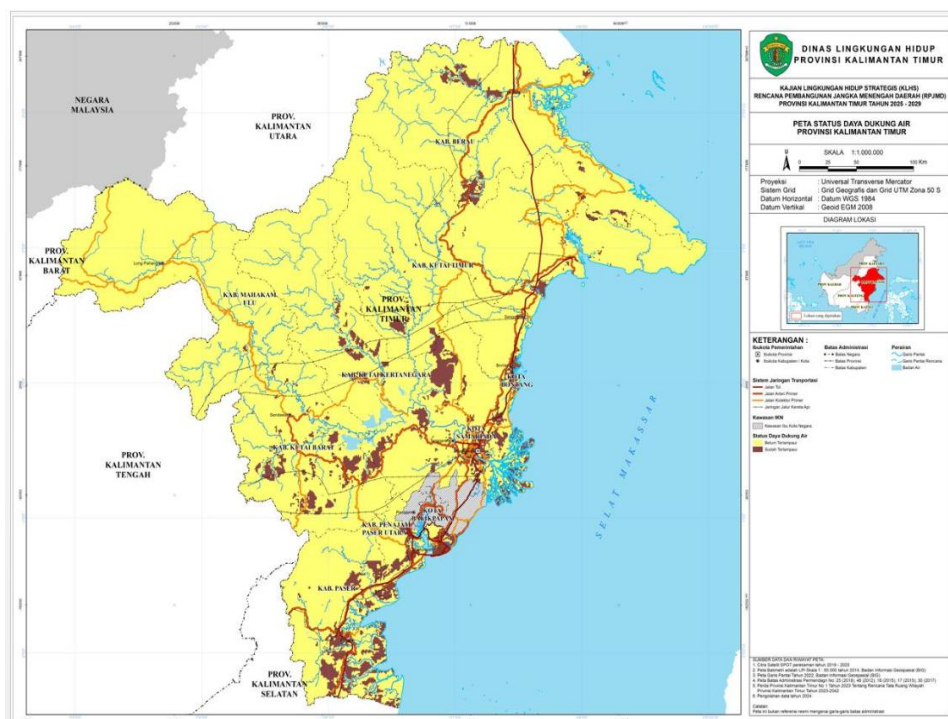
Peruntukan Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Hutan Produksi	5.953.731
Kawasan Pariwisata	9.857
Kawasan Perikanan	2.085.091
Kawasan Pertanian	3.469.408
Kawasan Peruntukan Industri	54.424

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, Kalimantan Timur juga menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata dengan keberadaan bentang alam yang indah, kawasan hutan tropis, gua karst, dan keanekaragaman hayati, yang mendukung ekowisata dan wisata budaya. Sektor pertambangan, terutama batu bara, minyak, dan gas, tetap menjadi tulang punggung ekonomi namun diarahkan agar lebih berkelanjutan dan sesuai pola ruang yang ditetapkan. Dengan berpedoman pada RTRW, setiap pengembangan wilayah diarahkan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, efisiensi pemanfaatan ruang, dan pemerataan ekonomi antardaerah. Hal ini memastikan bahwa Kalimantan Timur dapat memanfaatkan karakteristik wilayahnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

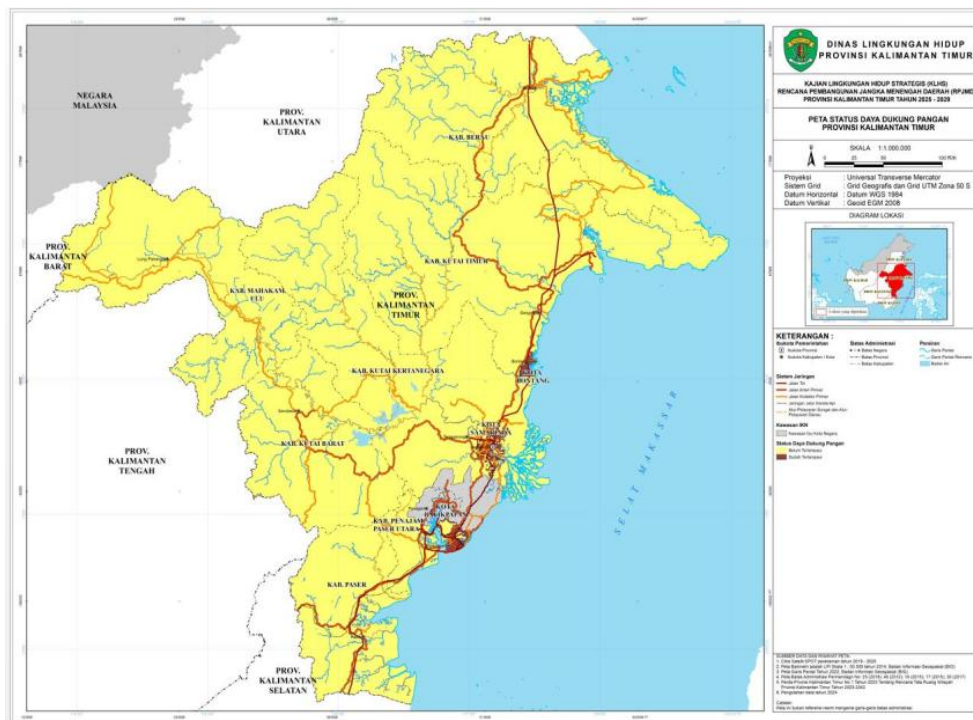
3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan wilayah, terutama kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, salah satunya dapat diketahui melalui identifikasi daya dukung air dan daya dukung pangan.



Gambar 2.9. Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan air di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kondisi geografis dan hidrologis. Meskipun potensi air baku yang berasal dari air permukaan dan air tanah cukup besar, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, adanya perubahan iklim, deforestasi, dan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan memperburuk kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui dengan luas 11.646.333,50 Ha (93,60 persen) dan sudah terlampaui dengan luas 796.483,87 Ha (6,40 persen). Selanjutnya diperlukan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung penyediaan air.



Gambar 2.10. Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan pangan menghadapi tantangan signifikan mengingat kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, status daya dukung penyediaan pangan di wilayah

perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara untuk wilayah Kabupaten yang sudah terlampaui yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan, diperlukan strategi diversifikasi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan. Upaya ini penting guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi pangan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2.4. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	82,26	80,48	81,76	83,70	80,04
2.	KUBAR	54,98	57,76	66,94	58,39	60,87
3.	KUKAR	84,28	84,73	84,44	85,53	87,17
4.	KUTIM	73,13	66,19	60,09	65,76	61,64
5.	Berau	85,34	86,77	86,16	85,33	81,91
6.	PPU	86,20	86,24	85,51	87,40	88,11
7.	MAHULU	63,17	52,75	53,29	57,68	56,53
8.	Balikpapan	87,66	88,68	89,47	91,40	91,23
9.	Samarinda	80,75	83,72	84,66	88,97	89,68
10.	Bontang	84,59	87,24	84,21	88,76	88,89
Kalimantan Timur		78,24	77,46	77,65	79,29	78,61

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan dalam IKP, mencapai angka 79,29. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mungkin melalui kebijakan yang efektif, peningkatan produksi pertanian, atau perbaikan distribusi pangan.

Namun, untuk capaian IKP kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

Tabel 2.5. Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
1.	Paser	81,31	87,38	82,73
2.	KUBAR	0,00	87,03	80,70
3.	KUKAR	78,27	91,28	86,67
4.	KUTIM	19,13	87,09	84,74
5.	Berau	76,02	94,43	85,50
6.	PPU	87,62	91,46	84,18
7.	MAHULU	0,00	84,63	80,73
8.	Balikpapan	-	98,62	85,49
9.	Samarinda	-	93,82	85,00
10.	Bontang	-	92,12	86,02
	Kalimantan Timur	48,91	90,79	84,18

Sumber: *Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024*

Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan

pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Semakin rendah PoU merepresentasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Tabel 2.6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

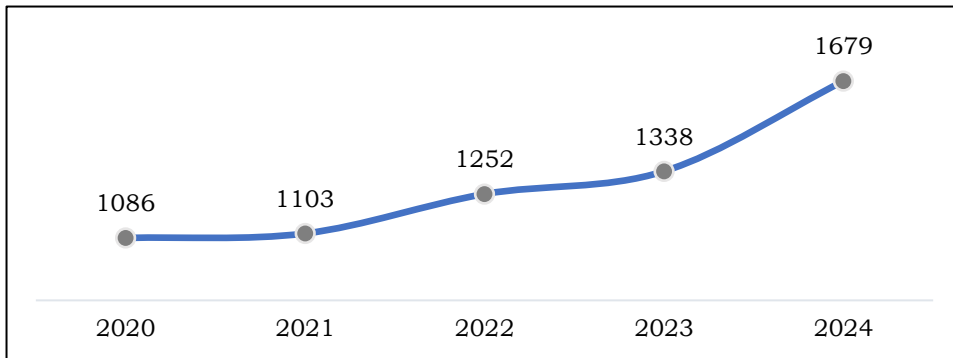
Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	11,64	15,37	20,54	11,99	8,44
KUBAR	11,17	14,20	16,39	12,63	7,23
KUKAR	11,14	14,41	18,52	10,59	8,06
KUTIM	9,24	10,90	16,35	8,70	6,60
Berau	5,14	12,30	14,16	7,86	6,66
PPU	11,58	16,60	23,09	16,34	8,20
MAHULU	8,20	10,76	18,22	13,82	8,18
Balikpapan	5,90	8,30	13,68	6,98	5,90
Samarinda	6,29	13,51	14,50	7,87	7,31
Bontang	5,21	9,84	11,72	6,95	7,73
Kalimantan Timur	8,24	12,56	16,19	9,20	7,40
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27

Sumber: BPS RI, 2024

Kondisi PoU Kalimantan Timur mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan kinerja. Namun, mulai tahun 2023 PoU Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan nilai PoU di tahun 2024 sebesar 7,40 persen. Perbaikan kinerja PoU terjadi karena adanya program pemerintah terhadap akses pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, Bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta Bantuan Pangan Non Tunai. Angka PoU Kalimantan Timur di tahun 2024 yang sebesar 7,40 persen merepresentasikan bahwa masih terdapat 7 orang dari 100 orang di Kalimantan Timur yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik Per Kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat, dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan akses energi di suatu wilayah.



Gambar 2.11. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.086 kWh per kapita dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 1.679 kWh per kapita. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 341 kWh, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan listrik selama periode tersebut. Kenaikan ini dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi, peningkatan akses terhadap energi listrik, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan listrik.

d. Rasio Elektrifikasi

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi pondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 2.7. Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024

No	Kab/Kota	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Elektrifikasi/
		PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah	

									Rasio KK Berlistrik (%)
1	Balikpapan	34	0	34	0	255,213	471	255,684	99,62%
2	Berau	91	19	110	0	79,736	10,353	90,089	89,58%
3	Kutai Kartanegara	227	10	237	0	223,658	9,641	233,299	89,32%
4	Samarinda	59	0	59	0	312,525	0	312,525	100%
5	Kutai Timur	115	26	115	0	107,268	26,308	133,576	89,17%
6	Bontang	15	0	15	0	57,319	1,123	58,442	94,43%
7	PPU	54	0	54	0	59,631	1,085	60,716	92,83%
8	Paser	138	6	138	0	88,203	4,129	92,332	92,31%
9	Kutai Barat	164	30	164	0	53,810	4,402	58,212	94,82%
10	Mahulu	32	18	32	0	6,682	5,047	11,729	87,41%
Total	Kaltim	929	109	1.038	0	1,244,045	62,559	1,306,604	96,17%

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Dari total 1.358.621 jumlah KK dan 4.048.079 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 89,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 10,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 109 Desa Berlistrik Non PLN dan 62.559 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 95,18 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 96,17 persen pada tahun 2024.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 109 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

e. Intensitas Energi Primer

Intensitas energi primer di Provinsi Kalimantan Timur merefleksikan efisiensi penggunaan energi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, yang diukur melalui rasio konsumsi energi primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai wilayah kaya sumber daya energi, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan peran sebagai lumbung energi nasional dengan upaya transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.8. Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator	Based Data	Unit	Annual Value					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Intensitas Energi Final	Konsumsi Energi Final	BOE	56,798,586	57,652,857	59,090,386	51,466,185	72,627,381	57,618,060.91
		PDRB	Milyar Rupiah	486,523	472,393	484,440	506,159	537,630	570,820
		Intensitas Energi Final	BOE/Milyar Rupiah Konstan 2020	116.74	122.04	121.98	101.68	135.09	100.94
2	Bauran Energi Baru Terbarukan dari Sumber Energi Primer	Total EBT	BOE	2,820,571	3,025,714	3,864,511	3,715,859	8,308,572	6,994,663.830
		Total Energi	BOE	56,798,586	57,652,857	59,090,386	51,466,185	72,627,381	57,618,060.91
		Bauran EBT	%	4.40	4.80	6.53	7.27	11.44	12.14

Sumber Data : Dinas ESDM Prov. Kaltim, Tahun 2025

Intensitas energi final di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2019 - 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi mencapai 198,14 BOE/miliar Rupiah konstan 2010 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan peningkatan konsumsi energi per unit output ekonomi yang mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur masih sangat tergantung pada sektor-sektor padat energi. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan tajam pada tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan adanya tantangan dalam meningkatkan efisiensi energi di tengah peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN.

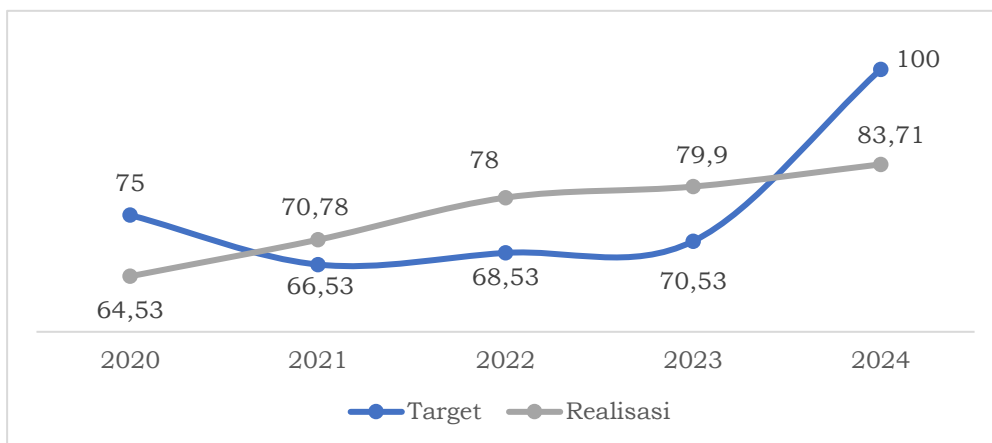
Peningkatan intensitas energi ini juga sejalan dengan naiknya konsumsi energi final dari 486.523 BOE pada tahun 2019 menjadi 537.630 BOE pada tahun 2023, sebelum kemudian menurun drastis menjadi 141.340 BOE pada tahun 2024. Fenomena ini bisa mencerminkan adanya perubahan struktural dalam sektor-sektor pengguna energi atau penyesuaian metodologi pencatatan statistik energi dan ekonomi. Namun demikian, secara umum, tingginya intensitas energi menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur belum sepenuhnya didorong oleh sektor-sektor yang efisien energi seperti jasa, teknologi, atau industri kreatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perencanaan pembangunan yang ingin menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya intensitas energi menuntut intervensi kebijakan yang terfokus pada transformasi struktural ekonomi dan adopsi teknologi energi yang efisien. Pemerintah daerah perlu

mendorong integrasi kebijakan energi dengan rencana pembangunan sektoral, termasuk pengembangan kawasan industri hijau, elektrifikasi sektor transportasi, serta insentif bagi pelaku industri yang menerapkan sistem manajemen energi. Selain itu, percepatan bauran energi terbarukan yang porsinya telah meningkat dari 4,40% pada 2019 menjadi 12,14% pada 2024 menunjukkan potensi yang patut dimaksimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

f. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020-2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100 persen, pada akhir periode RPJMN 2020-2024 Kalimantan Timur hanya mampu menembus angka 83,71 persen. Sementara itu, capaian Nasional pada tahun 2024 adalah 92,64 persen.



Gambar 2.12. Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen)

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Selanjutnya, tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

Tabel 2.9.
Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	48,56	66,80	70,14	84,25	84,25
2.	KUBAR	31,04	72,19	86,02	86,02	85,92
3.	KUKAR	51,54	56,50	72,85	78,22	87,74
4.	KUTIM	40,11	44,20	51,73	55,03	60,01
5.	Berau	56,87	70,21	82,16	81,55	82,00
6.	PPU	32,14	49,90	30,90	23,35	89,07
7.	Mahulu	24,51	13,89	66,06	14,40	85,10
8.	Balikpapan	79,79	97,84	99,25	98,99	99,51
9.	Samarinda	87,28	79,39	87,27	87,27	85,86
10.	Bontang	99,96	81,18	83,55	83,55	83,55

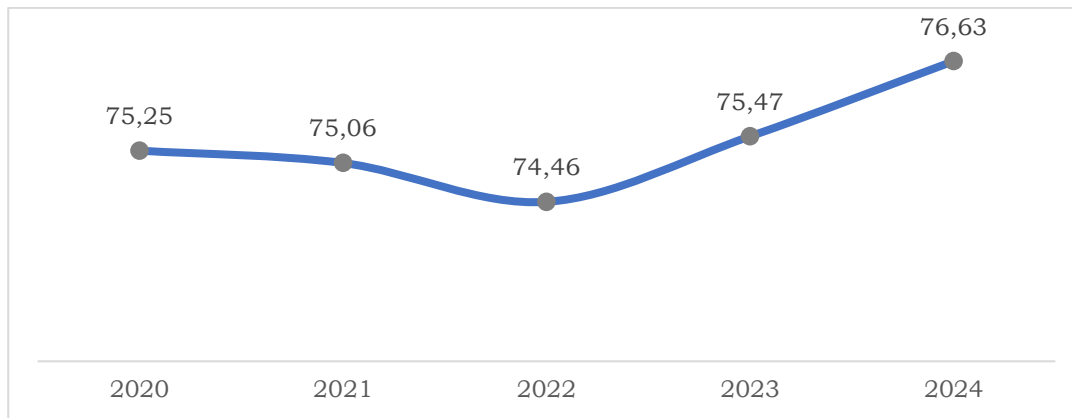
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan data Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, capaian akses air minum layak di seluruh kabupaten/kota pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Pada tahun 2024, capaian tertinggi diperoleh oleh Kota Balikpapan dengan 99,51%. Sementara itu, wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki capaian sebesar 60,01% yang masih berada di bawah target, sehingga memerlukan perhatian khusus. Adapun permasalahan air minum di Kabupaten Kutai Timur adalah penurunan kualitas air baku, penurunan debit air baku, tekanan dan kontinuitas pengaliran pipa masih kecil dan sering terganggu serta pencemaran lingkungan.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.



Gambar 2.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2024 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.10. Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	53,7	51,92	53,02	52,64	52,64
IKU	89,06	88,84	87,59	89,64	91,43
IKL	79,76	82,21	81,85	83,86	84,03
IKAL	83,51	85,4	81,45	81,36	85,16

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel 2.11. Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	0,71	0,71	0,71	0,61
2.	KUBAR	1,59	1,59	1,59	21,69
3.	KUKAR	0,27	0,32	0,32	0,32
4.	KUTIM	2,28	2,70	2,70	5,71
5.	Berau	1,69	3,35	3,35	2,14
6.	PPU	0,25	3,70	3,70	0,20
7.	MAHULU	2,92	2,91	2,91	0,50
8.	Balikpapan	9,18	9,18	9,18	14,64
9.	Samarinda	1,25	7,59	7,59	0,77
10.	Bontang	2,64	7,63	7,63	2,28

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
	KALTIM	2,68	4,71	4,71	4,88

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan hal ini akibat dari penambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Begitupun dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah setiap tahun juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.12. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Timbulan sampah (ton)	601.375,66	718.865,78	791.828,97	809.331,64	851.605,52
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton)	85.054	97.216	133.061	135.670	142.822
Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	14,14	13,52	16,80	16,76	16,77

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jika melihat persentase jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah diketahui bahwa angkanya sangat kecil, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti: 1). jumlah fasilitas pengolahan yang terbatas, tidak semua wilayah memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah, sehingga banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tidak terkelola, 2). sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien, 3). kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, 4). minimnya alokasi anggaran dan tidak berjalannya regulasi, 5). jarak antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan, dan 6). kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa sampah terkumpul, dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada sampah terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2022 sebesar 78,75 persen. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS setiap 3 Tahunan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Tahunan (masih dalam tahap pengusulan).

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64 persen), energi (17 persen), limbah (17 persen), dan pertanian (2 persen).

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) adalah suatu kewajiban agar pemerintah daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK. Sejak tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2023 total aksi yang sudah dilaporkan di Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 1.127 aksi.

Angka penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari keberlanjutan upaya-upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terlibat.

Tabel 2.13. Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	10,21	27,73	25,22	26,24	26,92

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.924.455,43 ton CO₂eq atau sebesar 49,19 persen pada tahun 2024 dari BAU (Business As Usual) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2024 sebanyak 54.739.320,59 ton CO₂ Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca provinsi Kalimantan timur tahun 2024 dari dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan timur adalah 31,05 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

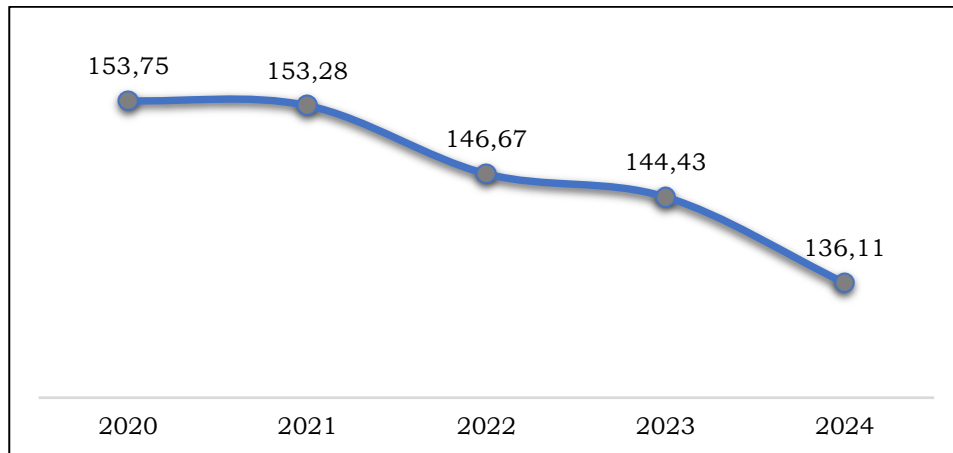
Besaran emisi gas rumah kaca tahun aktifitas 2023 yang diasumsikan sebagai emisi GRK tahun 2024 sebesar 27.814.865,16 ton CO₂ Eq, *baseline* intensitas emisi GRK tahun 2010 adalah 199,31 ton CO₂ Eq/milyar rupiah, serta PDRB Kaltim Harga konstan tahun 2024 adalah sebesar Rp570,82 triliun.

Dari data diatas diketahui intensitas emisi tahun 2024 adalah sebesar 27.814.865,16 ton CO₂ Eq/Rp570.820 Milyar atau sebesar 48,73 ton CO₂ Eq/milyar rupiah dan besaran presentase penurunan intensitas emisi GRK adalah (199,31 ton CO₂ Eq/milyar rupiah - 48.73 ton CO₂ Eq/milyar rupiah) / 199,31 ton CO₂ Eq/milyar rupiah atau sebesar 75,55 persen.

c. Indeks Risiko Bencana

Kalimantan Timur secara geografis merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana. Namun, dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memberikan potensi peningkatan risiko bencana di Kalimantan Timur. Risiko bencana yang paling berpotensi terjadi di Kalimantan Timur adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indikator yang digunakan untuk

mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB merupakan alat ukur yang menghitung tingkat risiko bencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). IRB membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas penanganan risiko bencana dan menentukan kebijakan mitigasi yang tepat. Semakin kecil nilai IRB merepresentasikan semakin rendah potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut.



Gambar 2.14. Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Timur hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesiapsiagaan, serta penerapan kebijakan berbasis data risiko turut mendukung penurunan IRB di wilayah tersebut.

Tabel 2.14. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

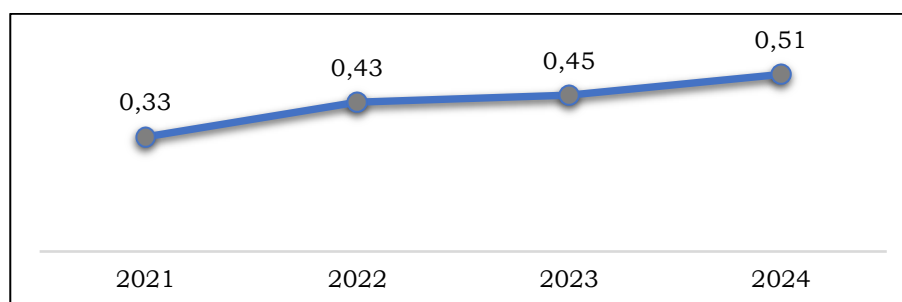
No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko
1	Paser	196.40	196.40	196.40	191.78	187.98	Tinggi
2	KUBAR	156.40	119.16	120.96	114.30	118.80	Sedang
3	KUKAR	119.16	202.40	188.37	173.74	148.64	Tinggi
4	KUTIM	156.40	156.40	153.65	149.15	151.32	Tinggi
5	Berau	190.00	190.00	181.57	185.17	173.36	Tinggi
6	PPU	158.32	151.67	143.00	129.44	131.81	Sedang
7	MAHULU	-	156.40	156.40	156.40	146.03	Tinggi
8	Balikpapan	108.14	123.46	110.79	118.21	101.43	Sedang
9	Samarinda	102.94	101.05	92.77	98.29	85.20	Sedang
10	Bontang	150.00	135.89	122.77	127.85	116.57	Sedang
	Rata-Rata	153.75	153.28	146.67	144.43	136.11	Sedang

Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah di Kalimantan Timur masih berada dalam kategori risiko bencana "tinggi" pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Paser dengan nilai 187,98, Kutai Timur dengan nilai 173,36 , Kutai Barat dengan nilai 151,32 , Berau dengan nilai 148,64, dan Mahakam Ulu dengan nilai 146,03.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks Resiko Bencana yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana diantaranya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, dan lain-lain. Semakin tinggi angka IKD merepresentasikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana semakin baik di suatu daerah.



Gambar 2.15. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2021-2024
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

IKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0,51 di tahun 2024. Namun, capaian ini masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya capaian kinerja pada beberapa indikator, antara lain restorasi sungai untuk ancaman banjir, perlindungan daerah untuk tangkapan air untuk ancaman banjir, restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.

7. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 3.757.220 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.045.860 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 288.640 jiwa.

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024) (%)
1	Paser	274.890	278.040	281.140	284.110	286.990	1,10
2	KUBAR	171.940	173.750	175.470	177.130	178.740	0,99
3	KUKAR	727.610	735.970	746.370	756.790	789.770	2,14
4	KUTIM	432.550	440.290	447.940	455.500	462.990	1,71
5	Berau	247.210	250.950	254.660	258.290	261.830	1,45
6	PPU	178.060	180.590	188.900	197.630	267.690	11,38
7	MAHULU	32.420	32.870	33.320	33.770	34.250	1,39
8	Balikpapan	687.060	694.940	702.600	710.040	717.230	1,10
9	Samarinda	827.070	835.150	843.010	850.630	858.080	0,96
10	Bontang	178.410	180.920	183.370	185.850	188.290	1,37
Kalimantan Timur		3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740	4.045.860	1,93

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,93 persen selama lima tahun sejak tahun 2020–2024. Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 11,38 persen. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat, seiring persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

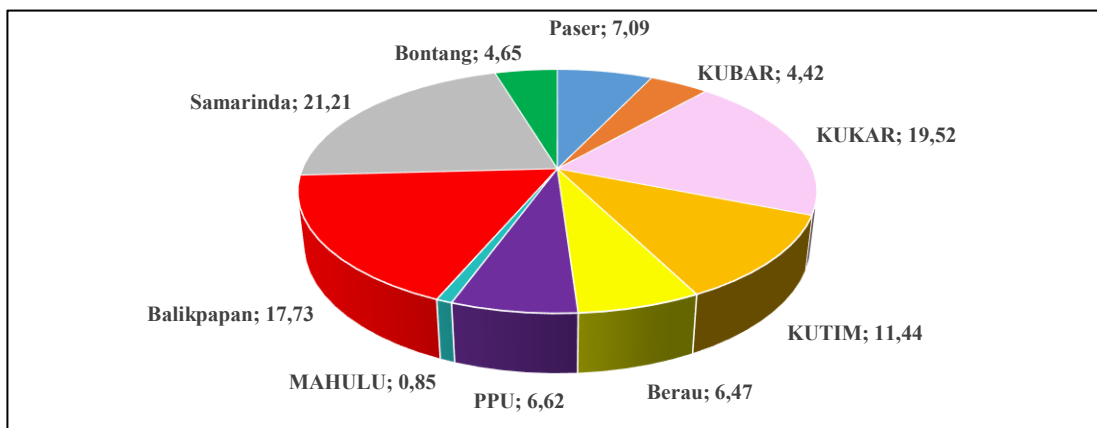
Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	148.880	138.110	286.990	107,80	27,00
2	KUBAR	93.950	84.800	178.740	110,79	13,00
3	KUKAR	409.890	379.880	789.770	107,90	29,00
4	KUTIM	248.020	214.980	462.990	115,37	15,00
5	Berau	139.350	122.480	261.830	113,77	12,00
6	PPU	137.570	130.120	267.690	105,72	84,00
7	MAHULU	17.760	16.490	34.250	107,66	2,00
8	Balikpapan	366.050	351.190	717.230	104,23	1.407,00
9	Samarinda	435.900	422.180	858.080	103,25	1.197,00
10	Bontang	96.560	91.730	188.290	105,26	1.171,00
Kalimantan Timur		2.093.900	1.951.960	4.045.860	107,27	32,00

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2 per km². Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga kurang menarik bagi pendatang untuk menetap atau berinvestasi serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan permukiman dan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,21 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,85 persen).



Gambar 2.16. Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen)

(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Timur memiliki nilai historis dan kultural, terdiri dari berbagai suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Paser. Masyarakat adat ini hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem melalui praktik-praktik tradisional seperti ladang berpindah, sistem pengelolaan hutan, dan ritual-ritual adat yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dan lahan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, arus modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan, seperti

konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kearifan lokal mereka.

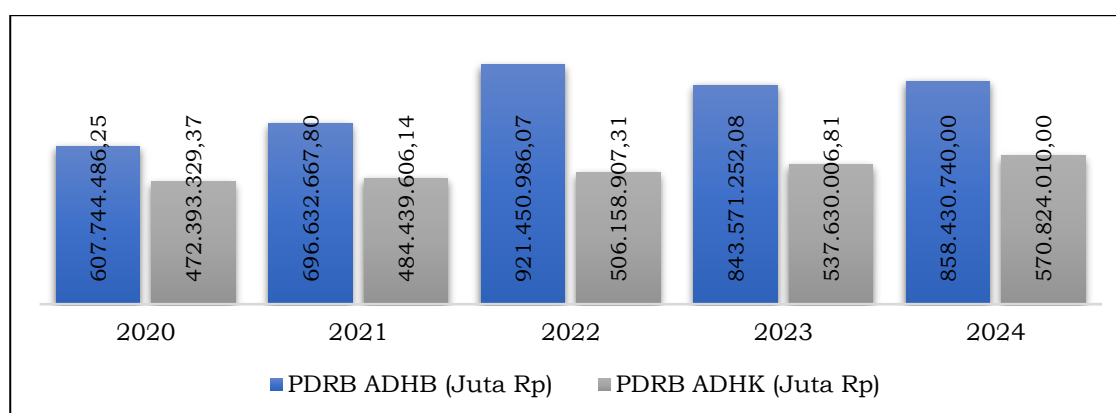
Peran dan fungsi masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki pengetahuan lokal yang unik tentang ekosistem di sekitar mereka. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi dan alam ini semakin penting di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran mereka semakin mendapat perhatian dalam berbagai kebijakan lingkungan, meskipun pengakuan atas hak-hak mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan (mengacu pada tahun dasar). Data PDRB menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, evaluasi kebijakan ekonomi, dan pengambilan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.17. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Secara umum, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Peningkatan nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahun diperoleh sektor non migas dan non batu bara. Meningkatnya Nilai PDRB ADHB dan ADHK pada tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah, aktivitas konstruksi IKN, serta mulai beroperasinya beberapa industri baru seperti smelter nikel, pabrik semen dan amonium nitrat di Kalimantan Timur.

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2023 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mengalami penurunan akibat turunnya nilai PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh Rp 364,37 triliun atau turun sekitar 126,13 triliun dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.17. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53.455,32 (8,80)	59.089,94 (8,48)	64.891,74 (7,04)	67.688,26 (8,02)	74.362,72 (8,66)
B	Pertambangan dan Penggalian	250.845,97 (41,27)	314.198,05 (45,11)	490.501,12 (53,24)	364.365,49 (43,19)	329.459,32 (38,38)
C	Industri Pengolahan	115.564,45 (19,02)	123.816,18 (17,77)	138.636,14 (15,05)	149.526,42 (17,73)	156.780,72 (18,26)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	385,06 (0,06)	395,47 (0,06)	422,61 (0,05)	503,42 (0,06)	588,78 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	326,53 (0,05)	348,38 (0,05)	379,90 (0,04)	414,92 (0,05)	472,08 (0,05)
F	Konstruksi	58.308,25 (9,59)	62.313,15 (8,95)	70.945,22 (7,70)	86.997,44 (10,31)	101.874,20 (11,87)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39.053,04 (6,43)	41.474,91 (5,95)	47.547,02 (5,16)	53.183,30 (6,30)	59.195,75 (6,90)
H	Transportasi dan Pergudangan	22.067,33 (3,63)	23.218,93 (3,33)	28.980,67 (3,15)	34.239,87 (4,06)	38.655,11 (4,50)
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6.479,40 (1,07)	6.707,64 (0,96)	7.520,92 (0,82)	8.372,54 (0,99)	9.627,66 (1,12)
J	Informasi dan Komunikasi	9.390,81 (1,55)	10.206,75 (1,47)	11.087,18 (1,20)	11.896,25 (1,41)	12.952,44 (1,51)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.490,25 (1,73)	11.244,16 (1,61)	13.379,87 (1,45)	15.329,16 (1,82)	16.613,49 (1,94)
L	Real Estate	5.868,85 (0,97)	5.891,47 (0,85)	6.152,95 (0,67)	6.526,67 (0,77)	6.978,22 (0,81)
M,N	Jasa Perusahaan	1.334,74 (0,22)	1.384,56 (0,20)	1.516,51 (0,16)	1.703,22 (0,20)	1.888,74 (0,22)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.750,61 (2,10)	13.198,18 (1,89)	14.448,96 (1,57)	15.716,80 (1,86)	18.962,75 (2,21)
P	Jasa Pendidikan	11.724,05 (1,93)	12.340,33 (1,77)	13.132,70 (1,43)	14.103,76 (1,67)	15.537,85 (1,81)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.331,02 (0,88)	6.205,10 (0,89)	6.692,40 (0,73)	7.294,79 (0,86)	7.865,59 (0,92)
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.368,80 (0,72)	4.551,86 (0,65)	5.097,08 (0,55)	5.708,94 (0,68)	6.615,32 (0,77)
PDRB		607.744,49 (100,00)	696.584,50 (100,00)	921.332,98 (100,00)	843.571,25 (100,00)	858.430,74 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

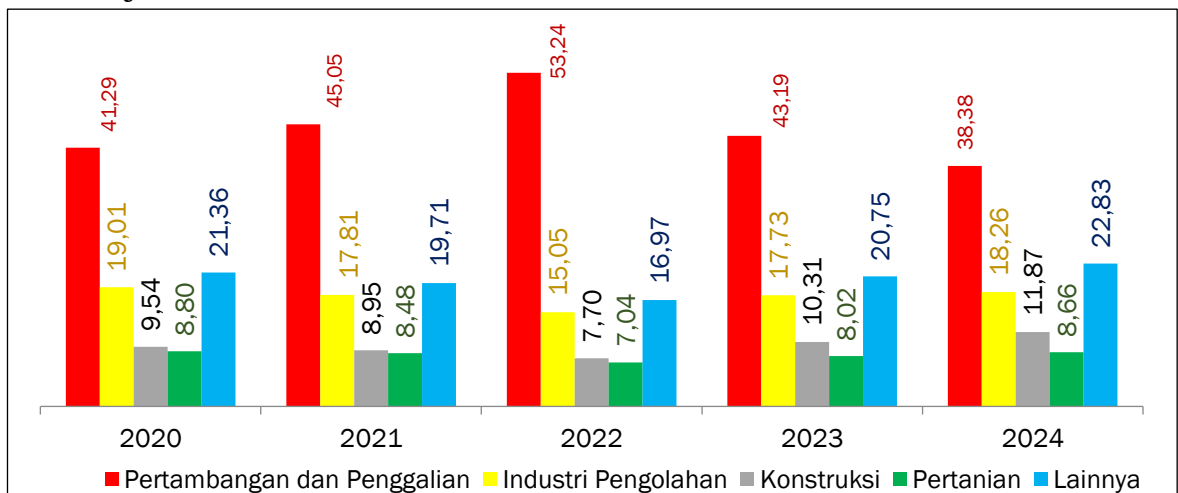
Tabel 2.18. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.026,69 (6,99)	33.001,68 (6,81)	33.649,34 (6,75)	34.552,82 (6,43)	35.372,74 (6,20)
B	Pertambangan dan Penggalian	222.909,20 (47,17)	227.991,37 (47,07)	235.949,04 (46,72)	248.204,04 (46,17)	264.961,06 (46,42)
C	Industri Pengolahan	93.909,77 (19,90)	96.208,52 (19,86)	99.651,98 (19,70)	104.339,85 (19,41)	104.606,60 (18,33)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	317,37 (0,07)	324,79 (0,07)	337,25 (0,06)	391,37 (0,07)	455,59 (0,08)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	247,99 (0,05)	258,50 (0,05)	278,10 (0,06)	299,36 (0,06)	322,45 (0,06)
F	Konstruksi	35.601,17 (7,49)	37.005,24 (7,63)	39.887,74 (7,68)	46.190,19 (8,59)	52.471,79 (9,19)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.069,91 (5,76)	28.216,90 (5,83)	30.137,13 (5,94)	32.195,96 (5,99)	34.955,11 (6,12)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.281,10 (2,83)	13.667,05 (2,83)	15.301,39 (3,00)	16.738,53 (3,11)	18.102,74 (3,17)
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	4.108,42 (0,87)	4.193,40 (0,86)	4.577,47 (0,90)	4.924,09 (0,92)	5.498,48 (0,96)
J	Informasi dan Komunikasi	8.338,49 (1,76)	8.994,26 (1,86)	9.712,24 (1,92)	10.348,22 (1,92)	11.168,90 (1,96)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.137,89 (1,51)	7.320,02 (1,51)	8.012,39 (1,58)	8.951,76 (1,66)	9.551,74 (1,67)
L	Real Estate	4.321,11 (0,91)	4.290,18 (0,89)	4.397,87 (0,88)	4.590,82 (0,85)	4.860,55 (0,85)
M,N	Jasa Perusahaan	889,60 (0,19)	911,51 (0,19)	960,34 (0,19)	1.024,14 (0,19)	1.101,55 (0,19)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.951,12 (1,68)	8.108,29 (1,67)	8.727,05 (1,71)	9.427,89 (1,75)	10.977,84 (1,92)
P	Jasa Pendidikan	7.244,72 (1,53)	7.420,37 (1,53)	7.679,67 (1,53)	8.051,04 (1,50)	8.482,45 (1,49)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.404,05 (0,72)	3.861,22 (0,80)	4.048,70 (0,80)	4.321,49 (0,80)	4.535,65 (0,79)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.634,73 (0,56)	2.665,59 (0,55)	2.851,23 (0,56)	3.078,44 (0,57)	3.398,77 (0,60)
PDRB		472.393,33 (100,00)	484.438,88 (100,00)	506.158,91 (100,00)	537.630,01 (100,00)	570.824,01 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Pergerakan nilai PDRB Kalimantan Timur yang cenderung linear dengan tren lapangan usaha pertambangan dan penggalian menunjukkan ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur pada sumber daya alam ekstraktif. Diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan.



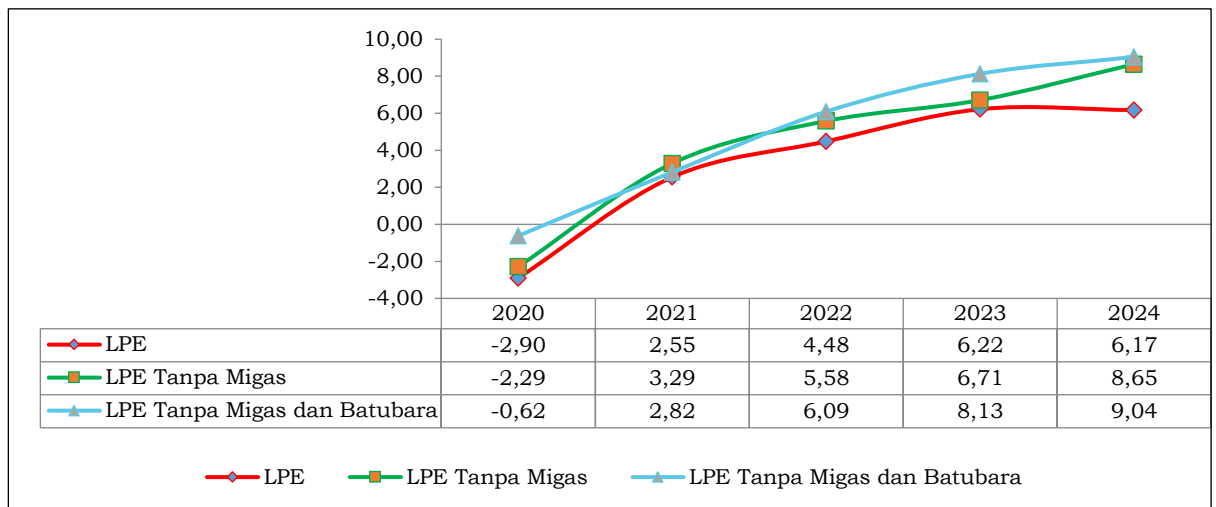
Gambar 2.18. Struktur Perekonomian Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang secara konsisten menyumbang ± 40 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi lapangan usaha ini terus menurun seiring dengan tumbuhnya kontribusi lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, pertanian dan konstruksi. Namun, meskipun terjadi peningkatan, kontribusi lapangan usaha lainnya tersebut masih belum dapat menggantikan peran dan kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam perekonomian daerah. Oleh sebab itu, transformasi ekonomi baik secara vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi

maupun horizontal yakni dengan menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru penting untuk dilakukan.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.



Gambar 2.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha

pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan.

Percepatan pertumbuhan LPE juga disebabkan oleh keberlanjutan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa lapangan usaha, seperti konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta jasa dan perdagangan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 2.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)

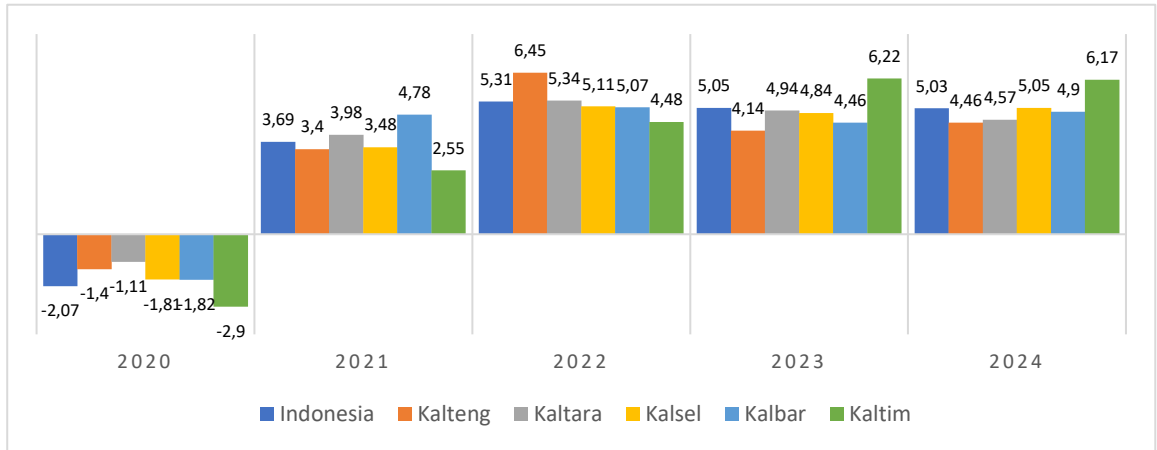
No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-2,86	5,39	1,10	1,38	3,77
2	KUBAR	-2,87	4,19	4,78	5,82	7,57
3	KUKAR	-4,21	2,68	3,70	5,13	5,62
4	KUTIM	-3,08	-0,89	5,58	7,71	9,82
5	Berau	-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28
6	PPU	-2,34	-1,69	14,49	29,85	30,68
7	MAHULU	-0,22	1,27	0,91	2,80	3,60
8	Balikpapan	-0,91	4,57	4,96	6,49	3,23
9	Samarinda	-0,99	2,78	6,60	8,62	8,66
10	Bontang	-2,74	1,60	2,46	4,16	-2,51

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan sangat cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 30,68 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan tertinggi

dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan dan juga nasional yaitu sebesar 6,17 persen.



Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

c. Kemiskinan

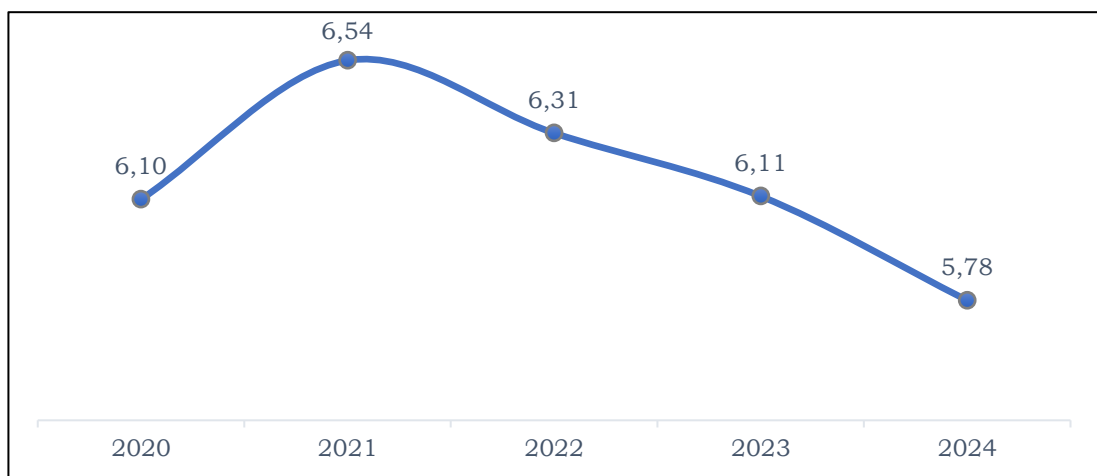
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 833.955 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.

Tabel 2.20. Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31
Maret 2023	560.368	229.818	790.186	231,07	6,11
Maret 2024	590.571	243.384	833.955	221,34	5,78

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.



Gambar 2.21. Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi salah satunya melalui Program Intervensi Kemiskinan

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kepada tenaga kerja rentan miskin, serta jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.

Tabel 2.21. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	9,23	9,73	9,43	9,11	8,63
KUBAR	9,29	10,24	10,2	9,72	9,56
KUKAR	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
KUTIM	9,55	9,81	9,28	9,06	8,81
Berau	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
PPU	7,36	7,61	7,25	6,97	6,69
MAHULU	11,44	11,9	11,55	11,38	10,75
Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,3
Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
KALTIM	6,1	6,54	6,31	6,11	5,78

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Kaltim juga menunjukkan penurunan di Tahun 2024. Jika dilihat dari capaiannya daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Capaian kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 10,75%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)

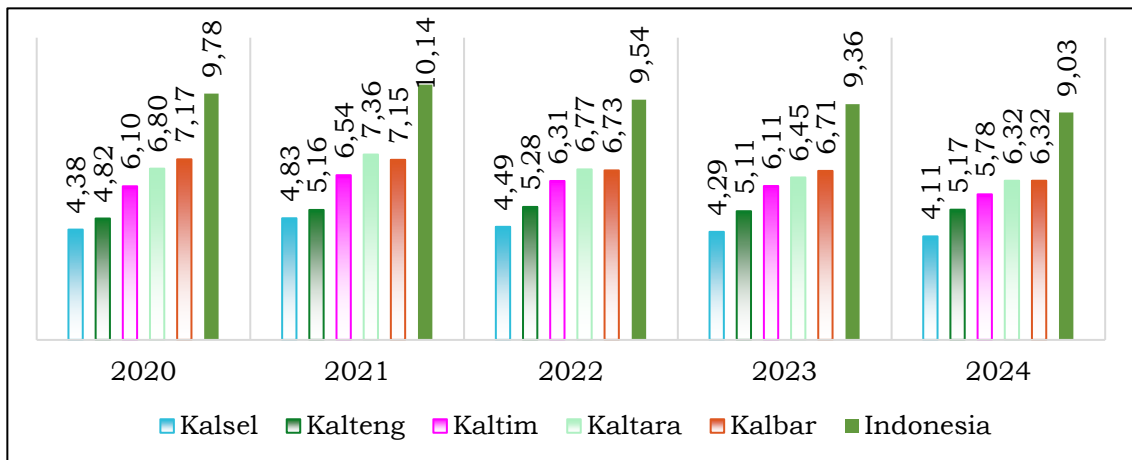
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	26,77	27,56	27,02	26,39	25,28
KUBAR	13,78	15,38	15,38	14,69	14,49
KUKAR	58,42	62,36	62,87	60,86	59
KUTIM	36,98	37,78	36,84	37,04	37,11
Berau	12,3	13,62	13,31	13,26	12,35
PPU	11,93	12,13	11,59	11,19	10,78

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
MAHULU	3,26	3,18	3,1	3,06	2,9
Balikpapan	17,02	18,53	15,83	14,99	14,53
Samarinda	41,92	42,84	41,95	41,89	37,8
Bontang	7,91	8,41	8,39	7,71	7,11
KALTIM	230,27	241,77	236,25	231,07	221,34

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat dari jumlah absolutnya penduduk miskin tertinggi ada pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 59 ribu jiwa, dan Kutai Timur 37,11 ribu jiwa hal ini dikarenakan kondisi wilayah kedua Kabupaten ini yang cukup luas.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,03 persen.



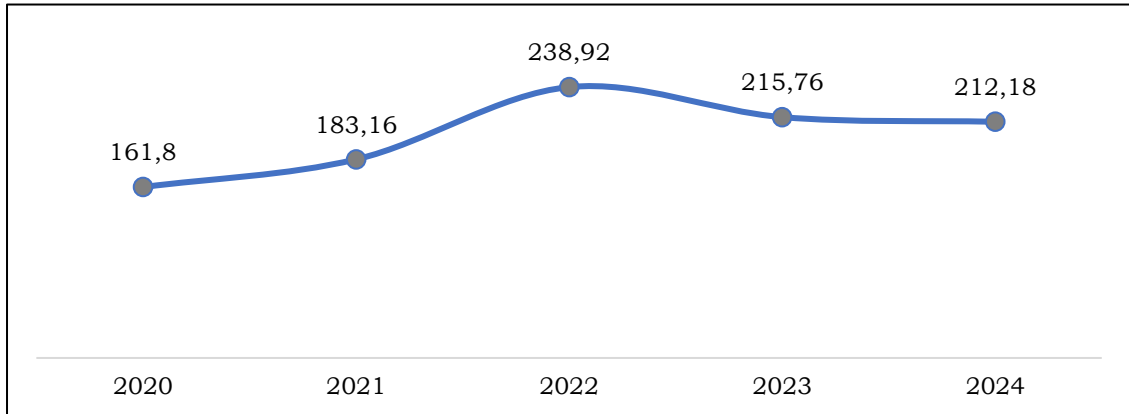
Gambar 2.22. Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tahun yang sama.



Gambar 2.23. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Sama halnya dengan Provinsi, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten/Kota rata-rata juga mengalami penurunan kecuali Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.23. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

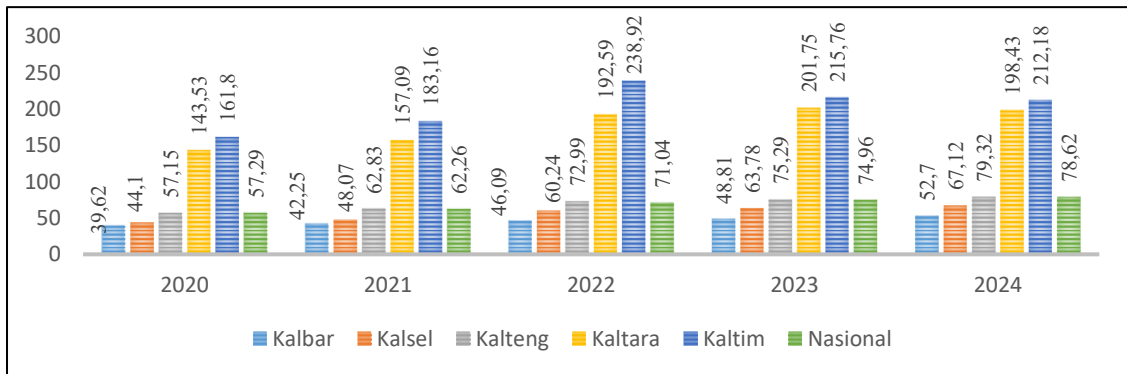
No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	157,18	193,82	271,26	208,43	193,14
2	KUBAR	158,03	184,71	247,40	222,08	222,07
3	KUKAR	204,50	241,07	322,08	270,72	259,19
4	KUTIM	268,80	310,29	471,27	369,42	344,49
5	Berau	143,67	171,49	236,23	198,53	194,08
6	PPU	50,78	55,87	69,50	87,26	87,14
7	MAHULU	85,38	90,43	95,12	100,94	110,20
8	Balikpapan	151,31	160,30	181,29	201,64	214,11
9	Samarinda	80,36	85,22	98,88	104,97	114,69
10	Bontang	311,88	320,30	344,15	366,46	363,37

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penyebab penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas migas dan batu bara akibat krisis

keuangan global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Pola PDRB per kapita ADHB Kalimantan Timur yang mengikuti volatilitas harga migas dan batu bara menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

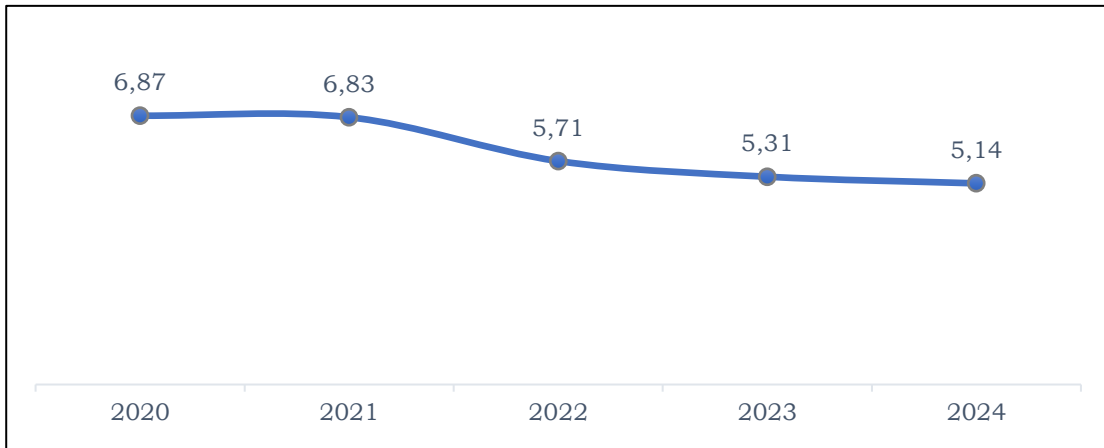
Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2024 berada di atas PDRB per Kapita Nasional. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar 2.24. PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.



Gambar 2.25. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 6,87 persen menjadi 5,14 persen di tahun 2024. Penurunan terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah berkurang ditandai dengan kinerja perekonomian yang meningkat serta pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada di atas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

Tabel 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

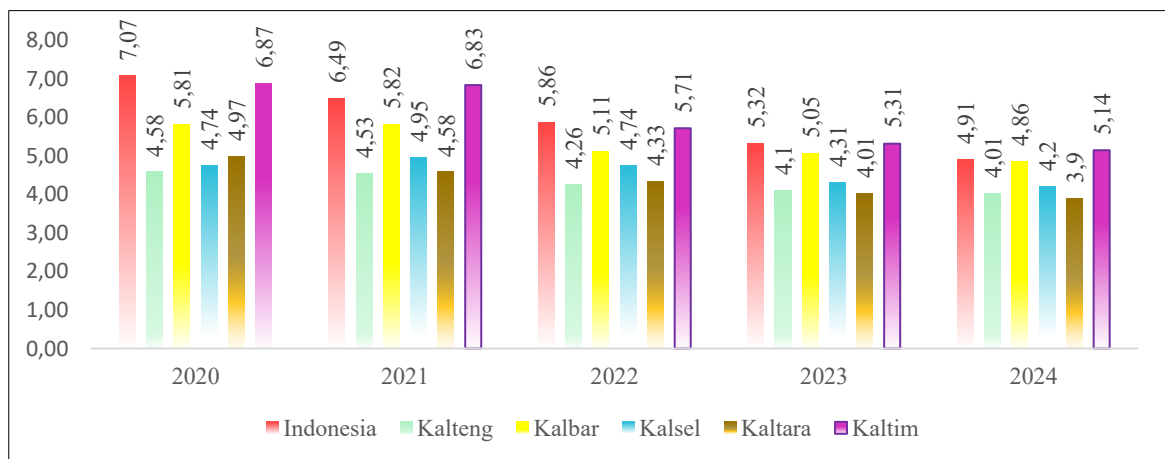
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	4,52	5,77	4,88	4,72	4,53
KUBAR	4,97	5,14	4,62	6,16	5,58
KUKAR	5,7	5,66	4,14	4,05	4,11
KUTIM	5,45	5,35	6,48	5,93	5,76
Berau	5,08	5,82	5,02	4,95	5,15

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
PPU	6,22	2,95	2,12	2,07	2,05
MAHULU	3,49	3,14	2,44	2,09	2,51
Balikpapan	9	8,94	6,9	6,09	6,22
Samarinda	8,26	8,16	6,78	5,92	5,75
Bontang	9,46	9,92	7,81	7,74	7,06
KALTIM	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan mengalami peningkatan TPT di tahun 2024. Meningkatnya TPT di kabupaten/kota tersebut dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang mencari pekerjaan, hampir selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan yang mengurangi volume pekerjaan, banyaknya lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan pendidikan dan masih mencari pekerjaan. Pada sektor pertanian terjadi pergeseran dari status pekerja bebas di pertanian menjadi buruh dan berusaha sendiri.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2024 masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan diatas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,91 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



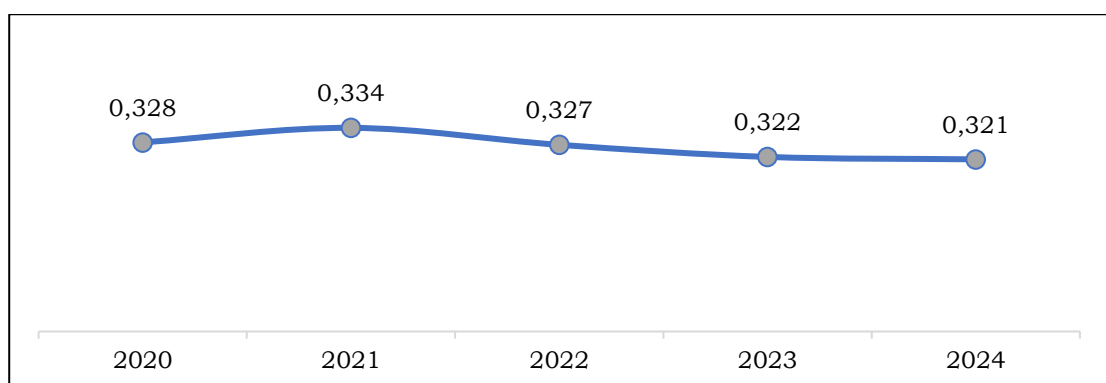
Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS RI, 2025)

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada di atas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

f. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.



Gambar 2.27. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,328 di tahun 2020 menjadi 0,321 di tahun 2024. Salah satu kondisi meningkatnya indeks

gini terjadi di tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2022 hingga 2024 seiring membaiknya kinerja aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

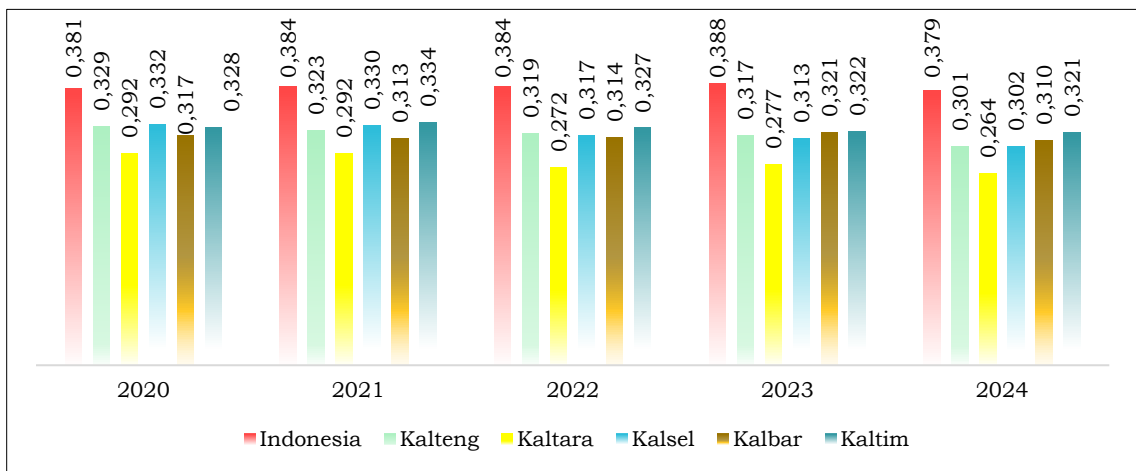
Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks ginya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.25. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,290	0,288	0,282	0,292	0,271
2	KUBAR	0,338	0,317	0,300	0,277	0,266
3	KUKAR	0,294	0,283	0,269	0,284	0,307
4	KUTIM	0,325	0,328	0,304	0,336	0,283
5	Berau	0,300	0,377	0,352	0,327	0,317
6	PPU	0,292	0,263	0,274	0,299	0,258
7	MAHULU	0,259	0,270	0,288	0,330	0,285
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,334	0,323	0,324
9	Samarinda	0,324	0,322	0,346	0,323	0,330
10	Bontang	0,405	0,340	0,324	0,299	0,330

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2024 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,264. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,379 pada tahun 2024. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



Gambar 2.28. Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

g. Indeks Modal Manusia

Pembangunan manusia dilakukan untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Penggunaan IMM tidak hanya menunjukkan kuantitas namun juga kualitas *outcome* pembangunan manusia.

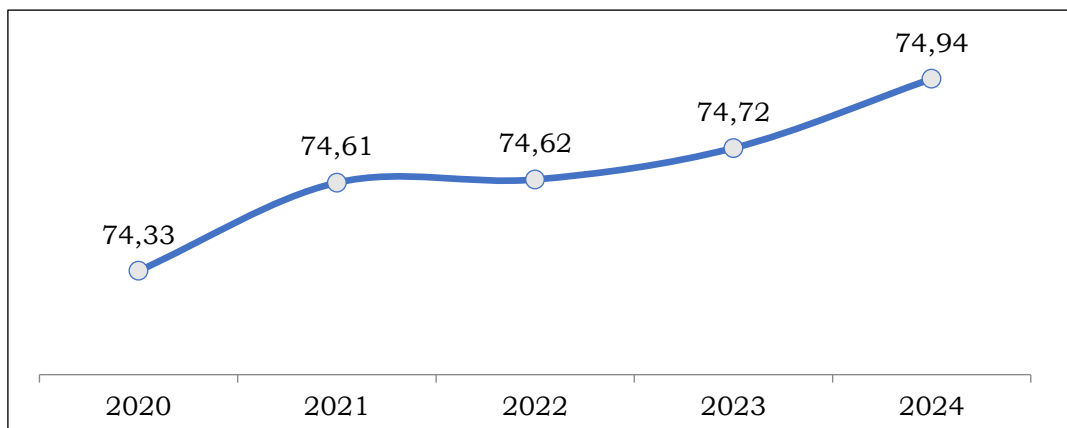
Indikator IMM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu *survival*, pendidikan dan kesehatan. Skor IMM berkisar dari 0 hingga 1, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya yang akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. IMM Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 0,56, capaian

ini berada diatas nasional sebesar 0,54 dan berada pada peringkat ke tujuh tertinggi dibandingkan provinsi yang lain.

2. Kesehatan untuk Semua

a. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,33 tahun hingga menjadi 74,94 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun.



Gambar 2.29. Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan umur harapan hidup di Kalimantan Timur, terutama didukung oleh upaya preventif dan kuratif yang telah dilakukan secara sinergis dengan seluruh stakeholders. Upaya preventif dilakukan melalui penanggulangan penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi, sedangkan dari sisi kuratif melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

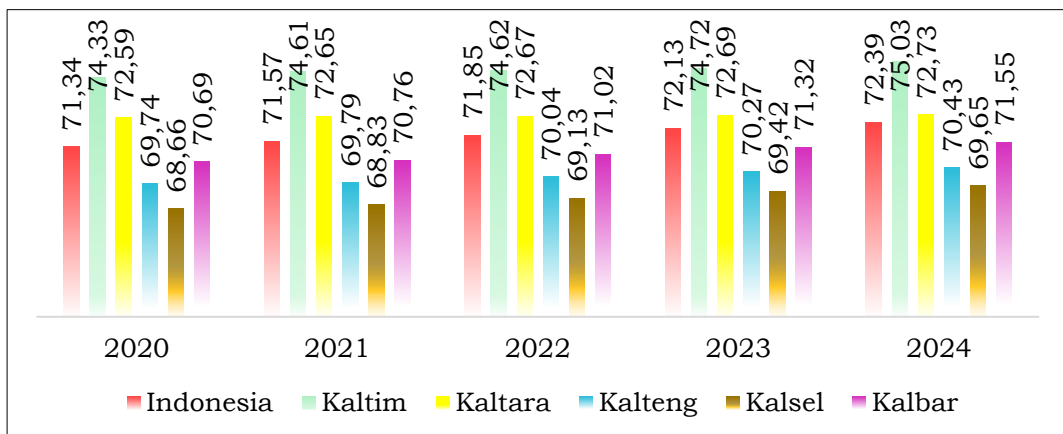
Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,44 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Tabel 2.26. Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	73,48	73,77	73,78	73,89	74,10
2	KUBAR	73,37	73,63	73,63	73,73	73,93
3	KUKAR	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33
4	KUTIM	73,86	74,21	74,22	74,33	74,55
5	Berau	73,06	73,35	73,35	73,45	73,66
6	PPU	73,57	73,87	73,90	74,03	74,27
7	MAHULU	73,06	73,30	73,32	73,44	73,64
8	Balikpapan	75,20	75,50	75,52	75,64	75,87
9	Samarinda	74,83	75,12	75,15	75,27	75,51
10	Bontang	74,37	74,67	74,69	74,81	75,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional yang sebesar 72,39 tahun.

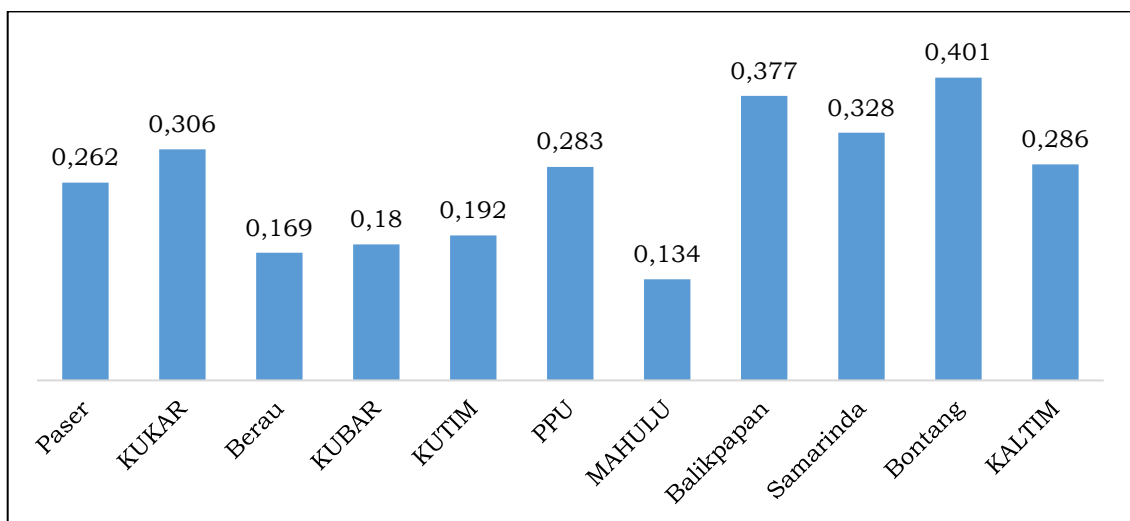


Gambar 2.30. Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5. Berikut data IKS yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.

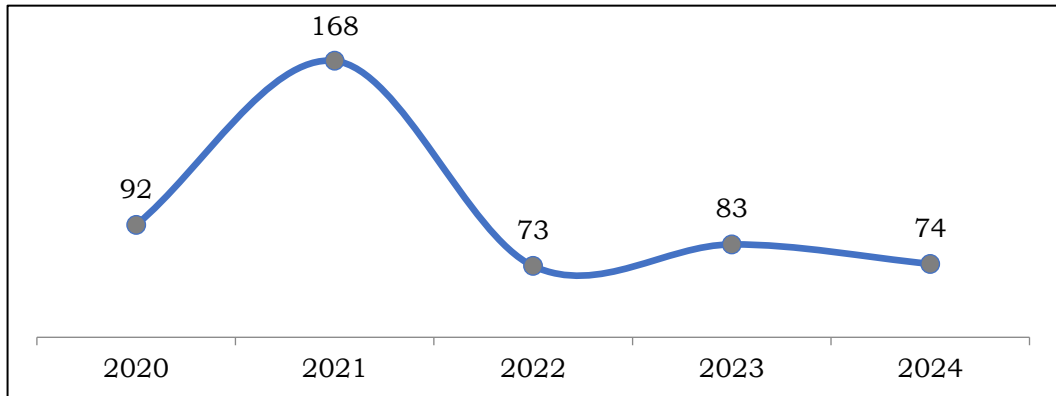


Gambar 2.31. Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Capaian IKS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 yang termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat", terutama disebabkan oleh rendahnya capaian pada indikator penderita tuberkulosis paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat secara teratur dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan. Secara umum, berdasarkan nilai IKS, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih masuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

c. Kematian Ibu dan Bayi

Kematian Ibu masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran.



Gambar 2.32. Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)

(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025)

Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2020–2024 berfluktuasi, cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai 74 jiwa. Jumlah kematian ibu tertinggi tahun 2024 berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.

Tabel 2.27. Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	5	20	5	12	7
2	KUBAR	5	9	5	6	5
3	KUKAR	28	38	24	14	14
4	KUTIM	14	13	5	13	10
5	Berau	7	16	8	5	9
6	PPU	3	15	5	5	6
7	MAHULU	4	2	0	0	0
8	Balikpapan	12	18	4	8	9
9	Samarinda	10	21	13	19	10
10	Bontang	4	16	4	1	3
	Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi)					1
	Kalimantan Timur	92	168	73	83	74

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025

Penyebab kematian ibu diantaranya disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, komplikasi non obstetri, perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan.

Jumlah kematian bayi (0–11) bulan mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 527 bayi yang meninggal menjadi 589 bayi di tahun 2024. Penyebab tertinggi dari Kematian Bayi ini disebabkan oleh karena Respiratory and Cardiovascular Disorders dan Low Birth Weight and Prematurity.

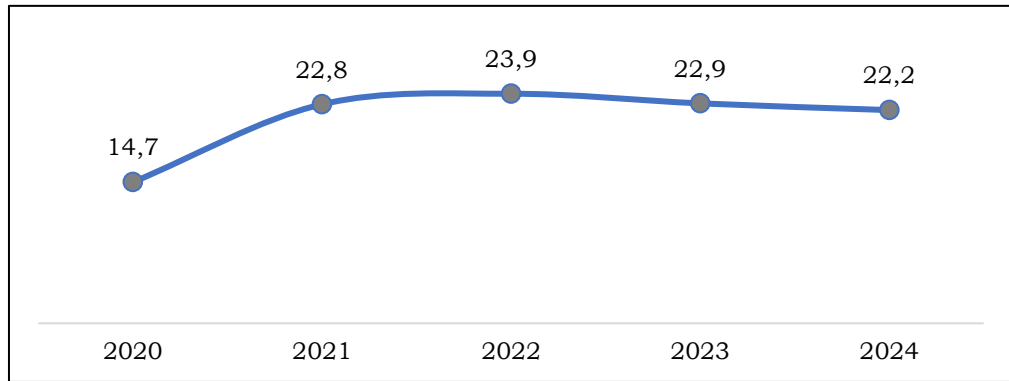
Tabel 2.28. Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	37	60	67	65	62
2	KUBAR	38	30	42	26	24
3	KUKAR	133	241	179	144	141
4	KUTIM	42	26	44	79	68
5	Berau	96	124	86	55	77
6	PPU	27	22	40	31	23
7	MAHULU	9	9	17	6	6
8	Balikpapan	75	92	72	83	82
9	Samarinda	26	47	54	83	65
10	Bontang	44	49	37	30	39
	Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi)					2
Kalimantan Timur		527	700	638	602	589

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024

d. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.



Gambar 2.33. Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025)

Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. Menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2024 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,2 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada urutan ke-22 dan pada tahun 2024 meningkat berada pada peringkat ke-19.

Tabel 2.29. Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	15,50	23,60	24,90	22,40	17,80
2	KUBAR	16,60	15,80	23,10	22,00	21,00
3	KUKAR	14,30	26,40	27,10	17,60	11,80
4	KUTIM	16,10	27,50	24,70	29,00	20,60
5	Berau	17,60	25,70	21,60	23,00	17,20
6	PPU	11,40	27,30	21,80	24,60	21,90
7	MAHULU	9,60	20,30	14,80	N/A	18,30
8	Balikpapan	13,30	17,60	19,60	21,60	20,20
9	Samarinda	11,90	21,60	25,30	24,40	15,20
10	Bontang	20,90	26,30	21,00	27,00	16,50

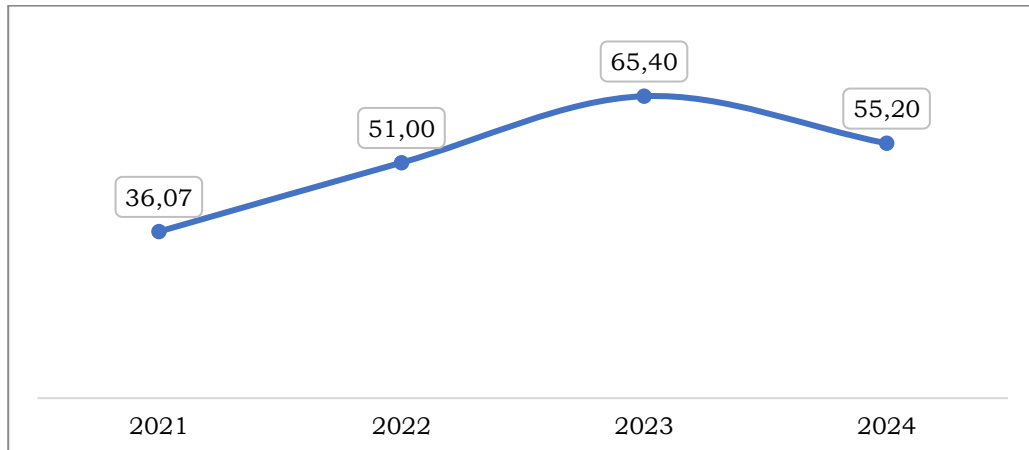
Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalensi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola

asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

e. Insidensi Tuberkulosis

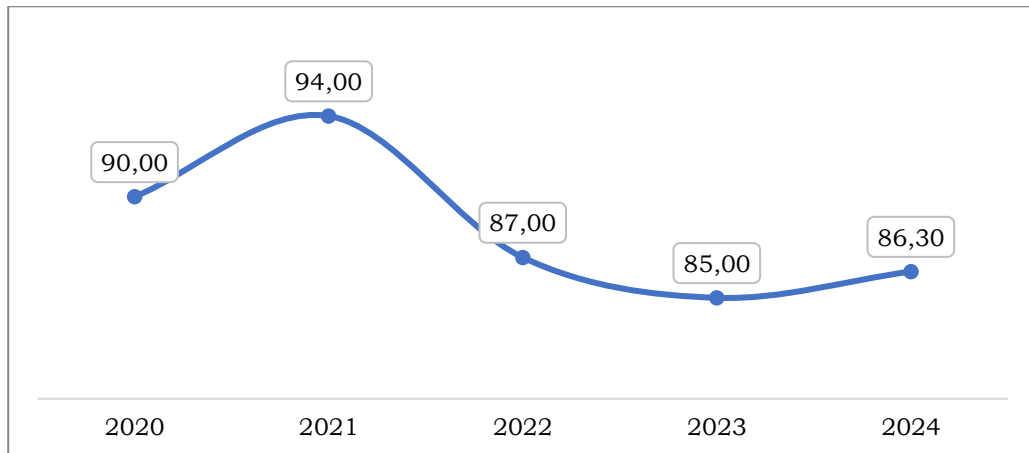
Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.



Gambar 2.34. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati (Case Detection Rate) di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 persen dan di tahun 2023 menjadi 65,4 persen. Terjadi penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 55,2 persen. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan

adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023 sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga presentase cakupan menjadi menurun.



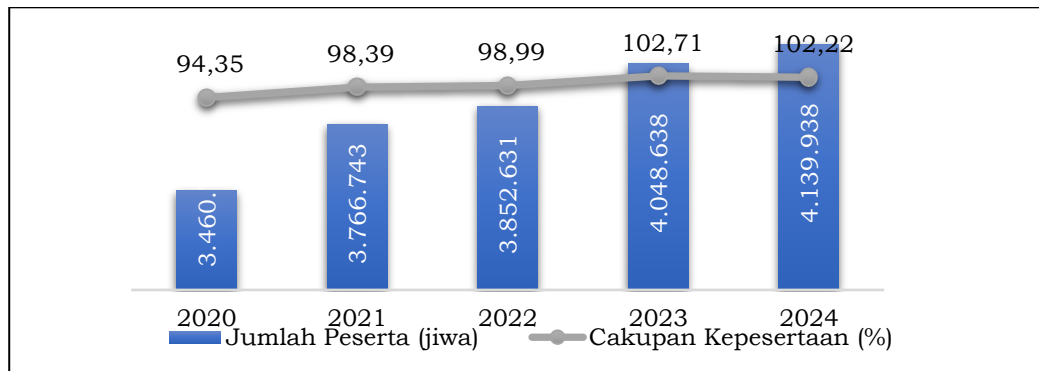
Gambar 2.35. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Angka kesembuhan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) di Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari 3 tahun terakhir, hal ini terjadi akibat banyak kasus tuberculosi yang tidak menyelesaikan pengobatan dikarenakan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya angka kematian penyakit ini.

Faktor utama penyebab masih tingginya kasus tuberculosi dengan angka kematian yang cukup tinggi adalah karena masih terjadinya penularan penyakit ini di masyarakat akibat belum terputusnya rantai penularan akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberculosi untuk mendapatkan pengobatan secara dini. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberculosi adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberculosi di masyarakat.

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Jumlah peserta JKN di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peserta JKN pada tahun 2020 berjumlah 3.460.756 peserta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4.139.938 peserta.



Gambar 2.36. Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPJS Kesehatan Kalimantan Timur, 2025)

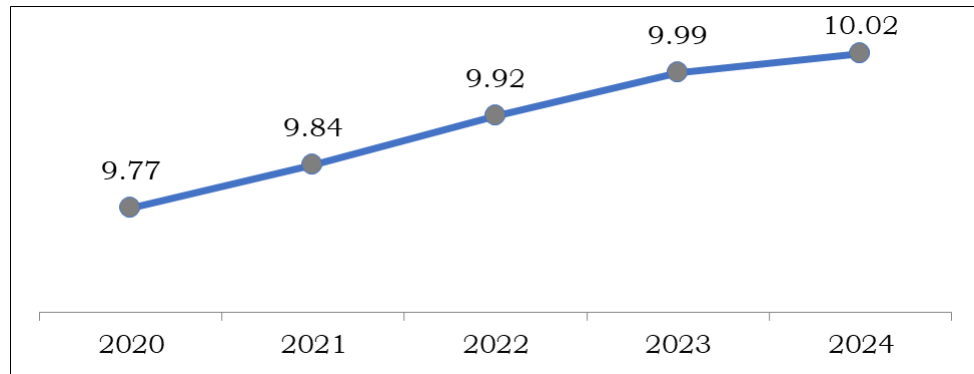
Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu dari beberapa aspek utama keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Capaian ini tercermin melalui cakupan UHC Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dimana cakupan pada tahun 2020 mencapai 94,35 persen dan meningkat menjadi 102,22 persen pada tahun 2024.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, dan

berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di Provinsi Kalimantan Timur, Capaian rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.



Gambar 2.37. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani adalah hingga jenjang SMA kelas X. Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa wajib belajar 12 tahun belum tercapai di Kalimantan Timur, tentunya ini disebabkan masih adanya masyarakat Kalimantan Timur berusia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan wajib belajarnya hingga lulus dari jenjang SMA.

Tentunya kondisi ini juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan unit sekolah dan kecukupan ruang kelas dalam kondisi baik untuk menampung anak usia sekolah, hingga kondisi ekonomi keluarga dan budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi anak untuk menamatkan pendidikannya.

Tabel 2.30. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (tahun)

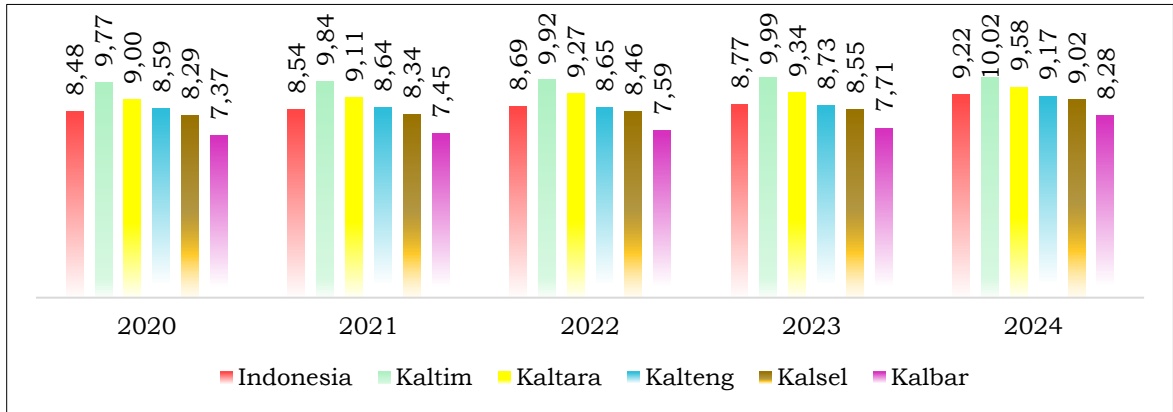
No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	8,55	8,79	8,80	8,91	8,92
2	KUBAR	8,47	8,70	8,78	8,85	8,89
3	KUKAR	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
4	KUTIM	9,19	9,43	9,44	9,45	9,47
5	Berau	9,52	9,53	9,54	9,56	9,57
6	PPU	8,28	8,36	8,51	8,53	8,57
7	MAHULU	7,97	8,18	8,36	8,49	8,50
8	Balikpapan	10,68	10,91	10,92	10,93	10,99
9	Samarinda	10,48	10,49	10,71	10,93	10,95
10	Bontang	10,79	10,80	10,81	10,92	10,97

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Sama halnya dengan pencapaian IPM, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat berkorelasi dengan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota. Jika dilihat dari pertumbuhan capaian RLS pada Kabupaten/kota tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada pada angka 0,027 tahun, dimana ada 4 Kabupaten yang pertumbuhannya hanya 0,01 tahun yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Mahakam Ulu.

Jika melihat kondisi capaian 4 Kabupaten tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Kabupaten Paser dan Berau merupakan daerah paling ujung perbatasan antara Kaltim-Kalsel dan Kaltim-Kaltara yang memiliki permasalahan dalam hal akses pendidikan. Begitu halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki cakupan wilayah paling luas di Kalimantan Timur. Namun kondisi Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sedikit perbedaan, dimana Mahakam Ulu memiliki karakteristik wilayah yang lebih sulit serta akses infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga berpengaruh pada sulit dan mahal biaya pembangunan infrastruktur pendidikan.

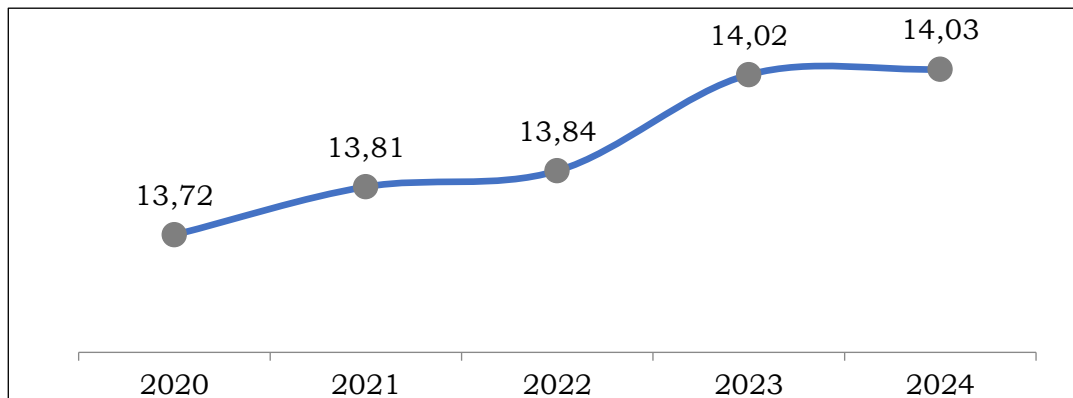
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur tertinggi bila dibandingkan dengan Regional Kalimantan lainnya pada tahun 2024, bahkan lebih tinggi dari Nasional sebesar 9,22 tahun.



Gambar 2.38. Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Indikator HLS sangat penting dalam menilai kualitas pendidikan dan potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah.



Gambar 2.39. Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meski pada tahun 2024 peningkatan hanya

sebesar 0,01 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian HLS pada Kabupaten/kota juga mengalami perlambatan. Kondisi ini sama halnya dengan rata-rata lama sekolah yang juga bergantung pada capaian ditingkat Kabupaten/kota.

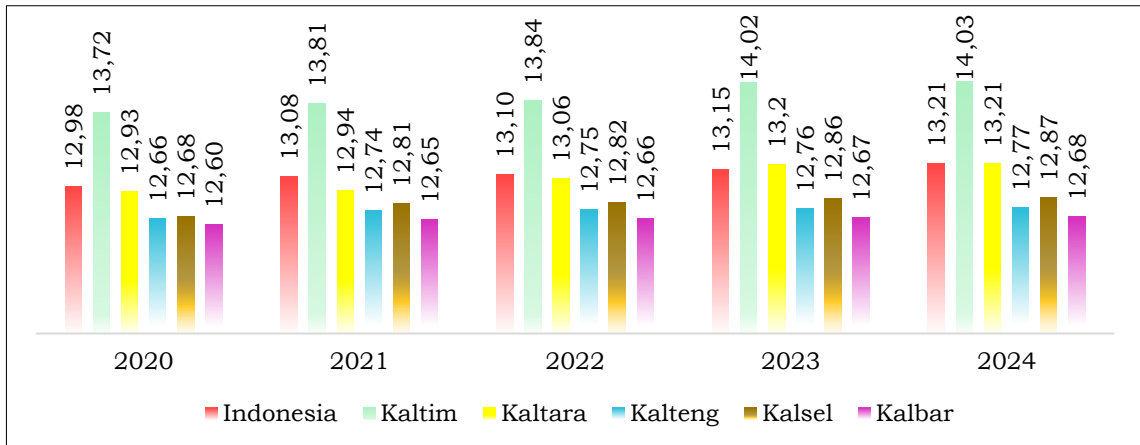
Tabel 2.31. Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	13,10	13,25	13,27	13,37	13,38
2	KUBAR	12,90	13,02	13,09	13,25	13,36
3	KUKAR	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
4	KUTIM	12,89	12,90	13,00	13,01	13,02
5	Berau	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
6	PPU	12,56	12,57	12,70	12,86	12,87
7	MAHULU	12,51	12,61	12,62	12,63	12,78
8	Balikpapan	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
9	Samarinda	14,89	15,09	15,10	15,39	15,40
10	Bontang	13,03	13,17	13,18	13,43	13,73

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Meski capaian HLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Terbukti dari 10 Kabupaten/kota hanya ada 2 Kabupaten yang pertumbuhannya mencapai 0,1 tahun yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Bahkan Kota Balikpapan dan Samarinda hanya bertumbuh 0,01 tahun dari tahun 2023. Perlambatan capaian HLS dapat disebabkan kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk menampung penduduk usia sekolah, kecukupan guru yang berpengaruh pada pembukaan kelas belajar dengan kualitasnya, kemudahan akses penduduk dari tempat tinggal terhadap fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi keluarga hingga budaya masyarakat.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah regional Kalimantan lainnya dan juga secara nasional.



Gambar 2.40. Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

c. Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan individu membaca dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan kemampuan numerasi merupakan kemampuan individu dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Standar kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dari sisi kualitas hasil pembelajaran peserta didik, serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota yang dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Tabel 2.32. Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum	6,72	12,65	32,36	43,53

Indikator	2021	2022	2023	2024
pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi				
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	29,48	40,38	53,89	57,83
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	0,00	0,00	10,00	0,00
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	10,00	20,00	40,00	67,51

Sumber: Kemendikdasmen, 2024

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan 6 kabupaten/kota yang belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang tepat. Termasuk diantaranya adalah pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran baik dari buku teks dan non teks, pendukung media pembelajaran siswa, hingga intervensi terhadap peningkatan kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran distribusi capaian pendidikan di masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Persentase penduduk di Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 40,14 persen, Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan menengah menjadi jenjang Pendidikan yang paling umum di Kalimantan Timur, yang juga dapat diartikan bahwa

masyarakat mulai menyadari pentingnya Pendidikan menengah sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Persentase (%)				
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
Paser	8,41	28,51	23,91	32,02	7,14
Kutai Barat	10,25	27,39	22,77	29,23	10,36
Kutai Kartanegara	8,68	25,59	23,48	32,73	9,52
Kutai Timur	9,58	22,76	22,37	36,09	9,20
Berau	7,77	25,79	23,24	30,99	12,21
Penajam Paser Utara	13,05	26,13	21,48	31,09	8,25
Mahakam Ulu	11,15	29,28	22,86	30,59	6,12
Balikpapan	4,39	13,46	19,96	46,06	16,13
Samarinda	3,08	12,04	19,07	47,73	18,07
Bontang	4,94	13,95	20,85	45,52	14,74
Kalimantan Timur	6,75	19,87	21,51	39,07	12,80

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi yakni lulusan perguruan tinggi sebesar 11,97 persen. Rendahnya penduduk yg berkualifikasi Pendidikan tinggi disebabkan banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan hambatan yang signifikan bagi masyarakat untuk mengakses Pendidikan tinggi, faktor-faktor seperti biaya Pendidikan, kurangnya informasi dan keterbatasan institusi perguruan tinggi di daerah juga menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Samarinda memiliki persentase penduduk tertinggi yang menamatkan perguruan tinggi (18,09 persen), diikuti oleh Bontang (16,56 persen) dan Balikpapan (12,64 persen). Sementara itu, Kabupaten Paser mencatat persentase

terendah, yakni 7,57 persen. hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan institusi Pendidikan tinggi dan dukungan infrastruktur yang lebih baik di perkotaan.

e. Akreditasi sekolah

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan sejauh mana satuan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi memiliki fungsi untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan di daerah.

Tabel 2.34. Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024 Kalimantan Timur

PROVINSI				KABUPATEN/KOTA			
JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL	JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL
SLB	11	24	35	SD	1658	273	1931
A	1		1	A	488	120	608
B	7	6	13	B	908	99	1007
BT	1	2	3	BT	4	20	24
C	2	15	17	C	252	33	285
TT		1	1	TT	6	1	7
SMA	144	97	241	SMP	458	247	705
A	88	34	122	A	166	90	256
B	40	33	73	B	206	100	306
BT	3	9	12	BT	6	10	16
C	12	21	33	C	80	47	127
TT	1		1				
SMK	88	131	219				
A	30	18	48				
B	51	67	118				
BT	1	3	4				
C	6	42	48				
TT		1	1				
Total	243	252	495	Total	2116	520	2636

Sumber: BAN-PDM Prov. Kaltim, 2024

Pada jenjang yang menjadi kewenangan Provinsi, satuan pendidikan di dominasi akreditasi “B” dengan total 41,21%, akreditasi

“A” 34,55%, akreditasi C 19,80% dan belum/tidak terakreditasi sebesar 4,44%. Mutu Pendidikan yang tercermin dari akreditasi sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat. Sekolah dengan akreditasi tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari orang tua dan Masyarakat, sedangkan sekolah dengan akreditasi rendah atau belum terakreditasi menghadapi tantangan dalam menarik kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Pemerataan Pendidikan berkualitas juga dapat dicerminkan dari meratanya satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi tinggi. Dimana komponen yang menjadi penilaian akreditasi adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kepemimpinan Kepala satuan Pendidikan dalam pengelolaan satuan Pendidikan, iklim lingkungan belajar serta kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan Masyarakat dan memastikan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur.

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan literasi suatu masyarakat, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Komponen Indeks Literasi Masyarakat diukur berdasarkan Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga kerja, Tingkat kunjungan masyarakat, Jumlah perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi, serta Ke anggota perpustakaan. Kategori penilaian yang digunakan adalah IPLM 0-29,9 masuk dalam kategori sangat rendah, IPLM 30-49,9 masuk dalam kategori rendah, IPLM 50-

79,9 masuk dalam kategori sedang, IPLM 80-89,9 masuk dalam kategori tinggi dan IPLM 90-100 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,78	17,74	36,06	68,77	78,34

Sumber: Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi KALTIM, 2024

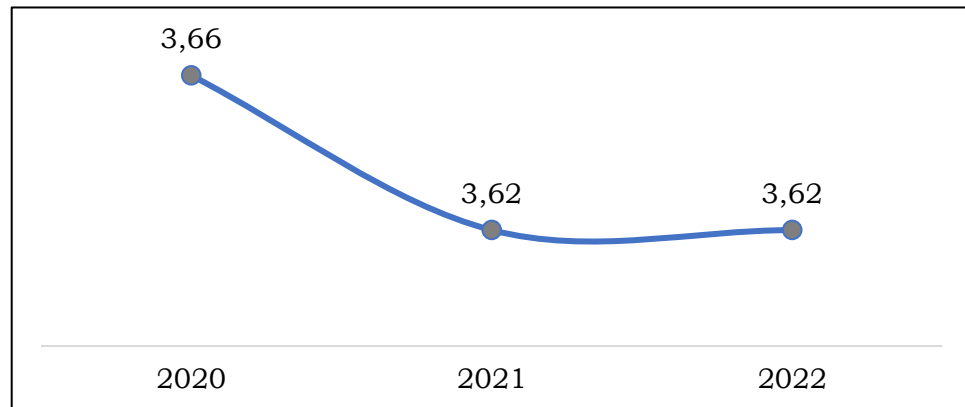
Pada tahun 2020 IPLM Kalimantan Timur adalah 20,78 dan pada tahun 2024 sebesar 78,34 dan termasuk dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 IPLM Kalimantan Timur pada kategori posisi rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan ruang gerak seperti mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan formal, perpustakaan, dan bahan bacaan. Dalam upaya untuk meningkatkan IPLM Kalimantan Timur maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi/buku, majalah, atau sumber bacaan digital, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, peningkatan kemampuan menulis dan menyampaikan ide serta minat dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan budaya membaca.

g. Indeks Literasi Digital

Pembangunan teknologi digital memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan teknologi digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan literasi digital, infrastruktur, sistem, dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Empat pilar dalam mengukur indeks literasi digital yaitu *Digital Skill*, *Digital Culture*, *Digital Ethics* dan *Digital Safety*.



Gambar 2.41. Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

(Sumber: Kominfo RI, 2023)

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 dan berada pada peringkat tiga besar nasional. Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet. *Digital ethics* atau indikator etika digital mencapai 3,90 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial dan menghargai privasi di media sosial. *Digital safety* atau indikator keamanan digital sebesar 3,17 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data dan perlindungan data pribadi. *Digital culture* atau indikator budaya digital sebesar 3,86 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari

suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

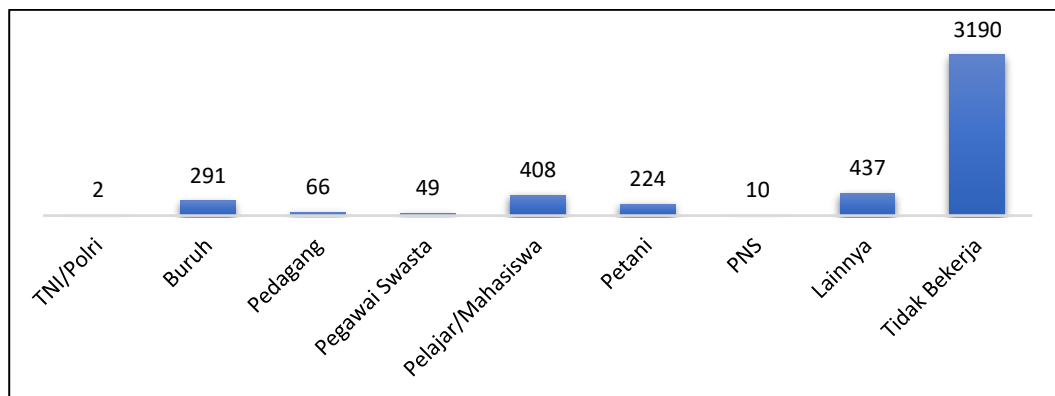
a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mendorong produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. Sebanyak 837.154 tenaga kerja di Kalimantan Timur, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024. Namun, tingkat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 66,54 persen jika dibandingkan dengan total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Kalimantan Timur.

b. Penyandang Disabilitas yang Bekerja

Keberadaan 6 (enam) Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja secara setara. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 94 penyandang disabilitas telah mendapatkan fasilitasi melalui ULD ini, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan penempatan kerja, hingga advokasi hak-hak ketenagakerjaan. Kehadiran ULD tidak hanya membuka peluang kerja yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Dengan adanya jaringan ULD di berbagai wilayah, Kalimantan Timur terus memperkuat langkah menuju ketenagakerjaan yang berkeadilan, setara, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas. Semakin tingginya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, diharapkan semakin banyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik dan layak.



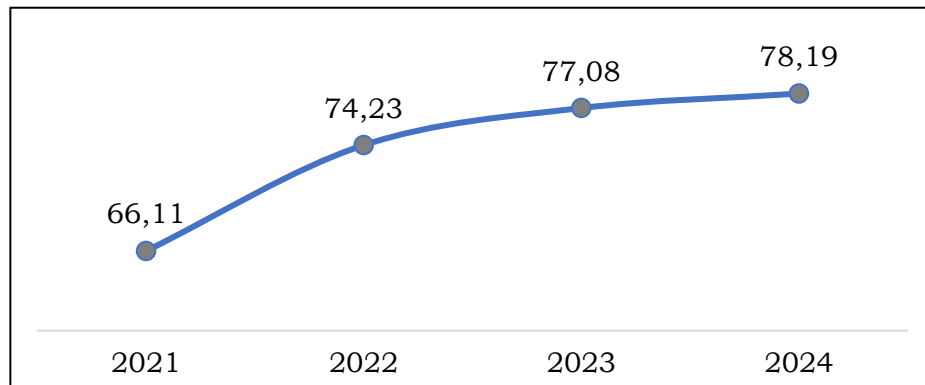
Gambar 2.42. Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa)
(Sumber: Dinsos Provinsi KALTIM, 2024)

Pada tahun 2024, dari total 4.677 penduduk penyandang disabilitas di Kalimantan Timur, hanya 352 orang (7,30 persen) yang bekerja di sektor formal. Sektor formal tersebut mencakup profesi seperti anggota TNI/Polri, buruh, pegawai swasta, dan PNS. Sebaliknya, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan pekerjaan lainnya, mencapai 952 orang (20,35 persen). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal di Kalimantan Timur, sehingga perlu upaya lebih untuk mendorong inklusi dan aksesibilitas dalam dunia kerja formal.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indikator IKUB diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



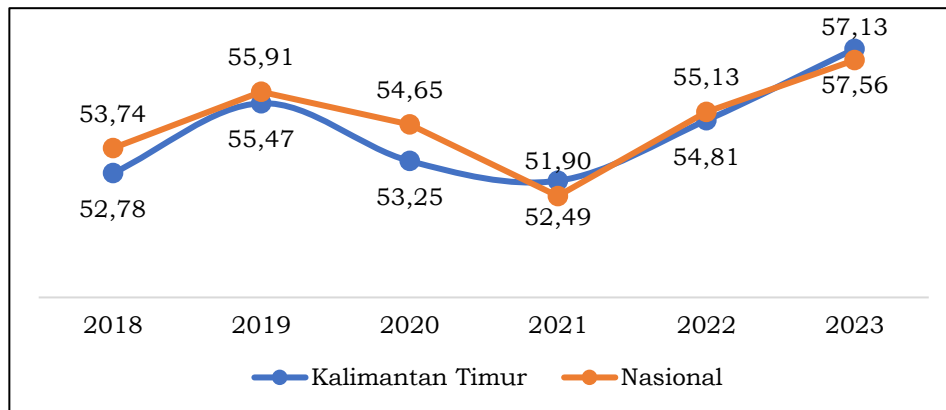
Gambar 2.43. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: Kementerian Agama RI, 2025)

IKUB Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 78,64 di tahun 2024 dan masuk dalam kategori rukun tinggi. Peningkatan skor ini terjadi di seluruh dimensi baik toleransi (78,64), kesetaraan (78,22) maupun kerja sama (77,72). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam membangun keharmonisan antarumat beragama di Kalimantan Timur, dengan indikasi semakin meningkatnya toleransi, kerja sama, serta penghormatan antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

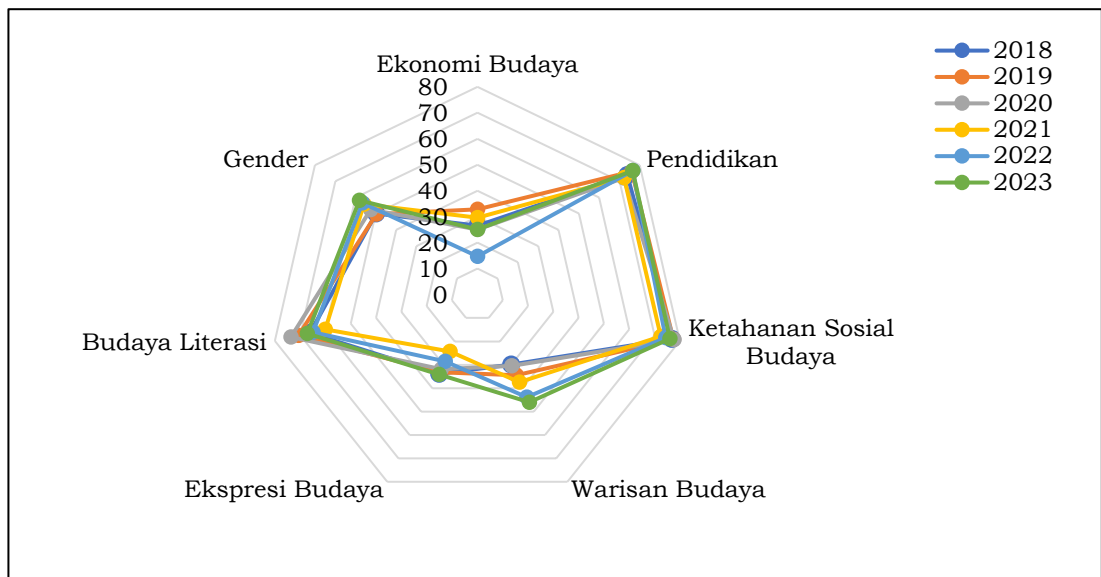
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 52,78 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023.

Peningkatan IPK Kaltim 2018-2023 menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah menjadi fokus perhatian dengan terus menjaga dan meningkatkan peningkatan kesadaran masyarakat, peran pemerintah daerah, pengembangan pariwisata berbasis budaya, pelestarian dan pengembangan warisan budaya, pendidikan kebudayaan, penguatan lembaga kebudayaan dan kerjasama lintas sektor.



Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018–2023
(Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024)

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.45. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023
(Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024)

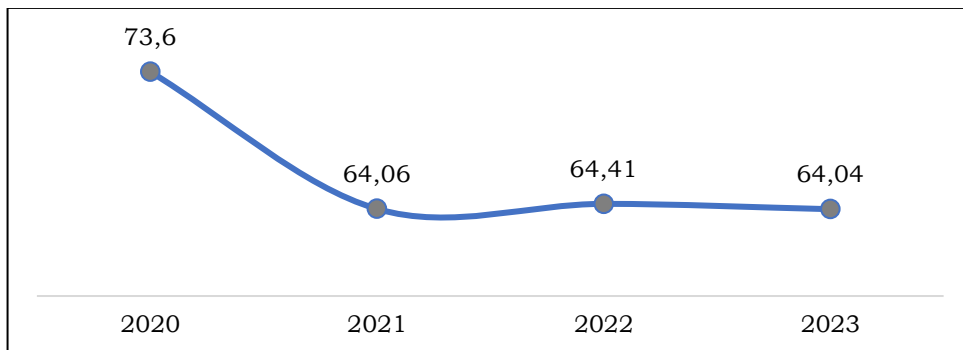
Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) meliputi beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus. Semakin tinggi Indeks Perlindungan Anak

(IPA) merepresentasikan bahwa keberhasilan pembangunan pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin baik.



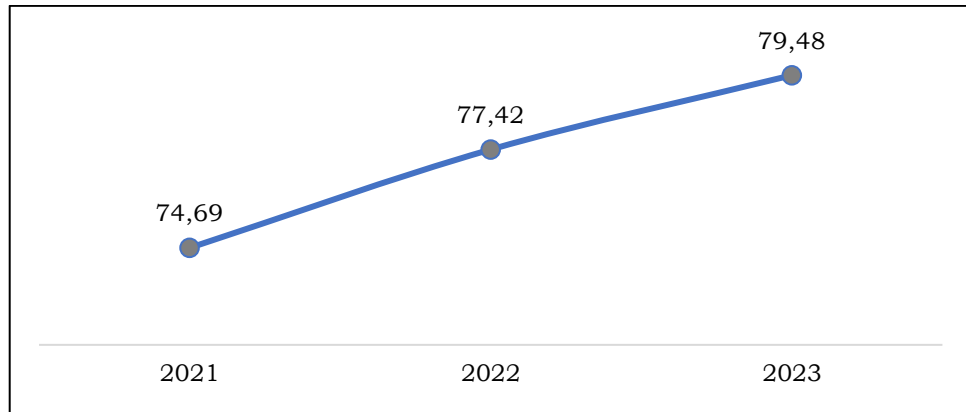
Gambar 2.46. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023

(Sumber: Kemenpppa RI, 2025)

Tren IPA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Turunnya IPA di tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya capaian pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Kondisi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai strategi implementatif dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian IPA Kalimantan Timur.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang dinilai melalui lima dimensi yang meliputi Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB).



Gambar 2.47. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
(Sumber: Kemenppa, 2025)

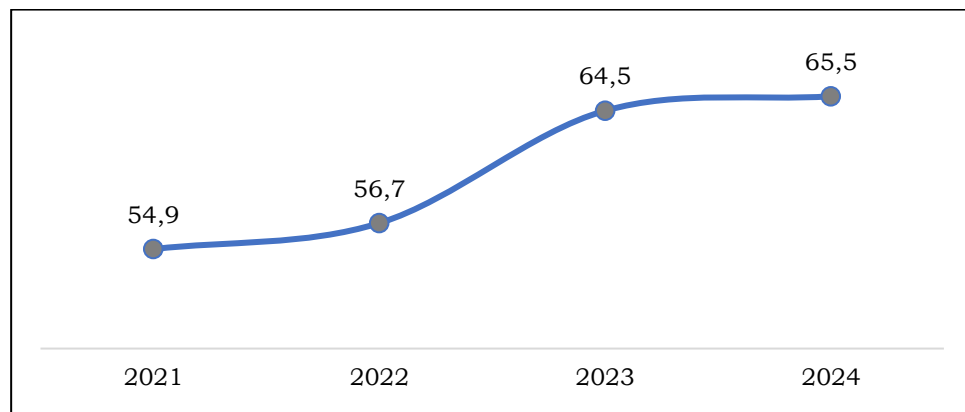
IKK Kalimantan Timur termasuk kategori responsif gender dan hak anak atau kategori tertinggi dalam penilaian IKK dengan capaian 79,48 pada tahun 2023. Meskipun nilai IKK di tahun 2023 mengalami peningkatan, beberapa indikator komposit penyusun IKK mengalami penurunan, diantaranya Prevalence of Undernourishment (PoU) semua umur yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi, persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak-anak dan lain-lain.

Kedepannya IKK akan menjadi turunan dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK adalah alat yang penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, IPKK memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan keluarga dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan. IPKK disusun demi memenuhi hak pengasuhan anak dan mewujudkan keluarga berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. IPKK akan menjadi ukuran atau indikator dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

c. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

3 (tiga) dimensi pembentuk untuk perhitungan iBangga yaitu Dimensi Ketentraman, dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan Kesehatan, jaminan keuangan dan keharmonisan keluarga. Dimensi kemandirian, dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan keluarga, dan akses informasi. Dimensi kebahagiaan dengan indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.

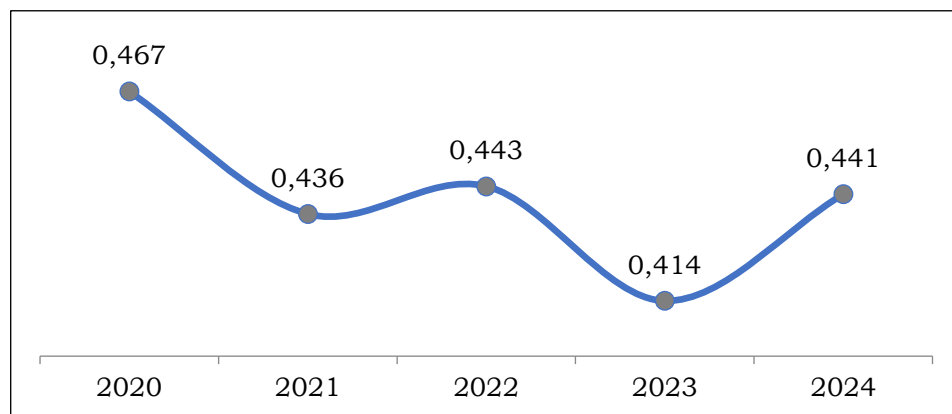


Gambar 2.48. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: BKKBN, 2025)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 65,5 di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan perbaikan dalam standar hidup, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

d. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, meskipun terjadi kenaikan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbaikan kesetaraan gender. Dengan kata lain, tingkat pencapaian kesetaraan gender di Kalimantan Timur relatif semakin baik.



Gambar 2.49. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dibandingkan dengan nilai IKG tahun 2020, penurunan nilai IKG Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perbaikan di hampir seluruh indikator pada ketiga dimensi pembentuk. Pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan nilai IKG yang terutama disebabkan oleh menurunnya persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, sedangkan indikator lainnya menunjukkan perbaikan, terutama pada dimensi tenaga kerja yang meningkat cukup signifikan.

Tabel 2.36. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,549	0,511	0,528	0,489	0,527
2	KUBAR	0,484	0,501	0,490	0,491	0,477
3	KUKAR	0,556	0,511	0,540	0,490	0,439
4	KUTIM	0,530	0,518	0,552	0,532	0,517
5	Berau	0,493	0,467	0,380	0,502	0,421
6	PPU	0,438	0,572	0,527	0,544	0,474
7	MAHULU	0,406	0,449	0,421	0,362	0,339
8	Balikpapan	0,297	0,246	0,344	0,178	0,313
9	Samarinda	0,311	0,222	0,197	0,237	0,243
10	Bontang	0,235	0,348	0,253	0,314	0,313
Kalimantan Timur		0,467	0,436	0,443	0,414	0,441

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2024, ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai 0,517, sedangkan ketimpangan gender terendah terdapat di Kota Samarinda dengan nilai 0,243. Rendahnya ketimpangan di Samarinda dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi serta pasar kerja. Secara umum, jika dibandingkan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan berbasis gender antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.37. Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

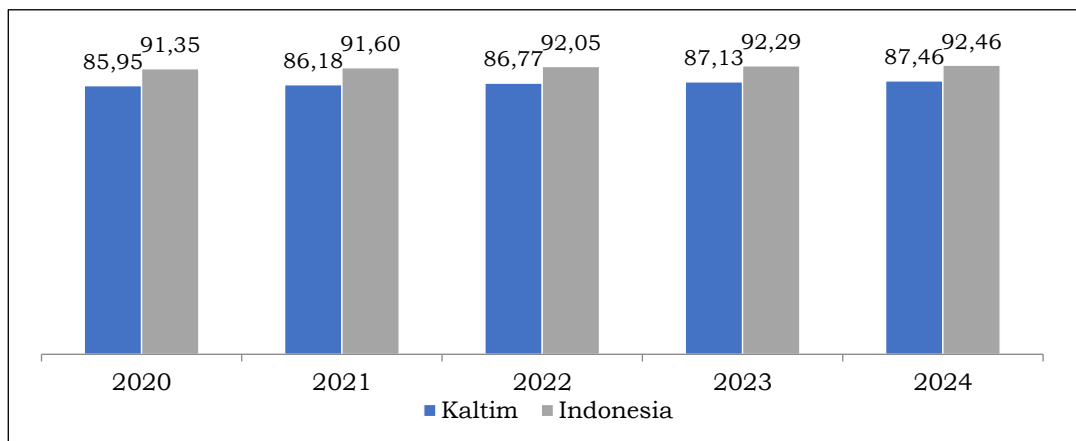
Dimensi/ Indikator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,111	0,085	0,089	0,069	0,066
MHPK20	Perempuan	0,269	0,267	0,265	0,255	0,258
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	81,82	79,63	80,00	78,18	87,27
	Perempuan	18,18	20,37	20,00	21,82	12,73
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	56,35	56,59	50,12	50,68	50,23
	Perempuan	43,36	46,36	50,12	50,68	50,23
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-laki	81,52	81,35	82,74	82,82	83,75
	Perempuan	47,96	48,20	45,17	46,86	49,07

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Dimensi penyusun Indeks Ketimpangan Gender terdiri dari dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, serta dimensi pasar tenaga kerja. Khusus untuk dimensi kesehatan reproduksi, indikator yang digunakan hanya berfokus pada penduduk perempuan, sedangkan dua dimensi lainnya menggunakan perbandingan indikator antara penduduk laki-laki dan perempuan.

e. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Index (HDI)* pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 2.50. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020 nilai IPG Kalimantan Timur

sebesar 85,95 dan meningkat menjadi 87,46 di tahun 2024. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian.

Tabel 2.38. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	76,62	76,90
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,19	14,21
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,29	9,82
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	20,76	8,16

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki. Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel 2.39. Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	71,35	71,49	72,27	73,15	74,03
2	KUBAR	84,09	84,67	85,02	85,73	86,23
3	KUKAR	79,20	79,61	80,30	81,08	81,71
4	KUTIM	76,63	76,95	77,67	78,46	79,10
5	Berau	87,71	88,08	88,08	88,43	88,88
6	PPU	86,68	86,97	87,23	87,41	87,80
7	MAHULU	81,07	81,92	82,60	83,28	83,89
8	Balikpapan	90,24	90,48	90,59	90,80	91,04
9	Samarinda	89,82	89,90	90,40	90,68	91,01
10	Bontang	87,29	87,66	88,05	88,34	88,84
Kalimantan Timur		85,95	86,18	86,77	87,13	87,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 91,04 sedangkan Paser memiliki Indeks

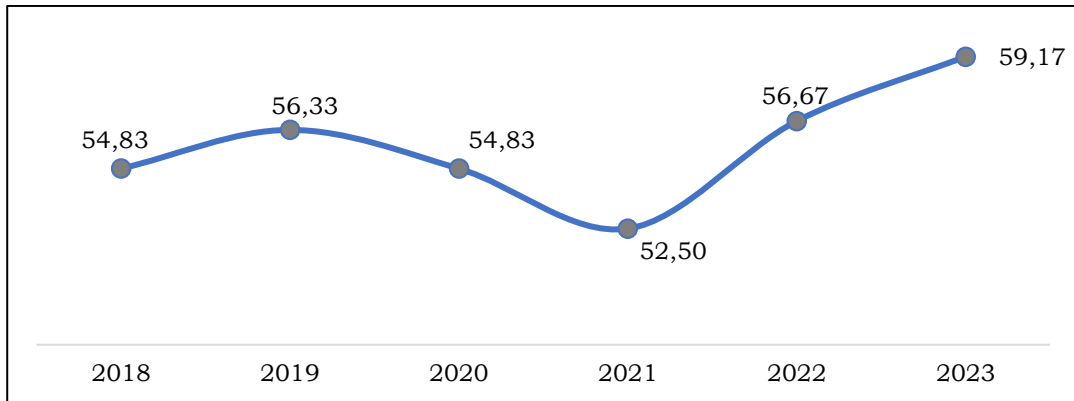
Pemberdayaan Gender terendah yaitu 74,03 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi. Rendahnya IPG di Kabupaten Paser disebabkan oleh rendahnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan yang hanya sebesar 3,39 juta rupiah pada tahun 2024.

Komitmen nyata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara gender ditegaskan melalui penetapan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai wadah koordinatif yg berperan strategis dalam memastikan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan ditandai dengan diraihnya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya pada tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana penghargaan ini diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagai sebuah pengakuan atas upaya strategis dan terstruktur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kepemudaan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator IPP menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan

kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.



Gambar 2.51. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

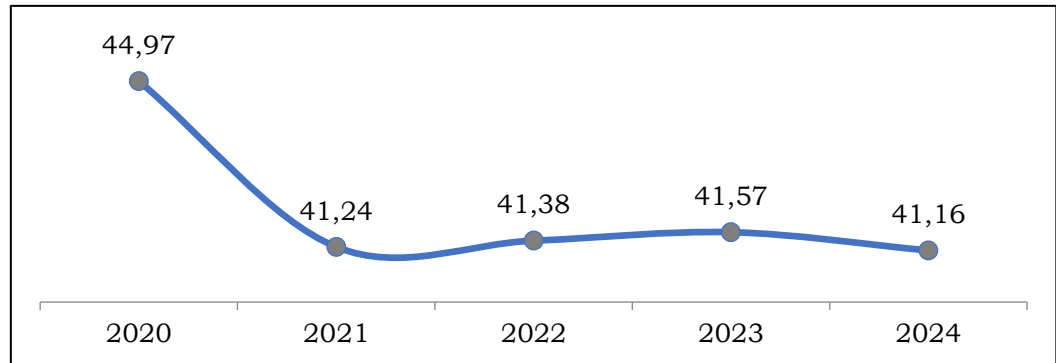
(Sumber: BAPPENAS, 2024)

IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2018 menjadi 59,17 pada tahun 2023. Semua capaian domain IPP mengalami peningkatan, kecuali domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Produktivitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



Gambar 2.52. Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

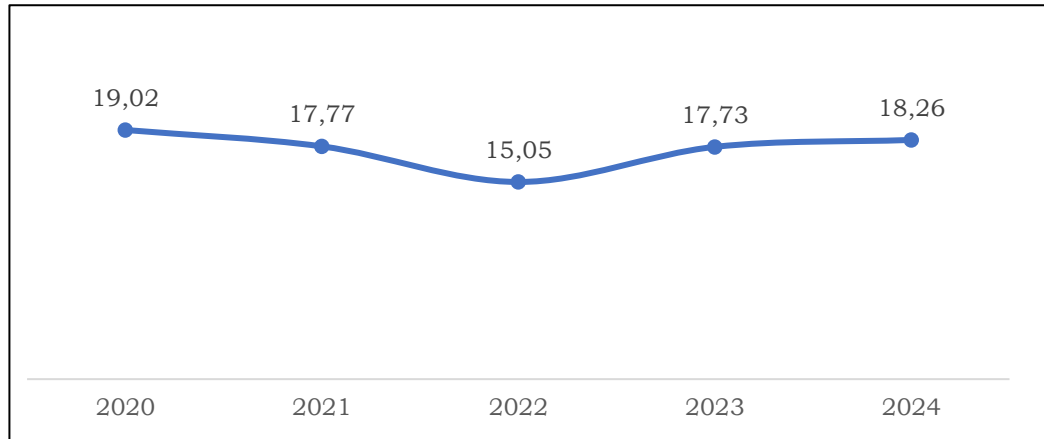
Rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan sebesar 41,16 pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41–42 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

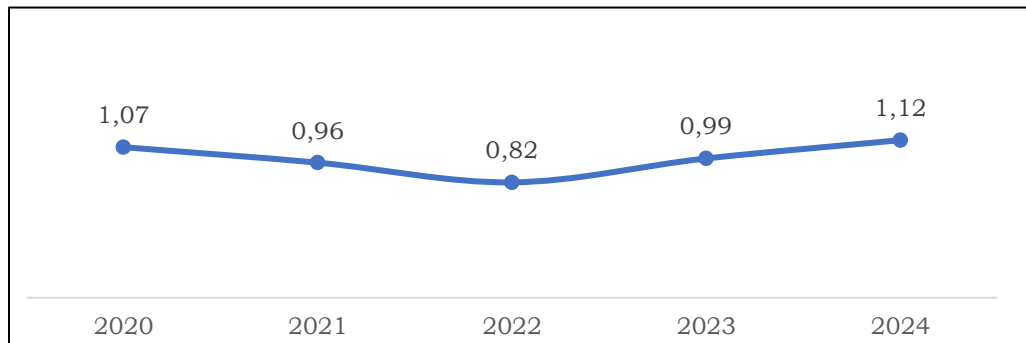


Gambar 2.53. Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio PDRB industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 18,26 persen di tahun 2024. Hal ini disebabkan mulai beroperasinya beberapa industri baru di Kalimantan Timur, seperti smelter nikel di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pabrik Semen di Kabupaten Kutai Timur dan Amonium Nitrat di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.



Gambar 2.54. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 1,12 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2024 disebabkan adanya pelaksanaan acara-acara besar di Kalimantan Timur pada tahun 2024 seperti perayaan HUT RI di IKN, MTQ Nasional ke XXX, *East Borneo Internasional Folklore Festival (EBIFF)*, dan peningkatan MICE yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif pada tahun 2024 sebesar 2,87 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,08 persen. Pemprov Kaltim dapat fokus pada pengembangan subsektor yang sudah dominan seperti Kuliner dan Fashion untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Subsektor Kriya dan Fashion menunjukkan bahwa produk-produk kreatif berbasis budaya lokal memiliki pasar yang cukup besar, sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor produk kreatif. Di sisi lain, subsektor yang masih kecil seperti Aplikasi, Game Developer, dan Film, Animasi, Video perlu mendapatkan perhatian lebih melalui insentif, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Subsektor seperti Arsitektur, Desain

Komunikasi Visual, dan Periklanan mungkin memerlukan program khusus untuk meningkatkan kontribusinya.

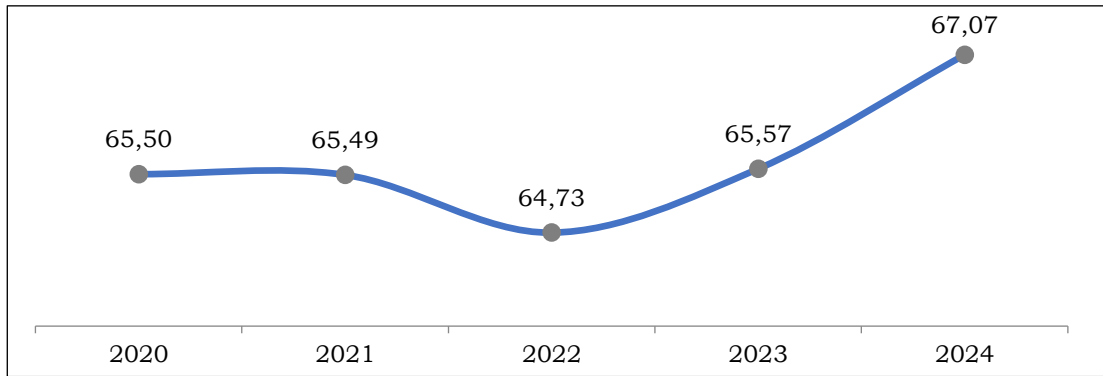
d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 2,04 persen mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 3,61 persen.

Kondisi kewirausahaan di Kalimantan Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang merata di seluruh wilayah. Meski provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan terus mengalami pembangunan ekonomi, sektor kewirausahaan masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi. Tantangan seperti akses terhadap modal, pengembangan keterampilan, serta infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kewirausahaan di wilayah ini. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan energi juga membuat diversifikasi ke sektor lain, seperti kewirausahaan, menjadi lebih lambat berkembang.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

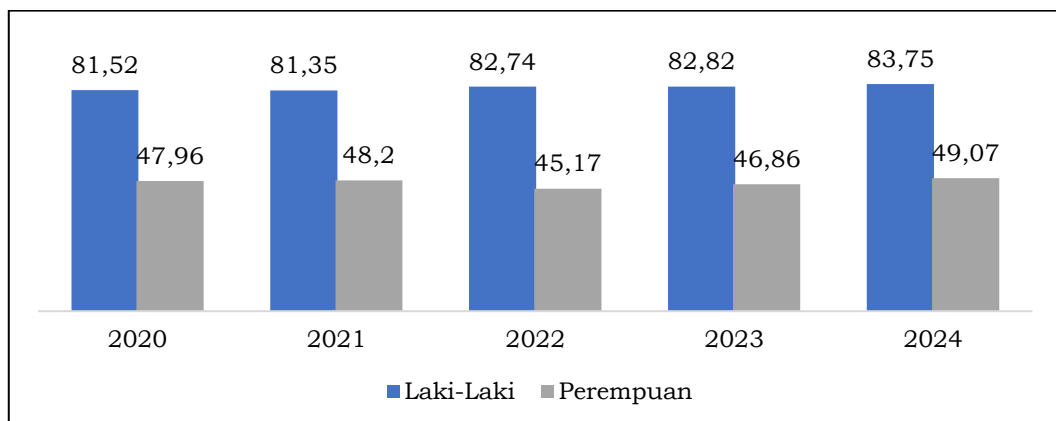
Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.



Gambar 2.55. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 persen di tahun 2024. Namun dalam perkembangannya terdapat penurunan angka TPAK di kurun waktu tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka TPAK menurun hingga 64,73 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesetaraan gender dapat digambarkan melalui keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah TPAK perempuan.



Gambar 2.56. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

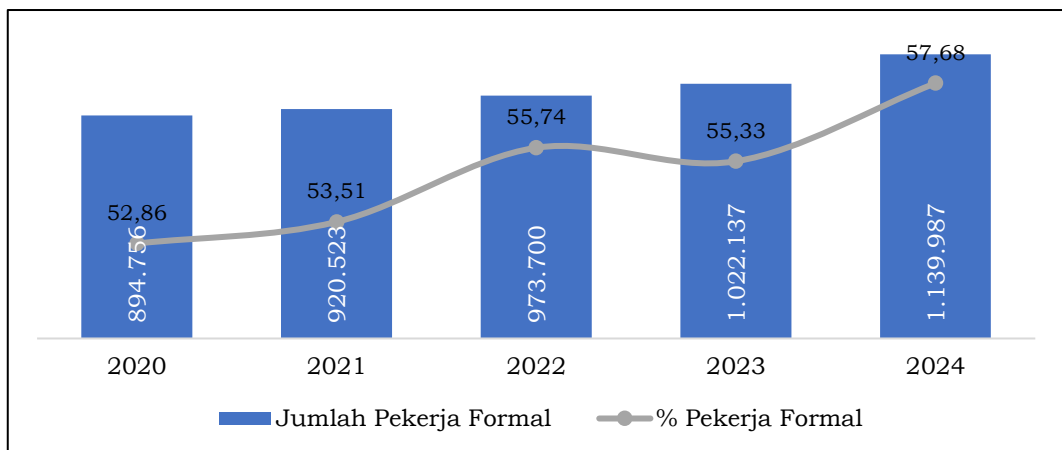
Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020–2024 angka TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan TPAK perempuan. Angka TPAK perempuan mengalami tren peningkatan di sepanjang tahun 2020–2024. Namun, pada tahun 2022 angka TPAK mengalami penurunan menjadi 45,17 persen. Hal ini disebabkan oleh pergeseran struktur angkatan kerja perempuan akibat dampak negatif pandemi Covid-19, dimana banyak yang memutuskan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Selanjutnya seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, angka TPAK perempuan kembali meningkat di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan TPAK perempuan, namun kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan. Hal ini menggambarkan adanya hambatan bagi perempuan untuk menjadi angkatan kerja, salah satunya dikarenakan masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik gender perempuan di Kalimantan Timur.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 25.155 orang, dimana 2.914 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 6.234 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi serta untuk meningkatkan

profesionalisme pekerja konstruksi, menjamin kualitas dan keselamatan dalam setiap tahap pembangunan.

f. Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Status pekerjaan yang menggambarkan hubungan antara pekerja dan tempat kerjanya yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal merupakan pekerja yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.



Gambar 2.57. Jumlah dan Rasio Pekerja Formal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

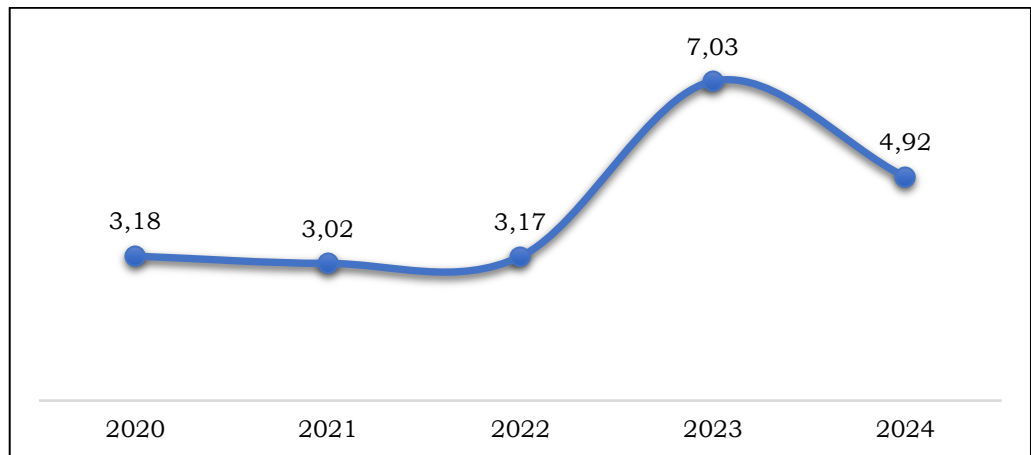
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah pekerja formal Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pekerja formal di Kalimantan Timur tahun 2024 didorong oleh pembangunan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan RDMP Balikpapan, serta tumbuhnya sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan yang menyerap banyak tenaga kerja bergaji tetap. Selain itu, program pelatihan vokasi dan pemagangan yang dilakukan pemerintah turut

meningkatkan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja ke sektor formal.

g. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur kontribusi sektor UKM terhadap perekonomian daerah. Pergerakan indikator ini dapat mencerminkan dinamika iklim usaha, keberhasilan program pemberdayaan, serta efektivitas kebijakan fasilitasi UKM yang diterapkan selama periode waktu tertentu.

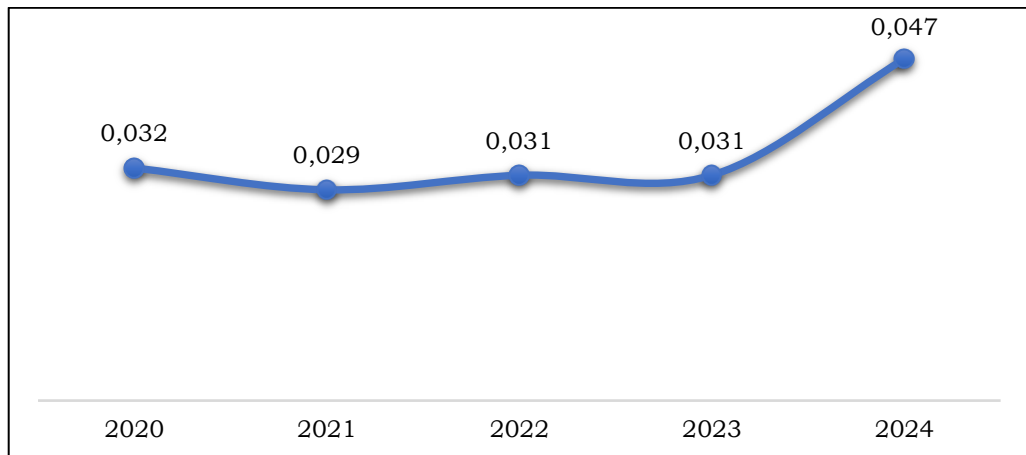


Gambar 2.58. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir proporsi jumlah UKM mengalami fluktuasi dengan kondisi menurun di tahun 2024 mencapai 4,92 persen. Pada tahun tahun 2023 proporsi jumlah UKM meningkat signifikan dengan capaian sebesar 7,03 persen yang kemungkinan besar merupakan hasil dari intervensi pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, dan peningkatan literasi digital pelaku UKM. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 4,92 persen. Perbedaan angka ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja sektor UKM, melainkan terjadi karena

adanya perbedaan sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator pada tahun tersebut. Perubahan metode pencatatan, basis data rujukan, atau pembaruan sistem pendataan dapat memengaruhi hasil akhir capaian, meskipun kondisi riil di lapangan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

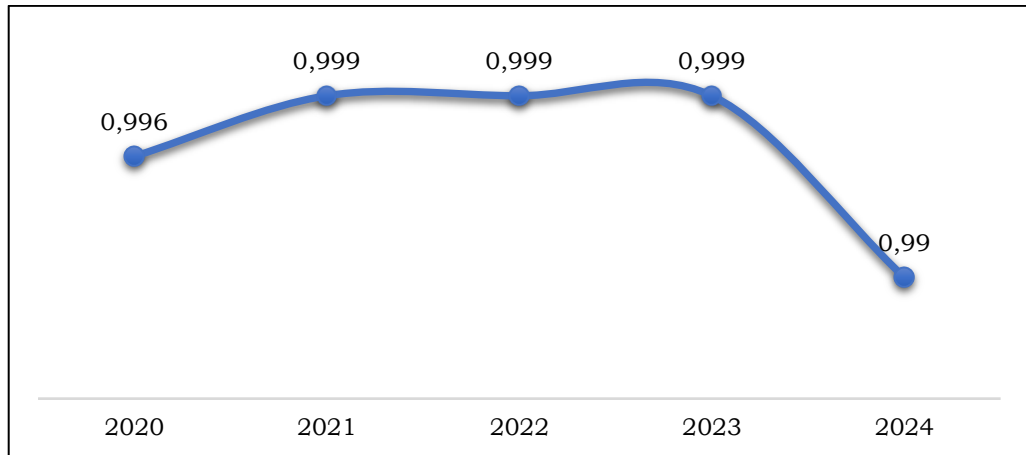
Selama 5 tahun terakhir, proporsi jumlah UKM Non Pertanian di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi di beberapa wilayah, dimana sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan fluktuasi yang bervariasi.



Gambar 2.59. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Fenomena ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor UKM di beberapa wilayah, seperti perubahan kebijakan ekonomi, persaingan pasar, atau faktor lokal lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Hal ini menekankan pentingnya dukungan dan kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat kontribusi usaha kecil dan menengah dalam perekonomian daerah.



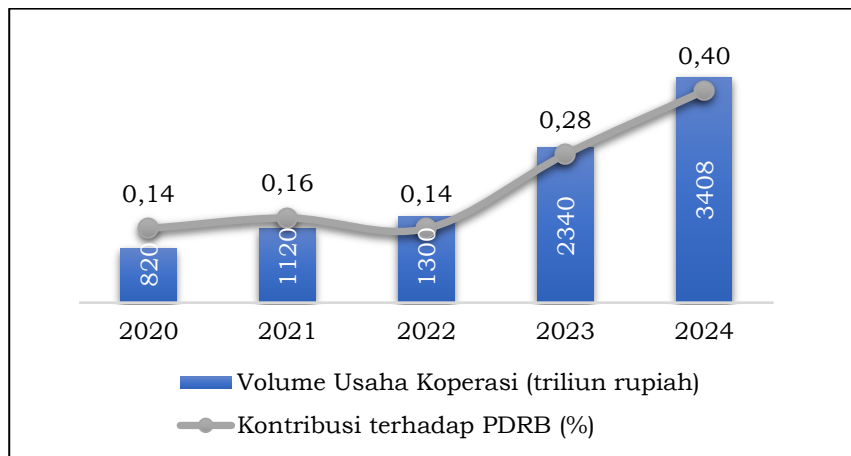
Gambar 2.60. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Proporsi industri kecil dan menengah di tingkat provinsi relatif stabil, selalu berada di sekitar angka 0,999. Ini menunjukkan bahwa proporsi IKM di Kalimantan Timur cenderung konsisten dan mendominasi sektor industri di provinsi ini. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren yang cukup konsisten (seperti Bontang dan Kutai Barat), sementara yang lain, seperti Kutai Kartanegara, menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti kebijakan pemerintah, perubahan industri utama di wilayah tersebut, atau dampak ekonomi eksternal. Beberapa daerah seperti Samarinda dan Paser menunjukkan stabilitas dan bahkan peningkatan, sementara daerah lain seperti Mahakam Ulu dan Berau menunjukkan stagnasi atau penurunan. Ini menandakan pentingnya kebijakan pemerintah dan dukungan sektor terkait untuk memperkuat sektor IKM di wilayah yang kurang berkembang.

h. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi sebagai modal utama dalam

peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.61. Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,34 triliun rupiah. Seiring dengan hal tersebut, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,28 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

i. *Return on Asset (ROA) BUMD*

Return on Asset (ROA) menjadi indikator penting untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena menunjukkan seberapa baik manajemen BUMD menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROA yang rendah bisa menjadi tanda adanya inefisiensi atau aset yang tidak produktif.

Tabel 2.40. *Return on Asset (ROA) BUMD (persen)*

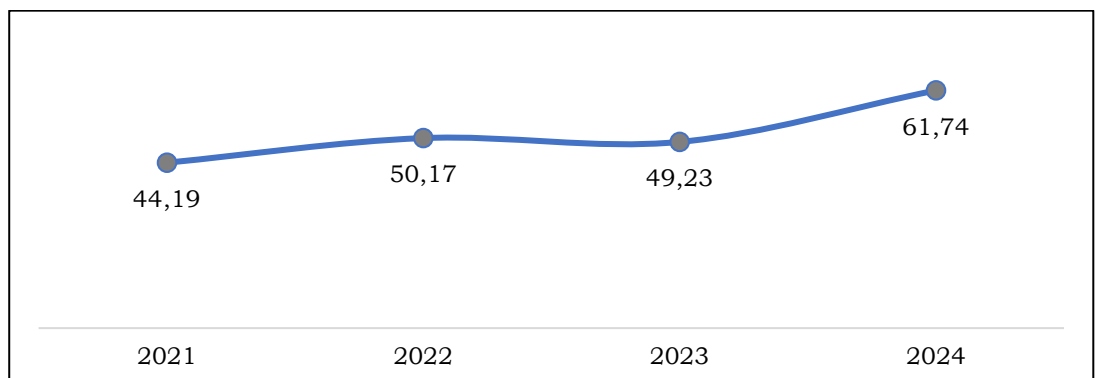
Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	ROA (persen)
2020	346.626.978.618	32.093.363.045.420	1,08
2021	548.298.971.125	35.291.428.257.166	1,55
2022	644.044.558.425	44.050.119.950.096	1,46
2023	709.620.264.375	51.597.214.487.495	1,38
2024	736.806.278.813	53.415.438.356.665	1,38

Sumber: Biro Ekonomi Setda Provinsi KALTIM, 2025

Secara keseluruhan, total ROA gabungan dari semua perusahaan BUMD menunjukkan penurunan dari 1,55 persen pada tahun 2021 menjadi 1,38 persen pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan laba bersih, pertumbuhan total aset yang cepat tidak diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan aset di beberapa perusahaan.

j. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID didasarkan pada variabel dan indikator tertentu yang digunakan untuk memetakan pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pemerintahan daerah. Aspek penilaian IID meliputi kecepatan inovasi, kemanfaatan inovasi, regulasi inovasi, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kualitas inovasi.



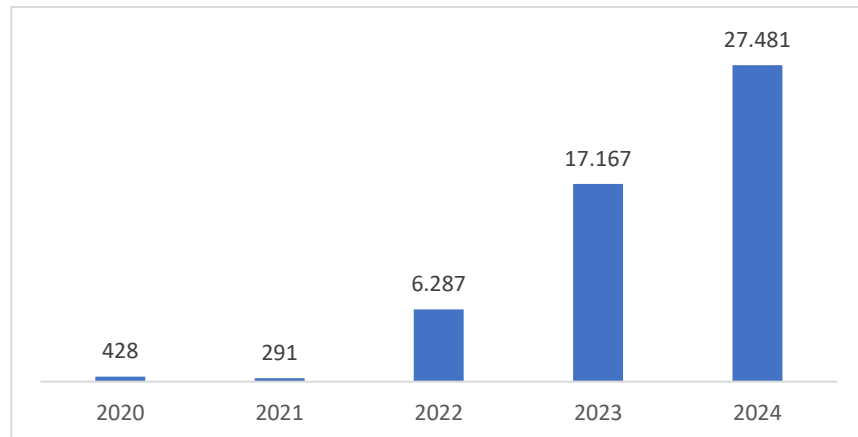
Gambar 2.62. Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: Kemendagri RI, 2025)

Skor Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 sebesar 61,74 termasuk kategori Sangat Inovatif dan berada pada peringkat ke 10 (sepuluh) dari 38 Provinsi. Peningkatan skor IID ini disebabkan mulai meningkatnya inisiasi pelaksanaan inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem inovasi di tingkat lokal juga diperlukan agar inovasi daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan Kalimantan Timur.

k. Produk Tersertifikat Halal

Peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal merupakan salah satu indikator penting dalam penguatan ekosistem industri halal di Kalimantan Timur. Dalam lima tahun terakhir, Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dihasilkan, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 produk, kemudian mengalami penurunan menjadi 291 produk pada 2021. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, Kalimantan Timur berhasil melakukan akselerasi besar dalam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan jumlah produk tersertifikasi menjadi 6.287 produk pada tahun 2022, kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 17.167 produk di tahun 2023. Kenaikan tajam ini merupakan hasil dari berbagai program strategis yang diluncurkan, seperti pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM, optimalisasi peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Halal Center di perguruan tinggi seperti

Universitas Mulawarman dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kampanye edukasi dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional.



Gambar 2.63. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber : BPJPH, 2025)

Capaian tertinggi hingga saat ini terjadi pada tahun 2024, di mana produk bersertifikat halal mencapai 27.481 produk. Lonjakan ini menandai puncak kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, pelaku UMKM, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif. Ini juga mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan daerah dalam menjadikan sektor halal sebagai penggerak ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

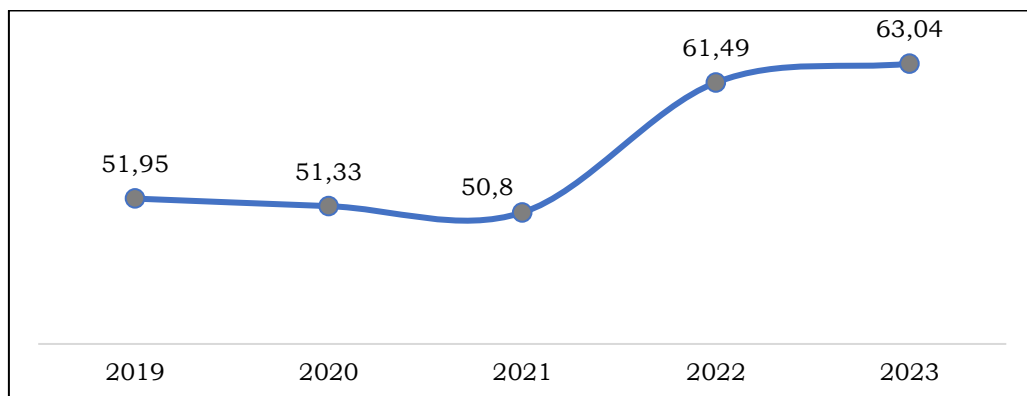
Meskipun pada tahun 2024 terlihat adanya sedikit perlambatan dari sisi target ke depan, namun capaian ini telah memberikan pijakan kuat bagi Kalimantan Timur untuk memasuki periode RPJMD 2025–2029 dengan optimisme tinggi. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan kuantitas produk bersertifikat halal, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan

sertifikasi, serta perluasan pasar produk halal lokal baik di tingkat nasional maupun ekspor.

2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi di provinsi ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau di tengah tekanan aktivitas ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan ibu kota negara baru.



Gambar 2.64. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023

(Sumber: Bappenas, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan. Kenaikan IEH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikarenakan adanya kenaikan nilai beberapa indikator pembentuk IEH seperti indikator bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas udara pada parameter NO₂, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per Kapita, rata-rata

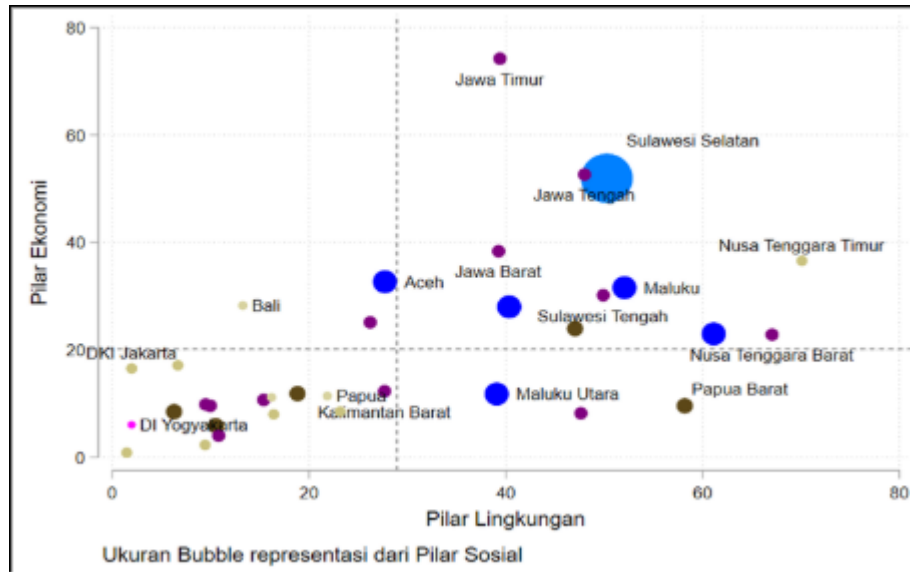
lama sekolah, serta penurunan nilai indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru, mengingat wilayahnya yang kaya akan sumber daya kelautan dan pesisir. Pembangunan ekonomi biru di Kaltim berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.

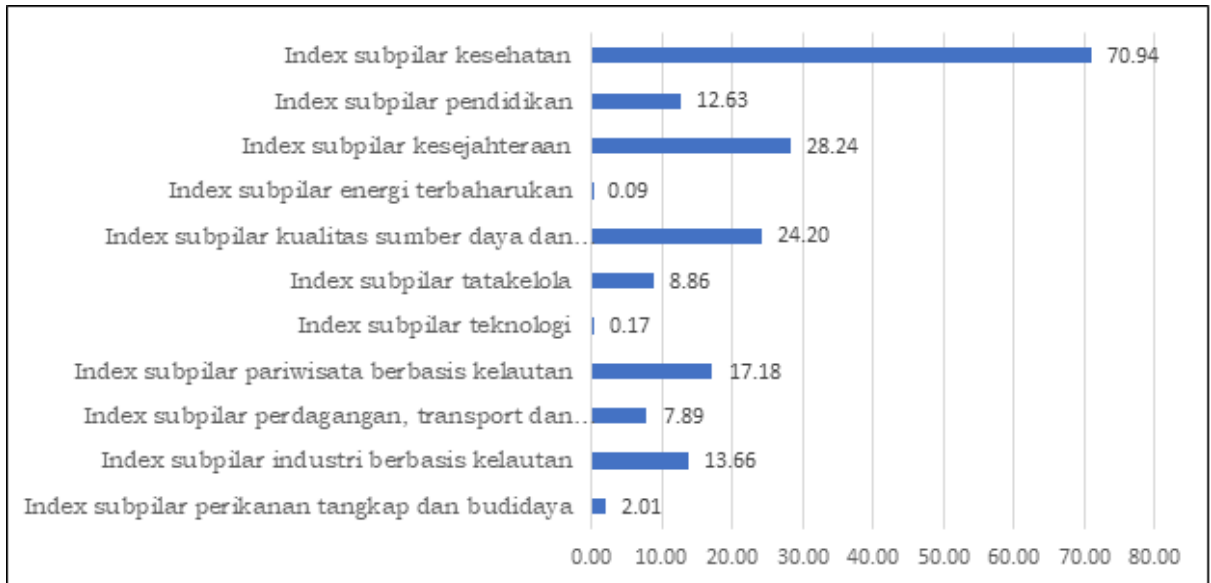
Untuk mengukur atau melihat kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional, maupun di tingkat provinsi disusunlah Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro (agregatif), yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.



Gambar 2.65. Analisa Kuadran IBEI 2023
(Sumber : BAPPENAS, 2024)

Dari Gambar diatas, IBEI Provinsi Kalimantan Tahun 2023 mencapai mencapai 29,07 (dibawah rata-rata Nasional yaitu 42,56). Capaian IBEI Provinsi Kaltim 2023 ini dibentuk oleh Indeks Pilar Ekonomi Kaltim sebesar 11,9 (dibawah rata-rata nasional sebesar 20), Indeks Pilar Lingkungan 18,8 (diatas rata-rata nasional sebesar 17), dan Indeks Sosial sebesar 57,75 (rata nasional sebesar 54).

Oleh karena itu perlu lebih ditekankan pada upaya meningkatkan skor di pilar lingkungan (kualitas sumber daya laut dan konserasi serta dan penerapan Energi Baru Terbarukan) dan Sektor Ekonomi (perikanan tangkap dan budidaya serta sub pilar perdagangan, transport dan logistik)



Gambar 2.66. Capaian Sub Pilar Penyusun IBEI Provinsi Kalimantan Timur 2023
(Sumber : BAPPENAS, 2024)

b. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW, Potensi Tenaga Air sebesar 2.118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3.112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13.479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*triliun cubic feet*).

Tabel 2.41. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

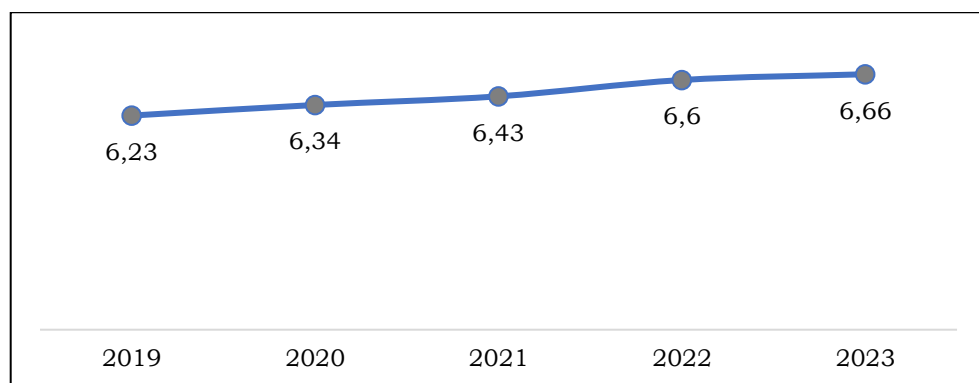
No	Uraian	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6,994,663.83	979,252.94	0.98	12.14%
2	Minyak Bumi	21,149,991.51	2,960,998.8	2.96	36.71%
3	Gas Bumi	21,437,322.89	3,001,225.20	3.00	37.21%
4	Batubara	8,036,082.68	1,125,051.58	1.13	13.95%
Total		57,618,060.91	8,066,528.53	8.07	100%

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 11,44 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

3. Transformasi Digital

Pertumbuhan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesenjangan digital, dan potensi pembangunan TIK suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan TIK. Terdapat tiga subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK memiliki skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.



Gambar 2.67. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS RI, 2024)

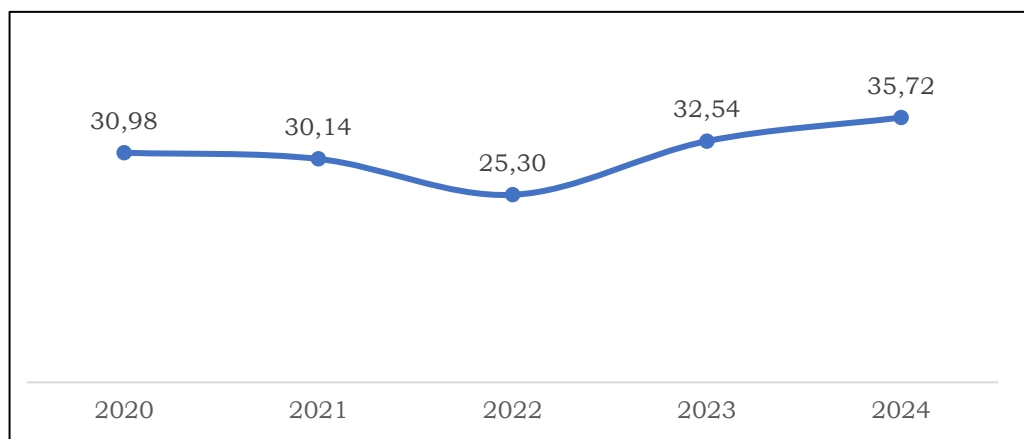
Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Timur memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Tren

kenaikan ini mencerminkan perkembangan infrastruktur TIK, aksesibilitas teknologi, dan kemungkinan peningkatan penggunaan TIK oleh masyarakat di Kalimantan Timur, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital di tingkat nasional maupun global.

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Rasio PDRB PMTB merupakan *share* PMTB terhadap PDRB Provinsi.



Gambar 2.68. Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

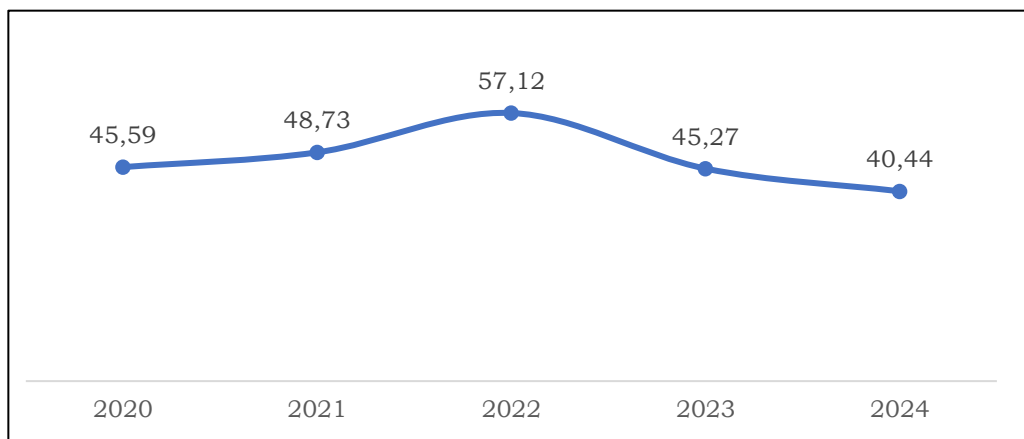
Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 35,72 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto disebabkan meningkatnya investasi di sektor

konstruksi dengan adanya pembangunan IKN dan berbagai proyek pembangunan serta revitalisasi infrastruktur di kabupaten dan kota.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.



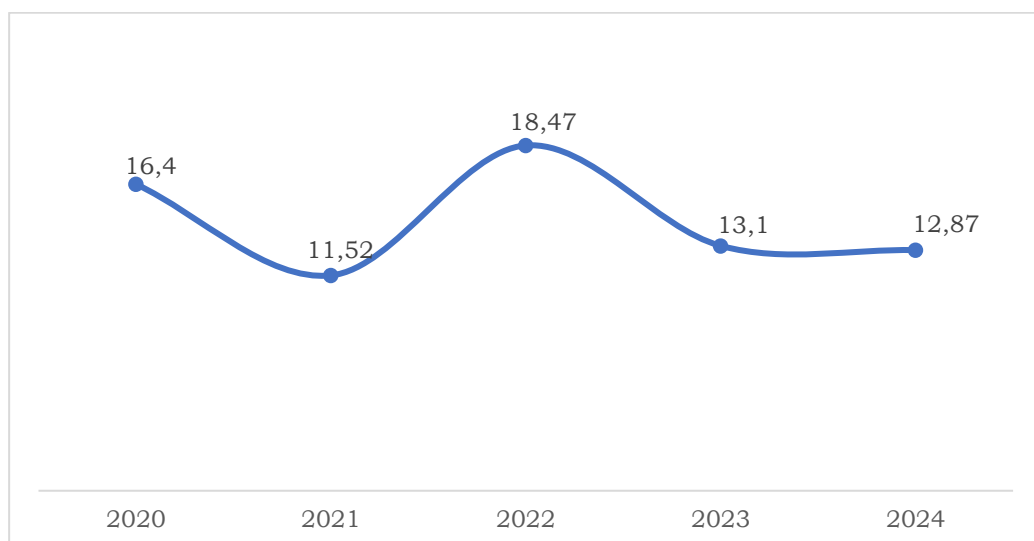
Gambar 2.69. Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan mencapai 40,44 persen di tahun 2024, namun masih mendominasi pada komponen pengeluaran PDRB. Turunnya Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan

Jasa dikarenakan mulai meningkatnya nilai PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

c. Disparitas Harga

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Bahkan menjelang Hari Besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relative tinggi. Disparitas harga antar wilayah tahun 2020-2024 relatif membaik, namun mengalami lonjakan di tahun 2022 hingga mencapai 18,47%. Tahun 2024 capaian disparitas harga antar wilayah adalah 12,87%. Semakin kecil capaian disparitas harga antar wilayah, maka semakin baik kondisi ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok.



Gambar 2.70. Disparitas Harga Antar Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim, 2025)

Penurunan disparitas harga tahun 2020-2021 sebanyak 4,88 persen dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi distribusi selama pandemi COVID-19. Tahun 2022 merupakan tahun dengan disparitas tertinggi di 5 (lima) tahun terakhir yang disebabkan oleh pemulihan pasca-pandemi, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga bahan pokok global. Kemudian terjadi perbaikan kondisi disparitas harga antar wilayah dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan tahun 2024. Disparitas harga masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai angka 7,39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 7,89 yang menandakan bahwa layanan infrastruktur di Kalimantan Timur berada pada kategori yang cukup baik. Nilai ini menggambarkan sebagian besar infrastruktur telah berfungsi optimal, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar layanan yang diberikan lebih merata dan efisien.

Beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas antara lain pada sektor transportasi, perumahan dan permukiman.

1) Infrastruktur Jalan

Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat kondisi jalan tidak mantap (dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat), baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk

dilakukan peningkatan. Sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

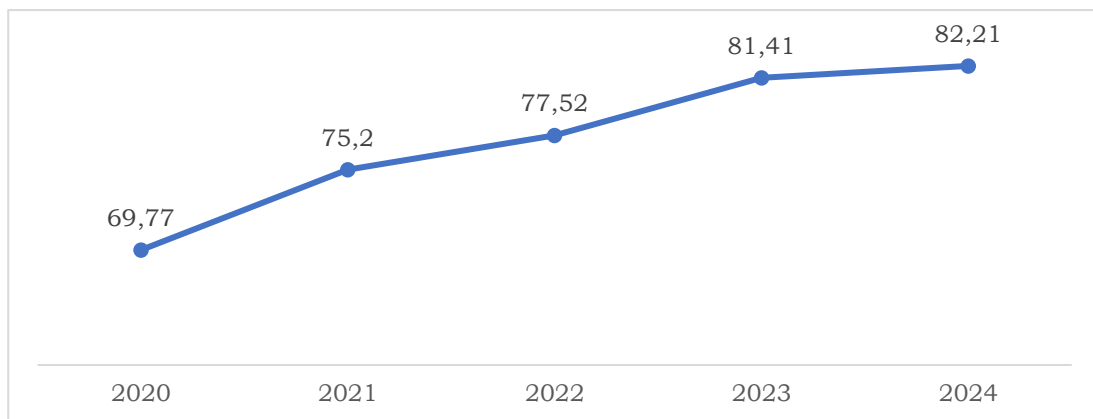
Tabel 2.42. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Status Jalan	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)	Total Panjang Jalan (Km)
1	Paser	176,16	75,15	102,96	650,92	1.005,19
2	KUBAR	643,42	260,74	509,12	110,16	1.523,44
3	KUKAR	524,86	827,79	490,96	349,42	2.193,02
4	KUTIM	234,79	55,85	78,62	736,50	1.105,77
5	Berau	395,43	280,21	26,04	984,40	1.686,08
6	PPU	302,68	25,13	37,75	655,49	1.021,46
7	MAHULU	90,25	7,63	155,6	484,05	737,59
8	Balikpapan	362,8	86,85	21,92	29,57	501,18
9	Samarinda	726,53	39,60	50,05	65,12	881,30
10	Bontang	90,14	62,64	39,59	2,96	195,34
11	Kalimantan Timur	321,38	450,46	55,55	111,46	938,85
12	Nasional	285,30	1.284,46	136,41	100,58	1.806,76

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 69,77%, sementara pada tahun 2024 telah mencapai 82,21%. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan, penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim - Talisayan dan ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp. 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian.

Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan jalan Akses Jembatan Sei. Nibung (Kutim), pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu), Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara) dan Pembangunan Jalan Sumbu IKN/Sotek – Bongan (Kubar – PPU)



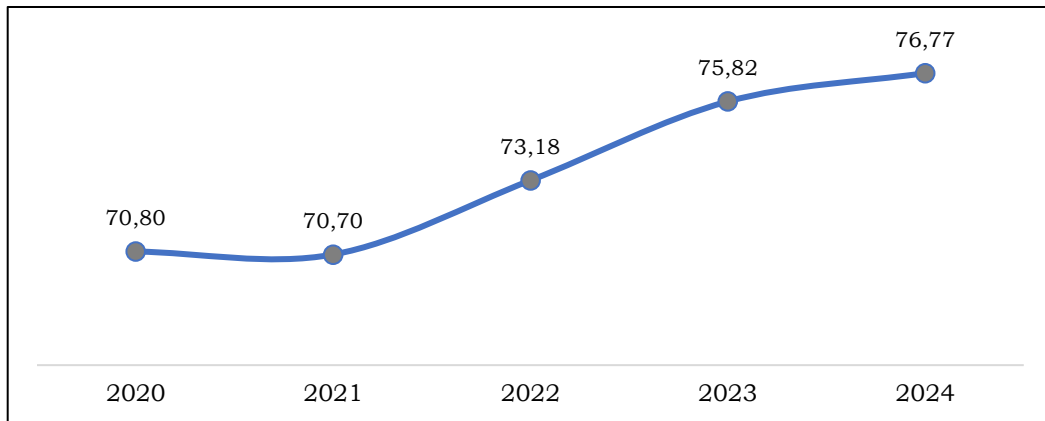
Gambar 2.71. Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1.000 km² dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

2) Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.



Gambar 2.72. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS RI, 2025)

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kalimantan Timur mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan permukiman tahun 2020-2024 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 26.732 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD kabupaten/kota

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.43. Data Backlog Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan		Penghunian	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Samarinda	124.578	Unit	51.069	Unit
2	Balikpapan	27.365	Unit	24.931	Unit
3	Bontang	11.993	Unit	23.585	Unit
4	Paser	13.242	Unit	6.418	Unit
5	PPU	10.290	Unit	6.318	Unit
6	Berau	21.700	Unit	2.390	Unit
7	Kutai Timur	41.538	Unit	11.615	Unit
8	Kutai Kartanegara	34.101	Unit	85.032	Unit
9	Kutai Barat	13.725	Unit	11.421	Unit
10	Mahakam Ulu	2.400	Unit	2.618	Unit
	Total	124.578	Unit	225.397	Unit

Sumber Data: Balai P2P Kalimantan II (2023)

Berdasarkan data backlog perumahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang dihimpun oleh Balai P2P Kalimantan II, masih terdapat tantangan dalam penyediaan hunian yang layak, khususnya terkait ketidakseimbangan antara aspek kepemilikan dan penghunian rumah. Total backlog kepemilikan tercatat sebesar 124.578 unit, sedangkan backlog penghunian mencapai 225.397 unit, yang menunjukkan bahwa persoalan keterhunian jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kepemilikan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perumahan ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan akses terhadap kepemilikan, tetapi juga pada penguatan aspek keterhunian melalui penyediaan infrastruktur dasar, fasilitasi pemanfaatan rumah yang belum dihuni, serta sinkronisasi program pusat dan daerah secara terpadu dan berbasis kebutuhan riil di masing-masing wilayah.

No	Kabupaten/Kota	2023		2024		Total Penanganan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	

1	APBD Provinsi Kalimantan Timur					
	Lokasi :	3	10	5	12	
a.	Samarinda	1	11	2	19	22
b.	Balikpapan					30
c.	Bontang			1	2	0
d.	Paser					2
e.	PPU					0
f.	Berau					0
g.	Kutai Timur		2	1	1	0
h.	Kutai Kartanegara			1	1	3
i.	Kutai Barat					1
j.	Mahakam Ulu					
	Total Penanganan		4	23	10	35

Tabel 2.44. Capaian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024

Sumber Data: Dinas PUPRPERA Bidang Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data capaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang didanai melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2023–2024, dari total 58 lokasi PSU yang berhasil ditangani, proporsi terbesar terjadi di Kota Balikpapan dengan 30 lokasi (lebih dari 50% total penanganan), disusul oleh Kota Samarinda dengan 22 lokasi. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten lainnya, seperti Bontang, PPU, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu, menunjukkan nihilnya realisasi penanganan PSU, yang dapat mencerminkan keterbatasan usulan dari daerah, kapasitas pelaksanaan, maupun belum optimalnya sinergi lintas sektor. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dari sisi target dan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tren penguatan komitmen terhadap pemenuhan infrastruktur dasar perumahan rakyat di tingkat provinsi. Ke depan, kebijakan penyediaan PSU perlu lebih diarahkan pada pendekatan berbasis kebutuhan lokal, memperhatikan aspek keterjangkauan dan keberlanjutan layanan permukiman, serta

memperkuat integrasi antara program provinsi dan usulan prioritas kabupaten/kota dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.45. Capaian SPM Bidang Perumahan Dan Permukiman 2023 - 2024

No	2023		2024	
	Jenis Penanganan	Keterangan	Jenis Penanganan	Keterangan
1	Identifikasi Lahan - lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan	Belum ada penanganan fisik	Data masih sama dengan tahun 2023	
2	Identifikasi Rumah Terkena Relokasi Program Provinsi	Belum ada penanganan fisik		
3	Identifikasi Wilayah Kumuh / Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Provinsi Kalimantan Timur	Belum ada penanganan fisik		

Sumber: Dinas PUPRPERA Bidang Perumahan dan Permukiman, 2024

Capaian SPM bidang perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Timur pada 2023–2024 menunjukkan belum adanya penanganan fisik. Seluruh kegiatan masih berada pada tahap identifikasi lahan relokasi, rumah terdampak relokasi, serta wilayah kumuh di bantaran sungai. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi SPM sebagai instrumen pemenuhan hak atas hunian layak. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sinergi antarperangkat daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta perencanaan berbasis data yang lebih operasional agar pelaksanaan SPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata terhadap kondisi perumahan dan permukiman di daerah.

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan

oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Tabel 2.46. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

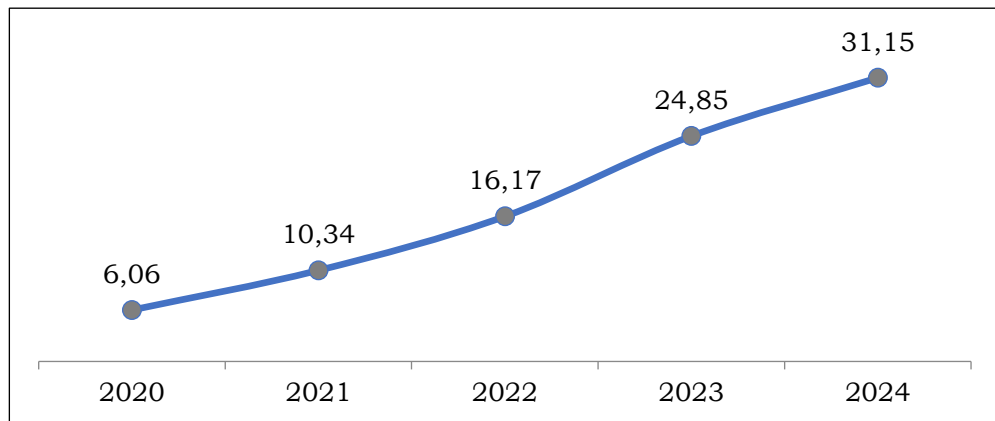
No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			Luas Kewenangan Provinsi Berdasarkan BA Verifikasi	SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota		
1	Paser	180,74	35,06	8,72	28,74	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	933,37	73,56	38,69		No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	92,61	25,49	15,5	25,49	No. 105/SK-BUP/HK/2023
4	KUTIM	74,77	310,14	172,03	270,62	No. 600/K.652/2023
5	Berau	0	25,79	2,47		No. 30 Tahun 2020
6	PPU	0	39,4	0		No.593.33/212/2023
7	MAHULU	49,2	22,52	49,98		No. 600/650/K.126/2023
8	Balikpapan	52,99	21,78	29,92	21,78	No. 188.45-203/2023
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	19,13	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	18,3	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1437,91	611,34	349,55		

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

b. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Klasifikasi status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.



Gambar 2.73. Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2025)

Persentase desa mandiri di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2021-2024 mengalami peningkatan dengan capaian 31,15 persen di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

c. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB wilayah kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peran penting masing-masing kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga kota utama yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB provinsi. Balikpapan menyumbang sekitar 17,90 persen, menjadikannya kota dengan kontribusi tertinggi karena perannya sebagai pusat industri migas dan perdagangan. Disusul oleh Samarinda, ibu kota provinsi, dengan kontribusi sekitar 11,48 persen yang dominan di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Sementara itu, Bontang berkontribusi sebesar 7,98 persen, didorong oleh aktivitas industri petrokimia dan pupuk.

Tabel 2.47. Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024

No	Kota	2020	2021	2022	2023	2024
----	------	------	------	------	------	------

1	Balikpapan	17,08	15,99	13,82	16,96	17,90
2	Samarinda	10,94	10,22	9,05	10,58	11,48
3	Bontang	9,15	8,32	6,85	8,07	7,98
Kontribusi Wilayah Kota		37,17	34,53	29,72	35,61	37,36

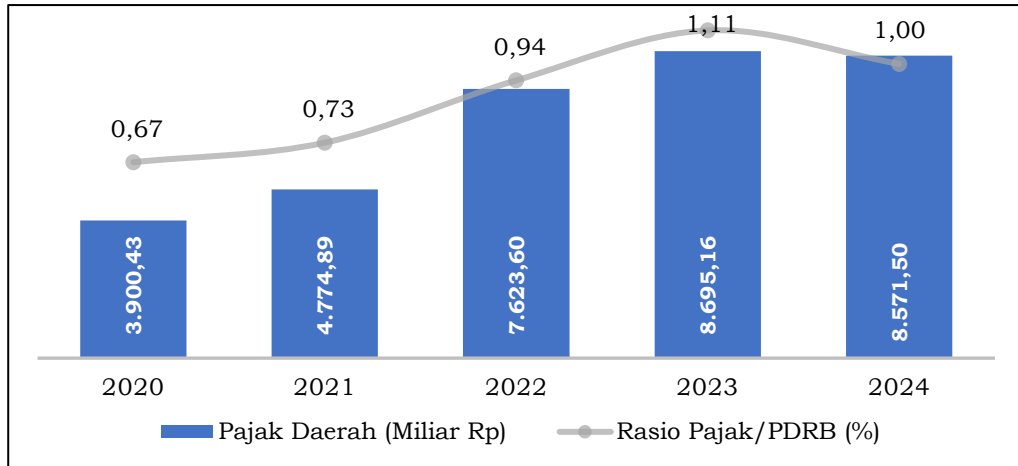
Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

Kontribusi yang signifikan dari kota-kota ini mencerminkan ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada sektor-sektor industri ekstraktif dan jasa. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah provinsi ini, diharapkan terjadi diversifikasi ekonomi yang mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah kabupaten lainnya. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengoptimalkan potensi kota-kota besar sambil memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah lain, sehingga kontribusi PDRB dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi Kalimantan Timur.

6. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.



Gambar 2.74. Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur

Tahun 2020–2024

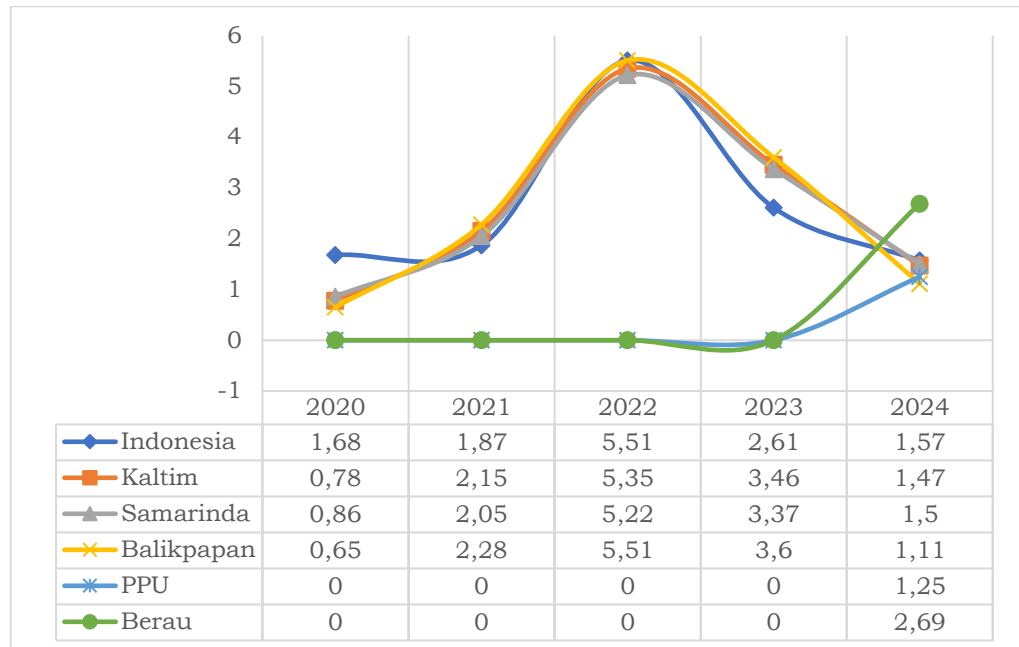
(Sumber: BAPENDA dan BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren fluktuasi hal ini disebabkan oleh tidak berkolerasinya antara pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah yang dibatasi oleh kewenangan pengelolaan pajak Provinsi dan Kab/Kota. Apabila pertumbuhan PDRB lebih besar maka Rasio Pajak akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan nilai pajak daerah tinggi maka Rasio Pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga perlu upaya dalam hal mengoptimasi penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah provinsi yang dilakukan dengan peningkatan nilai pajak bahan bakar yang berkontribusi dominan, optimalisasi pendataan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan penagihan piutang pajak dan digitalisasi layanan yang juga berperan dalam mendorong kepatuhan serta ketaatan pajak.

b. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Sebagai upaya menekan inflasi daerah dilakukan melalui strategi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.



Gambar 2.75. Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

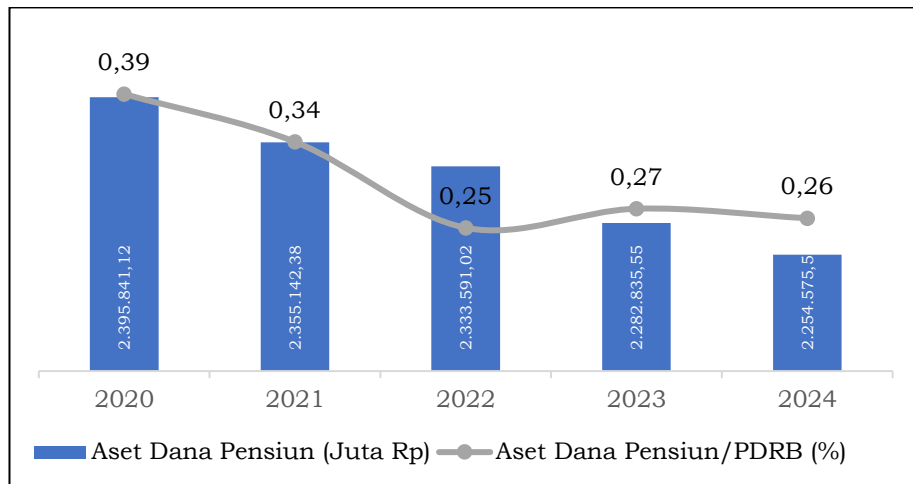
Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun 2024 laju inflasi sebesar 1,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran kesehatan dan perawatan probadi dan jasa lainnya.

Pada tahun 2024, terdapat wilayah penambahan perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 1,11 persen, dan tertinggi yaitu di Kabupaten Berau sebesar 2,69 persen. Secara keseluruhan

tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional sebesar 1,57 persen.

c. Aset Dana Pensiun

Aset dana pensiun berasal dari iuran peserta dan/atau pemberi kerja, hasil pengembangan investasi serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Besarnya aset dana pensiun mencerminkan kemampuan lembaga dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta di masa pensiun, sehingga pengelolaan aset yang aman, produktif dan menguntungkan menjadi sangat penting.



Gambar 2.76. Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

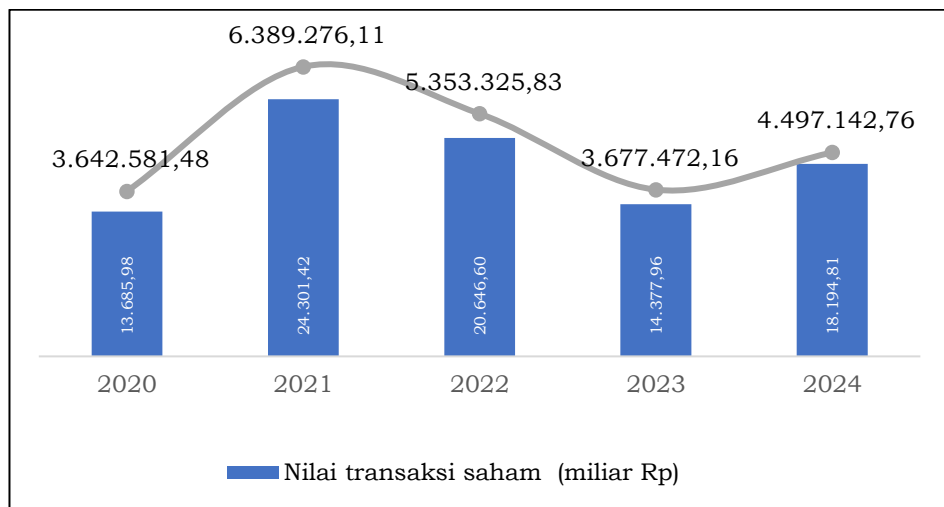
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aset dana pensiun mengalami penurunan sekitar 741 miliar rupiah yang diikuti dengan penurunan persentase aset dana pensiun terhadap PDRB yang menunjukkan bahwa kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan.

Penurunan nilai aset ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan kinerja investasi, pencairan dana pensiun yang lebih besar daripada iuran yang masuk, atau perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi perkembangan aset dana pensiun. Untuk menjaga keberlanjutan dan kontribusi Dana Pensiun terhadap perekonomian Kalimantan Timur, diperlukan strategi pengelolaan aset

yang lebih optimal, termasuk diversifikasi portofolio investasi dan peningkatan kepesertaan.

d. Nilai Transaksi Saham per Kapita

Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal

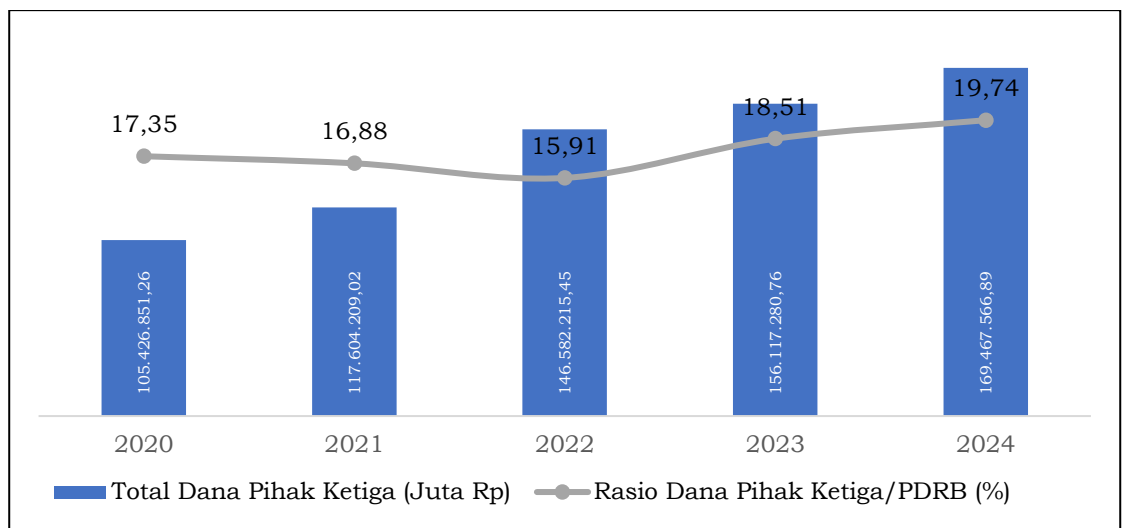


Gambar 2.77. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai transaksi saham per kapita mengalami fluktuasi. Pergerakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika ekonomi nasional dan global, harga komoditas utama (misalnya batu bara dan minyak), tingkat kepercayaan investor, serta likuiditas di pasar modal. Kenaikan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya optimisme atau pemulihan minat investasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, memantau indikator ini penting untuk memahami perkembangan iklim investasi dan potensi pergerakan ekonomi Kalimantan Timur ke depan.

e. Total Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari berbagai jenis simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun oleh perbankan dari nasabah di Provinsi Kalimantan Timur. DPK Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem perbankan daerah semakin tinggi. Meningkatnya pertumbuhan DPK di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Hal ini juga terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempercepat arus investasi dan memicu peningkatan simpanan dari masyarakat maupun perusahaan.

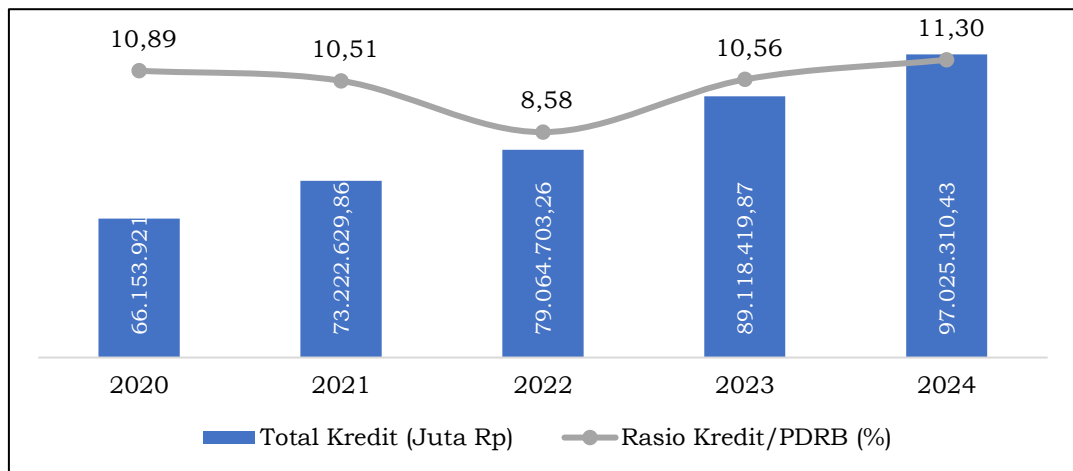


Gambar 2.78. Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio DPK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur menggambarkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh perbankan dibandingkan dengan total output ekonomi daerah tersebut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk simpanan di perbankan, memberikan potensi likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

f. Total Kredit

Total kredit di Kalimantan Timur mencerminkan aktivitas penyaluran pinjaman oleh perbankan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Kalimantan Timur. Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek IKN dan pertumbuhan sektor pertambangan serta energi, penyaluran kredit mengalami peningkatan signifikan dengan nilai terakhir 97,03 triliun rupiah pada tahun 2024. Kredit tersebut sebagian besar disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertambangan, konstruksi dan perdagangan, yang memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, permintaan kredit konsumsi juga mengalami peningkatan, yang disebabkan tumbuhnya daya beli masyarakat. Total kredit yang lebih tinggi ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap prospek ekonomi Kalimantan Timur di tengah dinamika pembangunan yang pesat semakin besar.



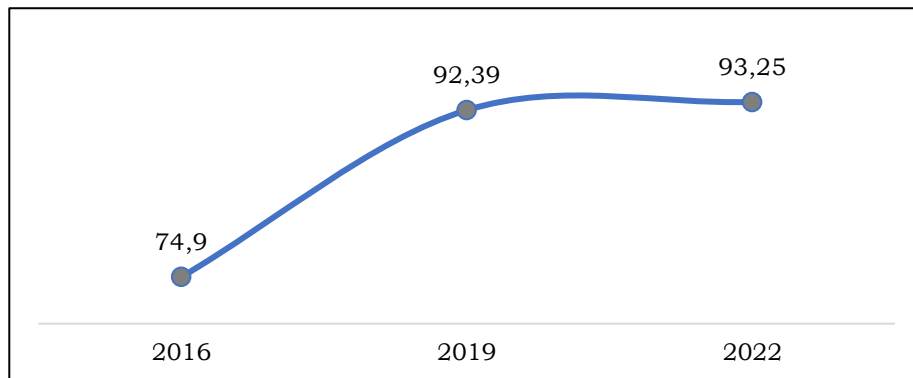
Gambar 2.79. Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio total kredit terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan seberapa besar fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam penyaluran pendanaan pada kegiatan usaha di Kalimantan Timur. Peningkatan rasio kredit terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor keuangan semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan likuiditas yang

lebih besar kepada sektor-sektor produktif, terutama di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

g. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.



Gambar 2.80. Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2022
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2023)

Perkembangan inklusi keuangan di Kalimantan Timur dalam tiga periode, yaitu pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan berada di 74,9 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 92,39 persen pada tahun 2019. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana inklusi keuangan mencapai 93,25 persen. Perkembangan ini mencerminkan adanya percepatan dalam akses layanan keuangan oleh masyarakat melalui perluasan akses ke layanan keuangan melalui teknologi digital dan upaya literasi keuangan.

h. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur efektivitas tata kelola zakat di daerah, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjadi

indikator strategis dalam mendorong penguatan peran zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah di daerah.

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori “Stabil” dengan skor indeks sebesar 0,53. Skor ini menempatkan Kalimantan Timur dalam klasterisasi potensi “Menengah” berdasarkan pengelompokan nasional, dengan estimasi pertumbuhan indeks tahunan sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat di Kalimantan Timur telah berada pada jalur yang baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi (baik atau sangat baik).

Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan dan operasional, pengelolaan zakat di Kalimantan Timur baik oleh BAZNAS Provinsi maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah relatif mapan dalam aspek tata kelola dan pelayanan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain adalah optimalisasi penghimpunan zakat, penguatan sistem pendistribusian yang tepat sasaran, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap zakat produktif.

Selain itu, pertumbuhan indeks yang relatif kecil (0,03) menandakan perlunya inovasi yang lebih progresif dalam pengelolaan zakat, seperti pemanfaatan teknologi digital, sinergi lintas sektor (khususnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha), serta penguatan kapasitas amil zakat. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 2.48. Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Dimensi Makro	Dimensi Mikro	IZN	Interpretasi
Paser	0,8	0,34	0,48	Stabil
KUKAR	0,71	0,25	0,39	<i>Developing/Berkembang</i>
Berau	0,71	0,74	0,73	<i>Growth/Bertumbuh</i>
KUBAR	0	0	0	
KUTIM	0,77	0,61	0,66	<i>Growth/Bertumbuh</i>
PPU	0,63	0,26	0,37	<i>Developing/Berkembang</i>
MAHULU	0	0	0	
Balikpapan	0,59	0,65	0,63	<i>Growth/Bertumbuh</i>
Samarinda	0,52	0,36	0,41	Stabil

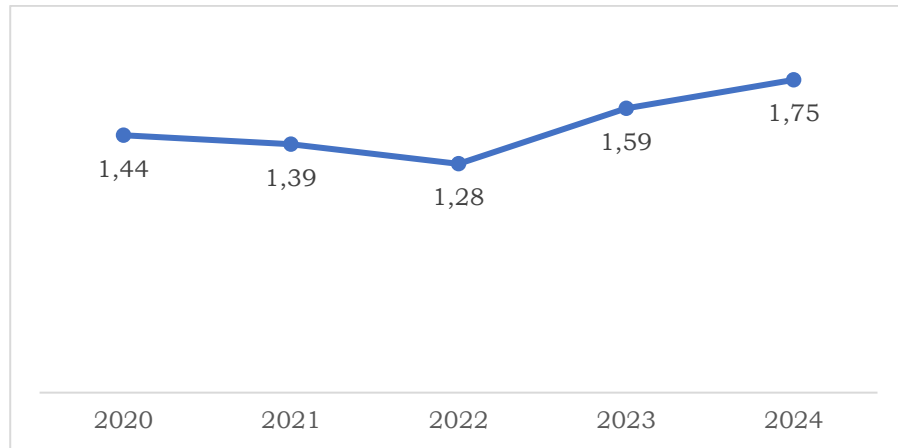
Kabupaten/Kota	Dimensi Makro	Dimensi Mikro	IZN	Interpretasi
Bontang	0	0	0	
Kalimantan Timur	0,8	0,41	0,52	Stabil

Sumber : BAZNAS, 2025

Adapun IZN tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Berau, sedangkan IZN terendah di ialah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan memperhatikan potensi Kalimantan Timur yang cukup besar dalam hal sumber daya manusia dan ekonomi, serta posisi strategis sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan tata kelola zakat menjadi prioritas strategis dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

g. Rasio Aset Perbankan Syariah

Rasio aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor keuangan syariah dalam struktur ekonomi daerah. Rasio ini juga menggambarkan sejauh mana perkembangan perbankan syariah mampu mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dalam periode tahun 2020–2024, Kalimantan Timur mencatatkan tren pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio aset perbankan syariah terhadap PDRB tercatat sebesar 1,44 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,21 persen. Kenaikan ini terjadi di tengah masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang justru menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk menunjukkan ketahanan dan daya adaptasi.



Gambar 2.81. Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber : OJK, 2025)

Namun pada 2021 dan 2022, terjadi sedikit penurunan berturut-turut menjadi 1,39 persen dan 1,28 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum optimalnya ekspansi pembiayaan syariah, konsolidasi internal lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya persaingan dengan perbankan konvensional. Selain itu, peningkatan PDRB daerah yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah juga turut mempengaruhi penurunan rasio tersebut.

Pada 2023, rasio ini kembali meningkat menjadi 1,59 persen, dan dilanjutkan dengan capaian 1,75 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa kebijakan penguatan industri keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Beberapa faktor pendukungnya antara lain bertambahnya unit layanan syariah dan kantor cabang pembantu perbankan syariah di daerah, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, khususnya pada sektor UMKM serta dukungan regulasi dari otoritas jasa keuangan dan pemerintah daerah yang mendorong ekosistem ekonomi syariah.

Secara umum, capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menjadi landasan penting bagi arah kebijakan

RPJMD 2025–2029 dalam memperkuat peran keuangan syariah sebagai salah satu pilar inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Birokrasi

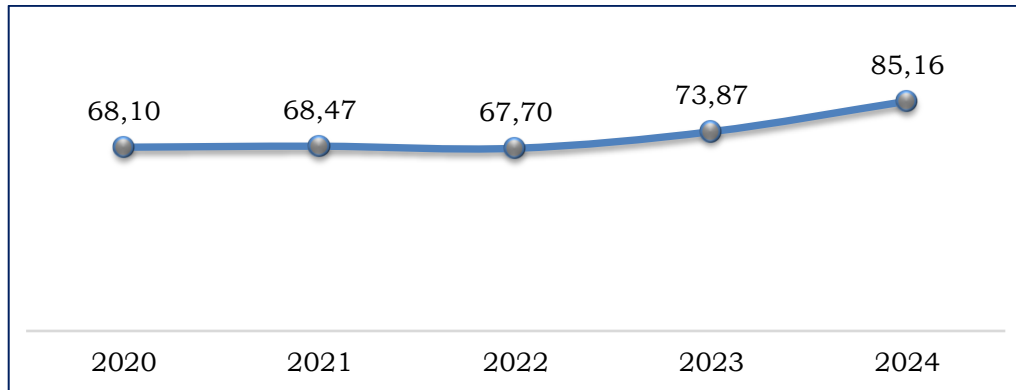
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahannya tentang RB adalah sebagai berikut :

- 1) Responsivitas Birokrasi, yaitu : Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat;
- 2) Reformasi Pelayanan Publik, yaitu : Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Efektivitas Alokasi Anggaran, yaitu : Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat perbaikan pendidikan dan akses ke layanan dasar;
- 4) Pelayanan Berbasis Teknologi, yaitu : Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat;

- 5) Pengelolaan ASN, yaitu : Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi;
- 6) Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran, yaitu : Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran;
- 7) Percepatan Implementasi Kebijakan, yaitu : Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif;
- 8) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga, yaitu : Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan nasional, dan swasembada pangan serta energi.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar di bawah ini disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.82. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang berbeda. Evaluasi Reformasi Birokrasi sebelum tahun Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan peraturan turunannya, terdapat perubahan mekanisme, instrumen, dan hasil penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

b. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu serta penataan database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2024 nilai IRH Kalimantan Timur berada pada angka 97,08 dengan kategori AA (Istimewa). Faktor yang menjadi pendukung kenaikan yang signifikan adalah dengan pemenuhan keterisian data yang dibutuhkan dan manajemen pengelolaan tata hukum pemerintah yang meningkat.

c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 4 domain pembentuk indeks SPBE yaitu Kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Tabel 2.49. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,14	2,22	2,11	2,91	3,79

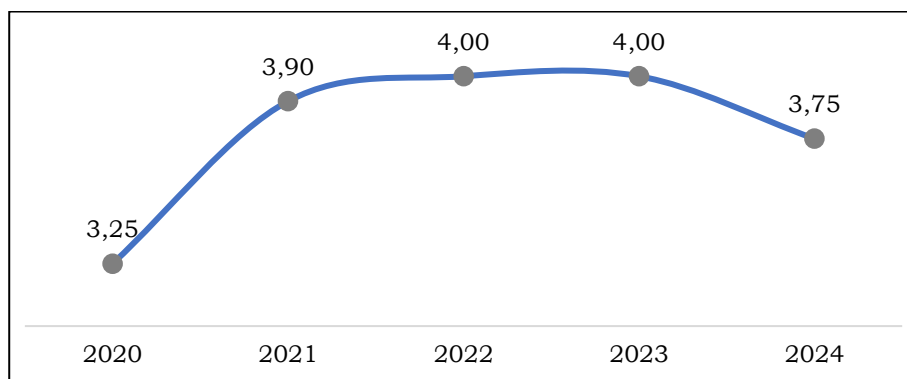
Sumber : Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2021, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Pada tahun 2024 nilai SPBE Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 3,79 dan masuk dalam predikat sangat baik. Beberapa area yang masih perlu perbaikan antara lain pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 2 (dua) daerah yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat "sangat baik", 6 (enam) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "baik" yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kota Bontang, 3 (tiga) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "cukup" yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Penilaian IPP diukur menggunakan 6 (enam) aspek yakni Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

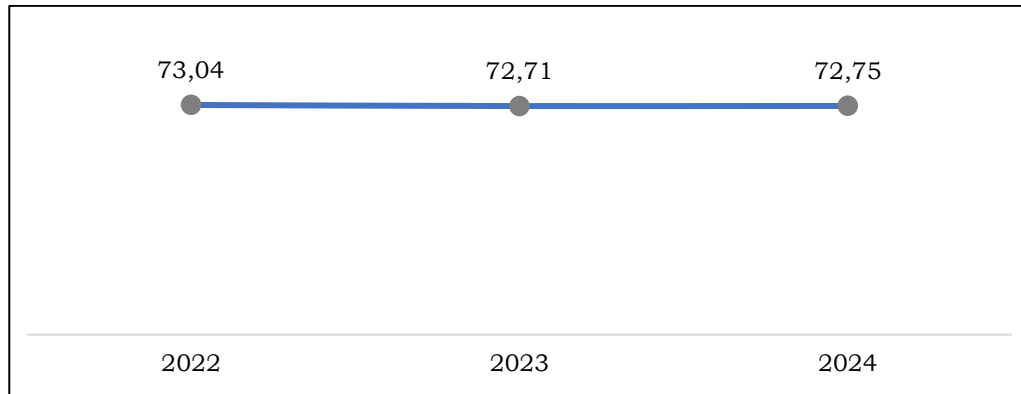


Gambar 2.83. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 masih berada pada nilai 4,00 dari skala 5,00, atau berada pada kategori B (Baik). Namun pada tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Indeks Pelayanan Publik senilai 3,75. Belum maksimalnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kalimantan Timur disebabkan oleh faktor belum diterapkannya kebijakan pelayanan namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belum optimalnya penerapan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

e. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah pusat dan daerah sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Penilaian IIN bersumber dari penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper (pakar/ahli).



Gambar 2.84. Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024
(Sumber: KPK, 2025)

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai IIN Kalimantan Timur tahun 2024 masih pada angka 72,75 dengan kategori tingkat integritas "rentan". Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai IIN di tahun 2023 adalah tingginya biaya demokrasi yang tinggi. Pemerintah daerah telah melaksanakan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran ASN tentang etika anti-korupsi, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan integritas pemerintah.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

a. Penegakan Peraturan Daerah

Perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak terlepas dari penegakan produk hukum peraturan daerah. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya penegakan terhadap 3 (tiga) peraturan daerah dan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) peraturan daerah.

Tabel 2.50. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	Nomor Peraturan Daerah	Nama Peraturan Daerah
1.	2022	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	Pembina Pasar Tradisional dan Pasar Modern
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016	Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	2023	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017	Jalan Umum, tambang batu bara dan kelapa sawit
		Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012	Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur
3.	2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika
		Perda Nomor 10 Tahun 2012	Jalan Umum, Tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2025

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah di Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya tenaga personil Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur baik PPNS maupun anggota di lapangan, kurangnya pemenuhan mutu layanan minimal berupa pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil

Satpol PP dan Satlinmas, kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku Peraturan Daerah didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda.

b. Pelaksanaan Aksi HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).

Dalam upaya untuk mengimplementasikan P5 HAM, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi pelaksanaan RANHAM daerah oleh Pemerintah Pusat diukur dengan indikator Capaian Aksi HAM.

Tabel 2.51. Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Aksi HAM Daerah	100	61,77	76,21	63,96	64,3

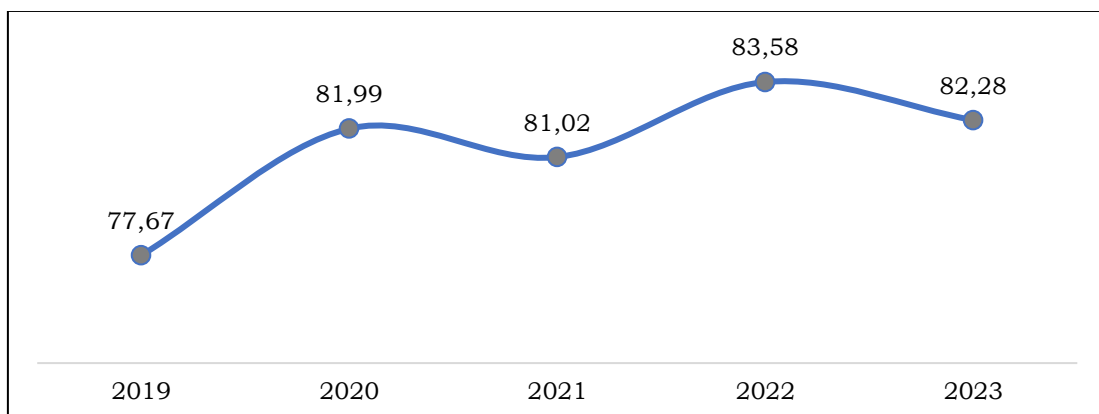
Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi KALTIM, 2025

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian aksi HAM di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2023 hanya sebesar 63,96 persen dari sebelumnya mencapai 100 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan nilai 64,3 persen. Hal yang menyebabkan turunnya capaian aksi HAM daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif

terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya juga masih kurangnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta

c. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 82,28 persen pada tahun 2023 dan di level nasional berada pada peringkat kelima setelah Provinsi Bali (85,13), DKI Jakarta (84,57), D.I Yogyakarta (83,88), dan Jawa Barat (83.04). Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,30 poin dibandingkan nilai pada tahun 2022. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 79,51.



Gambar 2.85. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

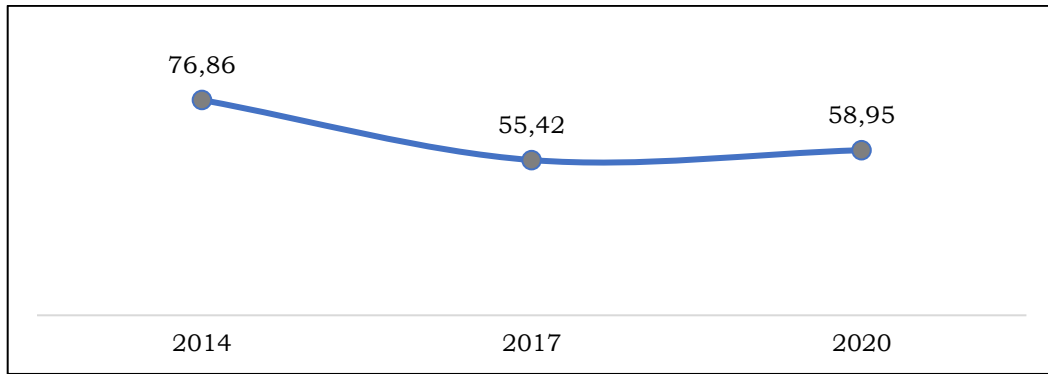
Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi

besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Kalimantan Timur tahun 2023, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya mengalami penurunan signifikan, yaitu aspek kebebasan pada indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan yang mengalami penurunan sebesar 23,60 poin dari tahun 2022 dengan nilai 76,40 dan pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yang mengalami penurunan pada nilai 72,73 atau turun 18,18 dari tahun 2022.

d. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mencerminkan tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingginya persentase penduduk yang merasa aman menandakan lingkungan yang kondusif, sedangkan rendahnya persentase bisa menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya.



Gambar 2.86. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020
(Sumber: BPS RI, 2024)

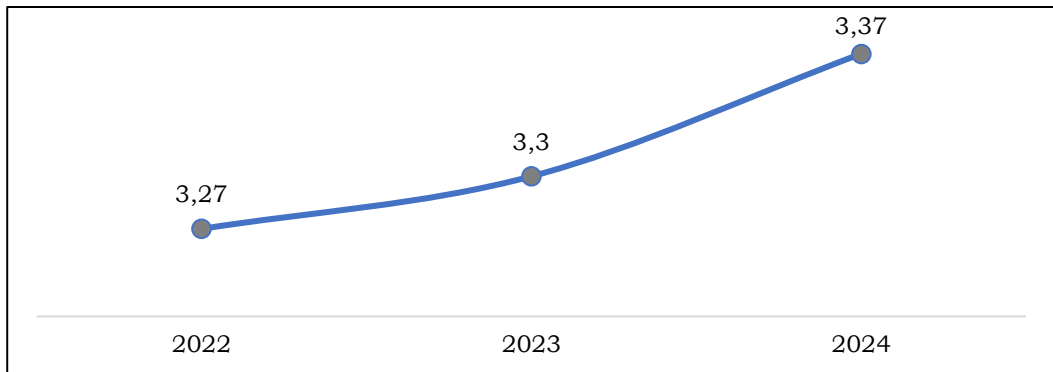
Pada kurun waktu tahun 2014–2020, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya baru mencapai 58,95 persen, atau turun dari tahun 2014 yang sebesar 76,86 persen. Capaian kinerja ini juga berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 62,62 persen. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya layanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pos dan petugas pengamanan di setiap RT, kelurahan ataupun kecamatan masih kurang, minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi pengetahuan kepada masyarakat terhadap layanan trantibumlinmas dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD menggunakan 4 (empat) komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 (empat) kerangka pengukuran,

yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, diantaranya pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar pasar tenaga kerja, pilar kapabilitas inovasi dan lain-lain.



Gambar 2.87. Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2024
(Sumber: BRIN, 2025)

Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,37 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, namun skor IDSD Kalimantan Timur masih berada di bawah skor IDSD Nasional yang sebesar 3,43. Terdapat beberapa pilar inovasi daerah yang memerlukan perhatian, yaitu pilar infrastruktur, pilar pasar produk, pilar sistem keuangan, pilar dinamisme bisnis dan pilar kapabilitas inovasi.

b. Kerja Sama Daerah

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengelola potensi yang ada di daerah adalah melalui kerja sama antar daerah, baik melalui kerja sama pemerintah daerah dalam negeri maupun kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain. Kerja sama antar daerah memungkinkan daerah untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki bagi kepentingan bersama. Bentuk legalitas kerja sama daerah dituangkan dalam nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama (PKS).

Pada tahun 2023, Kalimantan Timur telah memiliki 13 menjadi 44 perjanjian kerja sama antar daerah pada tahun 2024. Perjanjian kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain meliputi kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Peluang peningkatan kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur kedepannya akan semakin terbuka terlebih untuk mendukung daya saing daerah sebagai daerah mitra IKN dan *superhub* ekonomi IKN.

4. Fokus Layanan Urusan Pemerintah

1) Urusan Wajib

A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai akses pendidikan di suatu daerah. Terdapat beberapa komponen dalam angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Masing-masing indikator ini memberikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Tabel 2.52. Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Usia Sekolah/Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah					
7 - 12	99,73	99,6	99,57	99,64	99,69
13-15	99,07	98,9	98,75	98,71	98,73
16-18	81,88	82,1	81,43	81,5	81,84
Angka Partisipasi Kasar					
SD Sederajat	105,75	105,26	105,21	106,46	104,69
SLTP Sederajat	92,17	92,03	91,47	92,28	104
SLTA Sederajat	95,23	95,52	95,09	95,16	99,1
Angka Partisipasi Murni					
SD Sederajat	98,44	98,36	98,45	98,53	96,56
SLTP Sederajat	81,28	81,3	82,65	83,36	83,86
SLTA Sederajat	69	69,29	69,1	69,89	72,61

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

APK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di Kalimantan Timur telah terdaftar di sekolah pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan ketepatan umur peserta didiknya. Sedangkan APM yang lebih rendah dibandingkan APK menunjukkan masalah pada ketepatan umur siswa terhadap jenjang pendidikan yang seharusnya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, anak yang terlambat dalam mengenyam pendidikan dan anak yang putus sekolah.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.53. Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.664	352.693	23.145	15,24	211,95
Swasta	280	70.396	3.961	17,77	251,41
MI	149	33.396	2.326	14,36	224,13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	459	132.865	8.934	14,87	289,47
Swasta	258	32.617	2.357	13,84	126,42
MTs	182	31.833	2.998	10,62	174,91

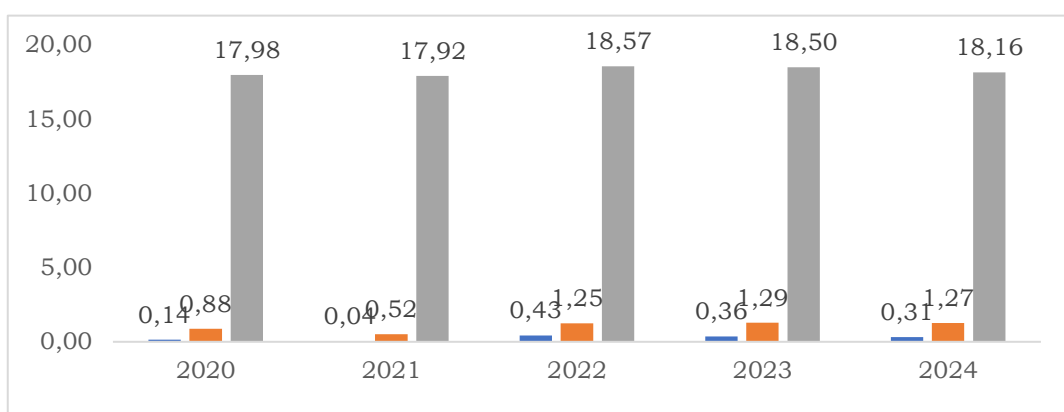
Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	146	71.034	4.427	16,05	486,53
Swasta	95	13.566	1.155	11,75	142,80
MA	92	12.138	1.512	8,03	131,93
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	88	55.536	3.604	15,41	631,09
Swasta	128	29.082	1.808	16,09	227,20

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2025

Pada tahun 2024, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,05 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun turun 0,02 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,34 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Gambar 2.88. Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
(persen)
(Sumber: BPS Kaltim, 2025)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 50 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa mencapai 101.340 orang dengan jumlah dosen sebanyak 3.781 orang.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100% menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, hal ini sejalan dengan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur.

Tabel 2.54. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kalimantan Timur

Kabupaten/ Kota	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
Paser	1.769	1.376	1.582	4.727
KUBAR	1.181	859	729	2.769
KUKAR	5.523	2.945	3.627	12.095
KUTIM	9.945	1.996	1.470	13.411
Berau	2.110	1.225	1.163	4.498
PPU	814	749	621	2.184
MAHULU	517	158	114	789
Balikpapan	3.300	1.674	1.149	6.123
Samarinda	4.221	2.076	2.079	8.376

Kabupaten/ Kota	Jumlah Belum Pernah Bersekolah (BPB)	Jumlah Drop Out (DO)	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	Total
Bontang	841	525	275	1.641
Total	30.221	13.583	12.809	56.613

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, tingginya jumlah siswa yang belum pernah bersekolah, *drop out* dan lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel 2.55. Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Di Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Usia				Total
		<7	7-12	13-15	>15	
1	Paser	0	432	471	866	1.769
2	KUBAR	0	342	293	546	1.181
3	KUKAR	0	1.304	1.297	2.922	5.523
4	KUTIM	0	1.452	2.200	6.293	9.945
5	Berau	0	534	561	1.015	2.110
6	PPU	0	225	208	381	814
7	MAHULU	0	140	131	246	517
8	Balikpapan	0	1.218	752	1.330	3.300
9	Samarinda	0	1.506	989	1.726	4.221
10	Bontang	0	189	162	490	841
Total		0	7.342	7.064	15.815	30.221

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memiliki jumlah anak yang belum pernah sekolah paling tinggi di antara Kabupaten/kota lain. dengan memiliki wilayah paling luas di Kalimantan Timur, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga masyarakat tinggal tersebar dekat pada daerah pertambangan dan perkebunan, kondisi ini juga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut yang penduduknya tidak terkumpul dalam satu wilayah. Selain itu, intervensi untuk anak yang belum pernah bersekolah ini tentunya bergantung pada Pemerintah

Kabupaten/kota dalam penyelesaiannya. Dimana Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan intervensi langsung kepada jenjang dasar dan ujian paket.

Tabel 2.56. Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Total
		PAUD	DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	ATAS (SMA/SMK)	
1	Paser	0	383	476	517	1.376
2	KUBAR	0	257	269	333	859
3	KUKAR	0	878	973	1.094	2.945
4	KUTIM	0	671	670	655	1.996
5	Berau	0	362	430	433	1.225
6	PPU	0	204	296	249	749
7	MAHULU	0	17	79	62	158
8	Balikpapan	0	382	476	816	1.674
9	Samarinda	0	480	585	1.011	2.076
10	Bontang	0	128	144	253	525
Total		0	3.762	4.398	5.423	13.583

Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)

Berbagai faktor penyebab terjadinya drop out atau putus sekolah anak, seperti kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak lebih memilih untuk bekerja, akses jarak antara rumah dengan sekolah yang begitu jauh, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan hingga budaya masyarakat.

Tabel 2.57. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	JENJANG PENDIDIKAN		Total
		DASAR (SD)	MENENGAH (SMP)	
1	Paser	690	892	1.582
2	KUBAR	291	438	729
3	KUKAR	1.497	2.130	3.627
4	KUTIM	603	867	1.470
5	Berau	488	675	1.163
6	PPU	275	346	621
7	MAHULU	47	67	114
8	Balikpapan	452	697	1.149
9	Samarinda	889	1.190	2.079
10	Bontang	97	178	275
Total		5.329	7.480	12.809

Sumber: *pd.data.kemendikbud.go.id* (16 Maret 2025)

Anak lulus yang tidak melanjutkan juga disebabkan oleh faktor yang kurang lebih sama dengan anak yang drop out. Namun, kendala dalam penanganan ATS ini adalah banyak ATS memiliki umur yang melebihi batas usia sekolah. Sehingga intervensinya juga bergantung pada keaktifan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana untuk penyelesaian penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah adalah dengan melalui ujian paket A, B dan C.

Intervensi pemerintah daerah terhadap ATS usia sekolah akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), sedangkan intervensi terhadap ATS pada penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah akan berdampak pada peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada akhirnya dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan.

B. Kesehatan

1) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel 2.58. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Pemerintah	28	28	29	30	30

No	Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Rumah Sakit Swasta	26	26	28	30	31
3	Puskesmas	187	188	188	188	188
4	Puskesmas Pembantu	730	742	745	766	697
5	Pedagang Besar Farmasi	52	53	52	52	54
6	Apotek	759	745	745	745	1120

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 2.59. Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten /Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Pemerintah	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	102	0	59
2	KUBAR	2	1	19	144	0	53
3	KUKAR	3	0	32	158	1	159
4	KUTIM	3	7	21	105	1	78
5	Berau	2	0	21	82	0	83
6	PPU	2	1	11	36	0	54
7	MAHULU	2	0	6	34	0	10
8	Balikpapan	7	8	27	7	19	224
9	Samarinda	6	10	26	26	33	376
10	Bontang	1	4	6	3	0	24
JUMLAH		30	31	188	697	54	1120

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 2.60. Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Umum	1.106	1.046	2.079	2.109	2.319
2	Dokter Gigi	320	326	438	474	610
3	Dokter Spesialis	649	999	805	843	930
4	Perawat	7.510	9.468	10.652	11.037	11.591

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

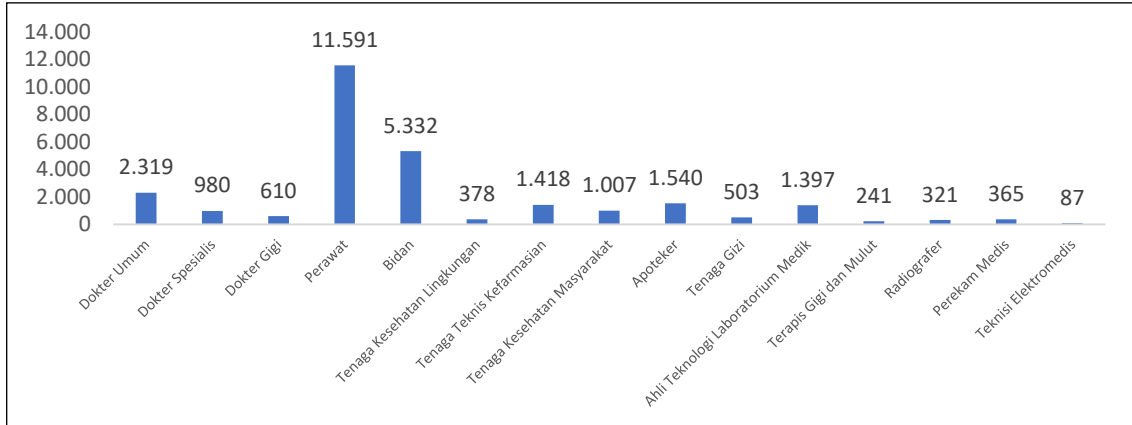
Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.61. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	130	48	40	694
2	Kutai Barat	90	14	24	760
3	Kutai Kartanegara	242	46	76	1.572
4	Kutai Timur	206	42	62	1.228
5	Berau	151	32	35	810
6	Penajam Paser Utara	67	32	27	390
7	Mahakam Ulu	18	4	0	216
8	Balikpapan	557	173	305	2.435
9	Samarinda	682	170	297	2.816
10	Bontang	176	49	64	670
JUMLAH		2.319	610	930	11.591

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar 2.89. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025)

Pemerataan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota juga menjadi perhatian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Distribusi tenaga kesehatan dengan memperhatikan analisis beban kerja dan kebijakan insentif yang memastikan tenaga kesehatan ditempatkan sesuai kompetensi serta kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota.

Tabel 2.62. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Medis	Psikologi Klinis	Keperawatan	Kebidanan	Kefarmasian	Kemas	Kesling	Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Teknik Biomedika	Kesehatan Tradisional	Nakes lainnya	Total
1	Paser	223	2	694	601	167	55	31	46	29	67	122	4	22	2063
2	KUKAR	369	5	1572	936	318	176	54	81	22	61	185	0	12	3791
3	Berau	225	1	810	416	178	113	39	47	14	56	125	0	23	2047
4	KUBAR	130	0	760	433	131	84	25	36	10	35	104	0	4	1752
5	KUTIM	314	1	1228	802	211	103	38	46	23	52	160	0	48	3026
6	PPU	128	0	390	313	136	42	18	24	7	28	61	0	4	1151
7	MAHULU	22	0	216	124	42	45	14	16	5	15	40	0	13	552
8	Balikpapan	1065	9	2435	717	643	94	57	87	82	194	415	0	75	5873
9	Samarinda	1178	10	2816	769	929	231	86	93	101	209	489	2	65	6978
10	Bontang	294	2	670	221	203	64	16	27	36	62	120	0	1	1716
Jumlah		3948	30	11591	5332	2958	1007	378	503	329	779	1821	6	267	28949

Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 23 per 100,000 penduduk dari

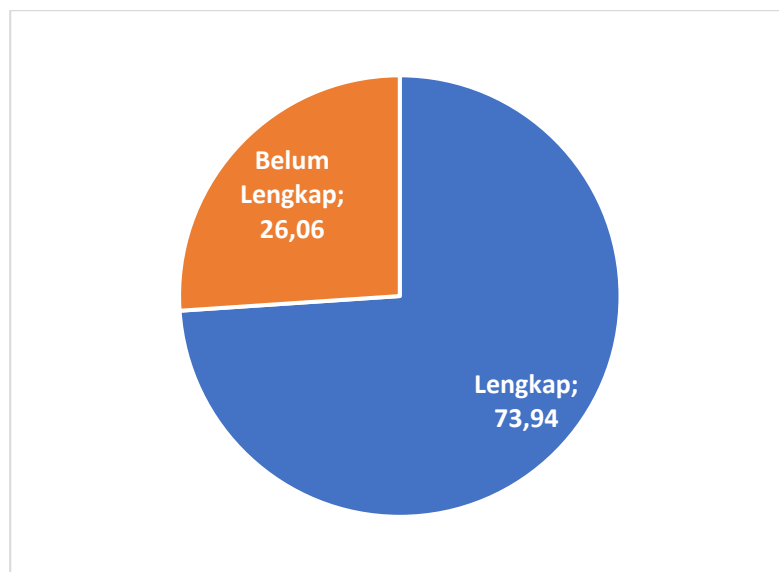
target rasio 12 per 100,000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan.

Tabel 2.63. Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	18	1	94,74
2	Kutai Barat	19	7	12	36,84
3	Kutai Kartanegara	32	26	6	81,25
4	Kutai Timur	21	12	9	57,14
5	Berau	21	14	7	66,67
6	Penajam Paser Utara	11	8	3	72,73
7	Mahakam Hulu	6	2	4	33,33
8	Kota Balikpapan	27	24	3	88,89
9	Kota Samarinda	26	23	3	88,46
10	Kota Bontang	6	5	1	83,33
Jumlah		188	139	49	73,94

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Sedangkan kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 73,94 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.



Gambar 2.90. Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 9 (sembilan) RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dan 6 (enam) RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel 2.64. Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

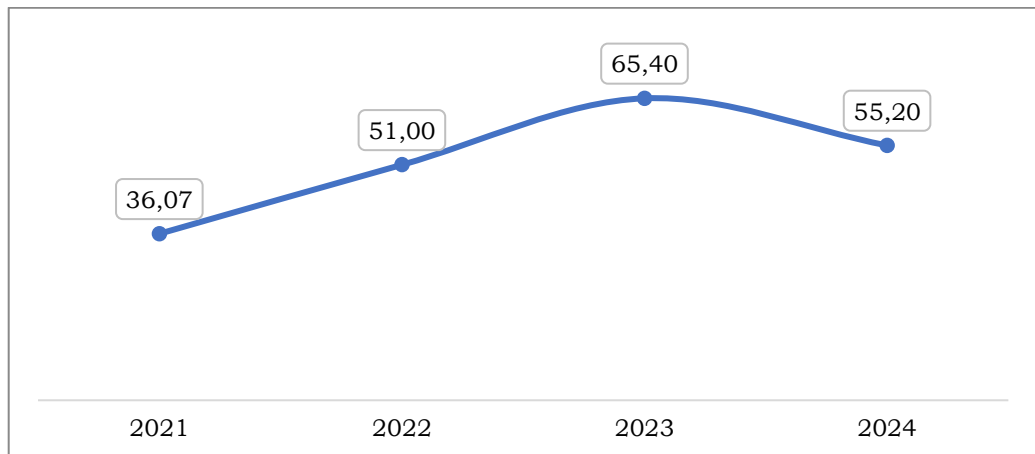
No.	Kab/Kota	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
			Sp.PD	Sp.OG	Sp.A	Sp.B	Sp.Rad	Sp.An	SP.PK
1.	Berau	RSUD Talisayan	1	1		1		1	
		RSUD Dr. Abd. Rival berau	4	2	3	2	2	2	2
2.	Balikpapan	RSUD Beriman	4	3	2	2	1	3	1
		RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	3	4	5	3	3	8	3
3.	Bontang	RSUD Taman Husada	4	2	3	2	2	3	2
4.	Samarinda	RSUD Inche Abdoel Moeis	5	3	4	3	1	4	2
		RSUD Abdul Wahab Sjahrane	12	9	13	3	6	13	4
		RSUD KORPRI		1				1	
5.	KUBAR	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
		RS Pratama Sendawar							
6.	KUKAR	RSUD AM Parikesit	5	7	4	2	2	2	2
		RSUD Dayaku Raja	1	1	1	1		2	1
		RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	3	2	2	2	1	1	1
7.	KUTIM	RSUD Sangkulirang	1	1		1		1	1
		RSUD Kudungga	4	2	2	3	1	3	2
		RSUD Muara Bengkal	1		1				1
8.	Paser	RSUD Panglima Sebaya	4	4	3	4	2	4	2
		RSUD Kerang		1					

No.	Kab/Kota	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
			Sp.PD	Sp.OG	Sp.A	Sp.B	Sp.Rad	Sp.An	SP.PK
9.	PPU	RSUD Sepaku Tipe D	2	2	1		1		
		RSUD Ratu Aji Putri Botung	2	3	1	3	2	1	2
10.	MAHULU	RS Gerbang Sehat Mahulu							
		RS Nawacita Datah Dave							

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

2) Insidensi Tuberkulosis

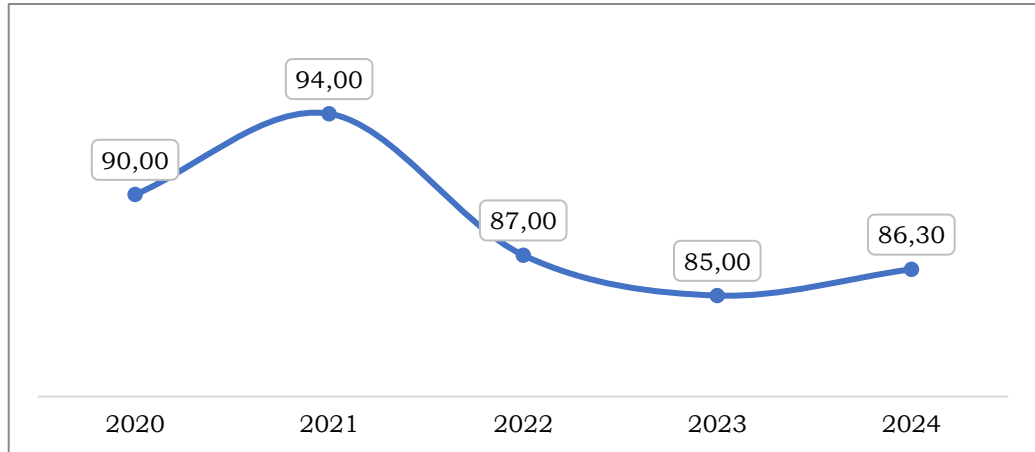
Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya, Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.



Gambar 2.91. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati (Case Datection Rate) di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 persen dan di tahun 2023 menjadi 65,4 persen. Terjadi penurunan capaian di tahun 2024

menjadi 55,2 persen. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023 sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga presentase cakupan menjadi menurun.



Gambar 2.92. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

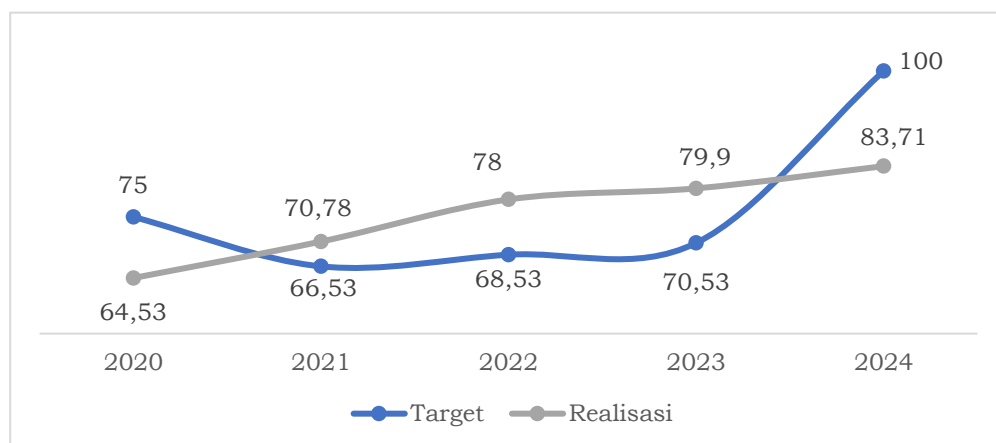
Angka kesembuhan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) di Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari 3 tahun terakhir, hal ini terjadi akibat banyak kasus tuberculosis yang tidak menyelesaikan pengobatan dikarenakan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya angka kematian penyakit ini.

Faktor utama penyebab masih tingginya kasus tuberculosis dengan angka kematian yang cukup tinggi adalah karena masih terjadinya penularan penyakit ini di masyarakat akibat belum terputusnya rantai penularan akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberculosis untuk mendapatkan pengobatan secara dini. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberculosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberculosis di masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020-2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100 persen, kontribusi Kalimantan Timur dalam pemenuhan air minum layak pada akhir periode RPJMN 2020-2024 hanya mampu menembus angka 83,71 persen dari angka capaian Nasional 92,64 persen.



Gambar 2.93. Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2020-2024 (%)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim, 2025)

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Ditambah lagi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian selanjutnya adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

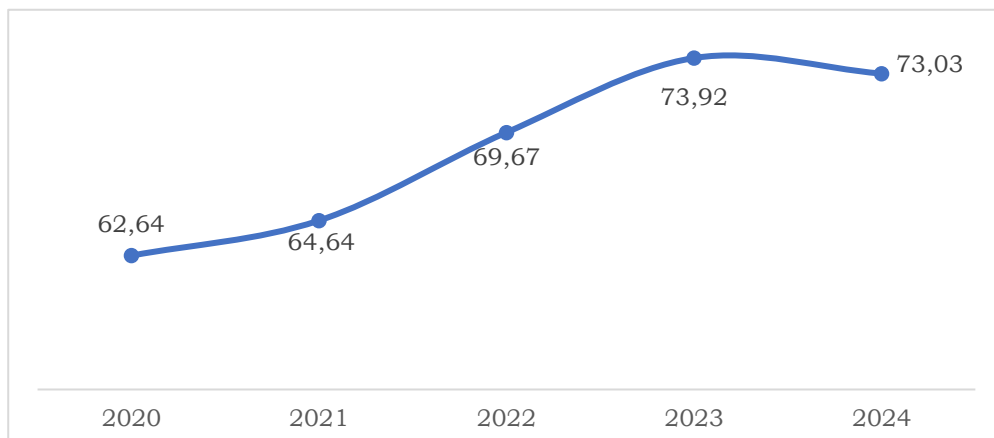
Tabel 2.65. Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1,	Paser	48,56	66,80	70,14	84,25	84,25
2,	KUBAR	31,04	72,19	86,02	86,02	43,21
3,	KUKAR	51,54	56,50	72,85	78,22	87,74
4,	KUTIM	40,11	44,20	51,73	55,03	60,01
5,	Berau	56,87	70,21	82,16	81,55	82,00
6,	PPU	32,14	49,90	30,90	23,35	89,07
7,	Mahulu	24,51	13,89	66,06	14,40	85,10
8,	Balikpapan	79,79	97,84	99,25	98,99	99,51
9,	Samarinda	87,28	79,39	87,27	87,27	85,86
10,	Bontang	99,96	81,18	83,55	83,55	83,55

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Agregat dari pencapaian akses air minum layak 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah memiliki capaian di atas 50 persen kecuali Kabupaten Kutai Barat, yang di tahun 2024 layanan aksesnya sempat bagus kemudian menurun kembali mencapai 43,21 persen karena kondisi topografi daerah yang berbukit, tingginya biaya operasional, serta masalah jaringan distribusi seperti kebocoran jaringan, kurangnya jaringan distribusi pada IPA yang Idle Capacity, dan pompa-pompa yang perlu diremajakan sehingga menyebabkan capaian layanan menurun.

Sedangkan di Kabupaten PPU dan Mahulu, peningkatan akses air minum layak dipengaruhi oleh terbangunnya beberapa unit air baku dan peningkatan kualitas infrastruktur air minum (seperti pembangunan IPA, revitalisasi IPA, perluasan jaringan) baik dari pusat dan daerahnya sendiri. Kemudian, faktor jumlah penduduk yang relatif sedikit, dampaknya akan sangat signifikan memengaruhi kenaikan akses capaian tersebut.



Gambar 2.94. Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2025)

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 73,03 persen dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel 2.66. Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	0,71	0,71	0,71	0,61
2.	KUBAR	1,59	1,59	1,59	21,69
3.	KUKAR	0,27	0,32	0,32	0,32
4.	KUTIM	2,28	2,70	2,70	5,71
5.	Berau	1,69	3,35	3,35	2,14
6.	PPU	0,25	3,70	3,70	0,20
7.	MAHULU	2,92	2,91	2,91	0,50
8.	Balikpapan	9,18	9,18	9,18	14,64
9.	Samarinda	1,25	7,59	7,59	0,77
10.	Bontang	2,64	7,63	7,63	2,28
	KALTIM	2,68	4,71	4,71	4,88

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat kondisi jalan tidak mantap (dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat), baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan, sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Tabel 2.67. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

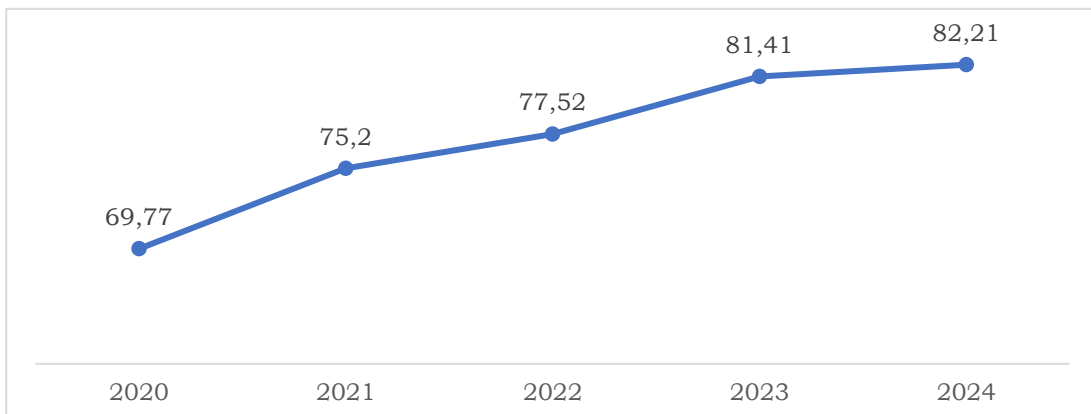
No	Status Jalan	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)	Total Panjang Jalan (Km)
1	Paser	176,16	75,15	102,96	650,92	1,005,19
2	KUBAR	643,42	260,74	509,12	110,16	1,523,44
3	KUKAR	524,86	827,79	490,96	349,42	2,193,02
4	KUTIM	234,79	55,85	78,62	736,50	1,105,77
5	Berau	395,43	280,21	26,04	984,40	1,686,08
6	PPU	302,68	25,13	37,75	655,49	1,021,46
7	MAHULU	90,25	7,63	155,6	484,05	737,59
8	Balikpapan	362,8	86,85	21,92	29,57	501,18
9	Samarinda	726,53	39,60	50,05	65,12	881,30
10	Bontang	90,14	62,64	39,59	2,96	195,34
11	Kalimantan Timur	321,38	450,46	55,55	111,46	938,85
12	Nasional	285,30	1,284,46	136,41	100,58	1,806,76

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 69,77 persen, sementara pada tahun 2024 telah mencapai 82,21 persen. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan,

penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim - Talisayan dan ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp, 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp, 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian.

Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan ruas jalan Sp, 4 Outer Ring Road IV - Bandara APT, Pranoto, ruas jalan Jembatan Mahulu – Jalan Jakarta (Samarinda), ruas jalan Akses Jembatan Sei, Nibung (Kutim), dan pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu).



Gambar 2.95. Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1,000 km² dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1,000 km², Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;

3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan air, ketersediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 (lima) dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2024 sebesar 11,01 m³/detik, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,17 m³/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m³/detik. Secara khusus, pada tahun 2024, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum

terkoneksinya pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

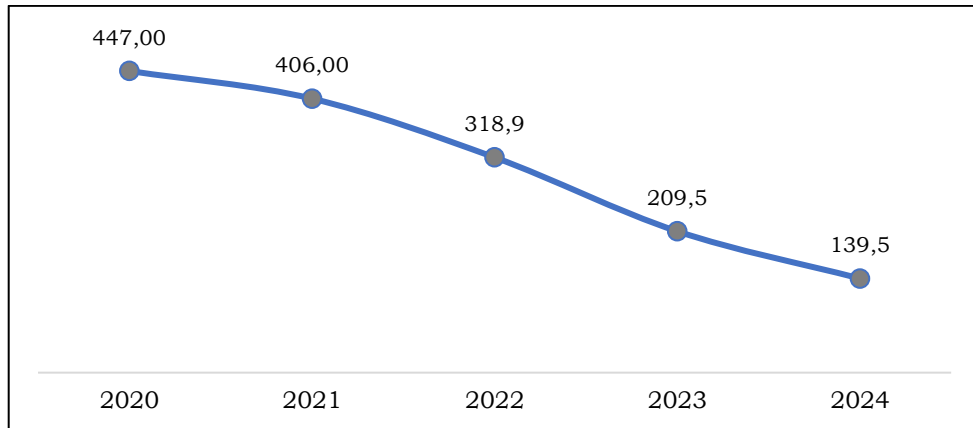
Daerah irigasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kriteria pembagian tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbagi ke dalam tiga tingkat kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.68. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas Permen PU No,14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan Fungsional

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)			
		Permen PU No,14/PRT/M/2015	Potensial	Fungsional	Baku
1	DI Biatan	1.779	383,56	263,53	2.145
2	DI Labanan	1.100	196,52	196,52	754
3	DI Merancang	1.200	1084,2	191,4	1.275
4	DI Semurut	1.089	737,65	309,43	1.047
5	DI Marangkayu	1.507	938,19	515,68	1.453
6	DI Sungai Buluh	1.089	701,53	84,27	785
7	DI Kaliorang	1.300	1.295,8	137,35	1.433
8	DI Selangkau	2.987	891,65	123,87	1.015,5
Total		12.060	6.229	1.822	9.908

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data menunjukkan Daerah Irigasi Permukaan (DI) yang berada di Kabupaten Berau (DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang, DI Semurut) Kabupaten Kutai Timur (DI Kaliorang, DI Selangkau) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (DI Marangkayu, DI Sungai Buluh). Secara data tabular maupun kondisi eksisting luasan fungsional areal daerah irigasi masih sangat jauh pemanfaatannya dibandingkan luas baku yang tersedia, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua stakeholder terkait, khususnya pihak terkait pertanian dan tanaman pangan.



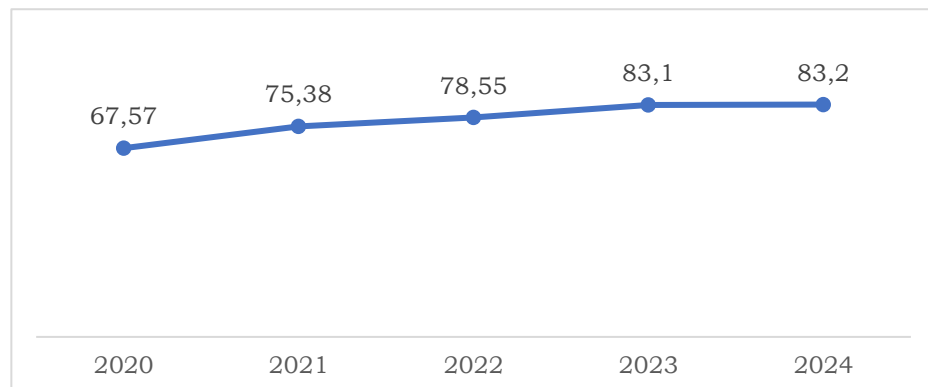
Gambar 2.96. Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM. 2025)

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, prioritas penanganannya adalah pengurangan luas genangan banjir, Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders*, baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun penurunan luas genangan masih fokus pada 3 (tiga) kota utama dan Kota Sangatta yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kota lainnya belum menjadi prioritas, kedepannya ini perlu menjadi perhatian.

5) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan, serta penetapan rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis. Selain itu, RTRW juga mencakup arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Keberhasilan pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dinilai

melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi dilakukan melalui Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.



Gambar 2.97. Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Data menunjukkan bahwa, capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat

kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Tabel 2.69. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			Luas Kewenangan Provinsi Berdasarkan BA Verifikasi	SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota		
1	Paser	180,74	35,06	8,72	28,74	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	933,37	73,56	38,69		No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	92,61	25,49	15,5	25,49	No. 105/SK-BUP/HK/2023
4	KUTIM	74,77	310,14	172,03	270,62	No. 600/K.652/2023
5	Berau	0	25,79	2,47		No. 30 Tahun 2020
6	PPU	0	39,4	0		No.593.33/212/2023
7	MAHULU	49,2	22,52	49,98		No. 600/650/K.126/2023
8	Balikpapan	52,99	21,78	29,92	21,78	No. 188.45-203/2023
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	19,13	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	18,3	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1437,91	611,34	349,55		

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai

dengan tahun 2024 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparat pemerintah dan aparat keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Tabel 2.70. Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	23.811	23.812	24.038	24.030	23.990	Orang
Jumlah Aparat Satpol PP	1.224	1.225	1.448	1.443	2.618	Orang
a. Provinsi	172	173	173	168	166	Orang
b. Kab/Kota	1.052	1.052	1.275	1.275	2.452	Orang
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	22.587	22.587	22.590	22.587	9.377	Orang
a. Provinsi	30	30	33	30	30	Orang
b. Kab/Kota	22.557	22.557	22.557	22.557	1.280	Orang
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	2.793	2.793	2.903	2.627	-	Kali
Jumlah Pos Siskamling	1.927	12.293	10.449	11.749	2.761	Unit
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	2	16	85	112	19,85	
Jumlah Pelanggaran K3	138	5.157	5.958	5.377	6.099	Kasus
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	365	4.508	5.823	5.365	5.197	Kasus
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	72,33	87,42	97,73	99,78	85,21	%
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	3	0,01	0	9	0,26	

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2024

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan

sosial masyarakat. Hal ini tergambar pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 81.247 orang.

Tabel 2.71. Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Jumlah PMKS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS	Orang	251.234	251.234	249.893	249.893	174.087
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1,34	1,40	1,08	1,70	1,04
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	81.247	2.671	4.231	4.440
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.052	1.134	2.671	4.231	4.440
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,34	1,40	1,08	1,7	1,04
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,22	0,22	0,22	0,22	6,43
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	46.510	46.510	46.510	46.490	778
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	100	100	100	100	50

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 251.234 orang menjadi 174.087 orang pada tahun 2023, atau berkurang sebanyak 77.147 orang. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum

tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel 2.72. Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021 – 2023 (Jiwa)

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	2.529	2.529	227
2	Anak terlantar	5.989	5.989	3.423
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	986	986	389
4	Anak Jalanan	517	517	61
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1.733	1.733	1.769
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	1.012	1.012	93
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2.698	2.698	409
8	Lanjut Usia Terlantar	2.816	2.816	18.402
9	Penyandang Disabilitas	8.358	8.358	6.697
10	Tuna Susulia	-	-	285
11	Gelandangan	213	213	251
12	Pengemis	76	76	149
13	Pemulung	97	97	63
14	Kelompok Minoritas	213	213	13
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	1.408	1.408	100
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.680	3.680	390
17	Korban Penyalahgunaan Napza	909	909	68
18	Korban Trafficking	19	19	-
19	Korban Tindak Kekerasan	180	180	8
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	626	626	53
21	Korban Bencana Alam	60.000	60.000	23.502
22	Korban Bencana Sosial	35.000	35.000	1.870
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	160	160	6.683
24	Fakir Miskin	114.400	114.400	108.439
25	Keluarga Bermasalah Sosial	963	963	253
26	Komunitas Adat Terpencil	5.311	5.311	490
Total PPKS Kaltim		249.893	249.893	249.893

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

Sementara berdasarkan capaian SPM bidang sosial mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mencapai 53,38 persen meningkat ditahun 2021 sebesar 64,74 persen dan terus meningkat

hingga 90,04 persen ditahun 2022 dan kemudian mencapai 100 persen ditahun 2023 dan 2024.

G. Ketenagakerjaan

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja, sehingga mampu membuka peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pendidikan tenaga kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan daya saing di pasar kerja.

Tabel 2.73. Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD ke Bawah	493.889	491.456	453.853	465.175	482.813
		(29,18)	(28,57)	(25,98)	(25,18)	(24,43)
2	SMP	267.721	260.789	259.693	279.689	285.005
		(15,82)	(15,16)	(14,87)	(15,14)	(14,42)
3	SMA/SMK	643.105	666.878	760.250	804.339	879.487
		(37,99)	(38,76)	(43,52)	(43,54)	(44,50)
4	Diploma I/II/III	64.507	64.906	56.923	68.139	64.997
		(3,81)	(3,77)	(3,26)	(3,69)	(3,29)
5	Universitas/DIV	223.574	236.332	216.201	229.953	264.145
		(13,21)	(13,74)	(12,38)	(12,45)	(13,36)
Kalimantan Timur		1.692.796	1.720.361	1.746.920	1.847.295	1.976.447
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

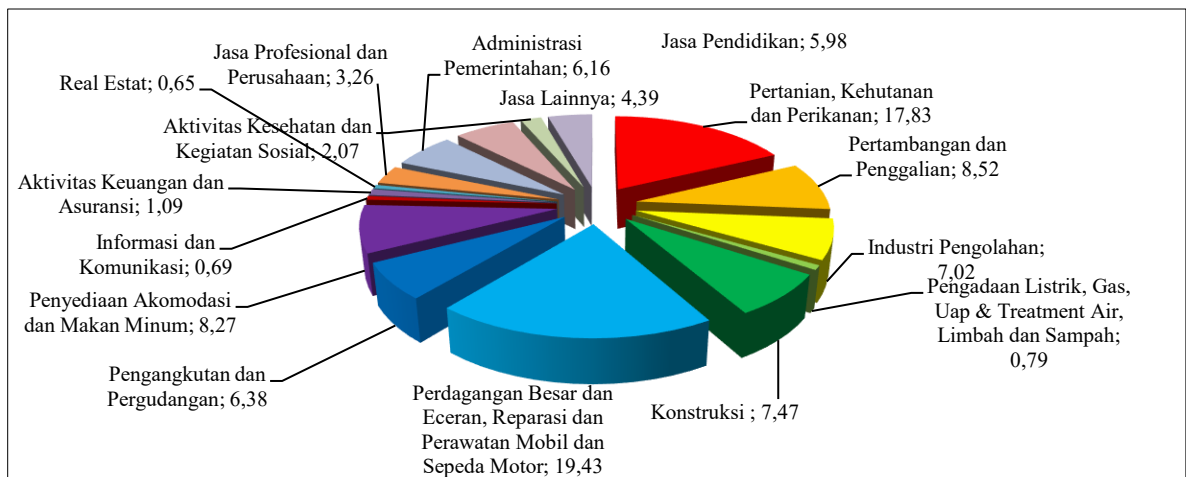
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penduduk usia bekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang semakin merata, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring pengembangan wilayah tersebut dengan adanya pembangunan IKN. Selain itu, investasi besar-besaran di sektor ekonomi dan proyek pembangunan di Kalimantan Timur turut mendorong permintaan tenaga kerja yang

memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sehingga meningkatkan angka partisipasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam angkatan kerja,

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi faktor penting untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membuka akses untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan besar, stabilitas karir yang lebih baik, dan peluang pengembangan profesional yang lebih luas.

Penduduk bekerja di Kalimantan Timur terbagi dalam 16 (enam belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.98. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Sebagian besar penduduk Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,43 persen serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 17,83 persen. Hal ini dikarenakan pada sektor tersebut menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan, Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian daerah hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,52 persen. Hal ini disebabkan pada sektor tersebut umumnya

memerlukan keterampilan dan pendidikan teknis yang lebih tinggi serta pekerjaannya lebih mengandalkan teknologi dan mesin sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 19.004 orang, dimana 1,519 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 17.485 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi, Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi, Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel 2.74. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	30.719	22.358	47.254	37.992	31.364
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	5.538	3.531	12.334	10.438	7.970
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	18,03	15,79	26,10	27,47	25,41

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2024 adalah Kota Balikpapan mencapai 37,60 persen dan Kota Bontang mencapai 37,44 persen.

Tabel 2.75. Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.260	550	24,34
2	KUBAR	2.701	288	10,66
3	KUKAR	2.355	583	24,76
4	KUTIM	2.910	795	27,32
5	Berau	6.016	729	12,12
6	PPU	883	203	22,99
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.178	1.571	37,60
9	Samarinda	2.129	281	13,20
10	Bontang	7.932	2.970	37,44

Sumber: *Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2025*

H. Transmigrasi

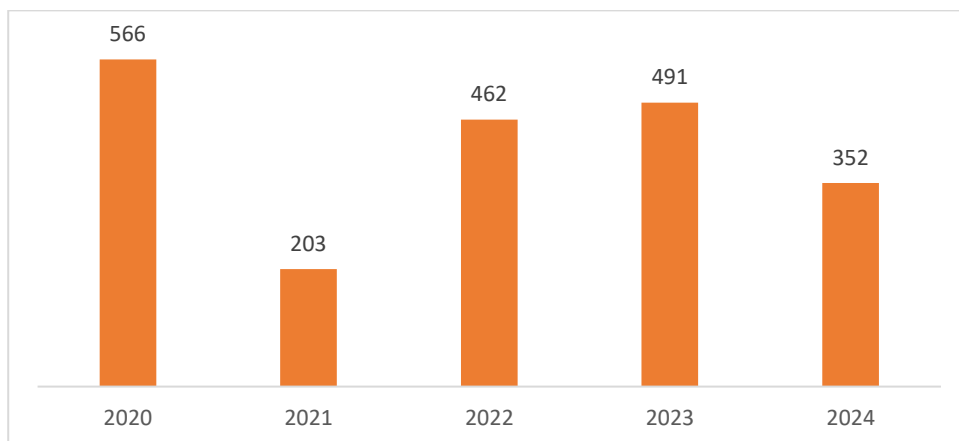
Kondisi transmigrasi di Kalimantan Timur tersebar pada beberapa daerah di Kalimantan Timur. Pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 ditetapkan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur seluas 152,76 Ha kemudian pada tahun 2017 Kawasan Transmigrasi ditetapkan di Kerang Kabupaten Paser seluas 125,30 Ha, Tahun 2019 melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 87 Tahun 2019 ditetapkan kawasan transmigrasi di daerah Muara Koman Kabupaten Paser.

Perkembangan penempatan transmigran sejak tahun 2018 mencapai 40 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kladen, kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan 15 kepala Keluarga, serta pada tahun 2023 sebanyak 5 Kepala Keluarga.

I. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 566 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi 352 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar 2.99. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (orang)
(Sumber: DP3A Provinsi KALTIM, 2025)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2024 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 733 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah,

masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.76. Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Mental	Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Mental Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya
1	Paser	61	31	83	176	14	33
2	Kukar	451	182	335	571	117	211
3	Berau	49	25	74	233	14	45
4	Kubar	95	42	117	159	19	96
5	Kutim	96	52	91	197	13	102
6	PPU	133	54	110	142	39	58
7	Mahakam Ulu	55	5	34	36	13	25
8	Balikpapan	163	44	213	587	23	126
9	Samarinda	123	71	185	699	26	78
10	Bontang	96	24	79	269	15	82
JUMLAH		1.322	530	1.321	3.069	293	856

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2025

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman, Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan

perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

J. Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2.77. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Paser	82,26	80,48	81,76	83,70	80,04
2.	KUBAR	54,98	57,76	66,94	58,39	60,87
3.	KUKAR	84,28	84,73	84,44	85,53	87,17
4.	KUTIM	73,13	66,19	60,09	65,76	61,64
5.	Berau	85,34	86,77	86,16	85,33	81,91
6.	PPU	86,20	86,24	85,51	87,40	88,11
7.	MAHULU	63,17	52,75	53,29	57,68	56,53
8.	Balikpapan	87,66	88,68	89,47	91,40	91,23
9.	Samarinda	80,75	83,72	84,66	88,97	89,68
10.	Bontang	84,59	87,24	84,21	88,76	88,89
Kalimantan Timur		78,24	77,46	77,65	79,29	78,61

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan dalam IKP, mencapai angka

79,29. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mungkin melalui kebijakan yang efektif, peningkatan produksi pertanian, atau perbaikan distribusi pangan.

Namun, untuk capaian IKP kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

Tabel 2.78. Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
1,	Paser	81,31	87,38	82,73
2,	KUBAR	0,00	87,03	80,70
3,	KUKAR	78,27	91,28	86,67
4,	KUTIM	19,13	87,09	84,74
5,	Berau	76,02	94,43	85,50
6,	PPU	87,62	91,46	84,18
7,	MAHULU	0,00	84,63	80,73
8,	Balikpapan	-	98,62	85,49
9,	Samarinda	-	93,82	85,00
10,	Bontang	-	92,12	86,02
	Kalimantan Timur	48,91	90,79	84,18

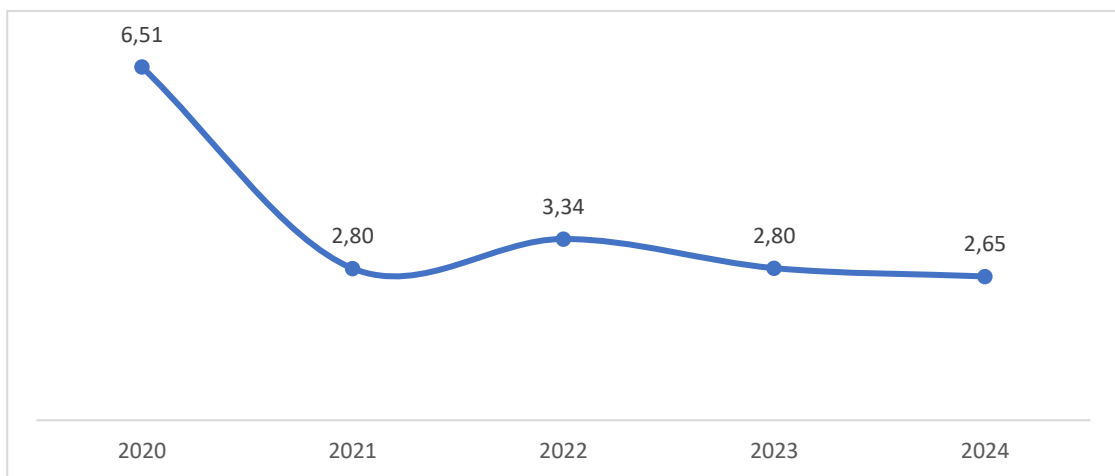
Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024

Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya

secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

K. Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.



Gambar 2.100. Indeks Pencemaran Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

IP Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dari 6,51 dengan status Cemar Sedang

tahun 2020 menjadi 2,65 pada tahun 2024 dengan status Cemar Ringan. Hal ini disebabkan nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 202 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar Kalimantan Timur.

L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang bervariasi selama periode 2020-2024. Data ini mencerminkan kinerja dalam mendokumentasikan peristiwa penting kehidupan penduduk, dimana capaiannya terus mengalami peningkatan, meskipun dengan pola yang bervariasi untuk setiap jenis dokumen. Peningkatan yang terjadi pada akta perkawinan, akta kelahiran, dan kembalinya tren positif KIA, serta lonjakan akta perceraian, mengindikasikan perbaikan dalam sistem pelaporan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan semua peristiwa penting kehidupan penduduk tercatat sepenuhnya, terutama untuk menjangkau sisa persentase yang belum terlayani.

Tabel 2.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	42,16	63,23	60,55	63,75	67,23
2	Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran (%)	93,49	93,79	96,90	97,89	98,96
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	28,78	33,42	65,90	68,88	71,91
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	100	100

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	30,09	63,79	69,86	68,19	76,68
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)	-	2	2	2	2
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (%)	-	18,92	26,47	60	33,33

Sumber: DISDUKCAPIL Prov. Kaltim, 2025

M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng). Juga potensi Padi yang terdapat terdapat Pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.80. Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan	Potensi
1.	Kutai Timur	Sanggata Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sengata Selatan - Sangkima - Teluk Sangkima 	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP	Wisata Terpadu
		Kecamatan Teluk Pandan	<ul style="list-style-type: none"> - Kandolo - Teluk Pandan 		Wisata Terpadu
2.	Berau	Pulau Derawan	<ul style="list-style-type: none"> - Pulau Derawan - Teluk Semanting - Pegat Bertumbuk - Kasai - Tanjung Batu 	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017	Minapolitan (Udang, Bandeng)
2.	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	<ul style="list-style-type: none"> - Perjiwa - Embalut - Manunggal Jaya - Kerta Buana - Karang Tunggal - Bukit Raya - Bukit Pariaman - Bangun Rejo 	Kawasan Pedesaan PKP Agromina Pastoral yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati No. 310/SK-BUP/HK/2017	Agromina Pastoral Pertanian, Peternakan dan Perikanan)

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	90,00	68,52	70,58	20
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	0,66	92,25	28,02	6,3
3	Indeks Desa Membangun	0,675 2	0,707 1	0,732 0	0,752 6	0,768 6
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	35	30	35	45	23
5	Jumlah Bumdes Yang Aktif	323	353	388	433	646
6	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80	80	80	80	-
7	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	18	10	10	10	10
8	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	165	150	150	150	2.891
9	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	363	30	35	45	341
10	Jumlah Desa berkembang	329	-	339	263	195
11	Jumlah Kampung/Desa Iklim	40	30	35	45	441
12	Desa Tertinggal (Desa)	128	78	17	5	4
13	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	30	35	45	341
14	Desa yang telah melaksanakan Penataan	-	7	7	7	11
15	Kampung/Desa Iklim + (Desa	-	25	27	27	-
16	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	128	30	35	30	68
17	Desa Berkembang	-	30	30	30	195
18	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	323	353	388	433	213
19	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	-	30	30	30	4

Sumber: DPMPD Prov. KALTIM, 2025

N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah

kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,51	2,16	2,18	2,17
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	50,82	55,50	62,46	55,71
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	22,18	29,70	14,06	25,86

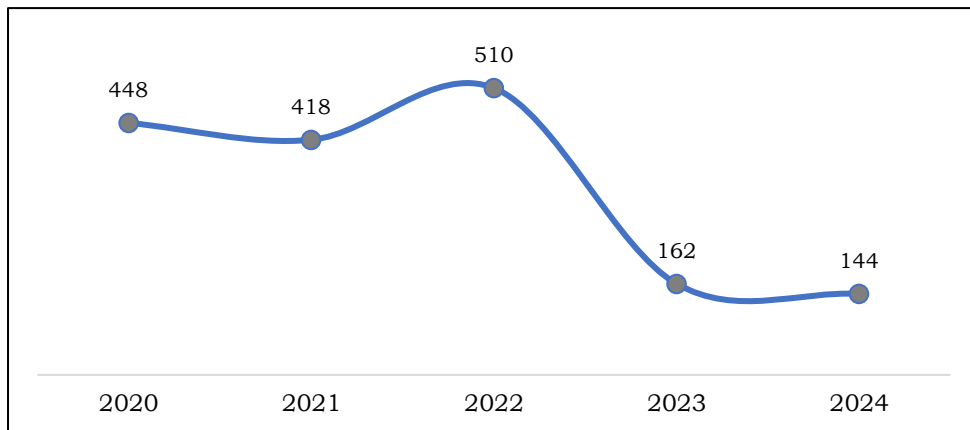
Sumber: LPPD 2024

Terjadi penurunan Total Fertility Rate dari 5,41 pada Tahun 70-an menjadi sebesar 2,17 pada Tahun 2024, namun berdasarkan kinerja khususnya berkaitan dengan Replacement Level, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil melakukan pengendalian penduduk.

Capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat sebesar 55,71 persen, sementara angka *Unmet Need* masih cukup tinggi yaitu 25,86 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun lebih dari separuh perempuan usia subur telah menggunakan alat kontrasepsi modern, masih terdapat proporsi signifikan perempuan yang memiliki kebutuhan ber-KB namun belum terlayani. Tingginya unmet need ini menunjukkan potensi risiko meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu, keberlangsungan pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses layanan KB yang lebih merata, edukasi yang menasar kelompok rentan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengoptimalkan capaian program keluarga berencana di Kalimantan Timur.

O. Perhubungan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 510 kejadian, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan, masing-masing dengan 162 dan 144 kejadian. Turunnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur, salah satunya disebabkan meningkatnya pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.



Gambar 2.101. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2020-2024
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2025)

Angkutan penumpang di Kalimantan Timur utamanya dilayani melalui bandar udara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) bandar udara yang terdiri dari 1 (satu) bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian di Kota Balikpapan dan 5 (lima) bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI yakni Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda, Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau, Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat, Bandara SAMS Sepinggian, Bandara Kalimarau dan Bandara APT Pranoto telah mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat berbadan lebar. Selain itu, dalam rangka

peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dan Bandara Paser di Kabupaten Paser. Kedua rencana bandara ini telah memiliki izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan angkutan barang, moda transportasi utama yang digunakan adalah angkutan laut. Saat ini pelabuhan yang memiliki fungsi sangat penting bagi Kalimantan Timur adalah Pelabuhan Balikpapan yang merupakan pelabuhan utama (PU) dan Pelabuhan Samarinda yang menjadi pelabuhan pengumpul (PP). Selain itu telah dibangun juga Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat melayani aktivitas ekonomi maupun industri di wilayah Kutai Timur dan sekitarnya. Optimalisasi dan pengembangan ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552/K.784/2022 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional telah ditetapkan 2 (dua) pelabuhan pengumpan regional, 3 (tiga) rencana pelabuhan penumpang regional, 2 (dua) pelabuhan penyeberangan kelas I, dan 5 (lima) pelabuhan sungai dan danau.

Tabel 2.83. Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mantaritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2022

Tabel 2.84. Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki	
1	Berau	Mantaritip	Pengumpan Regional	
2	Kutai Timur	Sangkulirang	Pengumpan Regional	
RENCANA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL				
1	Balikpapan	Kampung Baru Tengah	Pengumpan Regional	
2	Balikpapan	Somber	Pengumpan Regional	
3	Penajam Paser Utara	Penajam Speedboat	Pengumpan Regional	
PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS I				
No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Status Pencapaian	Keterangan
1	Balikpapan	Kariangau	Operasi	Kelas I
2	Penajam Paser Utara	Penajam	Operasi	Kelas I
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU				
1	Kutai Barat	Tering	Operasi	Pengumpan
2	Kutai Barat	Melak	Operasi	Pengumpan
3	Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	Operasi	Pengumpan
4	Mahakam Ulu	Long Bagun	Operasi	Pengumpan
5	Samarinda	Sungai Kunjang	Operasi	Pengumpan

Sumber: RIPP Prov. Kaltim, 2022

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni di Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser.

Berkaitan dengan angkutan massal perkotaan sampai saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah belum adanya lembaga pengelola transportasi massal yang efektif, keterbatasan infrastruktur perkotaan, pola permukiman yang tersebar dan kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam upaya untuk menangani kemacetan dan pengurangan emisi dari sektor transportasi, angkutan massal perkotaan perlu untuk dikembangkan, terutama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

P. Komunikasi Dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi publik, serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, mulai dari layanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, hingga interaksi sosial masyarakat.

Tabel 2.85. Data Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK (%)	0	25,00	25,00	25,00	50,00
2	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	2	2	2	2	2

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	80,00	80,00	85,00	85,00	95,42
4	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik (%)	48,95	50,13	49,66	48,32	49,55
6	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	77,00	77,00	80,00	80,00	80,00
8	Proporsi individu yang menggunakan Internet (%)	59,00	79,66	62,46	62,46	62,46
9	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) (%)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan (%)	50,00	50,00	66,23	66,23	66,23
11	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet (%)	30,00	30,00	66,23	66,23	66,23

Sumber: Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta jaminan keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan urusan ini. Melalui penguatan komunikasi dan informatika, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, masyarakat yang melek digital, serta pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya pengembangan koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para

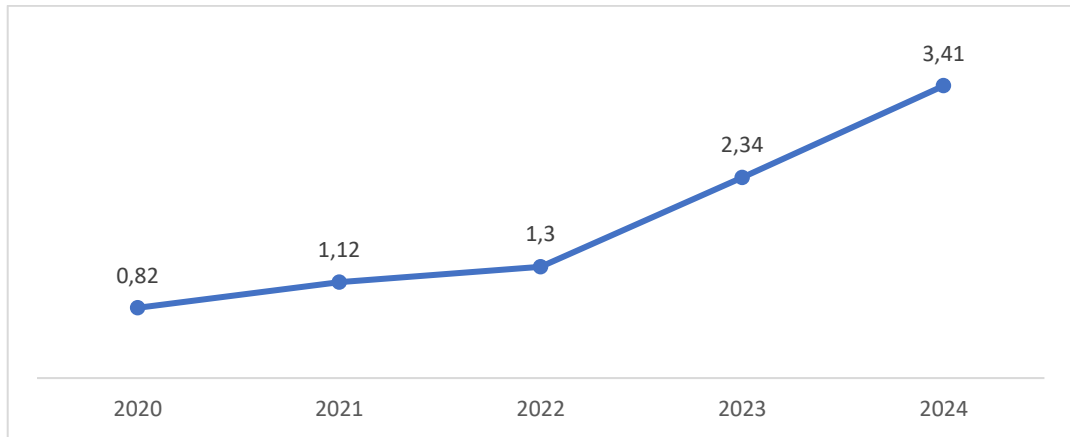
pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pada sektor koperasi, indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja pengembangan koperasi adalah jumlah koperasi aktif. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan dari semula berjumlah 2.751 unit koperasi aktif di tahun 2020 menjadi 3.162 unit koperasi aktif di tahun 2024.

Tabel 2.86. Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	2.751	2.844	2.885	2.995	3.162
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (unit)	351	457	446	646	827
3	Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	5.619	5.676	5.809	6.197	6.382
4	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	57.381	68.580	94.882	164.451	192.272
5	Persentase koperasi aktif (%)	48,95	50,13	49,66	48,32	49,55

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025

Peningkatan kesadaran para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan jumlah koperasi aktif. Namun, di sisi lain jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masih rendah. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi salah satu persyaratan koperasi dinilai aktif dan sehat. Terdapat potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi menjadi 197.272 orang di tahun 2024 sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.102. Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 3,41 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

Sementara itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing lokal. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, dan menciptakan produk-produk inovatif yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional. Sebagai bentuk konkret dari peran strategis tersebut, berikut disajikan data jumlah Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 2.87. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Unit)

No.	Kab/Kota	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1	Paser	4	3	7
2	KUBAR	866	77	943
3	KUKAR	2	0	2
4	KUTIM	3	2	5
5	Berau	2.183	205	2.388

No.	Kab/Kota	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
6	PPU	11	1	12
7	MAHULU	118	5	123
8	Balikpapan	4	4	8
9	Samarinda	23	8	31
10	Bontang	9	1	10
	Kalimantan Timur	3.223	306	3.529

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kalimantan Timur tidak merata antar Kabupaten/Kota, dengan dominasi tertinggi berada di Kabupaten Berau sebanyak 2.388 unit dan terendah di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Kabupaten Kutai Timur yang masing-masing hanya memiliki 2 dan 5 unit. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi, infrastruktur pendukung, akses pasar, dan kapasitas pendampingan usaha di masing-masing wilayah.

Pendorong utama berkembangnya UKM di daerah seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat antara lain adalah dukungan program pemerintah daerah, potensi sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, serta kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Sebaliknya, daerah dengan jumlah UKM rendah kemungkinan menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi kewirausahaan, serta minimnya intervensi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.

M. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Peningkatan nilai investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, namun juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian lainnya. Investasi berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 2.88. Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

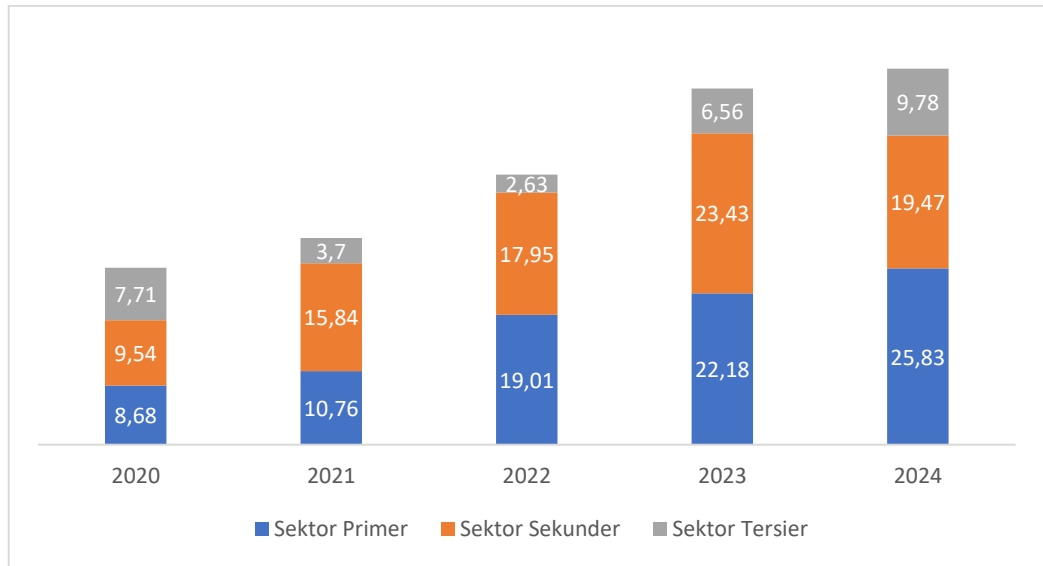
Tahun	PMDN	PMA	Total
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711
2023	15.490	1.991	17.481
2024	24.743	3.018	27.761

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan hingga mencapai 27.761 proyek PMDN/PMA sampai dengan tahun 2025. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dan di Kota Samarinda. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan.

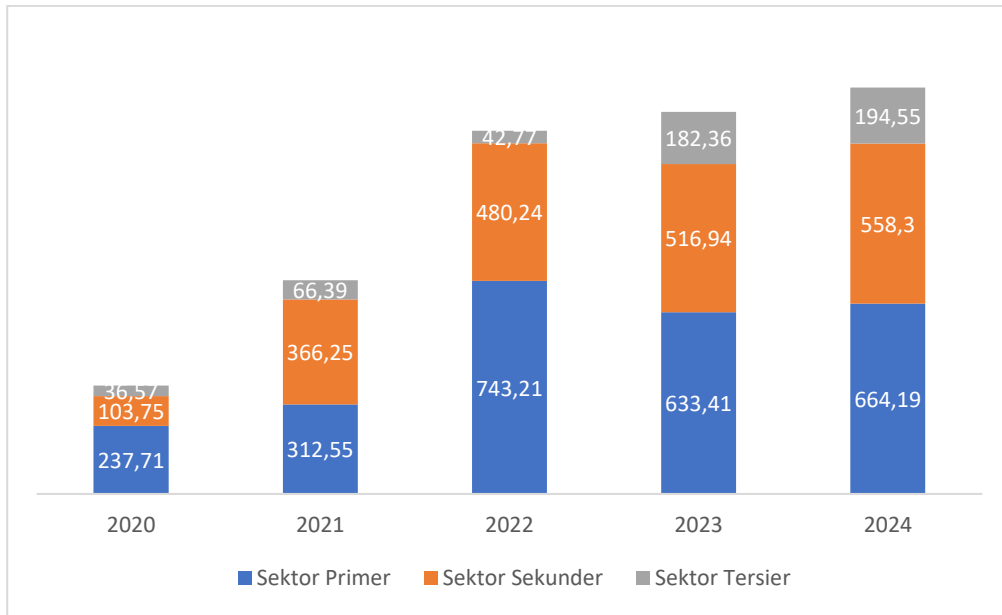
2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri pada tahun 2024 mencapai 55,08 triliun rupiah dengan 5 (lima) sektor utama yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi, Pertambangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Industri Makanan, dan Transportasi, Gudang & Komunikasi. Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai 1,42 miliar US\$ dengan 5 (lima) sektor utama yaitu Pertambangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Industri Mineral Non Logam, dan Transportasi, Gudang & Komunikasi. Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar 2.103. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (triliun Rp) (Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)

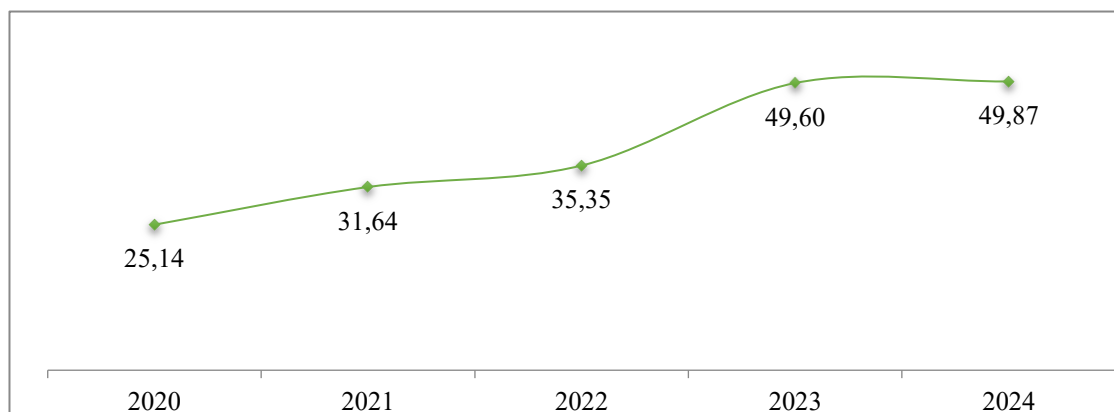
Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan terutama pada sektor primer dan tersier. Perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian juga turut meningkatkan investasi pada sektor tersebut di sektor primer. Selain itu, peningkatan sektor tersier dari sektor usaha konstruksi dan sektor usaha jasa lainnya sebagai dampak pembangunan IKN.



Gambar 2.104. Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (US\$)
(Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan nilai investasi ini juga diiringi dengan perubahan pola investasi. Peningkatan kontribusi investasi PMA di sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri mineral non-logam serta sektor usaha industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hingga mencapai 49,87 triliun rupiah pada tahun 2024.



Gambar 2.105. Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Triliun Rp)

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)

N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel 2.89. Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	107	305	1.280	305	75
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	45	57	23	21	54
Jumlah Klub Olahraga	1.109	1.112	1.087	1.087	875
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	105	105	205	205	205
Jumlah Kegiatan Olahraga	161	120	61	40	70
Jumlah Organisasi Olahraga	63	63	63	63	78

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2025

O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	100

Sumber: LPPD, 2024

P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2023 bernilai 64,34, dimana didapat dari jumlah area penilaian sebanyak 645 dan jumlah nilai per area keamanan informasi sebanyak 415. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91. Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173,33	38,76	64,34	66,51
2	Indeks keamanan informasi	Level 2	-	Level 3	Level 3

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim, dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel 2.92. Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Peringkat	Karya Budaya Tak Benda	Karya Budaya Benda
1	Kutai Barat	Nasional	Belian Bawo	Ulap Doyo
		Nasional	Hudoq	Sarut
		Nasional	Upacara Adat Kwangkay	
		Nasional	Genikng	
		Nasional	Kelentangan Kutai Barat	
		Nasional	Tari Perang Dayak Bahau Saq	
		Nasional	Ngerangkau	
		Nasional	Sapeq Kalimantan Timur	
		Nasional	Parapm Api Bayaq	
		Nasional	Banaq Sawaq Pelulukng Peruku	
		Nasional	Jomit Burei	
		Nasional	Tari Gantar Kutai Barat	
		Nasional	Pakaatn Nyahuq	
		Nasional	Beliat Sentiu Kutai Barat	
2	Kutai Kartanegara	Nasional	Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panju Selaten)	
		Nasional	Erau Kartanegara	
		Nasional	Ganjur	
		Nasional	Tari Gong	
		Nasional	Suliikng Dewa	
		Nasional	Tari Dewa Memanah	
		Nasional	Datun Ngentau	
		Nasional	Tari Topeng Kemindu	
		Nasional	Belian Namang	
		Nasional	Kanjet Lasan	
		Nasional	Punan Leto	
		Nasional	Gasing Kutai	
		Nasional	Naek Ayun	
		Nasional	Nutuk Beham	
Nasional	Tarsul Kutai			

No	Kabupaten/ Kota	Peringkat	Karya Budaya Tak Benda	Karya Budaya Benda
		Nasional	Muang Kutai Adat Lawas	
		Nasional	Jatung Utang Kalimantan Timur	
		Nasional	Kuda Gepang Kutai Kartanegara	
		Nasional	Mecaq Undat	
		Nasional	Sangkoh Kutai Kartanegara	
		Nasional	Gambus Kutai Kartanegara	
		Nasional	Tingkilan Kutai Kartanegara	
3	Kutai Timur	Nasional	Lom Plai	
		Nasional	Blontang Kalimantan Timur	
		Nasional	Bekenjong	
4	Paser	Nasional	Ronggeng Paser	Petis Udang Paser
		Nasional	Ngarang	
		Nasional	Pentengan Gambus Paser	
		Nasional	Besoyong	
		Nasional	besembur Paser	
5	Penajam Paser Utara	Nasional	Betore	
		Nasional	Tambak Pulut Paser	
6	Samarinda	Nasional		Sarung Tenun Samarinda
7	Kalimantan Timur	Nasional		Mandau Kalimantan Timur
		Nasional		Rumah Panjang Dayak
		Nasional		Pakaian Kulit Kayu

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel 2.93. Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya yang mencakup nilai-nilai tradisi, seni, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, telah ditetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai berikut.

Tabel 2.94. Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Seni Budaya dan Olahraga
1	Tradisi Lisan	Penulisan Cerita rakyat Betoreh Besoyong Tarsul Kutai
2	Manuskrip	Pendataan Naskah Kuno
3	Adat Istiadat	Erau Kartanegara Upacara Adat Kwangkay Ngerangkau Ngarang Belian Namang Naek Ayun Muang Kutai Adat Lawas
4	Ritus	Lom Plai

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Seni Budaya dan Olahraga
		Punan Leto Bekenjong Parapm Api Bayaq Nutuk Beham Mecaq Undat Banaq Sawaq Pelulukng Peruku Jomit Burei Tambak Pulut Paser Pakaatn Nyahuq Beliat Sentiu Kutai Barat
5	Pengetahuan Tradisional	Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panji Selaten) Besembur Paser
6	Teknologi Tradisional	alat berburu tradisional seperti sumpit anyaman rotan khas pedalaman Kaltim
7	Kesenian	Ronggeng Passer Genikng Ganjur Tari Gong Kelentangan Kutai Barat Tari Perang Dayak Bahau Saq Suliikng Dewa Tari Dewa Memanah Sapeq Kalimantan Timur Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu Kanjet Lasan Pentengan Gambus Paser Kuda Gepang Kutai Kartanegara Gendang Agong Paser Tingkilan Kutai Kartanegara Tari Gantar Kutai Barat
8	Bahasa	Bahasa Kutai Bahasa Berau Bahasa Dayak Kenyah Bahasa Paser
9	Permainan Rakyat	Balogo Asen Naga Sumpit Gasing Kutai
10	Kuliner Tradisional	Nasi Bekepor Gence Ruan Gami Bontang Petis Udang Paser Olahan ikan sungai khas Kalimantan Timur

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Pendokumentasian dan pemajuan OPK ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal, memperkaya khasanah kebudayaan nasional, serta menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa.

R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2024 seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.95. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (<i>online</i> dan <i>onsite</i>) (orang)	115.348	276.759	92.054	172.780
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)	60,85	46,27	68,46	69,53
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	17,74	34,16	68,77	78,34

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, Indikator kinerja bidang Kearsipan, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.96. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	64,30	74,65	74,88	74,99
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7,39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	7,39	3,34	6,55	36,66

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)				

Sumber: LPPD, 2024

T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM, BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 mendapatkan poin sebesar 271 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel 2.97. Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35
2.	Pengadaan	32	36	38
3.	Pengembangan Karier	62,5	67,5	57,5
4.	Promosi dan Mutasi	17,5	17,5	20
5.	Manajemen Kinerja	45	42,5	52,5
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16
8.	Sistem Informasi	18	19	22
	Jumlah Nilai	256	263,5	271

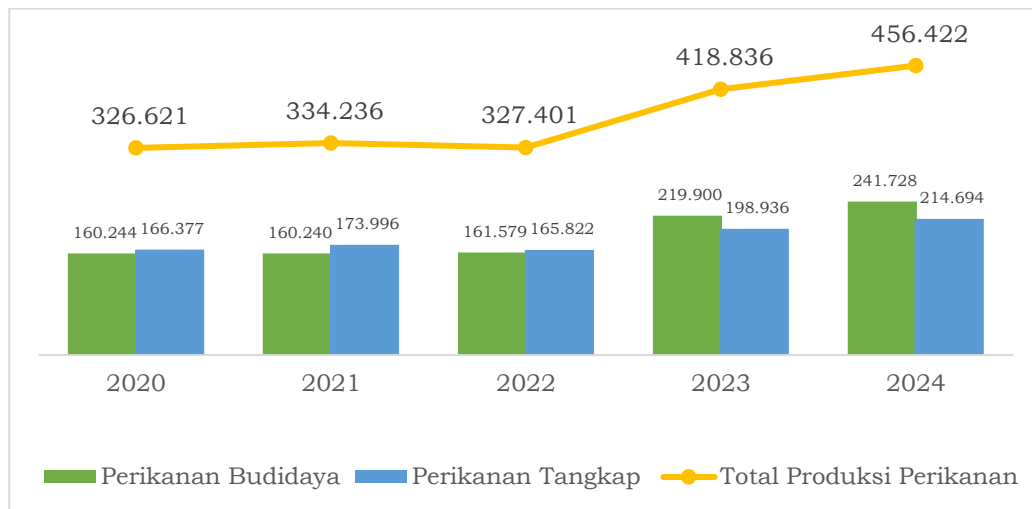
Sumber: KASN, 2024

2) Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan potensi perikanan yang juga sangat besar baik laut seluas 2,89 juta Ha maupun perairan darat seluas 2,4 Juta Ha. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana

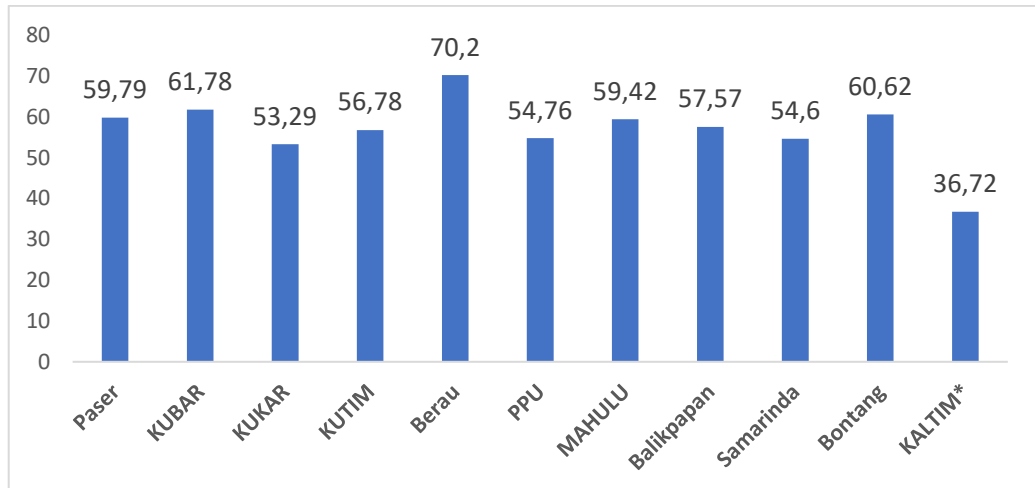
penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.



Gambar 2.106. Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2025)

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, disebabkan salah satunya karena bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan serta mulai diterapkannya penangkapan serta budidaya ikan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pencapaian produksi budidaya perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu. Sedangkan untuk usaha perikanan tangkap terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.

Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). AKI dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di suatu wilayah.



Gambar 2.107. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun)
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

AKI di Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 36,72 kg/kapita/tahun lebih tinggi dibandingkan AKI Nasional tahun 2023 yang hanya mencapai 25,07 kg/kapita/tahun. Capaian AKI Provinsi dan Nasional ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.4783/DJPDSPKP.5/TU.210/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024. Metode perhitungan ini menggunakan pendekatan konsumsi ikan di rumah tangga berbasis serapan tertimbang setara utuh segar. Adapun penggunaan reformulasi perhitungan AKI di tingkat Kabupaten/kota akan dilakukan pada Tahun 2025.

Jika ditinjau menggunakan formulasi perhitungan AKI yang lama, angka konsumsi ikan di Kalimantan Timur tidak merata di setiap kabupaten/kota, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya perbedaan pola konsumsi atau budaya makan ikan di masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan konsumsi ikan di Kalimantan Timur, rasio pemenuhan konsumsi ikan untuk masyarakat Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 180,41 persen.

B. Pariwisata

Pariwisata menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah. Kedua sektor ini secara beriringan saling

memperkuat dan menciptakan sinergi positif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pariwisata berperan sebagai pendorong utama yang menggerakkan sektor ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif pun turut menambah nilai tambah bagi sektor pariwisata.

Tabel 2.98. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	32.965	89.931	118.045	105.838	131.346
2	KUBAR	25.929	20.218	103.435	145.795	147.634
3	KUKAR	692.689	515.471	1.041.254	1.530.444	1.215.549
4	KUTIM	40.129	103.770	107.006	212.959	381.133
5	Berau	127.176	125.520	397.054	420.926	552.920
6	PPU	20.263	114.869	164.532	859.041	497.438
7	MAHULU	2.596	5.590	7.789	8.757	16.317
8	Balikpapan	1.072.569	1.306.225	1.748.085	2.534.015	2.633.919
9	Samarinda	654.984	742.844	2.338.341	3.119.216	2.538.018
10	Bontang	215.029	156.212	270.167	305.924	1.268.702
Kalimantan Timur		2.884.329	3.180.650	6.295.708	9.242.915	9.382.976

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebanyak 9,38 juta wisatawan nusantara di tahun 2024 dengan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi berada di Samarinda. Salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah wisatawan nusantara ini adalah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Derawan, baik untuk tujuan bisnis maupun rekreasi.

Tabel 2.99. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020 – 2024 (orang)

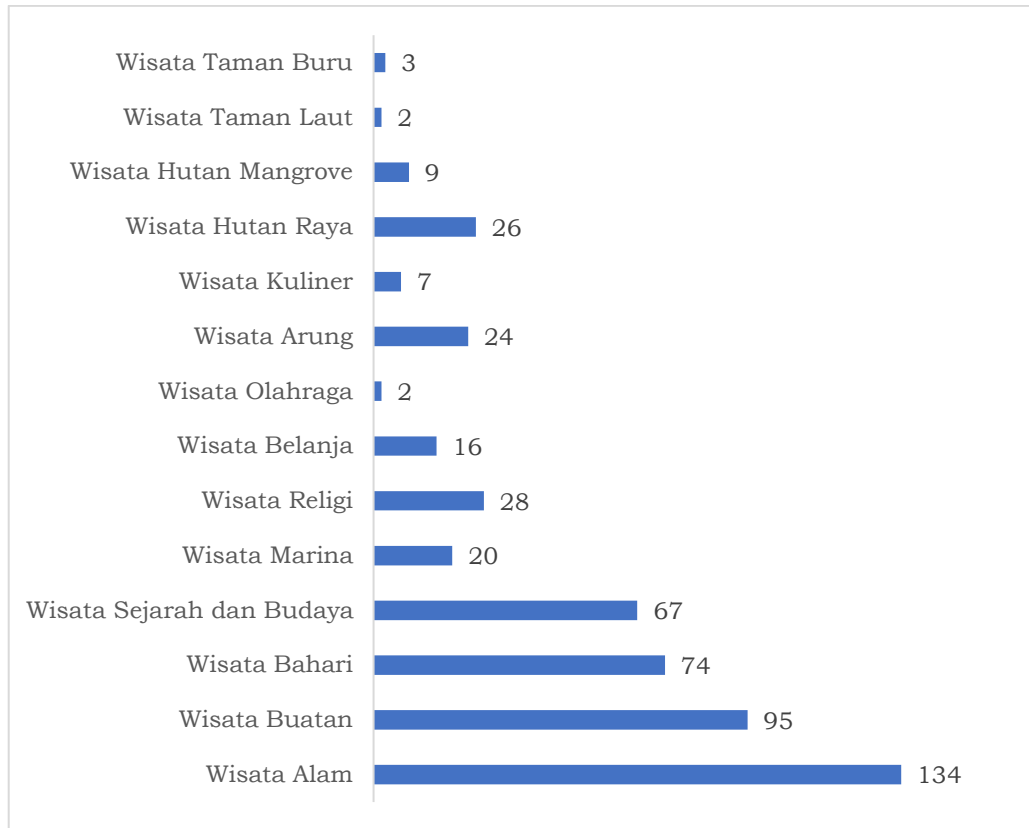
No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-	1	1	28	-
2	KUBAR	28	5	243	158	168
3	KUKAR	557	43	632	1.530	3.803
4	KUTIM	365	108	152	805	406
5	Berau	220	30	283	1.666	4.294

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
6	PPU	26	-	2	40	38
7	MAHULU	5	-	622	708	81
8	Balikpapan	16.510	17.200	11.704	24.511	36.450
9	Samarinda	2.075	441	1.418	6.818	8.281
10	Bontang	-	-	1.450	1.564	1.484
Kalimantan Timur		19.786	17.828	16.507	37.828	55.005

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025

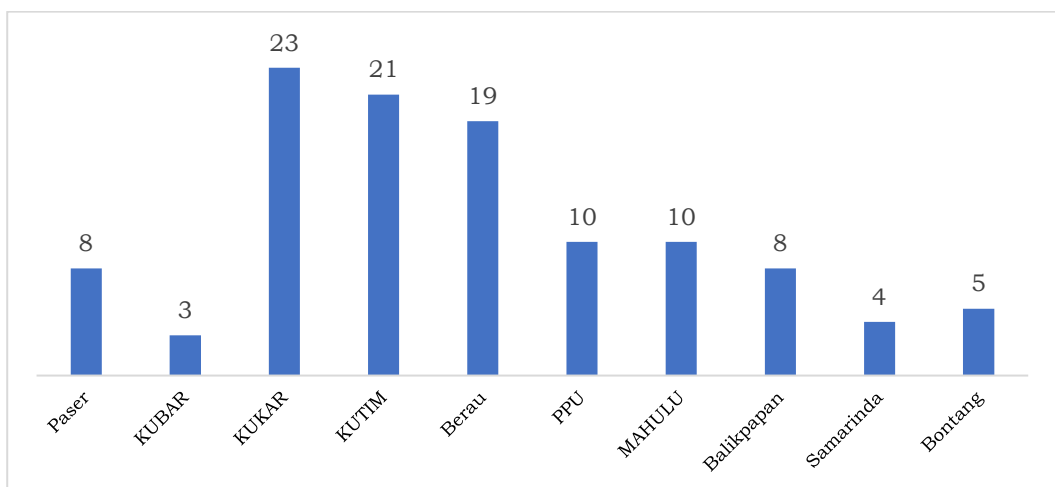
Wisatawan mancanegara juga mengalami pertumbuhan, meski dengan fluktuasi. Kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur menurun signifikan mulai tahun 2021 akibat terjadinya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pulihnya perekonomian, banyaknya pelaksanaan *event*, dan pembangunan IKN.

Berdasarkan data jumlah objek wisata di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, tercatat total sebanyak 500 objek wisata yang tersebar dalam berbagai kategori dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi alam dan budaya menjadi kekuatan utama sektor pariwisata di Kalimantan Timur.



Gambar 2.108. Jumlah Objek Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Sumber : Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)

Keanekaragaman jenis wisata ini menggambarkan peluang besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya yang berbasis alam dan budaya, yang bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Perlu peningkatan promosi dan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

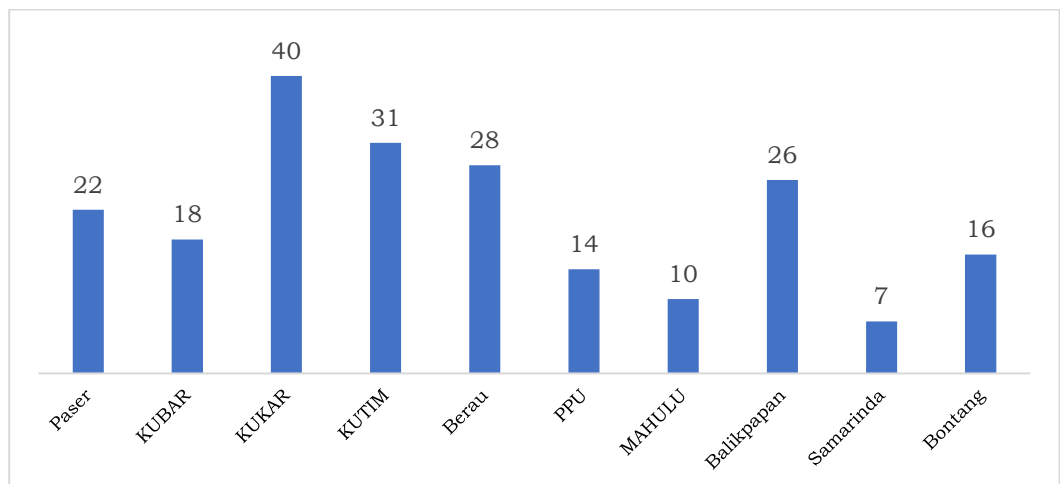


Gambar 2.109. Desa Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

(Sumber : Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)

Berdasarkan data jumlah desa wisata di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat sebanyak 111 desa wisata tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 23 desa wisata dan Kutai Timur sebanyak 21 desa wisata, mencerminkan potensi besar dari kekayaan alam, budaya, dan lokasi strategis yang dimiliki kedua wilayah tersebut. Kabupaten Berau menyusul dengan 19 desa wisata, menguatkan citranya sebagai destinasi ekowisata unggulan dengan kekayaan laut dan kawasan konservasi seperti Pulau Derawan.

Dominasi desa wisata di kawasan Kukar, Kutim, dan Berau menunjukkan potensi dan perhatian yang besar terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah desa wisata di beberapa kota besar seperti Samarinda dan Bontang dapat mencerminkan keterbatasan lahan pedesaan atau orientasi pembangunan yang lebih urban. Secara keseluruhan, ada indikasi disparitas pembangunan desa wisata antar daerah di Kalimantan Timur, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perencanaan strategis bagi pemerataan serta optimalisasi potensi pariwisata lokal.



Gambar 2.110. Jumlah Kelompok Sadar Wisata Provinsi Kalimantan Timur 2024
(Sumber : Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)

Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat total 212 Pokdarwis yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kutai Kartanegara menempati posisi tertinggi dengan 40 Pokdarwis, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberagaman destinasi wisata di wilayah tersebut. Disusul oleh Kutai Timur sebanyak 31, Berau sebanyak 28, dan Balikpapan sebanyak 26, yang juga mencerminkan keseriusan daerah-daerah ini dalam membina masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan pariwisata lokal.

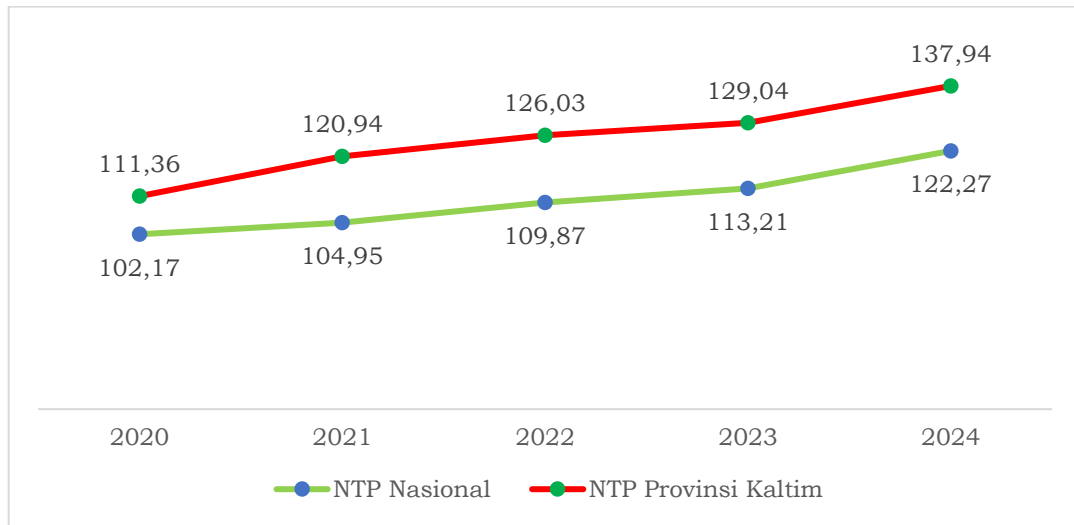
Dominasi jumlah Pokdarwis di wilayah seperti Kukar dan Kutim menunjukkan potensi dan keseriusan dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah Pokdarwis di Samarinda dan Mahakam Ulu dapat menjadi indikator perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata lokal. Keberadaan Pokdarwis di Kalimantan Timur menunjukkan peran aktif komunitas lokal dalam membangun pariwisata yang menjadi kunci keberlanjutan destinasi wisata yang inklusif dan berdaya saing.

C. Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil pertanian (It) dan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya produksi (Ib). NTP menggambarkan kemampuan petani dalam menukar hasil produksinya dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Secara umum, NTP digunakan sebagai gambaran tingkat kesejahteraan petani,

Rata-rata NTP dihitung dari gabungan lima subsektor pertanian setiap bulan. NTP lebih dari 100 menunjukkan bahwa petani mendapatkan keuntungan dalam hal perdagangan karena harga jual hasil pertanian naik lebih cepat dibanding biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika NTP di bawah 100, maka petani mengalami kerugian. Sementara itu,

NTP sebesar 100 menunjukkan kondisi seimbang, di mana perubahan harga jual sama dengan perubahan biaya yang dibayar.



Gambar 2.111. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Prov Kaltim, 2025)

Rata-rata NTP Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Selain itu, NTP Provinsi Kaltim dalam lima tahun terakhir juga jauh berada di atas rata-rata NTP Nasional dengan angka mulai dari 111,36 pada tahun 2020 dan mencapai 137,94 pada tahun 2024, peningkatan mencapai 24%. Peningkatan yang signifikan dan lebih cepat di Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa petani di Kalimantan Timur mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama lima tahun terakhir.

Dalam perhitungannya, sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi subsektor Tanaman Pangan (NTPP), Tanaman Hortikultura (NTPH), Perkebunan Rakyat (NTPR), Peternakan (NTPT), dan Perikanan (NTPN).

Tabel 2.100. Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai Tukar Petani				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	101,6	95,28	92,34	97,77	102,94
Hortikultura	105,2	106,07	112,32	111,86	113,63
Perkebunan	124,57	151,1	162,54	166,92	186,93
Peternakan	101,65	104,28	108,77	108,62	105,17

Perikanan	102,79	101,77	99,42	99,86	99,81
-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

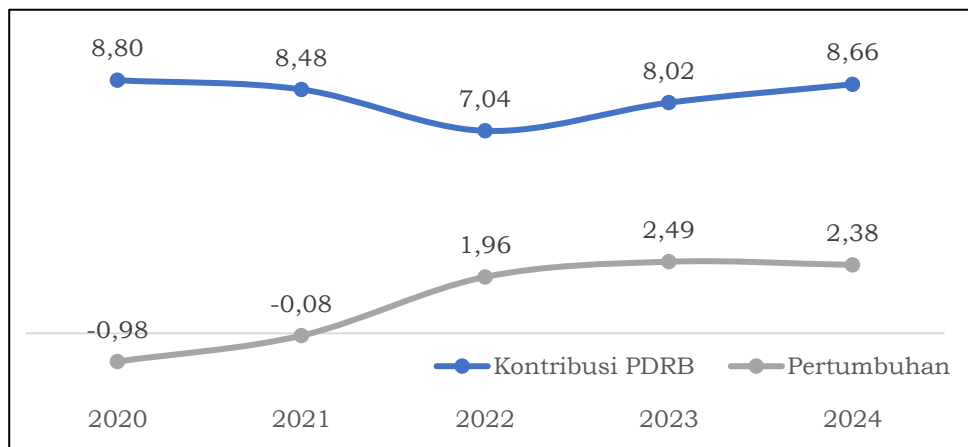
Data NTP di Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar subsektor pertanian. Subsektor Tanaman Pangan menunjukkan fluktuasi cukup besar, dengan nilai terendah 92,34 pada tahun 2022 dan kembali naik ke 102,94 di tahun 2024. Subsektor Hortikultura mengalami tren yang relatif stabil dan positif, meningkat dari 105,2 pada tahun 2020 menjadi 113,63 pada tahun 2024. Subsektor Perkebunan mencatat kenaikan yang sangat signifikan, dari 124,57 di tahun 2020 menjadi 186,93 pada tahun 2024, menjadikannya subsektor dengan peningkatan tertinggi. Sementara itu, subsektor Peternakan berada dalam kisaran stabil dengan nilai sedikit di atas 100, menunjukkan situasi yang relatif seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Berbeda dengan itu, subsektor Perikanan mengalami penurunan nilai NTP secara bertahap, dari 102,79 pada tahun 2020 menjadi 99,81 pada tahun 2024, mengindikasikan penurunan kesejahteraan petani subsektor perikanan.

Berdasarkan data di atas, subsektor Perkebunan dan Hortikultura merupakan sektor yang paling menunjukkan perkembangan positif dan menguntungkan bagi petani di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang dapat mendukung kondisi tersebut di antaranya peningkatan harga komoditas atau efisiensi produksi yang lebih baik. Sebaliknya, subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan menunjukkan kinerja yang kurang stabil yang ditunjukkan melalui NTP di bawah 100. Lebih lanjut, meski pun stabil, subsektor Peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan intervensi kebijakan, khususnya untuk subsektor dengan NTP di bawah atau mendekati 100, agar kesejahteraan petani dari seluruh subsektor dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan tingkat kesejahteraan petani dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi sektor

pertanian. Ketika NTP meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluaran, yang mendorong produktivitas dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaliknya, penurunan NTP dapat menekan pendapatan petani, mengurangi minat berusaha tani, dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pergerakan NTP memiliki hubungan erat dengan dinamika kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2024 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 8,66 persen.



Gambar 2.112. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam

arti luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka -0,98 persen dan -0,08 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 persen dan kontraksi pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48 persen. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mencapai 2,38 persen dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.

Berikut data dan informasi sub sektor pertanian dalam arti luas:

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Tabel 2.101. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2020	73.568	262.435	3,57
2021	66.269	244.678	3,69
2022	64.970	239.425	3,69
2023	57.143	215.291	3,77
2024	63.041	249.643	3,96

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Secara umum, pada periode tahun 2020-2024 terjadi penurunan produksi dan produktivitas. Penurunan dikarenakan luas lahan baku sawah dan luas panen yang berkurang, perubahan iklim, ketersediaan air dan benih unggul, serta menurunnya minat petani untuk menanam padi. Penurunan luas lahan baku sawah dikarenakan adanya perubahan

fungsi lahan menjadi fungsi lainnya, terbatasnya bendungan dan embung, saluran irigasi yang tidak terpelihara dengan baik, tersebarnya lahan persawahan, serta luas sawah beririgasi yang hanya 11.920 Ha dari luas baku lahan sawah 71.479 Ha mengakibatkan rendahnya produktivitas.

Tabel 2.102. Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	52.365,75	51.972,06	48.202,66	28.608,94	52.886,67
KUBAR	1.199,22	2.021,46	1.284,77	1.319,37	1.348,29
KUKAR	110.940,44	104.441,83	105.025,70	115.103,82	106.553,73
KUTIM	17.078,56	13.119,61	12.076,25	10.167,79	13.938,46
Berau	23.352,73	22.364,87	21.135,98	20.498,89	16.693,40
PPU	47.018,03	42.130,14	45.160,69	45.100,57	48.133,90
MAHULU	1.081,75	932,09	489,42	680,75	681,92
Balikpapan	419,57	354,13	302,10	153,81	125,69
Samarinda	8.651,61	6.988,91	5.492,34	5.184,28	9.280,84
Bontang	326,86	352,88	255,43	153,85	0,29
Kalimantan Timur	262.434,52	244.677,98	239.425,34	226.972,07	249.643,19

Sumber: BPS RI, 2025

Jika dilihat dari distribusi produksi padi menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara konsisten sebagai produsen terbesar dengan kontribusi 40-45% dari total produksi provinsi. Kabupaten Paser merupakan produsen terbesar kedua ($\pm 20\%$ total produksi) dengan fluktuasi signifikan (drastis turun di 2023, pulih di 2024). Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kestabilan produksi (± 45.000 ton) selama periode 2020-2024, Kota Bontang mengalami penurunan paling drastis dari 326,86 ton (2020) menjadi hanya 0,29 ton (2024) dan Kota Samarinda menunjukkan tren positif dengan lonjakan produksi tahun 2024 (9.280,84 ton).

Terdapat ketimpangan signifikan dalam produksi padi antar kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser berkontribusi $\pm 65\%$ dari total produksi provinsi, sedangkan wilayah perkotaan

(Balikpapan, Samarinda, Bontang) memiliki kontribusi minimal (<5% total).

Penurunan produksi padi 2020-2023 sejalan dengan pertumbuhan negatif sub-sektor tanaman pangan selama periode tersebut dengan pemulihan produksi tahun 2024 sejalan dengan pertumbuhan positif sub-sektor tanaman pangan (2,49% pada 2024).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan produktivitas (dari 3,57 menjadi 3,96 ton/ha), tantangan utama produksi padi di Kalimantan Timur adalah penurunan luas panen yang signifikan. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dan mengurangi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Rata-rata rendemen pengolahan padi menjadi beras di Kalimantan Timur sekitar 58,2% Tahun 2020 sebesar 152.649,84 ton beras dari 262.434,52 ton padi (rendemen 58,2%), Tahun 2024 sebesar 145,209,53 ton beras dari 249.643,19 ton padi (rendemen 58,2%).

Tabel 2.103. Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

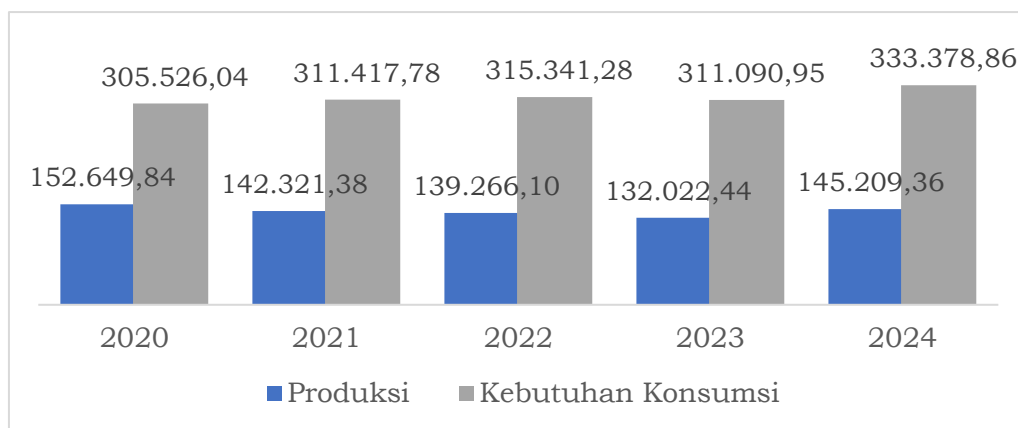
Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	30.459,51	30.230,50	28.037,95	16.640,91	30.762,49
KUBAR	697,54	1.175,83	747,33	767,42	784,27
KUKAR	64.530,52	60.750,49	61.090,11	66.952,24	61.978,93
KUTIM	9.934,06	7.631,26	7.024,36	5.914,28	8.107,56
Berau	13.583,55	13.008,91	12.294,14	11.923,56	9.710,01
PPU	27.348,90	24.505,74	26.268,52	26.233,57	27.997,96
MAHULU	629,22	542,17	284,68	395,97	396,66
Balikpapan	244,05	205,99	175,72	89,47	73,11
Samarinda	5.032,37	4.065,23	3.194,72	3.015,53	5.398,37
Bontang	190,12	205,26	148,57	89,49	0,17
Kalimantan Timur	152.649,84	142.321,38	139.266,10	132.022,44	145.209,53

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Jika ditinjau Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota maka pola distribusi serupa dengan produksi padi, dengan Kutai Kartanegara dan

Paser sebagai produsen utama. Berbeda dengan produksi padi, produksi beras di PPU relatif stabil, Kabupaten Berau menunjukkan kontribusi yang lebih signifikan dalam produksi beras ($\pm 9.000-13.000$ ton/tahun).

Dengan populasi penduduk Kalimantan Timur tahun 2024 sekitar 4.045.860 jiwa, produksi beras 145.209,36 ton pada 2024 setara dengan ketersediaan 35,89 kg/kapita/tahun. Angka ini jauh di bawah konsumsi beras rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (± 72 kg/kapita/tahun), menunjukkan Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan dari luar provinsi.



Gambar 2.113. Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber Data : DPTPH Prov. Kaltim, 2025)

Pola konsumsi beras di Kalimantan Timur cenderung tinggi, mengingat beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, permintaan beras pun terus meningkat. Hal ini memperburuk kesenjangan antara produksi dan kebutuhan lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kalimantan Timur banyak mengandalkan pasokan beras dari daerah luar, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Upaya untuk mengatasi masalah ini tentu saja perlu melibatkan berbagai langkah, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian beras melalui teknologi pertanian yang lebih modern, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah

dalam hal penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertanian beras di Kaltim.

Selain beras, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi komoditas pangan nomor dua setelah padi, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi dalam membudidayakan tanaman jagung khususnya jagung hibrida. Kebutuhan akan produk jagung akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain untuk konsumsi, jagung juga banyak digunakan untuk pakan ternak dan bahan input industri pangan. Peningkatan kebutuhan akan permintaan jagung juga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah produksi jagung tiap tahunnya.

Tabel 2.104. Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	6.569,23	5.615,62	5.358,83	1.538,60	1.071,56
KUBAR	2.376,57	2.832,38	1.981,75	2.917,20	879,48
KUKAR	9.296,99	5.717,84	6.982,08	7.674,00	4.639,98
KUTIM	5.762,85	6.774,56	7.283,61	2.122,40	916,71
Berau	48.881,75	63.023,55	51.072,78	19.335,90	138,18
PPU	1.898,14	2.535,01	503,28	171,60	533,11
MAHULU	2,17	7,94	12,74	3,20	-
Balikpapan	679,79	206,88	356,14	75,10	57,29
Samarinda	410,74	267,21	343,86	118,40	116,69
Bontang	42,18	38,00	40,62	87,90	94,77
Kalimantan Timur	75.920,42	87.018,99	73.935,68	34.044,30	8.447,77

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Produksi jagung di Kalimantan Timur menurun drastis dari 73.935,68 ton pada 2022 menjadi 34.044,30 ton pada 2023 (penurunan sekitar 54%). Kabupaten Berau sebagai produsen terbesar pada 2020-2022, namun mengalami penurunan signifikan pada 2023. Kutai Kartanegara dan Kutai Barat justru menunjukkan peningkatan produksi pada 2023 sementara kabupaten/kota lain mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kontribusi dimana dominasi Berau mulai menurun dan digantikan oleh kabupaten lain seperti Kutai Kartanegara. Pola

produksi yang sangat fluktuatif pada beberapa kabupaten menunjukkan kemungkinan adanya faktor eksternal yang memengaruhi produksi (cuaca, kebijakan, konversi lahan, dll). Penurunan drastis di beberapa kabupaten utama seperti Kutai Timur yang turun dari 7.283,61 ton (2022) menjadi 2.122,40 ton (2023). Sementara produksi di wilayah perkotaan (Balikpapan, Samarinda) relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya.

2) Hortikultura

Tanaman hortikultura mencakup beragam jenis tanaman yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, mulai dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, hingga tanaman obat. Tanaman-tanaman ini umumnya ditanam di lahan yang terbatas, seperti kebun rumah atau lahan pertanian kecil, dengan cara budidaya yang tepat dan inovatif, tanaman hortikultura dapat memberikan hasil yang optimal dan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 bahwa di Kalimantan Timur ditetapkan 3 komoditas prioritas sub sektor buah-buahan adalah Pisang, Pepaya dan jeruk. Sedangkan komoditas sayuran adalah bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Tabel 2.105. Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Komoditas	Produksi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pisang	95.528	130.656	127.562	156.132	159.120
Pepaya	15.121	24.068	13.674	29.442	12.882
Jeruk	12.517	11.457	7.755	8.396	7.349
Bawang Merah	267	72	114	252	345
Cabai Rawit	9.081	8.367	7.778	7.470	6.468
Cabai Besar	4.290	5.916	2.083	1.183	1.007

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Produksi pisang pada tahun 2024 merupakan produksi komoditas buah-buahan terbesar diantara komoditas tanaman lainnya, dan meningkat sebanyak 1,91 persen (2.988 ton) dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.106. Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kab/Kota	Produksi (ton)					
	Pisang	Pepaya	Jeruk Siam	Bawang Merah	Cabai Rawit	Cabai Besar
Paser	70.423,50	295,64	3.224,20	48,65	685,11	53,80
KUBAR	976,99	357,51	121,21	-	307,55	25,40
KUKAR	11.391,36	1.810,82	1.629,18	200,16	1.971,15	488,05
KUTIM	87.735,45	847,92	1.706,36	38,64	951,81	132,24
Berau	161,50	162,33	-	15,40	298,95	57,19
PPU	2.350,56	373,05	582,38	29,11	973,76	3,89
MAHULU	4,74	0,93	-	-	2,74	-
Balikpapan	16.239,00	18.440,40	21,92	2,10	667,66	21,61
Samarinda	5.262,23	11.132,51	277,51	-	129,90	35,47
Bontang	106,18	72,29	3,82	-	69,70	43,90
Kalimantan Timur	194.651,52	33.493,38	7.566,58	334,06	6.058,33	861,55

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/kota dengan produksi pisang terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur dan berkontribusi sebesar 45,07 persen terhadap total produksi buah-buahan di Kalimantan Timur.

Sementara itu untuk komoditas bawang merah, cabai rawit dan cabai besar cukup fluktuatif, kecuali untuk cabai besar yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan produksi cabai besar di Kalimantan Timur berdampak langsung pada ketersediaan pasokan cabai di pasar lokal, yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Inovasi dalam teknologi pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana serta pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan produksi di Kalimantan Timur.

3) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

Tabel 2.107. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024*

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	125.320	73.580	0,43
2.	Kelapa Dalam	19.624	7.843	0,46
3.	Lada	7.729	5.080	0,73
4.	Kakao	7.630	2.543	0,13
5.	Kelapa Sawit	1.473.772	18.667.978	13,39

Ket : *) angka sementara; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025

Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2024. Upaya pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi terus dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun dapat terintegrasi dari hulu-hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau.

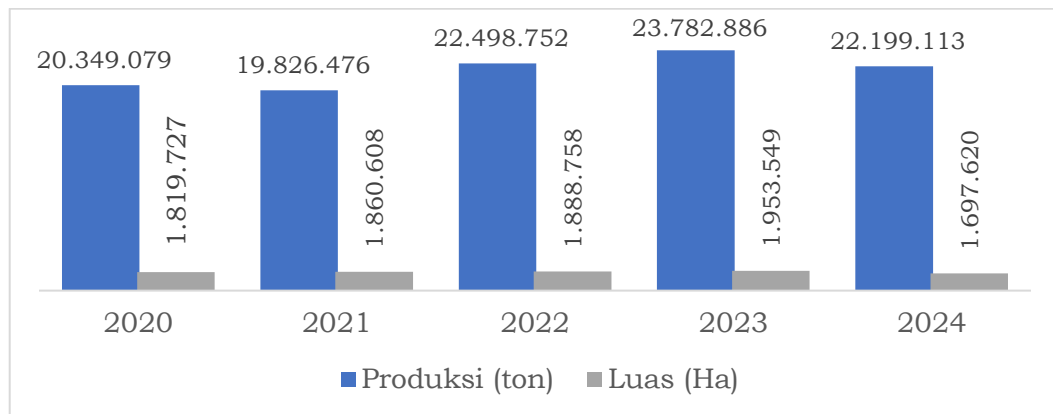
Tabel 2.108. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024* (ton)

Kabupaten/Kota	Kakao	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Lada
Paser	6	9.705	622	2.762.937	18
KUBAR	21	35.107	218	1.233.000	6
KUKAR	41	20.729	2.619	3.446.893	2.961
KUTIM	1.456	1.557	679	7.759.931	156
Berau	725	100	1.794	2.785.000	556
PPU	1	2.157	1.022	585.377	1.240
MAHULU	289	-	4	78.485	-
Balikpapan	1	3.626	562	250	127

Samarinda	3	599	306	15.371	16
Bontang	-	-	17	734	-
KALTIM	2.543	73.580	7.843	18.667.978	5.080

Ket : *) angka sementara; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025

Komoditas perkebunan yang sangat mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit. Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2024 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya.



Gambar 2.114. Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir, dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Komoditi Karet Rakyat di Kab. Kutai Barat, Kab. Paser, Kab. Kukar, dan Kab. Kutim memiliki potensi peningkatan produksi yang meningkat. Hal ini ditandai dengan besarnya calon tanaman produktif dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma. Disisi lain pada Komoditi Karet di Kab. Kubar, Kab. Kukar, dan Kab. Paser memiliki luasan Tanaman Tua/Rusak yang cukup tinggi dengan potensi Produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya peremajaan ataupun rehabilitasi pada komoditi tanaman tersebut.

4) Peternakan

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak maupun produksi daging.

Tabel 2.109. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (ekor)

No	Hewan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sapi	119.974	121.290	108.613	57.757	62.678
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69
3	Kambing	69.929	68.997	58.522	26.978	44.308
4	Domba	635	694	642	611	935
5	Babi	83.652	76.292	45.839	18.957	27.973
6	Kerbau	6.552	6.539	6.490	1.325	4.254
7	Kuda	95	143	95	24	94
8	Kelinci	10.830	9.462	7.931	857	1.006
9	Ayam Buras	4.435.205	4.815.976	5.183.873	686.916	2.569.524
10	Ayam Pedaging	59.402.832	60.804.149	61.412.191	54.860.076	55.408.677
11	Ayam Petelur	1.218.994	1.223.739	1.340.217	1.282.503	1.295.328
12	Itik	254.749	261.263	269.564	47.290	155.377
13	Itik Manila	52.823	64.178	67.608	45.791	21.090
14	Puyuh	79.222	94.339	88.143	19.518	16.161

Ket : *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2025

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 masih sangat didominasi oleh ternak unggas yaitu sebesar 99,73 persen,

sedangkan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan kelinci) hanya sebesar 0,27 persen. Penyebab turunnya jumlah populasi ternak besar terutama sapi potong diakibatkan oleh pemotongan sapi betina, adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), serta biaya produksi yang mahal.

Tabel 2.110. Produksi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Produksi/Konsumsi	2020	2021	2022	2023	2024*
PRODUKSI						
1	Daging Ayam Potong (Ton)	55.280,28	56.584,34	57.150,18	64.525,43	65.170,69
2	Daging Sapi (Ton)	8.349,82	7.316,54	7.836,42	7.478,68	7.947,72
3	Telur (Ton)	14.008,58	14.402,58	15.594,35	10.858,94	12.618,09
KONSUMSI						
1	Daging Ayam Pedaging (Ton)	60.372,41	65.702,56	67.609,21	71.564,91	72.177,90
2	Daging Sapi (Ton)	10.694,27	9.924,65	10.088,37	11.513,37	12.001,20
3	Telur (Ton)	23.667,38	26.433,12	26.018,62	28.606,01	23.336,94
DEFISIT/SURPLUS						
1	Daging Ayam Potong (%)	- 8,43%	- 13,88%	- 15,47%	- 9,84%	- 9,71%
2	Daging Sapi (%)	- 21,92%	- 26,28%	- 22,32%	- 35,04%	- 33,78%
3	Telur (%)	- 40,81%	- 45,51%	- 40,06%	- 62,04%	- 45,93%

Ket : *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024

Akibat rendahnya produksi daging dan telur belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging dan telur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut masih mendatangkan dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peran swasta/usaha peternakan rakyat masih rendah, biaya investasi usaha tinggi, dan manajemen budidaya ternak belum optimal.

Tabel 2.111. Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	509,30	469,17	1.020,96	341,03	335,20
KUBAR	296,51	240,43	298,88	254,57	241,70
KUKAR	909,12	762,52	870,10	643,86	878,46
KUTIM	840,56	883,84	766,15	893,85	1.197,50
Berau	636,78	506,93	705,49	537,08	522,66
PPU	473,59	545,63	599,50	564,74	901,88

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
MAHULU	14,53	13,11	17,38	14,47	26,85
Balikpapan	1.692,49	1.335,79	1.149,55	1.447,10	1.179,19
Samarinda	2.096,74	1.918,07	1.700,55	2.075,32	2.096,68
Bontang	880,21	641,04	707,86	706,66	567,60
Kalimantan Timur	8.349,82	7.316,54	7.836,42	7.478,68	7.947,72

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025

Daging ayam merupakan salah satu daging yang memegang peranan cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ayam potong merupakan salah satu ternak penghasil daging yang cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat asal protein hewani.

Tabel 2.112. Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	2.601,86	2.627,88	2.653,23	1.650,79	1.667,29
KUBAR	2.409,17	2.409,64	2.434,67	2.358,27	2.318,85
KUKAR	13.262,74	13.989,87	14.126,97	5.188,18	5.240,06
KUTIM	2.740,38	3.561,20	3.597,75	3.637,39	3.673,76
Berau	1.684,25	1.689,92	1.707,75	10.937,63	11.047,01
PPU	1.840,90	1.704,67	1.721,72	1.179,13	1.190,92
MAHULU	69,87	70,73	71,43	-	-
Balikpapan	11.888,42	12.228,08	12.351,30	15.279,67	15.432,47
Samarinda	14.619,26	14.799,23	14.946,29	20.285,32	20.488,18
Bontang	4.163,42	3.503,11	3.539,08	4.009,05	4.049,14
Kalimantan Timur	55.280,28	56.584,34	57.150,18	64.525,43	65.170,69

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025

Produksi daging ayam potong di Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan menunjukkan tren yang menarik selama periode 2020-2024. Lonjakan produksi di Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda pada tahun 2023 menjadi pendorong utama peningkatan total produksi daging ayam potong di Kalimantan Timur. Sementara itu, beberapa kabupaten justru mengalami penurunan

produksi pada periode yang sama. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan produksi secara umum di sebagian besar wilayah, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda.

Produksi telur juga belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Tabel 2.113. Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Paser	1.455,62	1.556,80	1.483,73	196,51	239,99
KUBAR	384,23	418,57	424,55	292,93	334,42
KUKAR	3.607,93	3.669,03	3.726,94	3.377,63	3.687,30
KUTIM	1.308,24	1.310,25	1.799,30	533,58	871,56
Berau	2.130,79	2.371,80	2.262,04	1.878,66	1.900,42
PPU	896,93	770,45	777,92	487,03	755,60
MAHULU	44,94	49,01	48,15	7,99	13,71
Balikpapan	938,81	937,43	945,85	879,94	905,78
Samarinda	3.094,14	3.195,57	4.027,44	3.172,79	3.818,11
Bontang	146,95	123,67	98,43	31,88	91,20
Kalimantan Timur	14.008,58	14.402,58	15.594,35	10.858,94	12.618,09

Ket: *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025

Kalimantan Timur konsisten mengalami defisit produksi telur antara tahun 2020 hingga 2024, dengan persentase defisit berfluktuasi yang berfluktuasi antara 40 hingga 62 persen. Dengan demikian, Kalimantan Timur memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor telur dari luar daerah, dengan defisit konsisten berkisar 40-62% dari total kebutuhan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kemampuan produksi

lokal dan kebutuhan konsumsi, dengan defisit terbesar terjadi pada 2023. Data 2024 menunjukkan tren pemulihan produksi setelah penurunan tajam di 2023, dan disertai penurunan konsumsi, sehingga defisit berkurang dibanding 2023. Dengan defisit rata-rata sekitar 46,87% selama periode 5 tahun, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar untuk mencapai swasembada telur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat di bidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Adanya sarana dan prasarana peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan produksi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) serta optimalisasi sistem integrasi ternak dengan sektor lain seperti integrasi sapi perkebunan sawit, integrasi sapi lahan pasca tambang, dan integrasi sapi perhutanan sosial.

D. Kehutanan

Pengelolaan sumber daya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumber daya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Dalam rangka menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumber daya hutan seluas 8.149.097,84 Ha yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Perlindungan Alam (KPA) (Kepmen LHK Nomor 584 Tahun 2024), hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan jasa lingkungan.

No	Nama Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hutan Alam	1.122.077,09	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	887.293,41
2	Hutan Tanaman	3.484.923,24	3.314.494,10	3.206.086,00	4.613.355,95	5.146.333,56
3	Non-Kehutanan	227.281,22	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.805,98
TOTAL		4.834.281,55	4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.293.432,95

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Terjadi sedikit penurunan produksi di tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini harga kayu bulat cenderung turun, sehingga perusahaan kehutanan cenderung mengurangi produksi.

Tabel 2.115. Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2020	38.737,80
2.	2021	39.900,80
3.	2022	38.866,17
4.	2023	38.861,16
5.	2024	38.165,00
TOTAL		194.530,93

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 274.477 Ha (diperbaharui setiap 5 tahun).

Secara keseluruhan, total luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2020–2024 yaitu seluas 194.530,93 Ha. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi kerusakan hutan seluas 12.766,01 Ha dengan rincian *illegal logging* seluas 1.049,64 Ha, kebakaran hutan seluas 6,869,65 Ha, dan penambahan seluas 4.846,71 Ha (Dishut Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat dengan luas total 233.099,40 Ha (Kepmen LHK Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023). Realisasi perhutanan sosial sampai dengan tahun 2024 sebesar 330.184,61 Ha yang dikelola oleh 179 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial).

Kalimantan Timur memiliki tutupan hutan yang luas, termasuk hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan lahan gambut, Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Timur memiliki distribusi luas hutan yang cocok untuk pengembangan perhutanan sosial berbasis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kondisi geografis seperti aksesibilitas terbatas dan topografi berbukit menjadi tantangan dalam pemanfaatan HHBK dan pemasaran hasil hutan, namun juga menjadi potensi untuk pengembangan ekowisata berbasis hutan.

Terdapat komunitas masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang selama ini telah mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari. Sebagian besar tenaga kerja lokal di daerah pedalaman masih tergantung pada sektor kehutanan, sehingga pengembangan HHBK dan HHK memiliki dampak ekonomi langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 2.116. Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Jasling dan HHBK	Kabupaten/ Kota	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE)					JUMLAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ekowisata	Balikpapan Berau, Kukar, Kutim			400.000.000	649.550.001	631.348.342	1.680.898.343

No	Jenis Jasling dan HHBK	Kabupaten/ Kota	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE)					JUMLAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Kerajinan	Kukar					220.935.500	220.935.500
3	HHBK Lainnya	Paser, Kukar, Balikpapan, Kubar	5.000.000	3.485.000	184.298.500	346.160.000	150.310.000	689.253.500
4	Udang	Kukar			292.770.000	593.425.000	124.557.000	1.010.752.000
5	Perikanan	Kukar dan Berau			7.300.000	50.225.500	97.986.000	155.511.500
6	Madu	Paser, Berau, Kukar dan Balikpapan		3.150.000	14.100.000	33.415.000	84.790.000	135.455.000
7	Padi	Kukar					63.000.000	63.000.000
8	Biji Kopi	Kutim				22.750.000	53.377.000	76.127.000
9	Kepiting	Kukar			158.605.000	474.045.000	43.635.000	676.285.000
10	Rotan Sega	Berau					5.000.000	5.000.000
11	Nira Aren	Berau					3.251.000	3.251.000
12	Jeruk	Kutim					3.200.000	3.200.000
13	Biji Kemiri	Kutim					1.800.000	1.800.000
14	Buah Naga	Balikpapan			5.600.000	256.000.000	770.000	262.370.000
15	Talas	Paser					100.000	100.000
16	Karet	Balikpapan	1.500.000	475.392.912	111.277.100			610.545.012
17	Durian	Balikpapan		7.000.000	18.000.000	24.000.000		49.000.000
18	Lada	Balikpapan			14.895.000	225.000.000		239.895.000
19	Nangka	Balikpapan			3.000.000			3.000.000
20	Silvofishery	Kutai Kartanegara			1.720.000			1.720.000
21	Bambu Lainnya	Kutai Kartanegara			1.600.000			1.600.000
22	HHK Lainnya	Balikpapan			730.000			730.000
23	Sarang Burung Walet	Kutai Kartanegara			700.000			700.000
24	Buah-Buahan/Umbi-Umbian Talas Lainnya	Balikpapan				131.100.000		131.100.000
25	Kunyit/Kunir	Kutai Timur				130.000		130.000
26	Ki Sereh	Balikpapan				120.000		120.000
	JUMLAH		6.500.000	489.027.912	1.214.595.600	2.805.920.501	1.484.059.842	6.022.478.855

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2025

Tabel 2.117. Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri Di Kalimantan Timur

	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hutan Alam					
	• Produksi (M3)	1.122.077,09	1.261.179,69	1.009.177,57	751.972,92	1.168.483,44
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	544.750,12	546.063,52	447.158,11	226.508,86	161.889,89
	• Persentase (%)	48,55	43,30	44,31	30,12	13,85
2	Hutan Tanaman					
	• Produksi (M3)	3.484.923,24	3.314.494,10	3.206.086,34	4.613.355,95	5.118.843,31
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	11.169	738.607,28	780.691,08	1.144.755	1.135.024,08

	• Persentase (%)	0,32	22,28	24,35	24,81	22,17
3	Non Kehutanan					
	• Produksi (M3)	227.281,22	260.724,00	218.807,27	194.763,82	259.812,64
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	158.464,48	546.063,52	82.219,54	78.327,00	56.913,06
	• Persentase (%)	69,72	209,44	37,58	40,22	21,91
Jumlah						
	• Produksi (M3)	4.834.281,55	4.836.397,79	4.434.071,18	5.560.092,69	6.547.139,39
	• Penyerapan Industri di Kaltim (M3)	714.383,20	1.830.734,32	1.310.068,73	1.449.590,89	1.353.827,03
	• Persentase (%)	14,78	37,85	29,55	26,07	20,68

Sumber : Dinas Kehutanan, 2025

Nilai transaksi ekonomi dari KUPS dan KTH menunjukkan tren peningkatan, meskipun fluktuatif per tahun tergantung pada komoditas dan dukungan pasar. Komoditas HHBK seperti madu hutan, bambu, rotan, getah damar, kemiri, aren, dan gaharu menjadi penyumbang NTE terbesar di banyak kabupaten. Beberapa KUPS telah berhasil naik kelas (*pemula* → *tumbuh* → *maju*), yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha dan daya saing komunitas.

NTE merupakan indikator outcome prioritas dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan PermenLHK. NTE mencerminkan kontribusi ekonomi langsung dari hutan kepada masyarakat, berbeda dengan indikator luas atau jumlah kelompok semata. NTE juga mencerminkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kehutanan non-ekstraktif (berbasis HHBK/HHK), sejalan dengan transformasi ekonomi hijau dan rendah karbon Kalimantan Timur.

E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050

potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW. Potensi Tenaga Air sebesar 2,118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3,112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13,479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*triliun cubic feet*).

Tabel 2.118. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

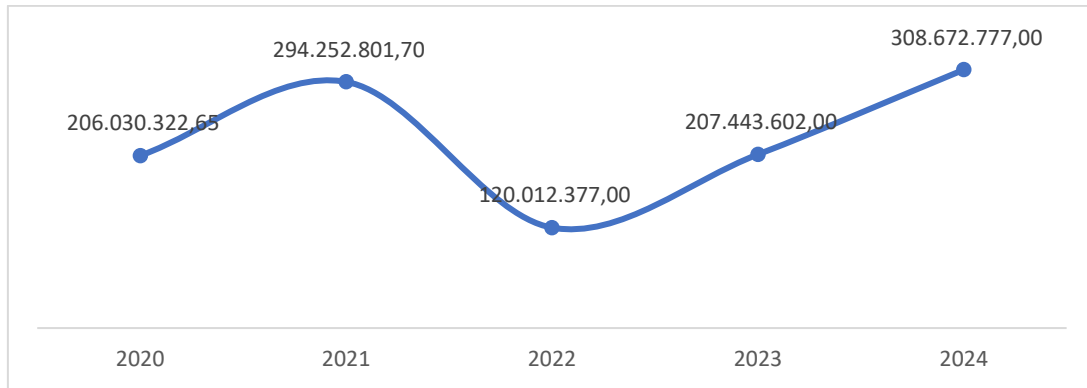
		BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6.994.663,83	979.252,94	0,98	12,14%
2	Minyak Bumi	21.149.991,51	2.960.998,8	2,96	36,71%
3	Gas Bumi	21.437.322,89	3.001.225,20	3,00	37,21%
4	Batubara	8.036.082,68	1.125.051,58	1,13	13,95%
	Total	57.618.060,91	8.066.528,53	8,07	100%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 12,14 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

2) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2023 adalah sebesar 207,44 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.

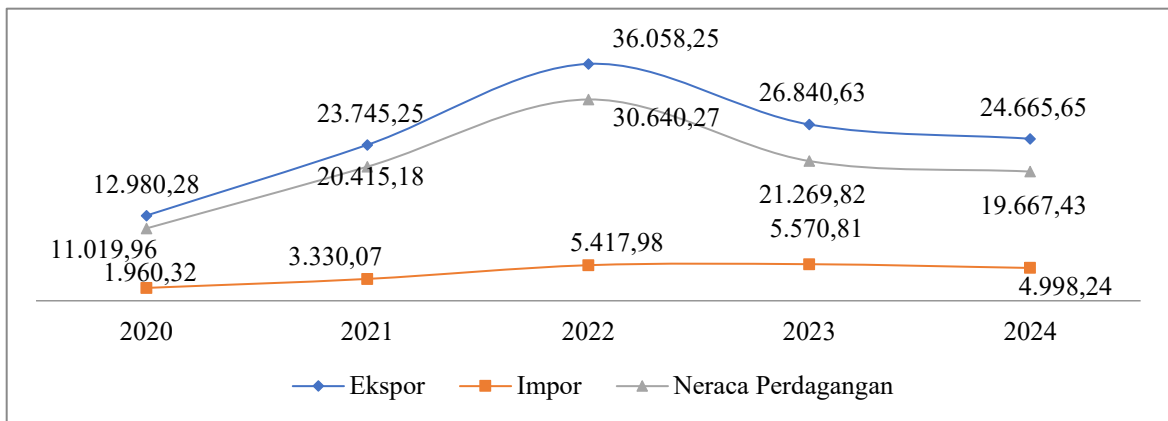


Gambar 2.115. Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Ton)
(Sumber: DESDM Kalimantan Timur, 2025)

Pada tahun 2024 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya cadangan dari lapangan-lapangan migas yang telah memasuki fase produksi lanjut (*mature fields*) serta terbatasnya kegiatan eksplorasi sumber cadangan baru. Selain itu, gangguan operasional seperti keterlambatan pengeboran, keterbatasan fasilitas produksi, dan kondisi cuaca ekstrem turut memengaruhi capaian produksi.

F. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Salah satu bagian penting kegiatan perdagangan adalah ekspor dan impor, dimana kegiatan perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebagai instrumen penting, neraca perdagangan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi ekspor dan impor.



Gambar 2.116. Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2020-2024, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Surplus perdagangan juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya daya saing produk lokal sehingga permintaan produk lokal tinggi untuk di ekspor meningkat.

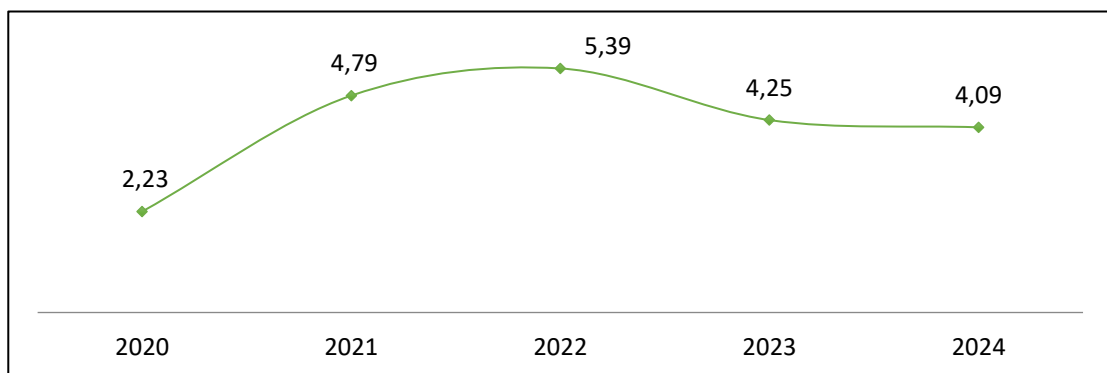
Tabel 2.119. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (Juta US\$)

No	Golongan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
Migas		2.068,20	1.605,15	2.998,12	2.612,66	2.507,40
1	Minyak Mentah	7,27	-	8,48	-	-
2	Hasil Minyak	108,64	7,40	763,12	683,52	866,75
3	Gas	1.032,38	1.597,75	2.226,52	1.929,13	1.640,65
Non Migas		14.113,59	22.554,76	33.052,95	24.228,07	22.158,25
1	Hasil Tambang	9.600,36	17.767,61	27.665,96	19.981,65	18.059,85
2	Hasil Industri	2.222,52	4.780,52	5.377,14	4.224,58	4.061,42
3	Hasil Pertanian	9,11	6,63	9,85	21,84	36,98
Total Ekspor		12.980,28	24.159,90	36.051,07	26.840,72	24.665,65

Ket: Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Ekspor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada tahun 2022 hingga mencapai US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang utamanya bersumber dari ekspor batubara seiring tingginya permintaan dan harga batubara di pasar global. Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar - 8,73 persen dibanding tahun 2023 yaitu dari US\$ 26,84 miliar menjadi US\$ 24,67 miliar. Penurunan disebabkan adanya fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar ekspor terutama di sektor nonmigas. Komoditas ekspor nonmigas yang mengalami penurunan yang signifikan adalah batubara, pupuk, minyak kelapa sawit, dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 dengan peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$. Namun, nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara menurun pada tahun 2024 mencapai 4,09 miliar US\$.



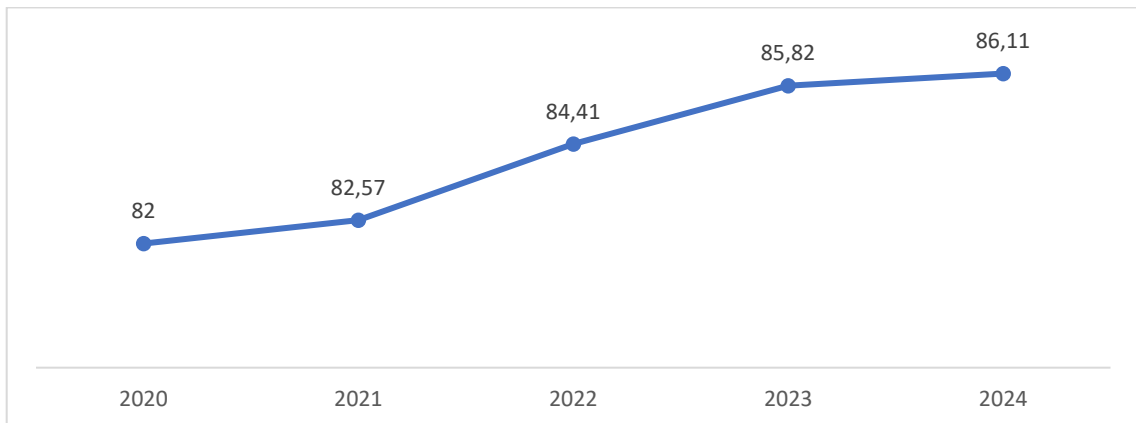
Gambar 2.117. Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar US\$)
(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2025)

3) Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2024 meningkat di angka 86,11 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 85,82. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar 2.118. Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM, 2025)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 78,74 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun masih terdapat komponen yang mengalami penurunan yakni pelaporan kinerja yang dikarenakan masih belum optimalnya laporan kinerja pemda maupun PD dengan analisis benchmark capaian kinerja provinsi lain, analisis

efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.

Tabel 2.120. Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,92	25,94	26,06	25,89	26,14
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,97	18,99	22,50	22,48	22,74
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,76	12,84	12,76	12,56
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	6,21	6,21	16,70	16,76	17,29
e.	Capaian Kinerja	-	13,82	13,92	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,50	74,89	76,55	78,10	78,74
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/414/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional.

4) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya, Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121. Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator	2024
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	90,33
2	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100
3	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	98
4	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100
5	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100
6	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

B. Keuangan dan Aset Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap

kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen, Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 adalah 61,43 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel 2.122. Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Ribuan Rupiah)	Total Pendapatan (Ribuan Rupiah)	DOF (Persen)
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
2022	8.997.262.537,26	16.804.693.776,01	53,54
2023	10.653.844.690,25	17.750.987.305,17	60,02
2024	10.239.889.614,11	22.084.696.501,92	46,37
Rata-rata	8.023.897.700,38	14.704.825.919,34	61,43

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2025

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2024. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Indeks Pengelolaan Aset merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja penatausahaan Barang Milik Daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Indikator ini meliputi 4 sasaran strategis yakni Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang – undangan, Pengawasan serta Pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif dan Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal.

Tabel 2.123. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024

No	Uraian	Nilai	Bobot (%)	Indeks
Sasaran Strategis : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif				
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	3,70	10	0,37
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	4,00	10	0,40
Sasaran Strategis : Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan				
3	Ketepatan waktu penetapan RKBMD	1,00	5	0,05
4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	0,80	15	0,12
5	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	4,00	10	0,40
Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif				
6	Tindak Lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	1,00	15	0,15
7	Tindak lanjut Pengelolaan BMD	1,60	20	0,32
Sasaran Strategis : Administrasi BMD yang Andal				
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	3,00	15	0,45
Total		19,10	100	2,26

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Pengelolaan Aset dihitung berdasarkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dalam

hal ini melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Nilai kategori 0,1-1,0 (*Buruk*), 1,1-2,0 (*Cukup*), 2,1-3,0 (*Baik*), 3,1-4,0 (*Sangat Baik*), Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,26 (*Baik*) dengan bobot nilai tertinggi melalui parameter sertifikasi dokumen kepemilikan BMD dengan skor 0,45 dan nilai terendah melalui parameter ketepatan waktu penetapan RKBMD. Oleh karena itu perlu penguatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah secara sistematis dan berbasis data, optimalisasi pemanfaatan aset melalui digitalisasi sistem informasi manajemen aset, peningkatan kompetensi SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala, serta penegakan regulasi dan pengawasan internal.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel 2.124. Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%)	26	57	-	102
2	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)	9	27	-	182

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

5) Pengawasan

1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau

Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini. Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3.234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai

pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap: (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

Tabel 2.125. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2025

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2023 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap

rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel 2.126. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	80	81	80	85	80

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022, data 2023 : data.kaltimprov.go.id

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2026. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.127. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					7	8	8	9	10	11	12					
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
		Pendidikan														
1	1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100	1.952.345.585.021	53,57	1.722.341.286.686	53,57	88,22	53,57	1.722.341.286.686	53,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK		%	100	81,5		81,50		81,5		81,50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		%	88,48	58,32		65,91		88,22		58,32		65,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		%	87,49	71,02		81,17				71,02		81,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Kebinekaan SMA,		%	94,87	71,84		75,72				71,84		75,72	Dinas Pendidikan dan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					7	8	8	9	10	11	12							
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12			
			SMK dan Pendidikan Khusus												Kebudayaan			
			Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69		73,37		108,39		73,37		108,39		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34		66,53		110,26		66,53		110,26		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79		75,8		95,95		75,8		95,95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94		89,54		95,26		89,54		95,26		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
2	1004	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100	16.185.551.800	99,69	12.128.636.282	99,69	74,93	99,69	12.128.636.282	99,69	74,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan													
3	1022	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10,8	216.115.843.845	8	132.185.108.847	125,93	61,16	8	132.185.108.847	125,93	61,16	Dinas Kesehatan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
4	1032	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenanga	Ha	9.544	339.044.432.326	9.956	294.215.840.101	104,32	86,78	9.956	294.215.840.101	104,32	86,78	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
			n provinsi (Ha)												
			Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8		3,1		110,71		3,1		110,71		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	liter/detik	126		135		107,14		135		107,14		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	77		77,4		100,52		77,4		100,52		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
5	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	163.295.769.000	59,77	159.070.983.964	103,68	97,41	59,77	159.070.983.964	103,68	97,41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	11,15	47.483.670.254	13,61	43.855.291.393	122,06	92,36	13,61	43.855.291.393	122,06	92,36	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	1	1.437.462.077.186	1	1.430.745.652.848	100,00	99,53	1	1.430.745.652.848	100,00	99,53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	82,09		82,21		100,15		82,21		100,15		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2			3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
12	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65	4.525.826.031	75,63	4.050.798.581	116,35	89,50	75,63	4.050.798.581	116,35	89,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
13	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	400	4.250.481.300	400	3.788.160.637	100,00	89,12	400	3.788.160.637	100,00	89,12	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pangan													
14	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,6	3.832.964.000	97,64	2.995.162.651	100,04	78,14	97,64	2.995.162.651	100,04	78,14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,3		89,06		103,20		89,06		103,20		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	2094	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya	Kecamatan	1	3.802.800.000	1	3.572.190.133	100,00	93,94	1	3.572.190.133	100,00	93,94	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase daerah rawan pangan	%	0		0		200,00		0		200,00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Lingkungan Hidup												
16	213	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤ (tercemar ringan) Indeks	5	7.608.055.705	2,65	7.247.420.586	147,00	95,26	2,65	7.247.420.586	147,00	95,26	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Standar Pencemar Udara	(Baik) Indeks	48		35		72,92		35		72,92		Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%						
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Administrasi Kependudukan dan Capil													
		Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa													
17	21304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	25	6.804.582.300	41,02	6.056.987.962	164,08	89,01	41,02	6.056.987.962	164,08	89,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
		Perhubungan													
18	21502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175	53.078.526.392	144	50.376.678.384	117,71	94,91	144	50.376.678.384	117,71	94,91	Dinas Perhubungan
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan	%	82		82		100,00	82	100,00		Dinas Perhubungan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4		7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21	21707	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	5	6.914.608.816	5,02	6.443.501.476	100,40	93,19	5,02	6.443.501.476	100,40	93,19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20	21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20	916.990.000	20	858.823.378	100,00	93,66	20	858.823.378	100,00	93,66	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Penanaman Modal													
21	21802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.634.777.000	2	2.423.319.375	100,00	91,97	2	2.423.319.375	100,00	91,97	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2				3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
28	3	2	7	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	39,29	23.040.262.077	40,29	16.364.239.967	102,55	71,02	40,29	16.364.239.967	102,55	71,02	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,5		32		90,14		32		90,14		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
29	3	2	7	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,36	19.539.925.010	25	16.819.731.444	98,58	86,08	25	16.819.731.444	98,58	86,08	Dinas Perkebunan
30	3	2	7	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis	Skor	96,21	30.011.661.369	95,53	28.278.516.418	99,29	94,23	95,53	28.278.516.418	99,29	94,23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		112,31		128,31		112,31		128,31		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
31	3	203	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34	4.162.439.510	34	3.920.114.286	100,00	94,18	34	3.920.114.286	100,00	94,18	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41,39		79,19		191,33	79,19	191,33				
32	3	203	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	Ha	50702	435.780.000	62772	372.448.408	123,81	85,47	62772	372.448.408	123,81	85,47	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2			3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
33	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	5.203.314.220	107,1	5.094.864.384	107,59	97,92	107,1	5.094.864.384	107,59	97,92	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	8.699.894.245	95,41	8.294.905.335	103,94	95,34	95,41	8.294.905.335	103,94	95,34	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		111,29		117,01		111,29		117,01		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68		164,69		166,89		164,69		166,89		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
35	3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat	%	100	6.327.817.950	100,31	5.742.777.830	100,31	90,75	100,31	5.742.777.830	100,31	90,75	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2			3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	
					bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)													
36	3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	77	3.048.100.000	77,04	2.948.924.962	100,05	96,75	77,04	2.948.924.962	100,05	96,75	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
37	3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	26,5	9.606.208.785	30,77	9.350.459.368	116,11	97,34	30,77	9.350.459.368	116,11	97,34	Dinas Perkebunan	
					Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	11,15		13,48		120,90		13,48		120,90		Dinas Perkebunan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
38	3207	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	1.420.405.100	99,99	1.324.245.223	100,25	93,23	99,99	1.324.245.223	100,25	93,23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kehutanan													
39	3283	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1		0,16		184,00		0,16		184,00		Dinas Kehutanan
			Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	273.399.865.737	0,74	256.067.357.307	157,45	93,66	0,74	256.067.357.307	157,45	93,66	Dinas Kehutanan
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850		1632,96		192,11		1632,96		192,11		Dinas Kehutanan
			Produksi Hasil Hutan Kayu	m3/tahun	442000		6293432,95		142,39		6293432,95		142,39		Dinas Kehutanan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
43	3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	243246,516		1180525		485,32		1180525		485,32		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	43,76	48.846.744.083	43,98	25.234.701.243	100,50	51,66	43,98	25.234.701.243	100,50	51,66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	33,56		52,44		156,26		52,44		156,26		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
44	3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,1	33.711.694.530	34,26	22.786.190.106	100,47	67,59	34,26	22.786.190.106	100,47	67,59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Pertambahan daya listrik yang	kWp	250		178,4		71,36		178,4		71,36		Dinas Energi dan Sumber

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
			bersumber dari EBT												Daya Mineral
			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		100		100,00		100		100,00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97		91,71		98,64		91,71		98,64		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Perdagangan												
45	304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	16	989.590.400	12,87	976.213.698	80,44	98,65	12,87	976.213.698	80,44	98,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4												12
			Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85		69		81,18		69		81,18		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
46	3305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	67	1.220.347.800	28	1.183.406.551	41,79	96,97	28	1.183.406.551	41,79	96,97	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Perindustrian													
47	3312	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,2	11.444.463.700	0	11.241.779.929	0,00	98,23	0	11.241.779.929	0,00	98,23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
																		Menengah
					Transmigrasi													
					Urusan Pendukung Sekretariat Daerah													
48	4	01	02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	Indeks	72		88,217		122,52		88,217		122,52		Biro Organisasi
						Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44		47,13		107,11		47,13		107,11		Biro Organisasi
						Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Perangkat Daerah	1	6.694.733.425	4.730.044.136	4	400,00	70,65	4	4.730.044.136	400,00	70,65	Biro Organisasi

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						7	8	9	10	11	12					
1	2		3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
49	5	0302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	29.320.781.825	90,43	26.043.645.288	100,48	88,82	90,43	26.043.645.288	100,48	88,82	Badan Kepegawaian Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan													
50	5	0402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86	21.211.438.300	120,3	18.951.631.911	139,88	89,35	120,3	18.951.631.911	139,88	89,35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Penelitian dan Pengembangan													
			Penghubung													
			Pengawasan Urusan Pemerintah													
			Inspektorat													
51	6	0102	PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	8.465.212.716	100	7.535.928.005	100,00	89,02	100	7.535.928.005	100,00	89,02	Inspektorat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n- 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n- 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%						
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
		Urusan Pemerintahan Umum													
		Kesatuan Bangsa dan Politik													

Keterangan :

Sangat Tinggi : > 90,01



Tinggi : 75,01 - 90



Sedang : 65,01 - 75



Rendah : 50,01 - 65



Sangat Rendah : < 50



Dari total 51 (lima puluh satu) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2024, terdapat sebanyak 90 (sembilan puluh) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 71 (tujuh puluh satu) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dan sebanyak 19 (sembilan belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024.

Tabel 2.128. Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target RPD Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,32	78,4	78,79	100,50
Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	14,05	14,03	99,86
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,1	10,10	10,02	99,21
Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82	74,82	74,94	100,16
	Prevalensi Stunting	%	12,83	21,00	22,9	90,95
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,46	5,28	5,14	102,65
Sasaran 4: Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,31	69,00	66,97	97,06
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,10-4,90	5,50-6,30	6,17	97,94
	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,78	5,78	100,00
	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,316	0,321	98,42
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	%	5,90-6,70	6,40-7,20	9,04	125,56
Sasaran 6: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,86	0,75	0,799	93,47
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,150	0,135	0,154	85,93
	Tingkat inflasi	%	4,5	2,50-3,50	1,47	158,00

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target RPD Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,74	7,74	7,89	101,94
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	76,05	76,63	100,76
	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	%	31,05	31,05	38,59	124,28
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,52	53,80	52,64	97,84
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,95	83,61	85,16	101,85
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,17	89,69	91,43	101,94
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,35	83,91	84,03	100,14
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	%	23,32	23,32	50,15	215,05
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	10,39	11,91	12,14	101,93
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00 (B)	74,00 (B)	A (85,16)	115,08
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86,50	86,11	99,55
	Sistem Merit	Nilai	270	275	271	98,55
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,9	3,00	3,79	126,33
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78,5 (BB)	78,50 (BB)	78,74 (BB)	100,31
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,476	3 Skor 3,200	3 Skor 3,203	100,09

Dari 4 tujuan dan 11 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2024, terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 18 (delapan belas) indikator telah melampaui target di tahun 2024, dan sebanyak 11 (sebelas) indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Pada wilayah Kalimantan Timur masih terdapat indikator yang memiliki kinerja belum optimal. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diidentifikasi berdasarkan analisis kondisi perekonomian dan sosial daerah secara makro, serta hasil capaian pada prioritas pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan hasil capaian Prioritas Pembangunan Daerah serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 4 (empat) Aspek permasalahan yaitu (1) Aspek Sumber Daya Manusia, (2) Aspek Ekonomi Wilayah, (3) Aspek Lingkungan Hidup, dan (4) Aspek Tata Kelola.

Pada **Aspek Sumber Daya Manusia**, pembangunan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan kompleks yang secara langsung terkait dengan beberapa permasalahan utama yaitu:

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Secara Merata

Permasalahan dalam akses dan kualitas pendidikan merupakan hambatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana, serta ketidakmerataan distribusi guru berkualifikasi menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan dasar di kalangan masyarakat, yang menghambat potensi ekonomi dan perkembangan sosial.

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur memiliki IPM di atas rata-rata nasional (74,20) pada tahun 2024, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional disebabkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi di wilayah tersebut, Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu dimana ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

2. Belum Terpenuhinya Akses dan Layanan Kesehatan Berkualitas serta Masih Tingginya Prevalensi Stunting

Keterbatasan akses dan layanan kesehatan berkualitas menjadi kendala serius dalam pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya sarana medis, kurangnya tenaga medis yang berkualifikasi, dan akses terbatas terhadap informasi kesehatan menyebabkan tingginya prevalensi stunting dan masalah kesehatan lainnya. Stunting menjadi indikator buruknya akses terhadap gizi yang baik dan layanan kesehatan yang tepat waktu.

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan

Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaganya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan Cut of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22,90. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke enam belas. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 17,60 persen.

3. Belum Optimalnya Penyediaan Tenaga Kerja yang Kompetensinya Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Penyediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi dan industri. Kurangnya kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja menghambat produktivitas dan inovasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada tahun 2024 sebesar 5,14% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara Nasional,

Kaltim menempati 12 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 4,91%.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya. Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2020-2024, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan skill tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit.

4. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender serta Masih Minimnya Peran Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

Ketidaksetaraan gender dan minimnya peran disabilitas dalam pembangunan menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya kesempatan dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan kaum disabilitas menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini mengurangi potensi sumber daya manusia yang tersedia bagi pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian 65,65 menjadi 68,96 di tahun 2023. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54, Tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 68,96. Masih

rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 21,82 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,57 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 48,03 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 82,42 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 47,20 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur juga menghadapi beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan **Aspek Ekonomi Wilayah**. Berikut penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Upaya Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalan menyebabkan kerentanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketidakstabilan harga komoditas dan penurunan permintaan global dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk penurunan pendapatan dan kerugian lapangan kerja. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan global.

Berbasis data sampai dengan tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE Nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 (satu) sektor unggulan yaitu pertambangan dan pengalihan. Pertumbuhan Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.

Secara umum, perkembangan Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHK) provinsi yang ada di Wilayah Kalimantan mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur paling tinggi diantara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu sebesar 4,78%. Kemudian tertinggi kedua Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,55%, selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara

dengan laju pertumbuhan sebesar 3,51%, diikuti Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,09%. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,77% terendah dibandingkan daerah Kalimantan lainnya. Dilihat dari nilai PDRB per kapita (ADHB) pada tahun 2023. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan penambahan terbesar hingga mencapai 9,16 juta rupiah, diikuti Provinsi Kalimantan Selatan yang bertambah sekitar 3,53 juta rupiah dan Kalimantan Barat sebesar 2,72 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan kondisi di Kaltim, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23,16 juta rupiah.

2. Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air

Meskipun Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketahanan pangan dan ketahanan air. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan urbanisasi yang cepat dapat mengancam ketersediaan pangan dan air bersih bagi masyarakat. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko kekeringan dan banjir, yang dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kerugian bagi petani dan masyarakat lokal.

Kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur per tahun kurang lebih 456 ribu ton, sedangkan ketersediaan beras lokal hanya mencapai 300 ribu ton pertahun. Berdasarkan kondisi tersebut maka hasil dari beras lokal di Kalimantan Timur masih kurang untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Timur. Upaya memenuhi kekurangan ketersediaan beras di Kalimantan Timur ini bergantung kepada supply dari daerah lain di luar Provinsi Kalimantan Timur seperti dari daerah Sulawesi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 luas panen padi sebesar 73.568,44 Hektar dan terus menyusut menjadi 66.269,46 Hektar pada tahun 2021 dan menyusut kembali menjadi 64.970,01 Hektar pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 menjadi 57.080 Hektar. Kondisi ini menyebabkan jumlah produksi beras yang dihasilkan juga semakin berkurang. Pada tahun 2020 produksi beras Kaltim mencapai 151.863,46 Ton, namun berkurang menjadi 142.321,38 Ton pada tahun 2021 dan berkurang lagi menjadi 139.266,10 Ton pada tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 126.970 Ton.

Berkaitan dengan Ketahanan Air, Indeks Ketahanan Air (IKA) adalah ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduknya dan mempertahankan

keberlanjutan sumber daya airnya. Angka IKA menunjukkan seberapa baik suatu wilayah mampu mengelola dan menggunakan sumber daya airnya secara efisien dan berkelanjutan. Adapun Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan skor IKA sebesar 71,9, hal ini menandakan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat ketahanan air yang moderat, dengan batas bawah yang masih cukup stabil, Skor 71,9 menunjukkan bahwa Kaltim memiliki sejumlah tantangan dalam manajemen airnya, namun masih dalam kategori yang dapat dikelola.

Krisis air dan krisis pangan seringkali berjalan beriringan. Ketika suatu wilayah mengalami kekeringan atau pencemaran air yang parah, pasokan pangan lokal dapat terganggu secara signifikan karena penurunan produksi pertanian. Ini dapat memicu peningkatan impor pangan, meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, dan mengakibatkan ketidakmampuan bagi sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

3. Masih Relatif Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang relatif tinggi sering kali menjadi cerminan dari permasalahan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif telah menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu rentan terhadap perubahan harga komoditas atau perubahan dalam permintaan global. Jika sektor ini mengalami penurunan, maka wilayah tersebut bisa mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan angka kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang kerja serta antara kelompok sosial dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, Angka kemiskinan yang tinggi juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan ekonomi.

4. Belum Optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi masih belum merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Kalimantan Timur. Kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, investasi, dan mobilitas

penduduk. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti pelabuhan, bandara, dan pusat logistik juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama.

Begitu pula permasalahan yang berkaitan erat dengan **Aspek Lingkungan Hidup** menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan di Kalimantan Timur telah menimbulkan sejumlah permasalahan, Berikut adalah penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut:

1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Risiko Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian, telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Deforestasi, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan, Penurunan kualitas udara dan air, hilangnya habitat satwa liar, serta kerusakan ekosistem hutan merupakan dampak negatif yang signifikan dari aktivitas ekonomi yang tidak dikelola dengan baik.

Dari tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Kalimantan Timur menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan terkait kondisi lingkungan hidupnya. Pada awal periode ini, provinsi ini masih terus berjuang melawan dampak deforestasi yang telah menggerogoti hutan-hutan tropisnya selama bertahun-tahun. Aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan illegal logging serta illegal mining menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang meresahkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah upaya mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan batu bara yang terus meningkat. Ekspansi tambang batu bara yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang luas, termasuk pencemaran air dan udara serta hilangnya habitat bagi spesies endemik.

2. Peningkatan Emisi dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan industri telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam

kehidupan satwa liar, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekonomi lokal.

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan memang menjadi perhatian utama di wilayah Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, ekspansi industri, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan deforestasi dan degradasi lahan, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yaitu 75,06, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 76,63. Meskipun pencapaian tersebut masih dalam kategori “Baik”, namun dari 4 (empat) indikator antara lain Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Yang perlu menjadi perhatian yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang mana hasil capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Rendahnya Implementasi Energi Baru dan Terbarukan

Meskipun Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti energi surya, angin, dan hidro, namun implementasinya masih rendah. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil, terutama batu bara, telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Rendahnya investasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kendala utama dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup.

Dari target bauran EBT yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 14,68 persen dan ditargetkan terus meningkat menjadi 28,72 persen hingga tahun 2050, sampai dengan semester pertama 2023, bauran EBT Kaltim masih berkisar pada angka 11,44 persen. Artinya, Kaltim perlu menggenjot 3,24 persen penggunaan EBT di sejumlah kabupaten dan kota untuk mencapai target pada tahun 2026.

Selanjutnya permasalahan pembangunan yang terkait dengan **Aspek Tata Kelola Pemerintahan** di Kalimantan Timur menggambarkan tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan

kualitas layanan publik. Berikut adalah penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Meskipun telah ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, pelaksanaannya masih belum optimal di berbagai aspek penilaian. Capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi belum sepenuhnya tercapai, hal ini tercermin dari proses birokrasi yang masih rumit dan terkadang memakan waktu yang lama. Pembangunan zona integritas juga belum merata di semua unit kerja, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi. Sementara itu, kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kualitas data statistik sektor masih menjadi masalah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah. Keterbatasan dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data statistik sektor tertentu menghambat pemahaman yang komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya efektivitas intervensi pembangunan.

3. Belum Optimalnya Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Meskipun upaya telah dilakukan untuk melakukan digitalisasi administrasi pemerintahan, terutama dalam fokus penanganan stunting, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya keterampilan digital di kalangan birokrasi, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sistem administrasi yang terintegrasi dan efisien.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Lainnya yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Selain permasalahan prioritas Pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah

yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2024. Berbagai permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel 2.129. Permasalahan Lainnya yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Sub Urusan	Permasalahan
Pendidikan	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas prima terstandarkan.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik , sistem pendukung /lab, sistem informasi berbasis internet, perpustakaan dan alat peraga pendidikan pada beberapa wilayah dan/atau sekolah terutama di daerah remote dan layanan pendidikan yang berkualitas prima.</p> <p>Ketidak sinkronan kewenangan dan manajemen operasional sistem pendidikan di tingkat pusat dan daerah terutama yang berasal dari skema pembiayaan DAK.</p> <p>Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana beasiswa daerah serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan SDM pada sektor prioritas pembangunan daerah.</p> <p>Akurasi data antara data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidik, substansi pendidikan dan capaian pendidikan terhadap kondisi faktual di lapangan.</p> <p>Tidak terpadunya sistem informasi perencanaan untuk mengakomodir program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang mampu menunjang penyelesaian persoalan dasar pada bidang pendidikan serta bidang lainnya (contoh : perpustakaan).</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan alokasi distribusi dana beasiswa.</p>

	<p>Wajib Belajar 12 tahun (angka partisipasi SMA/SMK) belum tercapai sesuai mandat.</p> <p>Daya saing lulusan SMK belum optimal.</p>
<p>Kesehatan</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Medis dan Paramedis belum memenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar pada daerah remote dan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas prima.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit terutama di daerah remote dan kesehatan rujukan yang berkualitas prima.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan layanan medis jarak jauh (telemedicine) berbasis spasial (kewilayahan).</p> <p>Rasio dokter dan dokter spesialis tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual.</p> <p>Kepatuhan sistem pelaporan belum terlaksana dengan baik.</p> <p>Angka prevalansi stunting, penyakit menular dan penyakit tidak menular masih relatif signifikan.</p>
<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pembangunan infratraktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan infrstruktur dasar dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk</p>

	<p>pengawasan pembangunan infrastruktur dasar.</p> <p>Proses pembangunan/penataan bangunan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.</p> <p>Implementasi program SPAM air minum belum optimal karena faktor sebaran geografis.</p> <p>Belum tersedianya masterplan jaringan jalan.</p> <p>Belum tersedianya Masterplan jaringan irigasi yang sesuai kewenangan dan berbasis kebutuhan belum tersedia.</p> <p>Data kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikasi ahli belum tersedia.</p> <p>Kompleksitas Status tenurial masih tinggi sehingga menghambat proses pembangunan fasilitas publik.</p>
<p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Belum idealnya rasio ketersediaan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani.</p> <p>Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapsras layanan air baku.</p> <p>Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi mengenai besaran jumlah kawasan permukiman.</p>
<p>Trantibumlinmas</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis serta terukur.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja untuk memberikan layanan publik mitigasi dan penanganan bencana.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan pelayanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis.</p>

	<p>Sistem informasi geografis/spasial untuk pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif dan tangguh belum terkoneksi dengan sektor pengampu terkait.</p> <p>Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana belum berjalan optimal.</p>
<p>Sosial</p>	<p>Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk keberdayaan masyarakat dan sistem pendampingan yang disertai sistem monev berkala untuk mengukur pencapaian target program pada isu sosial prioritas (isu kemiskinan, gizi buruk dan stunting).</p> <p>Desain program pemberdayaan pengembangan kapasitas individu PMKS (isu keterlantaran, isu kemiskinan, stunting, layanan berkebutuhan khusus/disabilitas) belum optimal.</p> <p>Mekanisme Layanan dasar PMKS/Panti Sosial belum sinergis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>
<p>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</p>	
<p>Tenaga Kerja</p>	<p>Basis data belum bersifat komprehensif dalam menyusun perencanaan program/kegiatan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan serapan pada Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>Belum optimalnya pemahaman tentang mandat implementasi Produk Hukum terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.</p> <p>Pola kolaborasi antar berbasis kewenangan sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja yang berdaya saing pada DIDU.</p>

	<p>Implementasi sistem informasi pasar kerja online untuk mengakomodasi pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi rencana tenaga kerja kolaboratif antar perangkat daerah belum berjalan baik.</p> <p>Keterbatasan ruang kerja terhadap calon tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Tidak optimalnya job fair/bursa kerja sebagai wadah pencari kerja untuk mendapat pekerjaan</p> <p>Basis data untuk formulasi kebijakan prioritas dan penetapan target kerja/cascading serta pengawasan/pengendalian kerja di bidang ketenagakerjaan belum tersusun dengan baik.</p> <p>Keterhubungan sisi penawaran - permintaan tenaga kerja dengan DIDU belum optimal.</p>
<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Lemahnya koordinasi, sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.</p> <p>Fasilitasi terhadap akses layanan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah Kaltim belum berjalan optimal.</p> <p>Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal.</p> <p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting belum optimal dilakukan.</p> <p>Belum masifnya sosialisasi dan promosi terhadap informasi terkait dengan tempat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kaltim.</p> <p>Implementasi terhadap layanan perlindungan - pendampingan terhadap perempuan - anak dari kekerasan seksual dan pendampingan pemberdayaan kewirausahaan yang berdaya saing pada perempuan kepala keluarga belum optimal.</p>
<p>Pangan</p>	<p>Basis data dan informasi geospasial belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan</p>

	<p>program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum ideal.</p> <p>Pola kolaborasi antar sub sektor agribisnis - agroindustri maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik, input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja/alsintan dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension).</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Tani menuju Korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</p> <p>Pengelolaan cadangan pangan dan distribusinya belum optimal.</p> <p>Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum optimal.</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum optimal.</p>
Lingkungan Hidup	<p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pengolahan sampah serta adaptasi perubahan iklim.</p> <p>Lemahnya Advokasi Kebijakan terhadap program konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan masyarakat terkait pengelolaan sampah.</p> <p>Implementasi program pengendalian laju deforestasi, adaptasi perubahan iklim, pemeliharaan kualitas air permukaan</p>

	<p>dan pengelolaan sampah laut belum optimal.</p>
<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan/pencatatan sipil yang prima dan terintegrasi dengan sektor lain</p> <p>Implementasi program Advokasi dan Promosi KIE belum optimal.</p>
<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan saptas kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya menekan angka desa tertinggal belum berjalan baik.</p> <p>Sinkronisasi rencana pengembangan desa dengan rencana pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kewilayahan belum optimal.</p> <p>Konsep kerjasama desa dengan lembaga mitra belum tersusun dengan baik.</p>
<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM (penyuluh KB) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan fasilitasi Keluarga Sejahtera.</p> <p>Belum optimalnya dukungan program pendampingan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan keluarga sejahtera</p>

	<p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak serta mendorong program keluarga berencana belum optimal dilakukan</p> <p>Implementasi program untuk menekan angka perkawinan usia dini belum optimal.</p>
Perhubungan	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>Lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha sektor perhubungan yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL.</p> <p>Keterbatasan jumlah SDM pelayanan perhubungan dan penegakan hukum atas pelanggaran fasilitas perhubungan.</p> <p>Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL belum optimal.</p> <p>Peralihan aset pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B dari Kab/Kota ke Provinsi belum berjalan lancar sehingga menghambat proses pekerjaan konstruksi.</p>
Komunikasi dan Informatika	<p>Pusat basis data belum berfungsi optimal sebagai referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik yang terdigitalisasi, ekosistem bisnis yang akseleratif serta perlindungan data.</p> <p>Wilayah yang memiliki aksesibilitas layanan telekomunikasi untuk layanan smart governance dan ekosistem bisnis masih terbatas.</p>
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<p>Basis data belum komprehensif sebagai dasar pemetaan target ekspor dari sektor UMKM unggulan</p>

	<p>Pola kolaborasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan sinergis dalam pengembangan ekosistem UMKM, kelembagaan koperasi maupun produk unggulan / potensial ekspor.</p> <p>Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>Belum dilakukannya inventarisasi kelembagaan koperasi yang dapat dinilai "aktif".</p> <p>Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal.</p> <p>Rencana pengembangan produk unggulan daerah dan strategi hilirisasi belum optimal.</p>
Penanaman Modal	<p>Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah melalui sistem OSS dan EPTSP.</p> <p>Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengukuran dampak investasi serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Strategi promosi dan kebijakan insentif mengakselerasi kepeminatan serta realisasi investasi dari berbagai daerah / negara mitra belum berjalan optimal.</p>

	<p>Aksesibilitas basis data dan portal informasi spasial potensi investasi secara menyeluruh belum berfungsi optimal.</p> <p>Analisis (ICOR) / Incremental Capital Output Ratio yang membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang di butuhkan untuk mencapai pertumbuhan tersebut belum dilakukan.</p>
<p>Kepemudaan dan Olah Raga</p>	<p>Keterbatasan saptas kerja, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kapasitas unggul kepemudaan dan prestasi olahraga.</p> <p>Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kewirausahaan pemuda serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Belum dilakukan evaluasi untuk mengetahui profit impact dan benefit impact dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan peluang keberlanjutan</p> <p>Implementasi sistem digital untuk penataan (pemeliharaan, pelayanan dan pendapatan) dari aset sarana keolahragaan belum optimal.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan event kepemudaan dan keolahragaan untuk mengetahui profit / benefit impact dari kegiatan belum dilakukan.</p>
<p>Statistik</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang statistik sektoral yang valid, mutakhir dan ramah akses belum ideal.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi kebutuhan layanan pengembangan data pembangunan yang valid, mutakhir dan ramah akses.</p> <p>Implementasi program pemanfaatan informasi statistika pada OPD pengampu maupun OPD produsen untuk mendukung formulasi kebijakan strategis pembangunan belum optimal.</p>
<p>Persandian</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang persandian dan perlindungan data belum ideal untuk memenuhi standar keamanan informasi siber.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah</p>

	<p>pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal.</p> <p>Koordinasi lintas perangkat daerah terhadap pola hubungan komunikasi sandi belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program persandian pada OPD pengampu untuk menjaga keamanan data belum optimal.</p>
Kebudayaan	<p>Basis data dan rencana induk pengelolaan / objek pemajuan kebudayaan belum tersusun secara komprehensif.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kebudayaan, kesenian dan kearifan lokal belum ideal.</p> <p>Belum ditetapkannya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.</p> <p>Belum ditetapkannya jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan</p> <p>Proses inventarisir dan penyimpanan naskah - naskah kuno masih banyak menghadapi kendala.</p>
Perpustakaan	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pustakawan secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan perpustakaan secara konvensional dan digital.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Belum masifnya sosialisasi dan informasi terkait dengan keberadaan perpustakaan elektronik dan/atau koleksi e-book sebagai salah satu layanan pada urusan perpustakaan.</p> <p>Minat/perilaku membaca dan literasi publik masih belum terbangun dengan baik.</p>
Kearsipan	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM arsiparis secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan</p>

	<p>layanan kearsipan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan kearsipan secara konvensional dan digital.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan kearsipan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Mayoritas perangkat daerah belum mampu memenuhi standar arsip dinamis karena keterbatasan SDM fungsional dibidang terkait.</p> <p>Mekanisme dan implementasi pengumpulan berjenjang arsip statis dan dinamis belum berjalan dengan optimal.</p>
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Sub Urusan	Permasalahan
<p>Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh perikanan) - manajerial belum ideal.</p> <p>Pola kolaborasi antar sub sektor aquabisnis dan agromaritime maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal.</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Perikanan menuju Korporasi Nelayan serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</p> <p>Koordinasi antar tingkat pemerintah dan stakeholder terkait dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan belum berjalan baik.</p> <p>Ketersediaan saprokan budidaya (benih bersertifikat, pupuk bersubsidi, pemberantasan hama) dan implementasi program penyuluhan (kewenangan pengelolaan SDM penyuluh, sistem cyber extensions).</p> <p>Kapasitas kelembagaan pengelola dan pemanfaatan nilai ekonomi kawasan konservasi belum optimal.</p> <p>Program pengembangan produk unggulan dan hilirisasi industri/agroindustri perikanan serta penguatan pasar produk perikanan dalam arti luas belum optimal.</p> <p>Kapasitas kelembagaan perikanan (korporasi nelayan, peran KUB dan</p>

	<p>Bumdes) belum berkembang dengan baik.</p>
<p>Pariwisata</p>	<p>Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sub sektor pariwisata dan ekraf maupun antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja (aksesibilitas, atraksi, amenities dan ansilari) dalam mendukung layanan publik pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Implementasi perencanaan pengembangan sektor pariwisata dan ekraf belum berjalan baik.</p>
<p>Pertanian</p>	<p>Basis data belum optimal belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum memadai.</p>

	<p>Keterbatasan saptas fisik (laboratorium yang berstandar, fasilitas check point berstandar, klinik hewan, RPH), input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja dalam/ alsintan mendukung pemberian layanan publik pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension).</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk (1) meningkatkan pendampingan usaha perkebunan rakyat guna meningkatkan daya saing menuju korporasi perkebunan; (2) untuk meningkatkan daya saing usaha tani menuju korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; (3) untuk meningkatkan meningkatkan daya saing usaha peternak menuju korporasi peternak.</p> <p>Advokasi kebijakan untuk pengadaan kawasan/pola ruang khusus usaha peternakan untuk mrnvapai stabilitas kebutuhan protein hewani.</p> <p>Koordinasi antar perangkat daerah atau stakeholder yang membidangi urusan pertanian belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program perlindungan lahan pertanian dari konversi belum berjalan optimal.</p>
Kehutanan	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh kehutanan) - manajerial belum ideal.</p> <p>Pola kolaborasi internal bidang kehutanan belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha produksi, jasa lingkungan serta konservasi kehutanan.</p> <p>Belum optimalnya untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha perhutanan sosial.</p> <p>Sistem kerja perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam belum berjalan baik.</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar dinas induk dengan UPTD dalam penyelenggaraan urusan kehutanan.</p>

	<p>Penyusunan rencana tata kelola hutan/integrasi rencana kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam secara partisipatif yang menjadi Kewenangan Provinsi belum sinergis.</p> <p>Implementasi program rehabilitasi hutan dan lahan di luar Kawasan hutan belum sinkron dengan status lahan dan rencana Kementerian Kehutanan.</p> <p>Benih dan/atau bibit yang bersertifikat masih terbatas jumlahnya dan tergantung dari luar daerah.</p> <p>Implementasi program pengembangan usaha perhutanan sosial pasca penerbitan izin belum berjalan optimal.</p>
Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Pola kolaborasi dan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi, terutama terkait implementasi Rencana Umum Energi Daerah.</p> <p>Keterbatasan SDM, saptas fisik (fasilitas konversi energi baru terbarukan), sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi.</p> <p>Belum terbangun mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Grand Design (RUED/Rencana Umum Energi Daerah) belum diimplementasikan dengan baik.</p> <p>Rencana dan implementasi tata kelola konservasi air tanah yang berkeadilan belum berjalan optimal.</p>
Perdagangan	<p>Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan ekosistem usaha, jalur distribusi dan perdagangan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik (optimalisasi peran pelabuhan ekspor) dan sistem informasi digital untuk promosi produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan</p>

	<p>penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal.</p> <p>Kapasitas dan fungsi kelembagaan koperasi dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga Bapokting belum optimal.</p>
Perindustrian	<p>Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik (fasilitas fabrikasi), sistem informasi digital untuk promosi dan alat kerja dalam mendukung pemberian pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Dukungan infrastruktur dasar dan penyediaan energi dalam pengembangan kawasan industri belum optimal.</p> <p>Rencana pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan hilirisasi/industrialisasinya belum terpadu.</p>
Transmigrasi	<p>Kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kewenangan antar sektor belum berjalan optimal</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigran.</p> <p>Belum masifnya koordinasi antar stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.</p> <p>Rencana pengembangan kawasan transmigrasi belum tersinkronisasi dengan RTRW, rencana pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan komoditas unggulan.</p>

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Dan Unsur Pemerintahan Umum	
Sub Urusan	Permasalahan
Sekretariat Daerah	<p>Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi (SIJABAT) untuk pengembangan potensi SDM Pegawai layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong pendapatan asli daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik.</p> <p>Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik, Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.</p> <p>Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.</p> <p>Lambatnya proses layanan dan kualitas produk hukum daerah.</p> <p>Belum optimalnya target penawaran kerjasama.</p> <p>Pembinaan dan monitoring serta evaluasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implementasi SPM.</p> <p>Masih rendahnya kualitas layanan urusan pertanahan, yang ditandai dengan lambatnya proses administrasi</p>

	<p>dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi serta layanan pertanahan yang memadai.</p> <p>Rendahnya kinerja BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa.</p>
Sekretariat DPRD	<p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar unsur pemerintahan belum berjalan optimal - sinergis dalam fungsi penyelenggaraan / fasilitasi Perundang - Undangan di yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk prosedur layanan aspirasi pada lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan / kebijakan pembangunan daerah</p> <p>Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal.</p> <p>Perlu penguatan implementasi pola koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan/fasilitasi kedewanan (pembentukan perda provinsi, anggaran dan pengawasan) yang transparan dan akuntabel.</p>
Perencanaan	<p>Basis data belum optimal untuk dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sinergis dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Peran Bappeda untuk mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan riset (terutama terkait dengan penentuan isu strategis) belum berjalan baik.</p>

	<p>Belum maksimalnya pemahaman tentang definisi operasional terhadap penetapan target kinerja pada level program, kegiatan dan sub kegiatan yang diimplementasikan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>Belum optimalnya evaluasi dan penguatan cascading kinerja pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah.</p> <p>Perlu penguatan pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Perlunya sinkronisasi dan kolaborasi dengan hasil riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p>
Keuangan	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pada lembaga pengelola anggaran dan aset daerah (BPKAD dan Bapenda) belum memadai.</p> <p>Jumlah dan fasilitas kerja Lembaga / Unit Teknis penyelenggara layanan pengelolaan aset dan pajak/retribusi daerah belum memadai dan belum berorientasi layanan inklusif.</p> <p>Belum terdapat sistem distribusi penganggaran yang secara handal mengatur soal mekanisme kerja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi ke Kab/Kota.</p> <p>Belum terdapat UPTD yang secara khusus berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.</p> <p>Peran BPKAD dalam mekanisme distribusi dan pengendalian Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil belum optimal.</p>
Kepegawaian	<p>Basis data dan rencana induk pemenuhan kebutuhan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pegawai penyelenggara layanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima belum tersusun dengan baik.</p> <p>Koordinasi dalam pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai belum berjalan optimal.</p> <p>Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian pusat dalam memahami dan</p>

	<p>mengimplementasikan regulasi di tingkat pusat, yang mengakibatkan hambatan dalam penerapan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif di daerah.</p> <p>Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait dengan jabatan fungsional.</p> <p>Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien.</p> <p>Masih terbatasnya advokasi kebijakan terkait implementasi kebijakan peningkatan kualifikasi sertifikasi pegawai perangkat daerah.</p>
<p>Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>Basis data dan rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan publik yang prima serta belum diikuti implementasi kebijakan dan program Sertifikasi / peningkatan Kompetensi SDM pada pegawai perangkat daerah.</p> <p>Basis data yang memuat aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat dimanfaatkan dengan baik</p> <p>Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien.</p>
<p>Penelitian dan Pengembangan</p>	<p>Basis data dan temuan riset belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Peneliti teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal.</p> <p>Belum optimalnya jejaring kerja pengembangan dan pemanfaatan hasil riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal.</p> <p>Hasil penelitian dan pengembangan kajian belum secara optimal</p>

	<p>dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.</p>
Penghubung	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik.</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet untuk pengembangan layanan promosi produk – jasa unggulan dan potensi investasi pembangunan daerah.</p> <p>Perlu pengembangan perangkat/sistem kerja untuk memperluas jangkauan dan mengukur efektifitas program promosi yang sudah dilakukan pada mitra kerja sama yang potensial.</p>
Inspektorat	<p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pengawas teknis dan auditor belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Keterbatasan kuantitas SDM pengawas dan auditor dalam menunjang tugas pokok dan fungsi inspektorat.</p>
Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor (FORKOMINDA) maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan fasilitasi stabilitas sosial politik masyarakat.</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan modal sosial/sistem adaptasi sosial berbasis hukum positif dan kearifan lokal dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Sistem adaptasi sosial belum dimaksimalkan dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.</p>

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2026, yang didasarkan pada proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2024 hingga Tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 mencakup perkembangan perekonomian global dan nasional, dinamika pertumbuhan ekonomi pasca sampai dengan tahun 2024, serta perkiraan tahun 2026 di Kalimantan Timur dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha sektor unggulan dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026 mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2025 dan perkiraan tahun 2026 serta mempertimbangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pada dokumen RKP tahun 2026.

3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global

Perekonomian global tahun 2026 dan tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana target pertumbuhan ekonomi

global tahun dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen ditahun 2025. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan risiko yang makin tinggi, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2025 seperti ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang dapat memberi efek domino pada perdagangan global dan tekanan ekonomi dan inflasi yang diperkirakan akan menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan diperkirakan akan meredam gejolak inflasi.

Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia tahun 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025, dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3 persen pada 2025, turun signifikan dari 5,8 persen tahun 2024. Kelihatannya inflasi di dunia sudah mulai terkendali.

Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4 persen (yoy) pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate (FFR)*. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada

dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. Untuk 2025. Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya oleh pasar.

3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 mencapai 5,03 persen yang ditopang oleh meningkatnya seluruh komponen pengeluaran seperti kenaikan investasi, meningkatnya ekspor, terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia tahun 2024. Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5 persen (*yoy*) di tahun 2024 dan 5,2 persen (*yoy*) di tahun 2025.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2024 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1$ persen, sejalan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat sebesar 1,57 persen (*yoy*). Inflasi inti terkendali pada level 2,26 persen (*yoy*) sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (*BI-Rate*) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, inflasi *volatile food (VF)* terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pemerintah dan BI meyakini inflasi terkendali dalam sasarannya sebesar $2,5\pm 1$ persen pada 2025 dan 2026. Inflasi inti juga diperkirakan terkendali karena ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas ekonomi yang memadai, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diperkirakan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Pemerintah.

Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter diseimbangkan untuk menjaga stabilitas

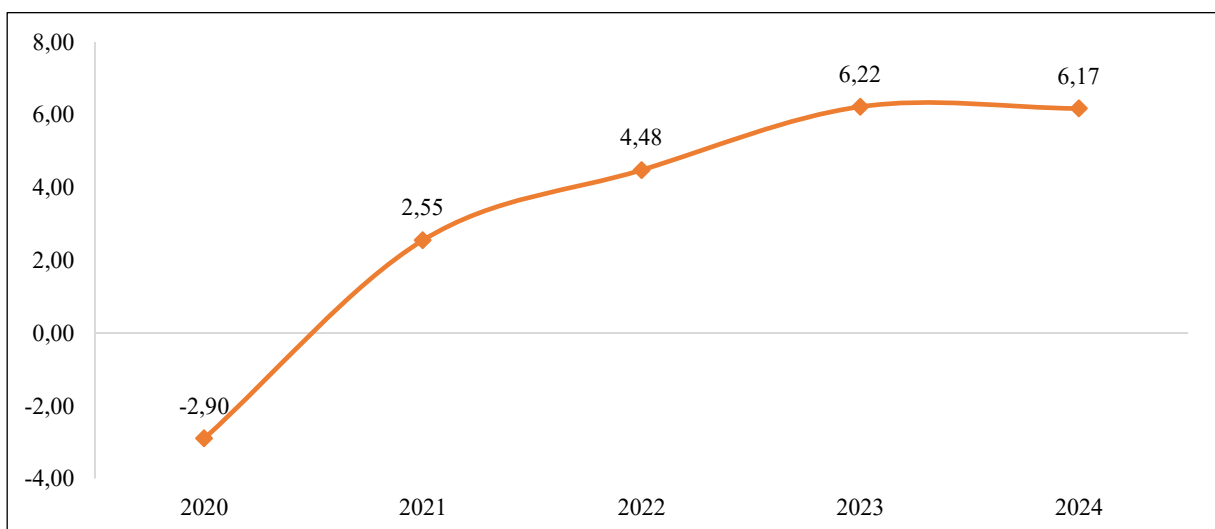
dan mendorong pertumbuhan (*pro-stability and growth*), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*). Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.

3.1.3 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah

A. Kinerja Ekonomi Daerah

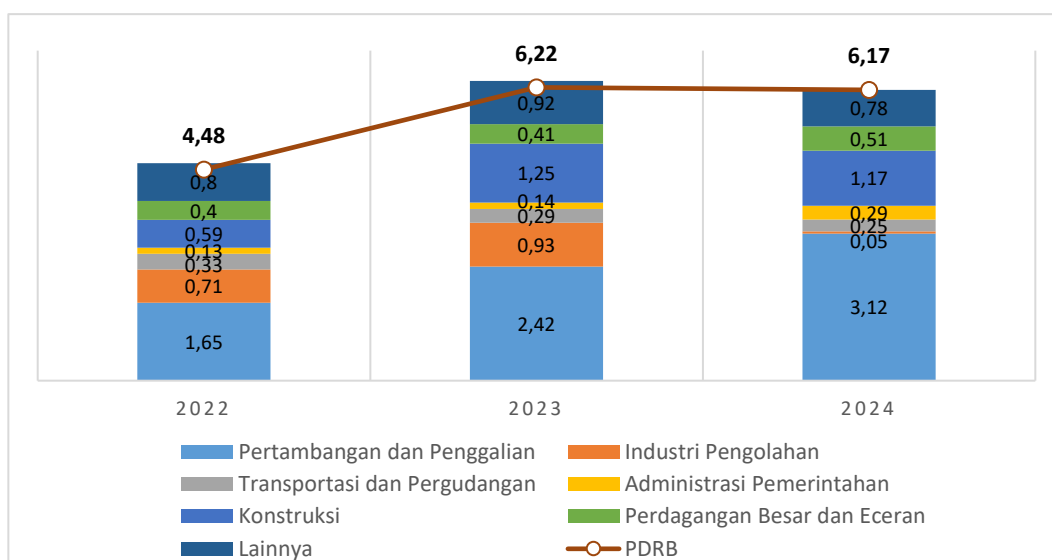
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, perekonomian Kalimantan Timur berkontraksi sebesar -2,90 persen akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja berbagai sektor usaha. Namun, LPE kembali tumbuh signifikan menjadi 2,55 persen pada tahun 2021, dengan selisih pertumbuhan 5,45 persen. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023 seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. LPE tahun 2024 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2023 menjadi 6,17 persen akibat perlambatan di beberapa lapangan usaha, utamanya pada Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan menjadi 0,23 persen.



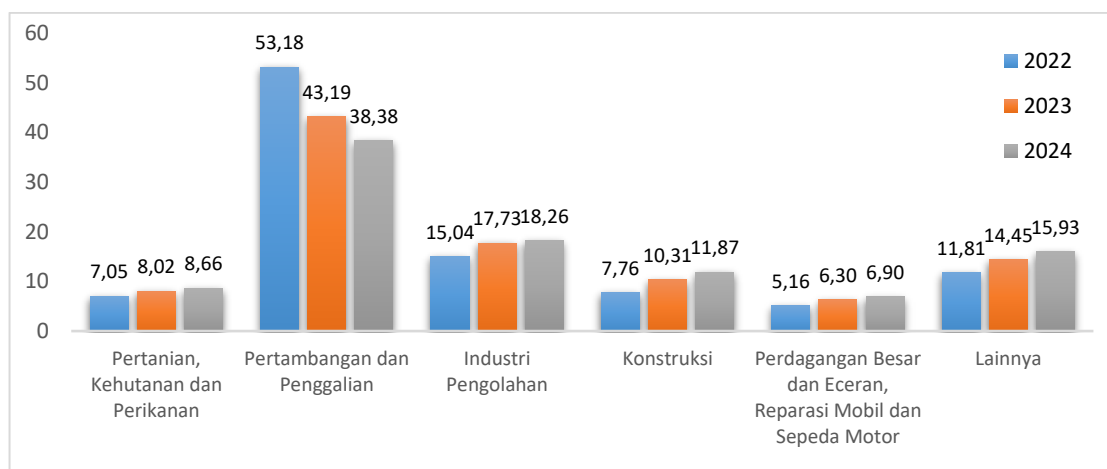
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, sumber pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2022-2024 utamanya berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha Konstruksi pun memperlihatkan adanya kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang dimotori oleh kegiatan percepatan pembangunan IKN. Sementara itu, Industri Pengolahan memberikan penurunan andil yang cukup signifikan sumber pertumbuhan tahun 2024 dibandingkan periode sebelumnya. Adapun sektor-sektor seperti Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya juga berkontribusi, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil.



Gambar 3.2. Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

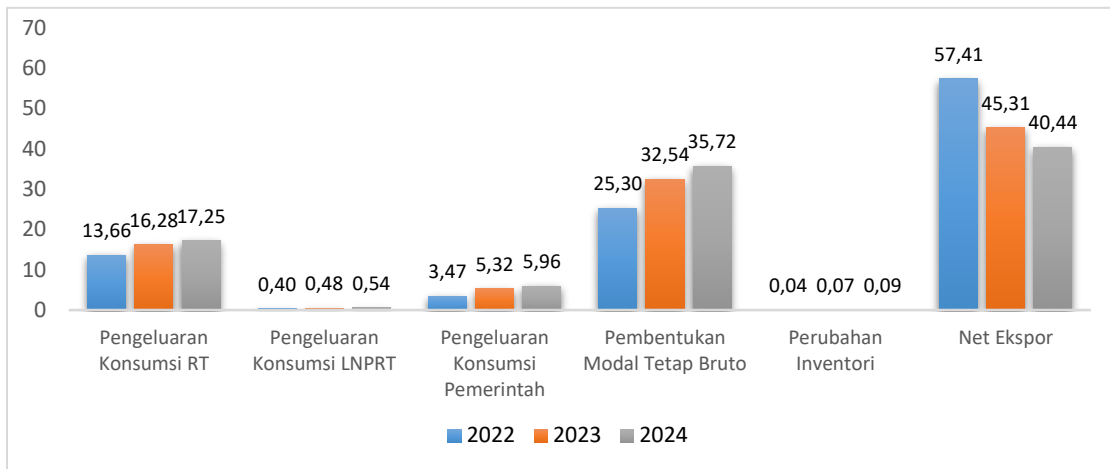
Selama tahun 2022-2024, struktur perekonomian Kalimantan Timur relatif konstan. Sejalan dengan sumber pertumbuhan PDRB, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pun mendominasi perekonomian Kalimantan Timur, yaitu berkisar 38-53 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar lainnya adalah Industri Pengolahan dengan kisaran 15-18 persen dan diikuti oleh Konstruksi sebesar kisaran 7-11 persen.



Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (Persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

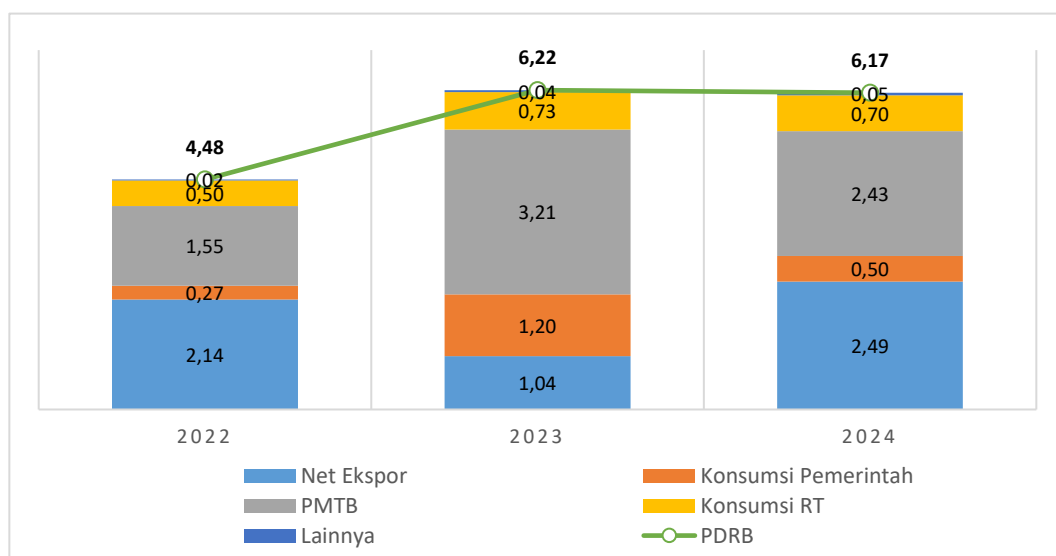
Meskipun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki andil yang paling besar, namun perkembangan sektor ini rawan berfluktuasi serta cenderung menunjukkan tren yang menurun. Bersamaan dengan fenomena tersebut, kontribusi dari lapangan usaha lainnya justru memperlihatkan peningkatan. Akan tetapi, peningkatan kontribusi lapangan usaha lainnya masih belum bisa untuk menyaingi andil dari lapangan usaha pertambangan penggalian pada perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kalimantan Timur yang bergantung pada sumber daya alam ekstraktif.

PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2022–2024 didominasi oleh net ekspor yang secara konsisten menjadi kontributor terbesar, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Komponen lain yang memiliki proporsi besar ialah PMTB, dimana tingkat distribusinya terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir karena adanya peningkatan belanja modal oleh pemerintah dan realisasi investasi baik dalam negeri maupun asing. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah juga berperan, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil. Pola ini cenderung stabil dari tahun ke tahun, menandakan adanya ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada perdagangan internasional.



Gambar 3.4. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Secara umum, seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran memberikan andil positif bagi LPE Kalimantan Timur. Komponen net ekspor dan PMTB merupakan 2 (dua) komponen yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan struktur PDRB Kalimantan Timur pada sisi pengeluaran. Secara rata-rata, pertumbuhan masing-masing komponen tersebut memiliki andil 1,89 persen untuk net ekspor dan 2,40 untuk PMTB selama periode 2022–2024.



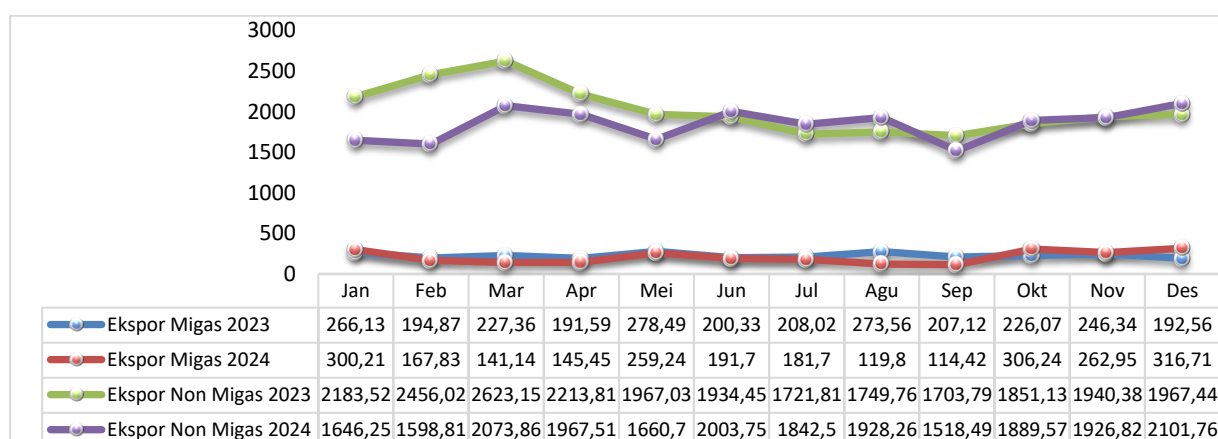
Gambar 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Peningkatan proporsi pertumbuhan diperlihatkan oleh seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran pada tahun 2023, kecuali net ekspor. Peningkatan proporsi yang signifikan, seperti pada komponen PMTB dan konsumsi pemerintah, didorong oleh kebijakan pemerintah yang pro-investasi, proyek strategis, kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil, serta

prioritas anggaran pada sektor-sektor penting dan program pembangunan. Pada sisi lain, net ekspor justru mengalami penurunan proporsi pada tahun 2023 yang diakibatkan oleh penurunan ekspor. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas ekspor khususnya batu bara dan penurunan permintaan global. Sebaliknya, komponen-komponen PDRB sisi pengeluaran menunjukkan penurunan proporsi pertumbuhan pada tahun 2024, kecuali net ekspor dan lainnya.

2) Ekspor dan Impor

Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024 menurun 8,73 persen dibandingkan tahun 2023, yaitu dari US\$ 27.024,73 juta menjadi US\$ 24.665,67 juta. Penurunan ini terjadi baik pada jenis barang migas maupun non migas. Nilai ekspor migas tahun 2024 menjadi US\$ 2.507,39 juta dimana sebelumnya bernilai US\$ 2.712,44 juta atau menurun 7,56 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas menurun dari US\$ 24.312,29 juta menjadi US\$ 22.158,28 juta.



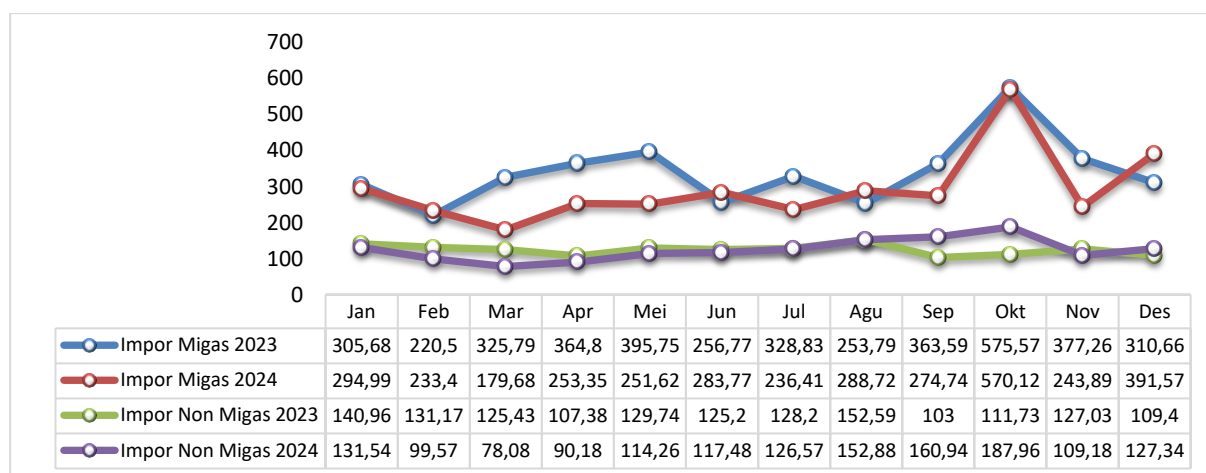
Gambar 3.6. Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Berdasarkan struktur pembentuknya, sektor non migas mendominasi nilai ekspor Kalimantan Timur dengan proporsi sekitar 90 persen. Pada tahun 2024, ekspor hasil pertanian mengalami pertumbuhan pesat hingga mencapai 69,32 persen. Namun, pertumbuhan ini tidak cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai ekspor non migas dikarenakan hasil tambang masih menjadi andalan ekspor Kalimantan Timur. Hasil tambang memiliki peran sebesar 73,21 persen terhadap total ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024, namun nilai ekspornya turun sebesar 9,88 persen dibandingkan

tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga komoditas batu bara di pasar global.

Pada sisi lain, sektor migas berkontribusi terhadap 10,17 persen total ekspor Kalimantan Timur tahun 2024, dimana ekspor gas berperan sebesar 6,66 persen dan hasil minyak sebesar 3,51 persen. Meskipun ekspor hasil minyak mengalami pertumbuhan hingga 26,81 persen, namun nilai ekspor gas justru turun merosot mencapai 19,14 persen dibandingkan tahun 2023. Faktor dibalik penurunan nilai ekspor gas ini disebabkan oleh stagnasi volume ekspor gas alam yang diiringi oleh harga gas alam di pasar internasional yang fluktuatif dan cenderung menurun.

Serupa dengan ekspor, nilai impor Kalimantan Timur secara kumulatif pun turut mengalami penurunan sebesar 10,28 persen pada tahun 2024 menjadi US\$ 4.998,24 juta yang sebelumnya mencapai US\$ 5.570,82 juta pada tahun 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh perubahan nilai impor migas dari US\$ 3.502,26 juta menjadi US\$ 4.078,99 juta atau menurun 14,14 persen. Sementara itu, nilai impor non migas justru mengalami sedikit peningkatan yang semula bernilai US\$ 1.491,83 juta menjadi US\$ 1.495,98 juta atau meningkat 0,28 persen.



Gambar 3.7. Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

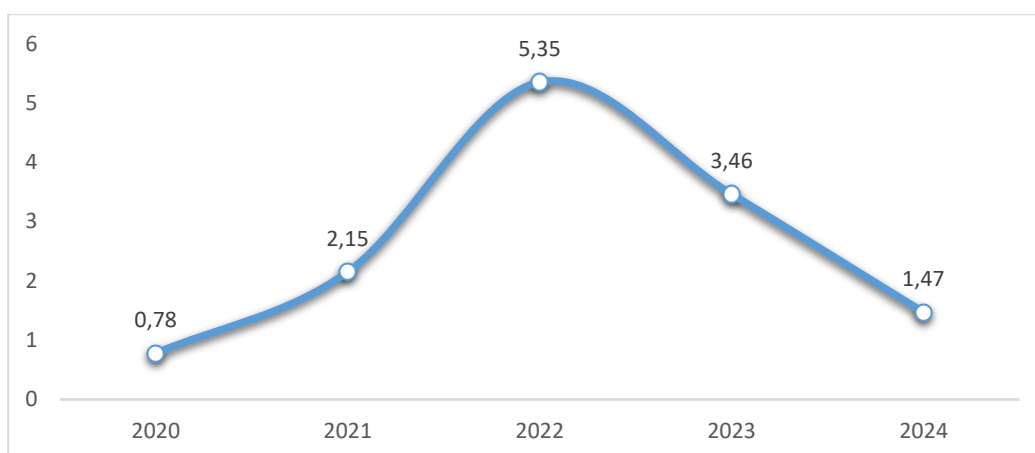
Pada struktur impor Kalimantan Timur tahun 2024, sektor migas berperan paling besar terhadap nilai total impor (70,07 persen) dibanding sektor non migas (29,93 persen). Impor gas menjadi yang paling pesat perubahannya mencapai 94,16 persen, meskipun hanya memiliki proporsi 7,87 persen terhadap total impor Kalimantan Timur. Adapun impor

hasil minyak juga mengalami kenaikan hingga 40,23 persen dibanding tahun 2023, sementara impor minyak mentah menurun 43,35 persen.

Berdasarkan golongan barang non migas, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya memberikan andil besar terhadap total impor dengan kontribusi sebesar 44,7 persen, meskipun nilai impornya menurun 7,95 persen dibandingkan tahun 2023. Golongan barang dengan andil tertinggi kedua terhadap total impor yaitu kapal, perahu, dan struktur terapung dengan kontribusi sebesar 9,52 persen. Adapun perubahan nilai impor golongan barang tersebut meningkat signifikan hingga 144,85 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada nilai impor, namun Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan neraca perdagangan surplus sebesar US\$ 1.899,56 juta, dengan sektor non migas surplus sebesar US\$ 1.974,42 juta dan sektor migas defisit sebesar US\$ 74,86 juta.

3) Inflasi

Secara umum, tingkat inflasi Kalimantan Timur berfluktuasi dari waktu ke waktu selama periode 2020–2024. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 5,35 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,78 persen. Rendahnya tingkat inflasi pada tahun 2020 salah satunya dilatarbelakangi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Inflasi melonjak secara signifikan pada tahun 2022 utamanya dikarenakan kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang. Namun, tingkat inflasi berangsur menunjukkan tren positif hingga tahun 2024.



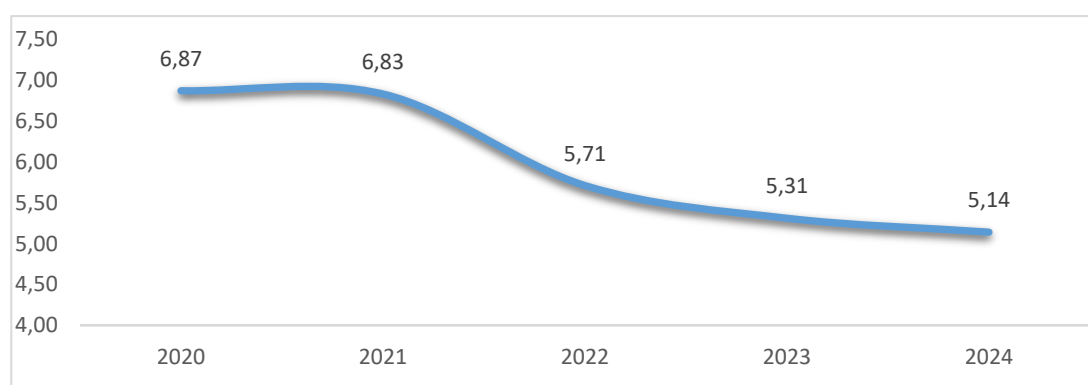
Gambar 3.8. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Penurunan tingkat inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 salah satunya didorong oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat secara masif. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Timur terus melakukan berbagai upaya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penambahan pasokan beras oleh Bulog, dan rapat koordinasi rutin.

Pada tahun 2024, perhitungan inflasi di Kalimantan Timur mencakup wilayah baru, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kembali menurunnya tingkat inflasi Kalimantan Timur sebesar 1,47 persen pada tahun 2024 mencerminkan stabilitas ekonomi yang membaik, didorong oleh efektivitas kebijakan moneter dan fiskal, peningkatan produktivitas sektor utama, serta stabilitas harga komoditas global. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Timur mengalami tren penurunan selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 6,87 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 6,83 persen pada 2021. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 5,71 persen. Secara konsisten TPT terus mengalami penurunan, meskipun terdapat perlambatan pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir.



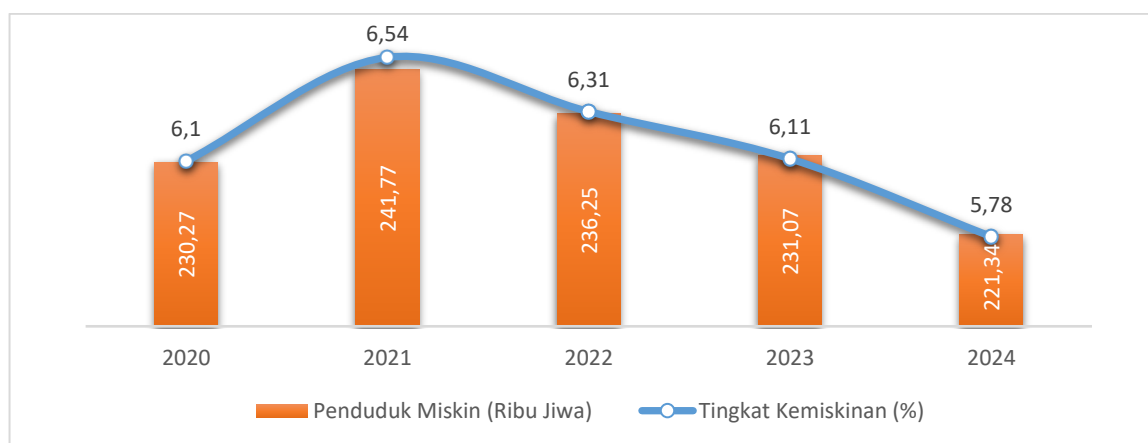
Gambar 3.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Beberapa faktor mempengaruhi penurunan TPT di Kalimantan Timur selama pada tahun 2020–2024. Adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan di periode awal pandemi menjadi salah satu faktornya. Selain itu, proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN juga berkontribusi menciptakan banyak lapangan kerja baru, khususnya di sektor konstruksi, jasa, dan industri terkait. Namun, perlambatan penurunan TPT dari tahun 2023 ke tahun 2024 diduga disebabkan oleh tantangan struktural seperti ketimpangan keterampilan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan pasar kerja.

5) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin tiap tahunnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2021 dari 6,10 persen menjadi 6,54 persen atau bertambah 11,5 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan mulai pada periode berikutnya hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mencapai 5,78 persen atau terdapat 221,34 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur.



Gambar 3.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan lonjakan kemiskinan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan pada periode berikutnya. Penurunan ini didorong oleh pemulihan

ekonomi pasca pandemi, peningkatan aktivitas di sektor strategis seperti pertambangan dan pariwisata, serta efektivitas program perlindungan sosial. Stabilitas harga komoditas unggulan juga turut mendukung penurunan angka kemiskinan.

6) Investasi

Investasi di Kalimantan Timur baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan selama periode 2020-2023. Dilihat dari sisi jumlah proyek maupun realisasi investasi turut mengalami peningkatan. Capaian investasi di tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan apabila dilihat dari jumlah proyeknya, meskipun baru mencapai triwulan III tahun 2024. Hal ini menunjukkan daya tarik Kalimantan Timur bagi investor asing yang terus menguat selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya pembangunan IKN.

Tabel 3.1 Jumlah Proyek dan Realisasi Investasi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)
2020	778	378.027,20	3.924	25.934.008,80
2021	1.034	745.190,20	9.291	30.297.382,20
2022	1.005	1.266.221,77	6.706	39.595.633,00
2023	1.991	1.332.710,60	15.490	52.171.695,70
2024*	2.274	1.144.415,80	18.524	38.669.046,70

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Ket: *) Realisasi hingga TW III Tahun 2024

Nilai realisasi investasi PMA mengalami kenaikan tajam dari USD 378.027,20 ribu dengan 778 proyek pada tahun 2020 menjadi USD 1.332.710,60 ribu dengan 1.991 proyek di tahun 2023, dan telah mencapai USD 1.144.415,80 ribu dengan total 2.274 proyek di triwulan III tahun 2024. Sementara itu, realisasi investasi PMDN juga meningkat signifikan, dari Rp 25,93 triliun dengan 3.924 proyek pada tahun 2020 menjadi Rp 52,17 triliun dengan 15.490 proyek pada tahun 2023, dan telah mencapai Rp 38,67 triliun dengan total 18.524 proyek pada triwulan III tahun 2024.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
- b) Isu geopolitik dunia akan berdampak pada perekonomian global dan perekonomian nasional;
- c) Ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
- d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
- e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih belum inklusifnya sektor-sektor unggulan.

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Berlanjutnya proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi,

terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;

- b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
- c) Beroperasinya kilang minyak Balikpapan/ *Refinery Development Master Plan Refinery Unit V* (RDMP RU V Pertamina);
- d) Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
- e) Masih terjaganya ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya didorong oleh optimisme target produksi yang tetap tinggi serta masih solidnya permintaan batu bara, terutama dari luar negeri;
- f) Realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
- g) Optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- h) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Selain dengan sederet keberhasilan, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim.

Adapun sasaran ekonomi makro nasional tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No.	Indikator	Tahun 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% _{yoy}): Akhir Periode	2,5±1,0
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900
3	Cadangan Devisa (miliar US\$)	171,01–171,42
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2–6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,04)–(0,90)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18–21,20
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6–4,7

No.	Indikator	Tahun 2026
8	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00-24,70
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22-13,35
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45-11,40
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)-(0,40)
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)-(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8-39,9
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17-7,18
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,3-2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4-1.006,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjadi tahun awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dimaksud mendorong pertumbuhan yang merata dan tidak menimbulkan ketimpangan dan disparitas antar daerah.

Pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur nasional diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit, penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar, serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan Timur.

3.1.5 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi dan ekspor dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara meskipun nilai harga batubara acuan yang menurun. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan tumbuh positifnya lapangan usaha konstruksi meskipun tidak seperti tahun sebelumnya, masih terjaganya volume produksi pertambangan batubara dan meningkatnya volume ekspor hasil dari industri pengolahan.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2025 dan 2026 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Pada Tahun 2026, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

No.	Uraian	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,60-7,20
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	226,40-233,30
3	Inflasi (persen)	2,5 ± 1
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	50,46
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54-5,07
6	Tingkat Kemiskinan (%)	3,50-4,30
7	Nilai Tukar Petani	108,56
8	Nilai Tukar Nelayan	100

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2026, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2025 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan tersebut, diharapkan perekonomian Kalimantan Timur dapat tumbuh inklusi yang berdampak pada perbaikan kehidupan sosial masyarakat serta diharapkan pada tahun 2026 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan terjaga dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 6,60-7,20 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp226,40-233,30 juta didorong oleh penguatan beberapa sektor utama, antara lain konstruksi yang diproyeksikan tumbuh 10-13 persen, industri pengolahan diperkirakan

tumbuh 5–7 persen didukung bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya *Refinery Development Master Project* (RDMP) RU V Balikpapan dengan perkiraan produksi sebesar 131 jura barel/tahun . Sektor pertambangan diproyeksikan tumbuh moderat di kisaran 2–4 persen akibat normalisasi harga komoditas.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2026, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 9,50 – 10,0 Persen, yakni melalui :
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui penguatan kawasan sentra produksi yakni intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
 - c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
 - d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian seperti hilirisasi komoditas unggulan, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya.
2. Mendorong Inklusivitas Ekonomi dengan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6,60–7,20 persen, melalui :
 1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai Superhub Ekonomi IKN

2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
4. Meningkatkan *nett* ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2026 pada RKPD dilakukan dengan berbagai asumsi/pendekatan yang diperkirakan akan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 akibat berlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan dan asumsi yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana komponen pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah memberlakukan opsen sehingga pendapatan yang masih harus dibagi hasilkan dengan kabupaten kota adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok;
- 2) Pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen, dana bagi hasil sumber daya alam terutama mineral dan batubara telah mempertimbangkan produksi batubara dan kurang salur dana transfer serta telah menambahkan alokasi komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sama dengan tahun 2025;

- 3) Lain-lain pendapatan yang sah dihitung dengan memprakirakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2026. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistik* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi Kalimantan sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Digitalisasi informasi pelayanan pajak daerah melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
- 13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
- 15) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan OP.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun 2025 secara umum dapat dilihat pada tabel III.4. Pada kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2025 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 21,37 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2024 akibat meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Proyeksi pendapatan tahun 2025 juga diperhitungkan akan mengalami mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dengan penurunan pada komponen PAD sebesar 2,00 persen dan pendapatan transfer sebesar 15,69 persen. Sedangkan komponen. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sangat signifikan dipengaruhi oleh perolehan pendapatan dari keuntungan Perusahaan Pertambangan Batubara (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Tahun 2025* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	10.220.142.967.274	16.804.693.776.013	17.750.987.305.165	22.084.696.501.917	20.100.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.111.918.272.284	8.997.262.537.258	10.653.844.690.246	10.239.889.614.105	10.035.157.739.563
4.1.01	Pajak Daerah	4.774.890.855.289	7.623.597.479.496	8.698.162.558.337	8.571.499.366.556	8.400.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.590.719.061	19.980.889.916	68.105.206.998	1.100.891.467.509	1.070.333.040.395
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kalimantan Dipisahkan	214.599.338.882	310.262.666.522	260.236.357.306	237.697.555.597	449.309.792.556
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.108.837.359.053	1.043.421.501.324	1.627.340.567.605	329.801.224.444	115.514.906.612
4.2	Pendapatan Transfer	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	9.862.791.865.296
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	9.862.791.865.296
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.056.865.328.990	7.753.114.697.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	9.841.377.199.296
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	2.591.967.832.399	6.329.446.113.503	5.486.976.401.730	9.946.322.921.000	8.120.244.188.296
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	828.050.174.361	824.108.986.889	857.319.948.081	1.009.520.102.500	1.068.787.337.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	247.450.542.385	233.206.951.954	185.061.506.345	740.277.629.340	72.197.874.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	389.396.779.845	366.352.645.409	477.575.001.763		580.147.800.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.454.311.000	37.169.461.000	0		
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal				2.665.740.500	21.414.666.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Tahun 2025* (Rp)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.905.055.000	17.147.080.000	90.209.757.000	146.020.494.472	202.050.395.141
4.03.01	Hibah	13.905.055.000	17.147.080.000	21.055.277.000	22.834.925.000	13.864.392.517
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			69.154.480.000	123.185.569.472	188.186.002.624

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025 (persen)

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Penetapan Tahun 2025*
4	Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	59,80	53,54	60,02	46,37	49,93
4.1.01	Pajak Daerah	78,12	84,73	81,64	83,71	83,71
4.1.02	Retribusi Daerah	0,22	0,22	0,64	10,75	10,67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,51	3,45	2,44	2,32	4,48
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18,14	11,60	15,27	3,22	1,15
4.2	Pendapatan Transfer	40,06	46,36	39,47	52,97	49,07
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	99,09	99,52	100,00	100,00	99,78
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	63,89	81,64	78,31	85,02	82,51
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,41	10,63	12,24	8,63	10,86
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,10	3,01	2,64	6,33	0,73
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	9,60	4,73	6,82		5,89

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Penetapan Tahun 2025*
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,91	0,48			
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal				0,02	0,22
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,14	0,10	0,51	0,66	1,01
4.03.01	Hibah	100,00	100,00	23,34	15,64	6,86
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	76,66	84,36	93,14

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar 6,57 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh pengurangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,81 persen akibat penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 18 persen dampak pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB (pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan pendapatan transfer menurun sebesar 14,57 persen akibat penurunan DBH sebesar 2 persen terutama pada DBH SDA Mineral dan Batubara dan DAK Fisik. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar 196,54 persen akibat penambahan komponen penerimaan Bagi Hasil Pemegang IUPK Pertambangan Mineral dan batubara. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 51,94 persen.

Tabel 3.6. Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2026		Tahun 2027
		Rp	%	Rp
4	Pendapatan Daerah	20.450.000.000.000	100,00	19.748.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.753.535.391.163	52,58	10.934.779.767.753
4.1.01	Pajak Daerah	9.067.500.000.000	84,32	10.169.950.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.126.375.315.643	10,47	1.203.993.442.567
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	432.266.776.014	4,02	446.601.810.672
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	127.393.299.506	1,18	114.234.514.514
4.2	Pendapatan Transfer	9.334.429.762.111	45,65	8.727.832.244.735
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.334.429.762.111	100	8.727.832.244.735
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	21.414.666.000	0,23	17.879.814.047
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.611.383.073.111	81,54	6.888.691.614.605
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.049.286.349.000	11,24	1.107.239.257.142
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.345.674.000	6,99	714.021.558.941
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	362.034.846.726	1,77	85.387.987.512
4.03.01	Hibah	29.805.805.044	8,23	28.435.288.996
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	332.229.041.682	91,77	56.952.698.516

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Alokasi belanja wajib dan mengikat serta belanja prioritas untuk mendukung program unggulan kepala daerah pada tahun 2026 diproyeksikan akan mencapai Rp15.657.528.020.553. Perhitungan alokasi ini telah mempedomani ketentuan yang telah diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara lebih rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

NO	Uraian Kebutuhan	Tahun 2026 (Rp)
I	BELANJA PRIORITAS I	10.830.937.745.480
A	BELANJA WAJIB	4.083.116.142.550
1	Belanja Pegawai	3.490.291.662.242
2	Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam, ATK dan Pemeliharaan wajib)	562.379.839.102
3	Honorarium Pengelola keuangan, Barang dan Jasa	30.444.641.206
B	BELANJA MENGIKAT YANG DITENTUNKAN PENGGUNAANNYA	6.616.132.294.517
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	392.650.389.000
2	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	158.574.202.000
3	Dana Bagi Hasil Sawit	16.579.129.000
4	Dana FCPF-CF	5.000.000.000
5	BLUD	730.362.486.739

NO	Uraian Kebutuhan	Tahun 2026 (Rp)
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	9.619.770.000
7	Belanja Tidak Terduga	70.218.949.370
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Kabupaten/Kota	5.233.127.368.408
C	BELANJA MANDATORY	93.086.163.387
1	Belanja Fungsi Pendidikan *)	
2	Belanja Fungsi Pengawasan (diluar belanja wajib)	43.642.744.704
3	Belanja Fungsi Pengembangan SDM ASN(diluar belanja wajib)	49.443.418.683
D	BELANJA SPM	38.603.145.026
1	Belanja SPM pada Perangkat Daerah Pelaksana SPM (diluar belanja wajib dan mengikat)	38.603.145.026
II	BELANJA PRIORITAS II	4.746.809.224.443
A	BELANJA PROGRAM UNGGULAN	4.746.809.224.443
1	Belanja Gratispol	2.702.558.264.147
2	Belanja Jospol	2.044.250.960.296
Jumlah		15.657.528.020.553
	Penerimaan Daerah	21.350.000.000.000
	Kapasitas Riil	5.772.253.030.077

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025*

Keterangan : *) Telah terpenuhi 23,99% dari belanja daerah melalui anggaran fungsi pendidikan pada Belanja Wajib, Belanja Mengikat yang Ditentukan Penggunaannya, serta Belanja Gratispol dan Belanja Jospol

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) serta gaji, tunjangan, biaya operasional serta hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan;
- b) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan, dan pemeliharaan rutin lainnya yang bersifat wajib;

- c) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- d) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- e) Dana Bagi Hasil Sawit dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya dikarenakan adanya perkebunan dan industri kelapa sawit di Kalimantan Timur dan diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023;
- f) Dana FCPF-CF dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan untuk pengelolaan lingkungan hidup;
- g) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- h) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- i) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi didaerah;
- j) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
- k) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;

- l) Belanja *Mandatory* adalah belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pendidikan, pengawasan dan pengembangan SDM ASN;
- m) Belanja SPM adalah belanja yang dialokasikan untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum serta sosial;
- n) Belanja Prioritas II merupakan belanja yang dianggap belanja prioritas program unggulan Kepala Daerah sesuai amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 158.

3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
 - 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 20,21 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025 dikarenakan terjadinya peningkatan belanja modal, belanja transfer ke pemerintah kabupaten kota akibat peningkatan pendapatan pajak daerah, peningkatan belanja hibah kepada penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan peningkatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 dan penetapan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Tahun 2025* (Rp)
5	BELANJA	10.723.529.422.431	12.393.745.833.368	19.724.298.910.866	20.463.584.497.128	20.950.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	4.983.150.466.273	6.001.780.302.943	8.266.977.895.372	9.336.791.589.120	9.390.879.440.369
5.01.01	Belanja Pegawai	2.105.588.712.918	2.334.585.774.591	2.591.408.921.533	3.225.823.898.873	3.749.475.911.228
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.634.941.566.554	3.184.224.252.607	4.983.933.808.073	4.898.722.386.377	4.916.292.223.573
5.01.05	Belanja Hibah	228.665.386.800	432.031.575.745	679.755.765.766	1.195.068.203.870	695.691.405.920
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	13.954.800.000	50.938.700.000	11.879.400.000	17.177.100.000	27.660.500.000
5.02	BELANJA MODAL	1.514.465.189.715	1.980.010.052.268	5.023.300.274.088	4.870.009.542.681	4.667.457.468.440
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	221.409.234.933	6.688.799.413	50.440.679.059	64.230.807.314	174.965.591.911
5.04	BELANJA TRANSFER	4.004.504.531.511	4.405.266.678.744	6.383.580.062.346	6.192.552.558.013	6.716.697.499.280
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.455.934.232.318	3.542.721.678.744	5.186.080.062.346	4.391.448.912.082	4.663.446.349.280
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.548.570.299.193	862.545.000.000	1.197.500.000.000	1.801.103.645.931	2.053.251.150.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025

Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Penetapan Tahun 2025*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	46,47%	48,43%	41,91%	45,63%	44,83%
5.01.01	Belanja Pegawai	42,25%	38,90%	31,35%	34,55%	39,93%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	52,88%	53,05%	60,29%	52,47%	52,35%
5.01.05	Belanja Hibah	4,59%	7,20%	8,22%	12,80%	7,41%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,28%	0,85%	0,14%	0,18%	0,29%
5.02	BELANJA MODAL	14,12%	15,98%	25,47%	23,80%	22,28%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,06%	0,05%	0,26%	0,31%	0,84%
5.04	BELANJA TRANSFER	37,34%	35,54%	32,36%	30,26%	32,06%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	61,33%	80,42%	81,24%	70,92%	69,43%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	38,67%	19,58%	18,76%	29,08%	30,57%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2026 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2026 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2026, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja penyediaan layanan dasar pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, perikanan dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah, penyediaan perumahan masyarakat, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan desa;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Pengalokasian belanja dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kerja selaras dengan potensi daerah, penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kesempatan kerja;
- 5) Belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 6) Penguatan perekonomian yang efektif di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, perikanan, UMKM dan IKM melalui peningkatan nilai tambah produk serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
- 7) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- 8) Pengalokasian belanja untuk mendukung pelaksanaan program unggulan kepala daerah dalam rangka mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

- 9) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
- 10) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun ke depan. Adapun proyeksi belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10. Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2026		Proyeksi Tahun 2027
		Rp	%	
5	BELANJA	21.350.000.000.000	100,00%	20.248.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	10.992.895.037.628	51,49%	8.579.015.656.273
5.01.01	Belanja Pegawai	4.135.467.815.430	37,62%	3.693.302.817.337
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	6.409.962.482.198	58,31%	4.545.712.838.936
5.01.04	Belanja Subsidi	20.000.000.000	0,18%	20.000.000.000
5.01.05	Belanja Hibah	414.970.490.000	3,77%	300.000.000.000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	12.494.250.000	0,11%	20.000.000.000
5.02	BELANJA MODAL	3.111.594.988.294	14,57%	5.781.984.343.727
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.218.949.370	0,33%	100.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	7.175.291.024.708	33,61%	5.787.000.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	5.231.796.378.408	72,91%	5.487.000.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.943.494.646.300	27,09%	300.000.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori (*mandatory spending*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan

peningkatan SDM ASN pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11. Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Uraian	Alokasi Pada RKPD 2026	
		Rp	Persentase
A	Belanja Mandatory Spending		
1	Belanja Mandatory Pendidikan	5.121.992.175.752	23,99%
	Subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.35/KM.7/2024	5.121.992.175.752	
2	Belanja Mandatory Kesehatan	2.518.701.112.000	11,80%
3	Belanja Mandatory Pengembangan Kompetensi ASN	70.100.466.469	0,33%
	Pagu BPSDM	70.100.466.469	
4	Belanja Mandatory Pengawasan	85.279.257.552	0,40%
	Pagu Inspektorat	85.279.257.552	
5	Belanja Mandatory Infrastruktur	5.126.287.432.467	36,17%*
	Subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.45/KM.7/2024	5.126.287.432.467	
	Jumlah Belanja Daerah	21.350.000.000.000	
	Jumlah Belanja Transfer	7.175.291.024.708	
	Jumlah Belanja Daerah diluar Belanja Transfer	14.174.708.975.292	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan : * Persentase dibagi belanja daerah dikurangi belanja transfer

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026-2027

No	Uraian	Tahun 2026	Tahun 2027
A	Penerimaan Pembiayaan		
1	Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000	500.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000	500.000.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Jumlah Pembiayaan Netto	900.000.000.000	500.000.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

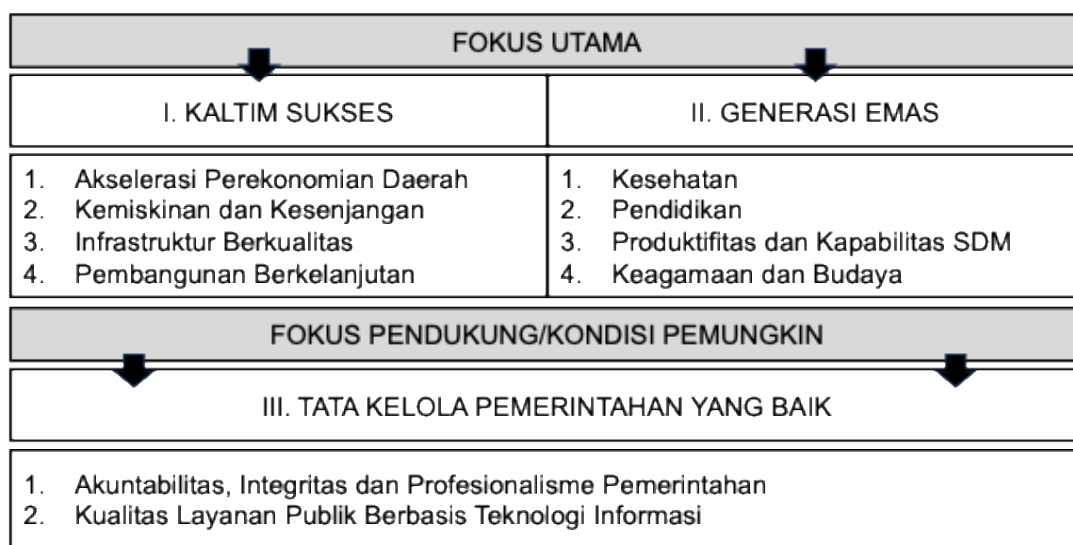
RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dengan 6 (enam) Misi Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan Daerah	
Misi 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
Misi 2	Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah
Misi 3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan
Misi 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi
Misi 5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
Misi 6	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada rencana tahunan.

Secara cascading kinerja, visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat terwujud apabila kinerja utama yakni terwujudnya Kaltim Sukses dan terbangunnya Generasi Emas dicapai, dengan didukung oleh kondisi pemungkin berupa tata kelola pemerintahan yang baik. Pola hubungan antar fokus pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2026 dapat di lihat seperti pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari *baseline* tahun 2024. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Rumusan tujuan dan sasaran RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES			
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%)	3,90	4,00
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,60–7,20
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,84
	Tingkat Inflasi (%)	1,47	2,50±1
	Indeks Daya Saing Daerah	3,37	3,44
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	3,50–4,30
	Indeks Gini	0,321	0,309-0,318
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	5,94	6,73
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia <i>Blue Economy Index</i>	29,07*	38,81
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,04*	63,84
	Indeks Ketahanan Pangan	78,61	80,47

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,63	80,36
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	75,55	55,00-60,70
	Indeks Risiko Bencana	136,11	129,05
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS			
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56*	0,60
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,94	75,04
	Prevalensi Stunting (%)	22,2	18,4
Sasaran 6 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,22
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,02	10,48
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,80	14,85
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	226,40-233,30
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,54-5,07

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,19	78,86
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,56*	59,36
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	85,16	86,53
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Nilai AKIP	78,74	79,78
	Indeks Integritas Nasional	72,75	76,62
	Indeks Inovasi Daerah	61,74	64,00
	Nilai Sistem Merit (skor)	271*	286
	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2,26*	2,33–2,40
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	3,75	4,10
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,79	3,91

Keterangan: *) Capaian Tahun 2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Selain mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan Nasional (RKP) tahun 2026. Tema RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang mendukung pencapaian Visi 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Fokus pembangunan nasional dijabarkan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 program kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun 17 program prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat/ <i>Quick Wins</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5) Pemberantasan Kemiskinan 6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7) Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10) Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12) Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13) Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14) Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri-Lainnya 15) Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins
16) Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17) Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Strategi percepatan dalam mewujudkan pencapaian tema RKP Tahun 2026 adalah melalui :

- 1) Peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya;
- 2) Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
- 3) Swasembada energi melalui ekonomi hijau;
- 4) Peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital; dan
- 5) Peningkatan investasi produktif utamanya *Foreign Direct Investment (FDI)* berorientasi ekspor dan investasi non-APBN.

Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditargetkan pada RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKP Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan	Target Kaltim (RKP 2026)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6 – 7,2
2	PDRB per Kapita (Rp Juta)	226,4 – 233,3
3	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%)	4,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	3,50 – 4,30
5	Rasio Gini	0,300 – 0,307
6	Indeks Modal Manusia	0,60
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	55,00 – 60,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,36
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54 – 5,07

Sumber: Rancangan RKP 2026

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026

Isu strategis disusun berdasarkan analisis kondisi capaian pembangunan dan berdampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat

menghilangkan peluang untuk pencapaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan;
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif;
4. Pemerataan pembangunan wilayah;
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;
6. Peluang pembangunan *superhub* ekonomi dan mitra IKN;
7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK);
8. Kemandirian pangan;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026

Berdasarkan penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan. Pengembangan budaya dan kearifan lokal turut diperkuat guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat, sementara pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tema pembangunan tahun 2026 selanjutnya digambarkan melalui prioritas pembangunan sebagai wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sektor pendidikan;
2. Membangun sektor kesehatan;
3. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Membangun infrastruktur konektivitas.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan tahun 2026 sebagai berikut.

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Sejahtera

- 1) Menyediakan pembiayaan sekolah dan seragam sekolah bagi seluruh peserta didik SMA/SMK/SLB/MA;
- 2) Menyediakan pembiayaan berupa uang kuliah tunggal bagi penduduk usia produktif untuk pendidikan tinggi jenjang S1 hingga S3;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- 5) Membangun sekolah unggul dan sekolah rakyat;
- 6) Menyediakan akses layanan berobat melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 7) Meningkatkan upaya promotif-preventif kesehatan;
- 8) Memperkuat kelembagaan pendamping keluarga beresiko stunting;
- 9) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan;
- 10) Menyediakan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis secara merata;
- 11) Memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi;

- 13) Meningkatkan partisipasi perempuan, pemuda, maupun penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada anak dan lansia;
- 14) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang diiringi dengan penyediaan lapangan kerja;
- 15) Meningkatkan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 16) Mengembangkan eksosistem pekerjaan hijau (*green jobs*) dan kompetensi tenaga kerja hijau.

Misi 2: Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru Yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah

- 1) Mendukung pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN dan wilayah Mitra IKN di Kalimantan Timur sebagai wilayah pusat pertumbuhan;
- 2) Meningkatkan industri pertanian yang didukung dengan peningkatan dan perluasan areal berbasis pertanian modern;
- 3) Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan;
- 4) Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- 5) Meningkatkan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- 6) Mengembangkan ekonomi maritim dengan mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
- 7) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 8) Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
- 9) Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis desa;
- 10) Memberikan kemudahan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, serta swasta;
- 11) Meningkatkan peran ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik Dan Kesehatan

- 1) Membangun jalan akses wilayah perbatasan;

- 2) Meningkatkan kondisi jalan mantap di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
- 3) Mengembangkan konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan;
- 4) Mendukung pembangunan bandara perbatasan;
- 5) Mendukung pembangunan pelabuhan internasional;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana dermaga Sungai Mahakam;
- 7) Meningkatkan kualitas layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan;
- 8) Membangun bendungan untuk mendukung irigasi pertanian dan pemenuhan air baku;
- 9) Membangun bendali dan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir;
- 10) Membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum berskala regional;
- 11) Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan dan inklusif;
- 12) Memperluas akses hunian layak melalui penyediaan pembiayaan administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 13) Mengembangkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang andal;
- 14) Mengembangkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di setiap desa;
- 15) Membangun rumah sakit umum daerah provinsi.

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara;
- 3) Mengoptimalkan penerapan sistem merit;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital;
- 5) Meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja aparatur;
- 6) Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal;
- 7) Meningkatkan penerapan hasil riset dan inovasi daerah;
- 8) Mengoptimalkan tata kelola pencatatan dan pemanfaatan aset daerah;
- 9) Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antar kabupaten/kota.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal

- 1) Menyediakan pembiayaan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah;
- 2) Membangun sarana dan prasarana peribadatan yang representatif;

- 3) Meningkatkan penghargaan, toleransi dan kerukunan antar suku dan antar umat beragama;
- 4) Memperkuat pelestarian budaya asli daerah dan kearifan lokal;
- 5) Menyediakan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial budaya masyarakat;
- 6) Memberikan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
- 7) Mengintegrasikan muatan lokal dan kearifan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

- 1) Mengimplementasikan konsepsi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sirkular ekonomi lingkungan;
- 2) Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
- 3) Meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- 5) Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan;
- 6) Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah melalui penerapan sirkular ekonomi;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengurangan pencemaran lingkungan;
- 8) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama untuk mendukung kedaulatan energi, air, dan pangan;
- 9) Memperkuat perencanaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
- 10) Meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana.

Selain arah kebijakan, prioritas pembangunan pun turut didukung oleh strategi yang merupakan langkah-langkah ataupun upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah indikasi strategi tahun 2026.

Tabel 4.5. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
KATA KUNCI VISI: KALTIM SUKSES		
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses	Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan nilai tambah hilirisasi industri; 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri; 3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; 4. Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 5. Peningkatan investasi pada sektor produktif; 6. Menjaga stabilitas perekonomian daerah; 7. Peningkatan nilai ekspor daerah.
	Sasaran 2: Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan; 4. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
	Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum; 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air limbah dan sanitasi; 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana hunian layak; 6. Peningkatan kualitas bangunan bersifat strategis;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan.
	Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; 2. Penurunan emisi gas rumah kaca; 3. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; 4. Pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim; 5. Peningkatan pengelolaan persampahan; 6. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan; 7. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; 8. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan.
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS		
Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas	Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses layanan kesehatan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 3. Penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan; 4. Peningkatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.
	Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan inklusi layanan pendidikan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 3. Peningkatan keterhubungan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; 4. Penyediaan akses pendidikan tinggi.
	Sasaran 7: Meningkatnya Produktifitas dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja; 2. Peningkatan kesempatan kerja;

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Kapabilitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kewirausahaan; 4. Peningkatan daya saing kepemudaan; 5. Peningkatan daya saing perempuan.
	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat; 2. Pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal.
LANDASAN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK		
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2. Peningkatan kualitas layanan publik; 3. Peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur; 4. Peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah; 6. Penguatan dan penerapan riset dan inovasi pemerintahan.
	Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi layanan pemerintahan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah, indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif. Program pembangunan daerah yang bersifat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 tersaji pada tabel 4.6. sebagai berikut.

Tabel 4.6. Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses							
Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah							
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	600.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Produk yang masuk pasar ekspor baru (produk)	17	19	599.925.820	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Negara (daerah) tujuan baru produk ekspor	11	12		
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri (%)	37,81	40,81	19.339.880.969	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	250.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya wirausaha baru	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	4,86	2,91	21.710.242.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya koperasi kewenangan provinsi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	758.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya luas lahan pertanian yang terlindungi	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	10.195,06	16.415,06	710.930.925	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan (ton)	321.685,60	347.814,02	3.089.013.932	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Produksi tanaman hortikultura (ton)	439.628,00	493.966,02		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	996.382.221	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh kelompok tani (%)	n/a	12		
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan	Produksi komoditas perkebunan (ton)	19.829.215	20.004.096	3.686.927.115	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)	n/a	13,33		
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan	Luas Kawasan Untuk Peternakan (Ha)	300	500	2.030.051.143	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan (Skor)	87,02	90,54	25.825.264.115	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya kemanfaatan Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan (skor)	80,66	85,57		
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	4.804.391.633	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)	87,54	91,08		
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	40.214,00	44.289,00	650.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	1.496.856.638.140	1.680.270.182.290		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	214.694,00	223.367,80	5.555.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan	Produksi perikanan budidaya (Ton)	241.728,40	258.945,50	18.375.778.785	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu (m3/tahun)	6.293.432,95	6.402.024,00	37.548.255.712	Dinas Kehutanan
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)	1.545	1.645		
03.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Miliar Rupiah)	1,5	3,25	22.108.500.000	Dinas Kehutanan
			Luas kawasan yang dikelola masyarakat	330.184 Ha	370.184 Ha		
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	10%	10%		
			Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1%	6%		
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	1,69	0,5	5.100.000.000	Dinas Pariwisata
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3,55	5,07	15.105.601.579	Dinas Pariwisata
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100	100	2.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berinvestasi (investor)	2.364	2.489	2.250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan							
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	81	100	10.855.500.000	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50	60		
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	30	50		
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti (%)	100	100	14.839.145.388	Dinas Sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100		
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100		
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	8.160.727.610	Dinas Sosial
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100		
			Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa (%)	2,73 (23 Desa)	3,56 (30 Desa)	7.816.413.930	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang maju (%)	4,2	5		
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)	16,6	31,43	52.397.023.278	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas							
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	82,21	89,84	1.273.274.533.385	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air	Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	2,41	11,42	162.894.336.008	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	0,4	16,08		
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	29,25	35,99		
			Kapasitas air baku untuk air bersih (liter/detik)	10.980	11.676		
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota (%)	0	8,62	118.224.260.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	84,23	88,23	3.073.294.900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (%)	4,88	7		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	74,47	79,08	794.229.456.840	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	20.970.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100	100		
		Tersedianya rumah murah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah (Orang)	N/A	2.000		
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)	16,6	31,43	52.397.023.278	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	29,02	33,27	60.494.886.304	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,41	0,44	23.048.453.169	Dinas Perhubungan
			Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (%)	50,74	55		
			Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang (%)	25	35		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut dan SDP	Rasio Konektivitas Laut dan SDP	0,917	0,917	94.286.205.990	Dinas Perhubungan
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	45,45 Indeks	48,21 Indeks		
03.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (%)	0,3788	0,4996	47.549.390.215	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	12,14	15,73		
03.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	96,17	97,06	29.465.443.876	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan							
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,77	18,75	965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Emisi GRK dari sektor persampahan (Ton Co2e)	350.130,40	371.535,10		
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Air	2,65 (Tercemar Ringan)	≤5 (Tercemar Ringan)	2.349.144.676	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Standar Pencemaran Udara	35 (Baik)	46 (Baik)		
			Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah (Ton Co2e)	308.191,20	318.721,20		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
03.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	1	1	37.548.255.712	Dinas Kehutanan
			Luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Ha)	3,5	4,45		
			Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (%)	0,16	<0,5		
			Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) (M3/tahun)	6.293.432	6.402.024		
			Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Ton)	1.545	1.645		
03.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	N/A	0,54 Indeks	2.500.000.000	Dinas Kehutanan
			Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	N/A	95.337		
03.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	19.886 Ha	544.821	5.361.610.000	Dinas Kehutanan
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	N/A	0,23		
03.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Luas kawasan yang dikelola Masyarakat (ha)	330.184	370.184	22.108.500.000	Dinas Kehutanan
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	1	6		
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	10	10		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
03.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Meningkatnya penggunaan energi bersih	Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)	6.994.832,59	9.388.542,39	47.549.390.215	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
03.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	85,71	1.200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi bencana	Indeks Pra Bencana	N/A	0,077 Indeks	4.878.996.221	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	N/A	0,034 Indeks		
			Indeks Pasca Bencana	N/A	0,016 Indeks		
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan (%)	N/A	100	1.509.943.943	Dinas Perkebunan
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani (%)	74,5	90	104380200	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya persediaan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	372,73	100	134.168.270	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (skor)	89,1	89,95	1.153.173.018	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya kualitas ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (skor)	97,7	97,8		
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,81	1,9	1288973544	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas							
Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	8,42	8,05	481.331.880.251	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun(%)	2	2,1		
			Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	N/A	2		
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun(%)	28	23,4		
			Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	80%		
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	84	85		
			Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	N/A	2%		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	88%	88%		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	88%	88%		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	91%	91,75%		
			Persentase lanjut usia yang mandiri	94%	95,1%		
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	13%	12%		
			Cakupan penemuan kasus TB	58	85		
			Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta	0	0		
			Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	100%	100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	35%	50%	39.881.075.434	Dinas Kesehatan
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	0,0066	0,0073		
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	60%	80%		
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	62%	60%		
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100%	100%	685.900.000	Dinas Kesehatan
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	N/A	100%	250.701.000	Dinas Kesehatan
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	N/A	100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat							
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	81,84%	82,57%	1.328.066.734.365	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	53,75%	71,34%		
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	78,53%	80,63%		
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi Membaca	68,84%	70,95%		
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	81,63	82,71		
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	88,2	90,18		
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru	0,58 Indeks	0,6 Indeks	848.215.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	51,00%	52,52%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia							
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	451.446.262	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang dimagangkan dan atau Bekerja/Berwirausa	65%	67%		
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10%	28,10%	415.818.693	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen	44,09%	45,92%	1.072.180.012	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,07%	50,20 - 51,26%		
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	1,02%	1,45%	13.482.886.439	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat							
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya implementasi kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	1.224.576.613	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

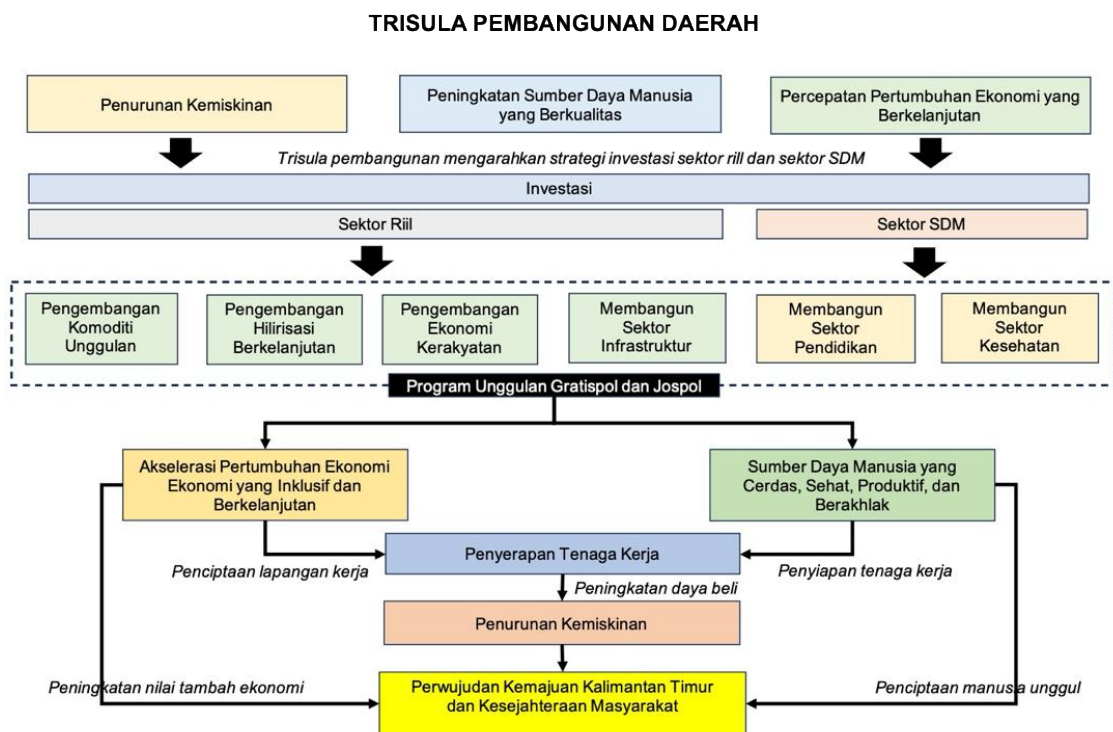
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
04.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi	100%	100%	1.771.595.278.861	Sekretariat Daerah
			Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra	N/A	5715 Orang		
			Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra	N/A	19900 Orang		
02.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	45%	50%	2.092.123.247	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan	29%	70%		
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan							
04.01.02	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya Hasil Penilaian Kelembagaan dan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi	10.26%	63%	3.456.983.511	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik)	95.69%	82,00%		
		Meningkatnya Penerapan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan	47.43%	86%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan ASN	Persentase Pemenuhan ASN Sesuai Perencanaan	60,87%	89,21%	9.517.586.512	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	86,54%	88,13%		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	94,23%	94,29%		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	97,29%	97,43%		
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Professional dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,26 Indeks	2,4 Indeks	10.486.851.931	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	86%	90%	33.534.548.824	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	86%	88%		
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	N/A	91%		
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	87%	89%		
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100%	100%	15.019.916.378	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2026		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
05.05.03	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan secara berkelanjutan	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan (%)	N/A	52,94	200.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase Pengembangan Hasil Inovasi dan Inovasi	N/A	45,71%		
Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi							
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80,00%	85,00%	27.977.968.386	Dinas Komunikasi dan Informatika
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	46,32	51,94%	15.493.012.400	Badan Pendapatan Daerah
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	2.400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.2.4 Program Unggulan

Pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan wujud nyata dari inovasi daerah yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan sekaligus menjadi janji politik yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu program unggulan Gratispol dan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 4.2. Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Daerah

Program Unggulan Gratispol, terdiri dari **7 (tujuh) kegiatan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu :

1) Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat bersekolah SMA/SMK/SLB/MA secara gratis. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa tidak ada anak-anak di

Kalimantan Timur yang tidak bersekolah hingga jenjang menengah atas hanya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah. Instrumen utama yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan unggulan ini adalah melalui optimalisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sementara itu untuk pendidikan tinggi, setiap penduduk usia produktif juga akan diberikan bantuan pembiayaan untuk dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah :

2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Kesejahteraan Rakyat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3 adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK/SLB/MA dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	187.914 siswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1	149.307 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3	7.449 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim	892 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri	133 mahasiswa
		Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus	1.200 mahasiswa

2) **Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh masyarakat domisili Kalimantan Timur dapat berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan secara gratis (sesuai standar yang ditentukan). Kegiatan ini memiliki semangat bahwa setiap warga Kalimantan Timur harus memiliki jaminan kesehatan aktif yang dapat digunakan untuk berobat, sehingga pengobatan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk

seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kelompok sasarannya diutamakan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu. Lingkup biaya berobat gratis ini tidak hanya diterapkan pada puskesmas/rumah sakit pemerintah saja, namun juga di klinik/rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Selain itu, jaminan biaya pengobatan gratis ini juga akan diikuti dengan alokasi pembiayaan kompensasi berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi untuk tetap menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Meningkatnya cakupan jaminan dan layanan kesehatan masyarakat	Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	492.352 Orang
		Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi	6.968 Orang

3) **Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;**

Merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya ungkit keberhasilan Program Strategis Nasional (ProSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk dukungan pengendalian pelaksanaan dan rantai pasok. Selain itu, kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting ini juga memiliki semangat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur yang pada tahun 2024 masih di angka 22,2%. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penguatan kader risiko stunting yang secara bertahap dilakukan di 10 kabupaten/kota. Kelompok sasaran yang dituju kepada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dua tahun (baduta).

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Diberikannya Penguatan Kader Risiko Stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	3 Kab/Kota
		Jumlah Kader Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	610 Kader

4) **Gratis Internet di Setiap Desa;**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin pada setiap desa memiliki paling sedikit 1 (satu) titik akses internet secara gratis dalam rangka membuka ruang bagi masyarakat pedesaan untuk dapat mengakses informasi global. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diharapkan tumbuh lebih cepat karena meningkatnya aksesibilitas terhadap lokapasar. Internet memungkinkan pelajar di pedesaan untuk memperluas wawasan tentang perkembangan terkini di berbagai bidang serta mengakses sumber belajar secara daring (kursus dan pendidikan jarak jauh). Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah penyediaan perangkat dan biaya berlangganan internet. Adapun untuk desa yang belum terakses jaringan internet melalui fiber optik dan/atau provider telekomunikasi, maka opsi yang diberikan adalah melalui jaringan internet satelit. Sebagai catatan penting, bahwa pelaksanaan kegiatan unggulan ini juga perlu di ikuti dengan pengendalian, pengawasan dan edukasi mengenai pemanfaatan internet kepada seluruh masyarakat desa agar tidak digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Internet di Setiap Desa adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	841 desa

5) **Gratis Seragam Sekolah**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa setiap peserta didik baru SMA/SMK/SLB/MA negeri dan swasta serta SLB mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk menekan biaya pengeluaran orangtua peserta didik yang harus membeli seragam sekolah baru pada masa kelulusan SMP/MTs menuju jenjang SMA/SMK/SLB/MA. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembagian seragam sekolah secara gratis dalam bentuk barang. Peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang akan diberikan bantuan seragam sekolah yang terdiri dari 1 (satu) stel pakaian, 1 (satu) pasang sepatu dan tas sekolah.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Seragam Sekolah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	135.210 siswa

6) **Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;**

Merupakan kegiatan unggulan yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi *backlog*¹ kepemilikan rumah dan mendukung program 3 juta rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)². Kegiatan unggulan ini juga menyasar kepada segmen anak muda dan pengusaha pemula yang hendak memiliki rumah. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah (seperti biaya

¹ *Backlog* rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat (Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2016)

² Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016)

provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya *appraisal*, biaya balik nama sertifikat, dll). Secara bertahap kegiatan unggulan ini rencana juga akan dikembangkan pada instrumen *down payment* (DP) 0% dengan angsuran kredit yang sangat rendah. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga biaya penyediaan rumah menjadi lebih murah.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah Program Pengembangan Perumahan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen anak muda/ pengusaha pemula	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	1.000 orang

7) Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah;

Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah Program Kesejahteraan Rakyat.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan unggulan Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah adalah sebagai berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2026
1.	Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh (perjalanan suci, dll) secara gratis bagi imam dan penjaga rumah ibadah	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	900 orang

ket : Penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) tidak berulang

Program Unggulan Jospol, terdiri dari **9 (sembilan) arah kebijakan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu :

1) Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;

Peningkatan nilai tambah dari komoditi pertanian menjadi salah satu mesin penggerak transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Komoditi pertanian Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain kelapa sawit, karet, kakao, lada, pisang, padi dan jagung. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi komoditi pertanian untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pertanian. Strategi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, seperti jaringan irigasi, alsintan, bibit unggul dan lain-lain.

2) Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik;

Peningkatan efisiensi dan produktivitas membutuhkan adanya pengembangan teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut serta usaha perikanan lokal diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap ekosistem dan menghasilkan produk yang berkualitas, terlebih dalam konsepsi pengembangan ekonomi biru. Penggunaan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inisiatif digitalisasi dalam

pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pengembangan teknologi dan inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Kalimantan Timur.

3) Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah;

Peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdian masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

4) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;

Pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital merupakan langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital, UMKM di daerah dapat memperluas visibilitas dan akses pasar, serta mengembangkan inovasi produk yang lebih menarik bagi konsumen. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang digital marketing, desain produk, dan manajemen keuangan juga menjadi penting untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;

Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa merupakan pendekatan yang efektif untuk memberdayakan komunitas lokal serta melestarikan warisan budaya dan alam. Penedeapan potensi khusus yang dimiliki tiap desa, seperti tradisi, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan keindahan alam dari desa-desa tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya dan lingkungan. Pelatihan bagi masyarakat lokal dalam hal manajemen pariwisata, layanan pengunjung, dan pemasaran digital juga dilaksanakan secara beriringan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat akan memperkuat dukungan yang diperlukan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Ekonomi masyarakat desa akan terakselerasi sebagai dampak positif adanya destinasi wisata. Kedepannya pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata.

6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan;

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses di seluruh wilayah. Di sektor pendidikan, strategi ini dapat diwujudkan dengan membangun unit sekolah baru, pengembangan sekolah menjadi sekolah unggulan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah terluar dan tertinggal. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, dan posyandu yang memadai, dilengkapi dengan peralatan

medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan layanan ini bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Timur.

7) Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional;

Pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur, meliputi jalan tol dan non-tol, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional, merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan jalan tol dan non-tol serta jembatan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mengurangi isolasi daerah pedalaman dan perbatasan. Sementara itu, pengembangan transportasi umum yang modern dan terintegrasi akan mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, penguatan jaringan komunikasi, termasuk internet berkecepatan tinggi, akan mendukung digitalisasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional dalam upaya mendukung Superhub Ekonomi IKN akan membuka peluang ekspor-impor, menarik investasi asing, serta memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai hub perdagangan di kawasan Asia. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Kalimantan Timur yang lebih maju dan berkelanjutan.

8) Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;

Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang

panggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pengerukan dan pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.

9) Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta;

Memudahkan investasi termasuk melalui pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta, merupakan langkah krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor domestik maupun asing. Pemerintah daerah dapat menyederhanakan perizinan investasi dengan mengefektifkan sistem satu pintu yang efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi untuk proyek-proyek strategis. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ketiga pihak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi di Kalimantan Timur dengan melakukan promosi untuk menarik investasi, serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi, serta kepastian hukum bagi investor. Melalui strategi ini diharapkan investasi di Kalimantan Timur akan meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Dari kedua Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Gratispol dan Jospol, dilaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 4.7. Indikasi Kegiatan Unggulan
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
Program Unggulan Gratispol			
1.	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	10 kabupaten/kota	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Kesejahteraan Rakyat
2.	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	10 kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Gratis Internet di Setiap Desa	7 kabupaten	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
5.	Gratis Seragam Sekolah	10 kabupaten/kota	Program Pengelolaan Pendidikan
6.	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan
7.	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	10 kabupaten/kota	Program Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol			
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern			
1.	Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Penunjang Pusat Distribusi Pangan Provinsi	Balikpapan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2.	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Minyak Goreng, Pengolahan Rotan, dan Pakan Ternak	a. Minyak Goreng: Kutai Kartanegara b. Pengolahan Rotan: Penajam Paser Utara c. Pakan Ternak: Paser	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3.	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang, Balikpapan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
			4. Program Penyuluhan Pertanian
4.	Pengembangan kawasan tanaman Pisang Kepok (Grecek)	Kutai Timur dan Kutai Kartanegara	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5.	Pembangunan <i>Workshop</i> Produksi Pupuk Organik Pertanian	Samarinda	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6.	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao, Kopi, Aren	Kakao : Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau Kopi : Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser Aren : Kutai Kartanegara, Kutai Barat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7.	Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH	10 kabupaten/kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner	Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung
9.	Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul	Penajam Paser Utara	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
10.	Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman	Samarinda	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
11.	Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan (mendukung generasi emas)	Samarinda	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik			
1.	Pembangunan Aplikasi SAKTI (Super App)	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan <i>Cold Storage</i> sebagai sarana Sistem Rantai Dingin	Berau, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah			
1.	Pemberian Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 kabupaten/kota	Program Kesejahteraan Rakyat

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM			
1.	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	10 kabupaten/kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2.	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3.	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	10 kabupaten/kota	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa			
1.	Pengembangan Pariwisata <i>Geopark</i> Sangkulirang-Mangkalihat	Kutai Timur, Berau	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2.	Pengembangan Desa Wisata yang berstandar	7 kabupaten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3.	Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya	7 kabupaten	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan			
1.	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Samarinda	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	Kutai Barat - Mahakam Ulu	Program Penataan Bangunan Gedung
3.	Pembangunan Parkir Rumah Sakit Mata (Parkir Non Vertikal)	Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung
4.	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II	Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung
5.	Pembangunan <i>Workshop</i> Las Bawah Air Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang	Bontang	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional			
1.	Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang	Kutai Barat - Mahakam Ulu	Program Penyelenggaraan Jalan
2.	Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara)	Mahakam Ulu	Program Penyelenggaraan Jalan
3.	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46	Kutai Timur	Program Penyelenggaraan Jalan

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Nomenklatur Program
4.	Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda	Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan
5.	Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan	Balikpapan	Program Penyelenggaraan Jalan
6.	Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat	Penajam Paser Utara – Kutai Barat	Program Penyelenggaraan Jalan
7.	Pembangunan Bandara Ujoh Bilang	Mahakam Ulu	Program Penataan Bangunan Gedung
8.	Kegiatan peningkatan/rehabilitasi ruas jalan Provinsi	Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Balikpapan, Bontang	Program Penyelenggaraan Jalan
9.	Dukungan pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau	Balikpapan	Program Pengelolaan Pelayaran
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata			
1.	Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat	Program Pengelolaan Pelayaran
2.	Pembangunan Pelabuhan Tambat	Samarinda	Program Pengelolaan Pelayaran
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta			
1.	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	10 kabupaten/kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.	Forum Investasi Daerah	10 kabupaten/kota	Program Promosi Penanaman Modal

4.2.5 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah disusun sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dan mendukung Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional ditampilkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.8. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Membangun sektor pendidikan
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	a. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan; b. Membangun infrastruktur konektivitas
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	a. Membangun sektor pendidikan; b. Membangun sektor kesehatan
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun ekonomi inkluaif dan berkelanjutan
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	a. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan; b. Membangun infrastruktur konektivitas
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Membangun sektor pendidikan

Dalam rangka memastikan pembangunan yang dilaksanakan di daerah turut mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan pembangunan nasional, maka perlu dipastikan keselarasan antara sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan sasaran prioritas nasional (PN) dalam RKP Tahun 2026. Adapun persandingan antara sasaran pembangunan daerah terhadap sasaran PN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Pembangunan RKPD
	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	-
2	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan
3	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	
4	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Pembangunan RKPD
		Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan
	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	
1	Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
2	Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
3	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	Sasaran 7 : Meningkatkan Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
5	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
1	Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata	Sasaran 6 : Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat
2	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Sasaran 5 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Sasaran 8. Meningkatkan Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
4	Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatkan Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
5	Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	Sasaran 8. Meningkatkan Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
1	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
2	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan
2	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Pembangunan RKPD
3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan
4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta politik yang fungsional	Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan
2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	-
5	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung paya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
6	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah
	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
1	Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat
2	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan

Sinkronisasi antara program prioritas nasional dan daerah juga perlu dilakukan sehingga mencerminkan upaya harmonisasi perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan. Program prioritas daerah disusun dengan turut memperhatikan arah dan fokus pembangunan nasional yang

bertujuan agar pelaksanaan program di tingkat daerah dapat memperkuat pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Berikut merupakan perbandingan antara program prioritas PN RKP Tahun 2026 dengan program prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Tabel 4.10. Keselarasan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Program Prioritas PN dalam RKP Tahun 2026

Kode	Program Prioritas PN RKP 2026	Kode	Program Prioritas RKPD 2026
	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia		
01.02	Penguatan Komunikasi Publik dan Media	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
01.03	Penguatan Lembaga Demokrasi	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
02.10	Swasembada Pangan	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
02.11	Swasembada Energi	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)
02.12	Swasembada Air	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
02.13	Ekonomi Syariah	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
02.14	Ekonomi Digital	2.17.08	Program Pengembangan UMKM
		3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
02.15	Ekosistem Ekonomi Sirkular	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
02.16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Ekosistem, Spesies, dan Genetik	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
		3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kode	Program Prioritas PN RKP 2026	Kode	Program Prioritas RKPD 2026
02.17	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
02.18	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
02.19	Pembangunan Rendah Karbon	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
02.20	Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
02.21	Pengelolaan Hutan Lestari	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan
		3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
02.22	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
03.01	Pengembangan konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
03.02	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
03.03	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	2.17.08	Program Pengembangan UMKM
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
03.05	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kode	Program Prioritas PN RKP 2026	Kode	Program Prioritas RKPD 2026
03.06	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		
04.01	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
04.02	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
		1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
04.03	Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
04.04	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
04.05	Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
04.07	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
04.08	Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	5.05.03	Program Riset Dan Inovasi Daerah
04.10	Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
04.11	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
04.12	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
04.13	Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
04.14	Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kode	Program Prioritas PN RKP 2026	Kode	Program Prioritas RKPD 2026
04.15	Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
04.18	Peningkatan Kualitas Pemuda	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
04.19	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
04.20	Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
05.01	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi ekspor	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
05.02	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
05.03	Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
05.04	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
05.05	Peningkatan Perdagangan Domestik Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
05.06	Optimalisasi Investasi Strategis Negara	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
06.02	Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
		1.06.06	Program Penanganan Bencana
06.03		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kode	Program Prioritas PN RKP 2026	Kode	Program Prioritas RKPD 2026
	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
06.04	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	1.04.03	Program Kawasan Permukiman
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung
06.06	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
06.07	Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
07.05	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
07.07	Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
07.08	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	4.01.02	Program Penataan Organisasi
07.10	Pemerintah Digital	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
07.15	Pengendalian Inflasi	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
08.01	Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
08.02	Pelestarian Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
08.03	Pembangunan Berketahanan Iklim	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
08.04	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2026, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan Program Prioritas Daerah dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.11. Penyelarasan Kegiatan Utama RKP Tahun 2026 dan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Prioritas Nasional 2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	Prioritas Nasional 2	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
7	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Penyediaan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Prioritas Nasional 2	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Prioritas Nasional 2	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Prioritas Nasional 2	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
11	Prioritas Nasional 2	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
12	Prioritas Nasional 2	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
13	Prioritas Nasional 2	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14	Prioritas Nasional 2	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15	Prioritas Nasional 2	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
16	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
17	Prioritas Nasional 2	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
18	Prioritas Nasional 2	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
19	Prioritas Nasional 3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
20	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Prioritas Nasional 3	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Prioritas Nasional 3	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
23	Prioritas Nasional 4	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Prioritas Nasional 4	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Prioritas Nasional 4	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Prioritas Nasional 4	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	Prioritas Nasional 4	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
30	Prioritas Nasional 4	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
31	Prioritas Nasional 4	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
32	Prioritas Nasional 4	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
33	Prioritas Nasional 4	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
34	Prioritas Nasional 4	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
35	Prioritas Nasional 4	Eliminasi Penyakit Kusta & <i>Schistosomiasis</i>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
36	Prioritas Nasional 4	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
37	Prioritas Nasional 4	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
38	Prioritas Nasional 4	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
39	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
40	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
41	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
42	Prioritas Nasional 6	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
43	Prioritas Nasional 6	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
44	Prioritas Nasional 6	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
45	Prioritas Nasional 6	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
46	Prioritas Nasional 6	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
47	Prioritas Nasional 7	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
48	Prioritas Nasional 7	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
49	Prioritas Nasional 7	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program	Perangkat Daerah
50	Prioritas Nasional 7	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
51	Prioritas Nasional 8	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
52	Prioritas Nasional 8	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Prioritas Nasional 8	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

Keterangan : Jumlah KPU yang di indikasikan berlokus di Kalimantan Timur sejumlah 53 KPU dari total 83 KPU yang direncanakan berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Selain kegiatan prioritas utama, dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.12. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Provinsi
Swasembada Energi			
Baru			
27	North Hub Development Project Selat Makassar	Kalimantan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelarasan tata ruang dan dukungan infrastruktur dasar dalam dokumen perencanaan. 2) Mempercepat proses perizinan lokasi, tata ruang, dan lingkungan untuk proyek PSN. 3) Penyederhanaan perizinan investasi melalui OSS daerah. 4) Integrasi pembangunan wilayah dengan Ibukota Nusantara (IKN). 5) Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Kariangau, Maloy dan Palaran.
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
Baru			
33	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat,	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hilirisasi kelapa sawit sudah berjalan dengan pembangunan Refinery & Pabrik Biodiesel (RPB) di Kaltim.

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Provinsi
		Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 2) Percepatan Verifikasi teknis perizinan berusaha untuk kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. 3) Memberikan insentif investasi. 4) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. 5) Program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek.
34	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemprov Kaltim telah melakukan Vertek perizinan berusaha untuk komoditi nikel, bauksit, dan mineral lain. 2) Dukungan penyediaan infrastruktur energi dan logistik untuk kawasan industri hilirisasi. 3) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. 4) Program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek.
Konektivitas dan Kawasan			
<i>Carry over</i>			
69	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Ibu Kota Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Lahan Jalan Sumbu IKN/Sotek-Bongan 2) Pembangunan Jalan Sumbu IKN/Sotek-Bongan 3) Rehabilitasi Jalan Provinsi di PPU 4) Rehabilitasi Jalan Provinsi di Balikpapan 5) Rehabilitasi Jalan Provinsi di Kutai Kartanegara

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Provinsi
			<p>6) Rekonstruksi Jalan Dondang-Simp. Samboja 1</p> <p>7) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Saluran Pembawa DI Sungai Buluh</p> <p>8) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi KM12-KM8, Kota Balikpapan</p> <p>9) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>10) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan di Jalan Provinsi wilayah Kutai Kartanegara</p> <p>11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Pengembangan Pelabuhan Internasional di Kariangau Balikpapan</p> <p>12) Pengembangan kapasitas kelembagaan desa khususnya pada wilayah yang berbatasan dengan IKN</p>

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.13. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1) Program bantuan Usaha Ekonomi Perorangan pada 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur 2) Program unggulan Gratispol di bidang pendidikan (Gratis bersekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2 hingga S3), di Bidang Kesehatan (Gratis berobat) 3) Jaminan Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin/rentan miskin 4) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1) Identifikasi, verifikasi dan validasi data kemiskinan mendukung DTSEN 2) Program bantuan sosial dalam penurunan beban pengeluaran
		3. Sekolah Rakyat	1) Penyediaan lahan pembangunan sekolah rakyat 2) Identifikasi data masyarakat miskin untuk sekolah rakyat 3) Penyiapan transportasi Calon Siswa Sekolah Rakyat

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	1) Biaya Administrasi Pemilikan Rumah 2) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur
2.	Ketahanan Pangan	2. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (DI Labanan, DI Marangkayu, DI Merancang, DI Biatan, DI Semurut, DI Buyung-Buyung) 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi (DI Rantau Pangan, DI Tabalar, DI Sebulu)
		3. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	1) Bimbingan teknis bagi aparatur (penyuluh) 2) Bimbingan teknis bagi petani 3) Pelatihan kelembagaan petani (UPJA dan GAPOKTAN)
		4. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	1) Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 3) Penitipan dan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah 250.000 Kg
		5. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	1) Pengadaan benih Padi 18.600 Kg 2) Pengembangan kawasan hortikultura (Benih pisang 28.600 batang, pupuk dan Dolomite) 3) Gerakan Tanam/Panen 4) Rapat Evaluasi Prasarana dan Sarana Produksi Tanaman Pangan

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
3.	Kesehatan untuk Semua	1. Stunting	Peningkatan Kapasitas Kader Penyuluh Stunting pada 3 Kab/kota dengan capaian Stunting tertinggi
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan Defisiensi Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) untuk deteksi dini dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat kondisi penyakit
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	Pemberian Jaminan Kesehatan bagi kepesertaan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemerintah Daerah
		4. Penuntasan TBC	Skrining tuberkulosis (TB) pada populasi berisiko untuk mendeteksi dan mengobati TB sedini mungkin, sehingga mencegah penyebaran lebih lanjut
		6. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Baru di Kabupaten Kutai Barat
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	-
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Perluasan daya tampung melalui pembangunan unit sekolah baru dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dengan melakukan rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana sekolah lainnya
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	Peningkatan kualitas sarana prasarana pada SMAN 10 Samarinda melalui rehabilitasi gedung sekolah dan penambahan sarana prasarana lainnya
		4. Makan Bergizi Gratis	1) Dukungan terhadap penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2) Dukungan data siswa penerima MBG 3) Dukungan data balita, ibu hamil dan menyusui bagi penerima MBG

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	1) Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi di Kariangau Balikpapan 2) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar pantau dan distributor 3) Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih (Akuntabilitas, Tata Kelola, Kepatuhan, dan Kesehatan) di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1) Peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada belanja produktif dan belanja program prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 2) Optimalisasi Pendapatan Daerah berbasis potensi daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD 4) Digitalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	1) Pembangunan Rumah Produksi Bersama Pabrik Minyak Goreng di Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Penyusunan IPRO 3) Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM

No	Program Strategis Nasional (ProSN)	Proyek/Kegiatan	Dukungan Pemerintah Provinsi
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none">1) Pemantauan sampah laut di Balikpapan, PPU, Kukar dan Kutim2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup (Uji Kualitas Air Sungai, Uji Kualitas Udara, Uji Kualitas Air Laut dan Uji Kualitas Air Danau)3) Penilaian kinerja pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup4) Pengawasan lingkungan hidup5) Peningkatan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup6) Pemberian penghargaan kepada masyarakat/tokoh untuk pelestarian lingkungan hidup

4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini telah ditelaah dan diinternalisasi kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan kewenangan dan kedudukan Pemerintahan Daerah. Adapun penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelaahan
1.	Meningkatkan terus upaya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dengan atmosfer kemitraan yang saling menghargai, mendukung, dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing	Pemerintah akan terus mendorong penguatan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam suasana kemitraan yang saling menghargai, mendukung, dan bersinergi. Komitmen untuk terus membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta merupakan fondasi penting dalam mendorong efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah provinsi meyakini bahwa sinergi yang konstruktif antar-lembaga akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2.	Memasukkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebagai program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	Pemerintah memahami pentingnya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai bagian dari penguatan peran legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. Secara normatif, program tersebut merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini secara proporsional dalam proses perumusan RPJMD Tahun 2025–2029, dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah.
3.	Memberikan peran kepada semua Perangkat Daerah sebagai pengampu program prioritas tahun 2025-2029 sesuai urusan tugas pokok dan fungsinya, dengan cara prioritas program ditentukan berdasarkan urutan bobot kepentingan dari yang terbesar hingga terkecil, serta urutan alokasi dan batas nilai anggaran, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, dan perkembangan ketersediaan fiskal tahun 2025-2029	Pemerintah mendorong optimalisasi peran seluruh Perangkat Daerah dalam mengampu program pembangunan daerah tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Prinsip penetapan program prioritas berdasarkan bobot kepentingan, urutan alokasi, serta batas nilai anggaran merupakan pendekatan yang sejalan dengan kaidah perencanaan berbasis prioritas dan penganggaran berbasis kinerja. Keselarasan dengan kinerja tujuan dan sasaran pembangunan merupakan kunci utama penentuan program prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk menyusun RPJMD Tahun 2025–2029 secara terarah, terukur, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah, serta memastikan setiap Perangkat Daerah berperan aktif dalam mencapai sasaran pembangunan strategis melalui sinergi, efisiensi, dan akuntabilitas.

No	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelaahan
4.	<p>Mendorong Pemerintah Daerah untuk memerintahkan Perangkat Daerah membuka kamus usulan aspirasi seluas-luasnya melalui program yang ada dalam dokumen renstra dan renja di seluruh Perangkat Daerah guna mengakomodir aspirasi pembangunan dari rakyat yang diterima Anggota DPRD melalui kegiatan Reses</p>	<p>Pemerintah akan mendorong keterbukaan dan perluasan akses aspirasi masyarakat melalui optimalisasi peran Perangkat Daerah dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah. Secara normatif, hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD merupakan salah satu sumber penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong setiap Perangkat Daerah agar secara aktif membuka ruang pengusulan dalam koridor keselarasan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra/Renja PD, sehingga usulan masyarakat dapat diakomodir secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, serta kemampuan kapasitas fiskal daerah.</p>
5.	<p>Meminta Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan berbasis SIPD-RI, yang didalamnya mengatur mekanisme konsolidasi Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam Renja SKPD. Hal ini untuk menciptakan kepastian dan menghilangkan kendala dalam setiap tahapan dan proses pembahasan kamus usulan aspirasi, penginputan, verifikasi dan validasi usulan aspirasi baik melalui DPRD, maupun langsung oleh masyarakat</p>	<p>Pemerintah akan segera menginisiasi penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tata Cara Penyampaian dan Penelaahan Usulan Aspirasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara normatif, usulan ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Pemerintah memandang bahwa keberadaan regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum, menyelaraskan proses input, verifikasi, dan validasi usulan aspirasi, serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara terstruktur dalam dokumen perencanaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem SIPD-RI.</p>

4.4 Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD)

Usulan list aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (<https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) adalah sebanyak 4.855 usulan yang terdiri dari aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) sebanyak 3.506 usulan dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) sebanyak 1.349 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2026. Adapun rincian jumlah *entry* usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15. Jumlah *Entry* Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah <i>Entry</i> Usulan
1	Balikpapan	385
2	Berau	219
3	Bontang	140
4	Kutai Barat	421
5	Kutai Kartanegara	366
6	Kutai Timur	169
7	Mahakam Ulu	34
8	Paser	661
9	Penajam Paser Utara	317
10	Samarinda	794
Total		3506

Tabel 4.16. Jumlah *Entry* Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

No	Fraksi	Jumlah <i>Entry</i> Usulan
1	Demokrat	83
2	Gerindra	196
3	Golkar	250
4	Nasdem	27
5	PAN	429
6	PDI.P	219
7	PKB	84
8	PKS	50
9	PPP	11
Total		1349

Apabila ditinjau dari jenis usulannya, maka status *entry* usulan aspirasi langsung masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17. Status Entry Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang Kabupaten/Kota) Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kabupaten/Kota	Usulan Bersifat Belanja Langsung	Usulan Bersifat Bantuan Keuangan
1	Balikpapan	69	143
2	Berau	41	145
3	Bontang	14	55
4	Kutai Barat	22	111
5	Kutai Kartanegara	52	74
6	Kutai Timur	16	78
7	Mahakam Ulu	10	12
8	Paser	26	587
9	Penajam Paser Utara	34	181
10	Samarinda	20	421
Total		304	1.807

Usulan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota didominasi oleh usulan yang bersifat Bantuan Keuangan dengan total sebanyak 1.807 Usulan, sedangkan usulan yang bersifat Belanja Langsung disampaikan sebanyak 304 Usulan. Usulan bersifat Belanja Langsung (BL) merupakan usulan belanja aspirasi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan usulan bersifat Bantuan Keuangan (Bankeu) merupakan usulan belanja aspirasi yang sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota.

Selain dari pemerintah kabupaten/kota, usulan aspirasi masyarakat juga disampaikan secara langsung oleh instansi vertikal/institusi/organisasi/badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18. Status Entry Usulan Aspirasi Langsung Masyarakat (Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat)

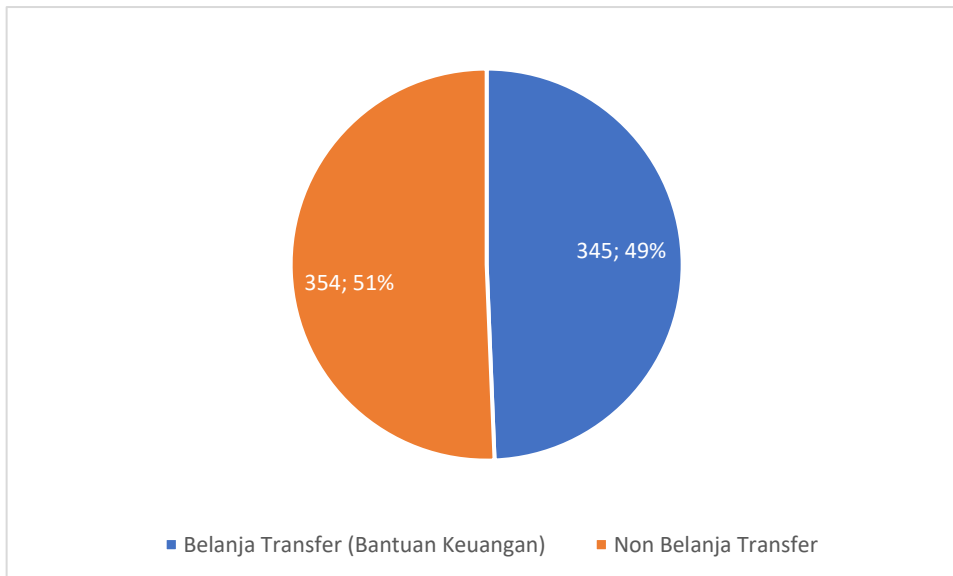
No	Kamus Usulan Hibah/Bantuan Sosial	Jumlah Usulan
1	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan	166
2	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	343

No	Kamus Usulan Hibah/Bantuan Sosial	Jumlah Usulan
3	Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah	18
4	Hibah Kepada PAUD/TK Swasta	62
5	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Negeri	26
6	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Swasta	24
7	Hibah Kepada SD/SMP Swasta	64
8	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB swasta	47
9	Hibah sarana peribadatan	302
10	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial	179
Total		1.231

Seluruh usulan aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD-RI ini selanjutnya di validasi dan di verifikasi oleh Sekretariat DPRD (untuk pokok-pokok pikiran DPRD), Bappeda, Perangkat Daerah terkait sesuai kamus usulan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil validasi dan verifikasi usulan aspirasi sebagai dimaksud selanjutnya menjadi *input* dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

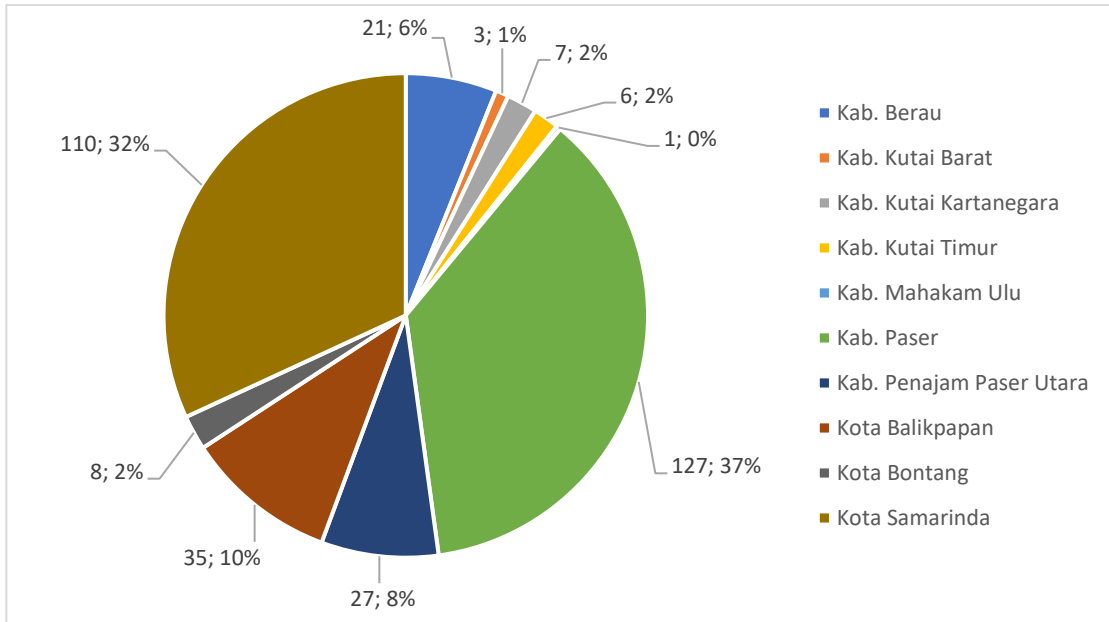
4.5 Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 3.506 usulan aspirasi langsung yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun dari Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat melalui aplikasi SIPD-RI. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 699 usulan aspirasi langsung yang disetujui. Usulan aspirasi langsung yang telah lolos proses verifikasi berdasarkan jenis belanjanya dapat dilihat pada gambar berikut.



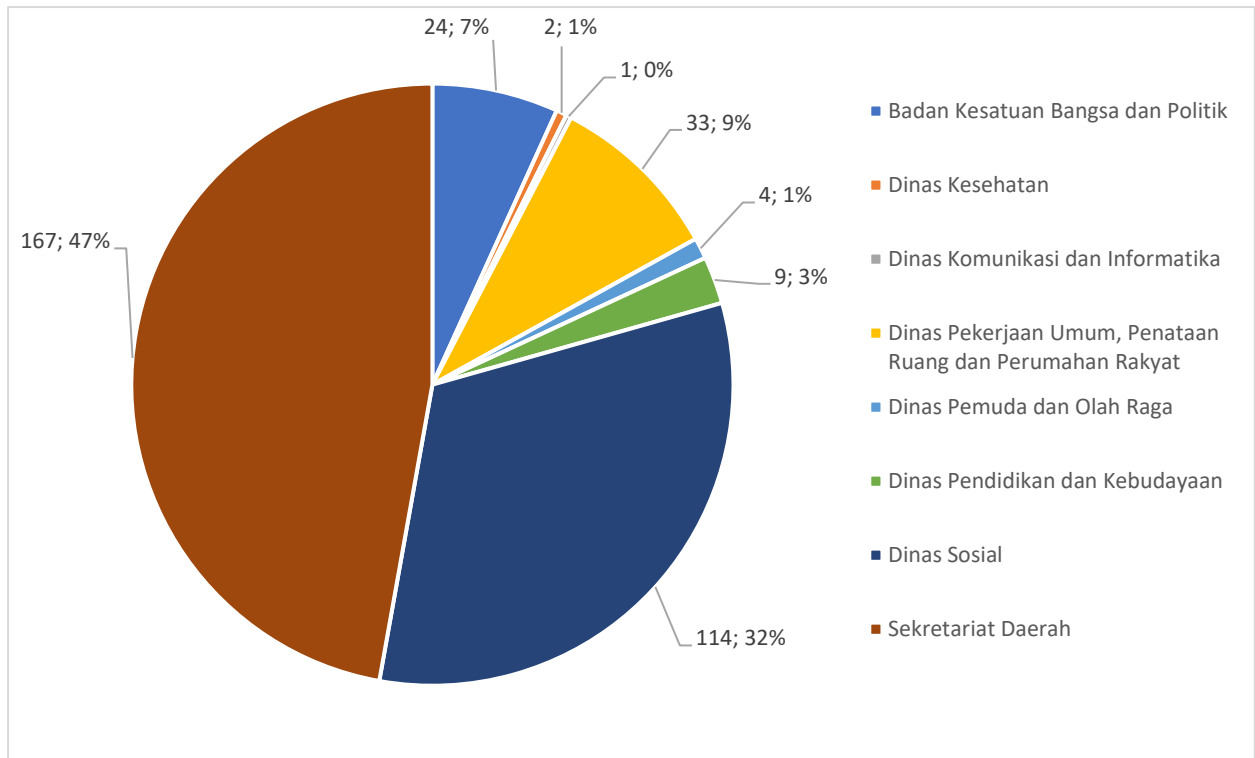
Gambar 4.3. Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer)

Adapun usulan aspirasi langsung yang disetujui berjenis belanja transfer yakni sebanyak 345 usulan. Pola pendanaan terhadap usulan yang berjenis belanja transfer ini adalah melalui mekanisme Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang nilainya telah dirumuskan di dalam kerangka pendanaan. Persetujuan terhadap usulan aspirasi berjenis belanja transfer (bantuan keuangan) ini atas pertimbangan bahwa usulan-usulan tersebut berselarasan dengan prioritas pembangunan, serta dapat menunjang pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang perlu dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena kewenangannya. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja transfer atau bantuan keuangan berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.4. Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

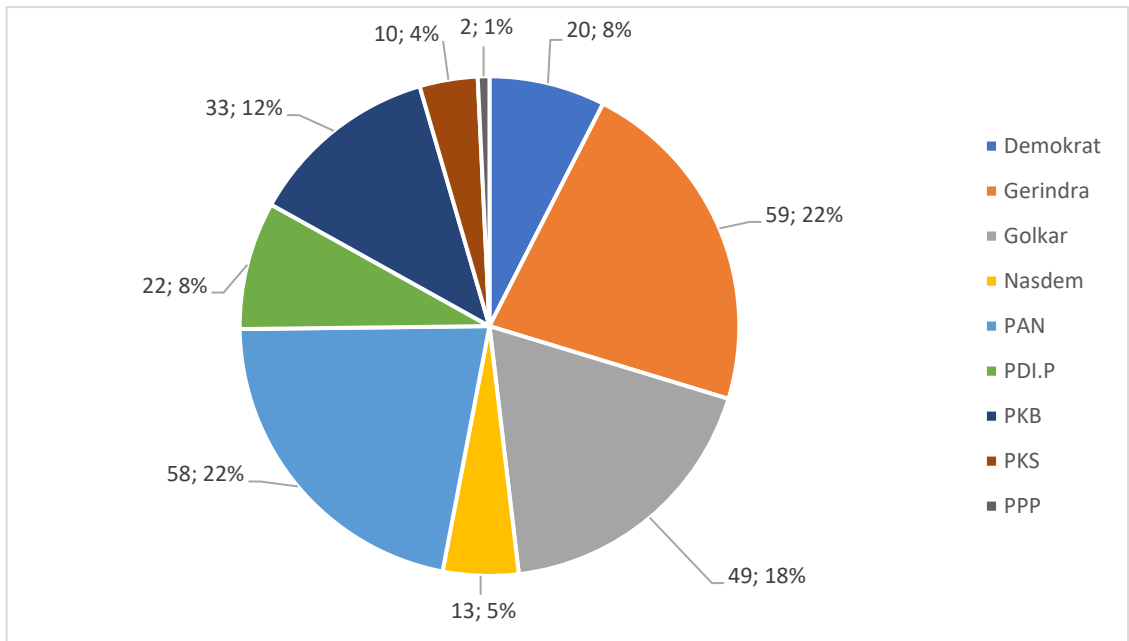
Selain dari kewenangan kabupaten/kota, terdapat pula usulan aspirasi langsung masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bersifat Belanja Hibah/Bantuan Sosial. Usulan aspirasi Belanja Hibah/Bantuan Sosial ini diajukan oleh Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat. Total usulan aspirasi bersifat Belanja Hibah/Bantuan Sosial yang disetujui berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebanyak 354 usulan aspirasi. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis Belanja Hibah/Bantuan Sosial berdasarkan tujuan Perangkat Daerahnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.5. Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

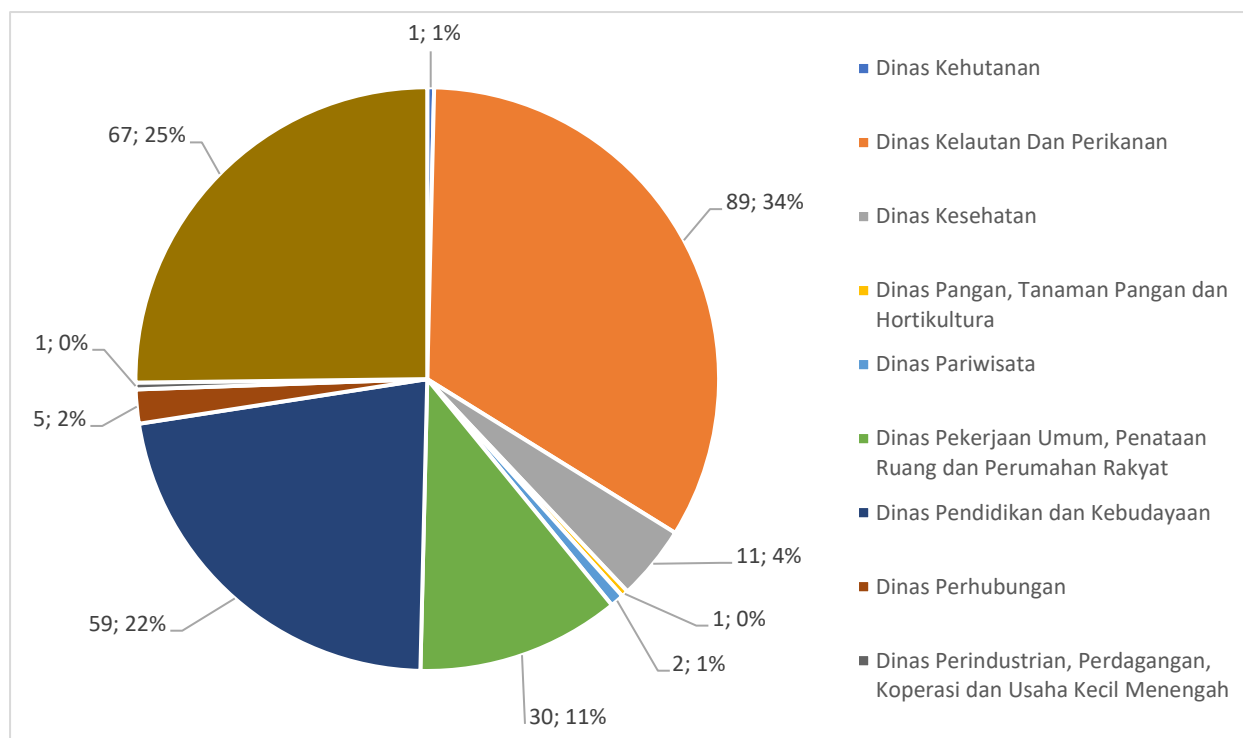
4.6 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Terhadap usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD, telah dilakukan proses validasi dan verifikasi terhadap 1.349 usulan aspirasi pokir yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses dan/atau rapat dengar pendapat melalui aplikasi SIPD-RI. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi tersebut, terdapat 266 usulan yang disetujui. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6. Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Fraksi

Jika dilihat secara lebih rinci, secara kuantitas proporsi usulan aspirasi pokir DPRD yang telah disetujui di dalam tahap penyusunan RKPD paling banyak ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah tujuannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.7. Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

Seluruh usulan aspirasi yang telah lolos proses validasi dan verifikasi, baik usulan aspirasi langsung maupun usulan aspirasi pokir DPRD, selanjutnya di sinkronisasi dan di internalisasi ke dalam masing-masing rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di Tahun 2026. Adapun informasi terhadap usulan-usulan aspirasi yang telah disetujui di dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat di dalam aplikasi SIPD-RI.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA





5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2026.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

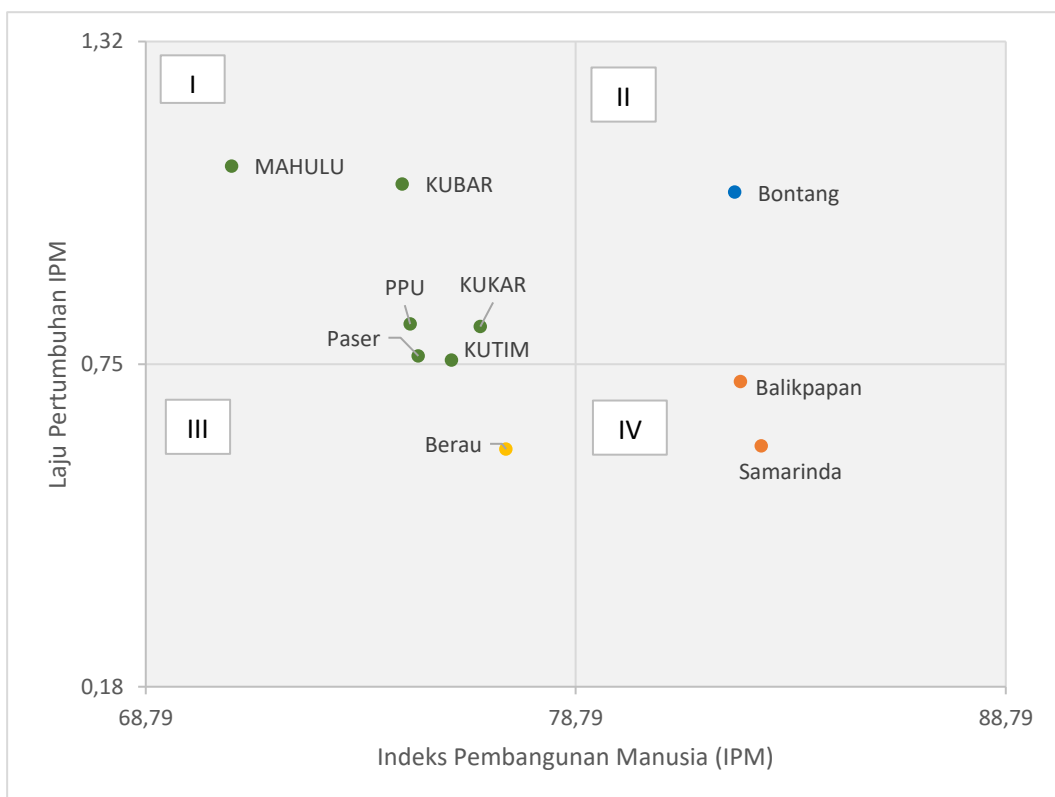
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.



Gambar 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai 78,79 meningkat 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 78,20. Namun, apabila ditinjau menurut laju pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan IPM Kalimantan Timur tahun 2024–2023 (0,75 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2023–2022 (0,98 persen).

Peningkatan kualitas hidup manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan aspek sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merealisasikan tujuan pembangunan ini menjadi sangat penting. Peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan peningkatan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan sumber daya manusia Kalimantan Timur berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 5.2 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	73,85	74,56	75,13	75,66	76,48
2	KUBAR	73,16	73,97	74,76	74,90	75,51
3	KUKAR	75,31	75,95	76,57	76,86	77,12
4	KUTIM	74,69	75,33	75,90	76,18	76,80
5	Berau	76,24	76,71	77,17	77,57	77,92
6	PPU	73,56	74,33	74,94	75,00	75,60
7	MAHULU	69,17	70,02	70,79	71,07	71,21
8	Balikpapan	81,49	82,03	82,62	83,09	83,18
9	Samarinda	81,72	82,61	83,11	83,40	83,79
10	Bontang	81,00	81,63	82,49	82,86	83,18
Kalimantan Timur		77,36	78,20	78,79	78,60	78,92





Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah atas kinerja pembangunan yang dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Berdasarkan hasil

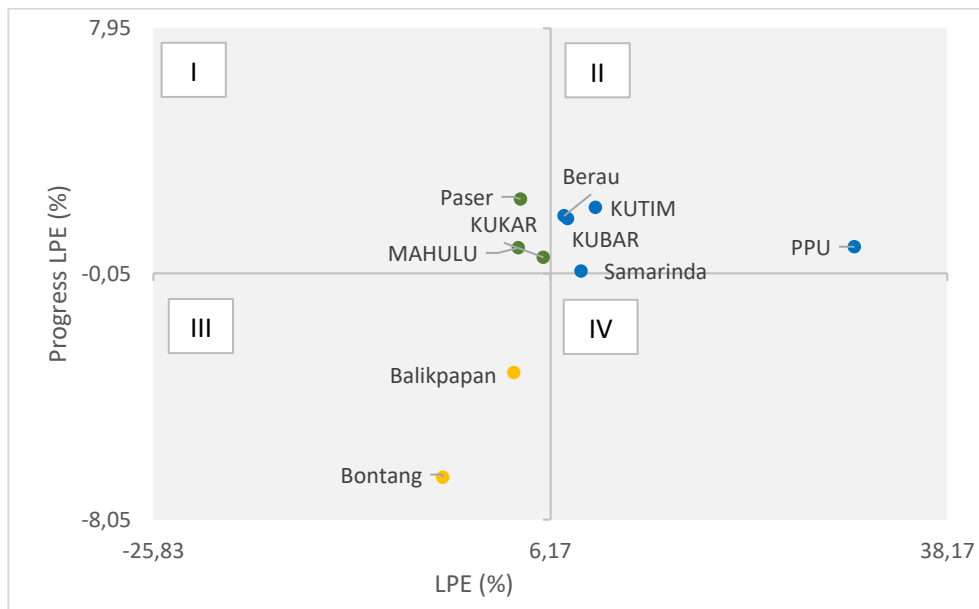
analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian LPE dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi.



Gambar 5.2 Analisis Kuadran Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tidak lepas dari pengaruh kinerja ekonomi kabupaten/kota. Perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan mencapai 6,17 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Kabupaten/kota memperlihatkan kontribusi yang beragam, dimana Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan dinamika ekonomi yang paling positif. Sementara itu, beberapa daerah mengindikasikan kestabilan, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan PDRB terjadi di Kota Balikpapan, bahkan kontraksi perekonomian turut terjadi di Kota Bontang.

Upaya dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resilien di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui pengembangan diversifikasi ekonomi. Perwujudan diversifikasi ekonomi, baik horizontal maupun vertikal, utamanya difokuskan pada sektor-sektor non-ekstraktif. Oleh karena itu, target perekonomian Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel 5.4 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	1,10	1,38	3,77	3,78–3,80	3,75–5,00
2	KUBAR	4,78	5,82	7,57	7,60–8,00	7,30–8,30
3	KUKAR	3,70	5,13	5,62	5,63–5,70	5,70–6,30
4	KUTIM	5,58	7,71	9,82	9,85–10,00	10,00–10,50
5	Berau	3,95	5,44	7,28	7,29–7,30	7,30–8,30
6	PPU	14,49	29,85	30,68	6,00–7,00	7,00–8,00
7	MAHULU	0,91	2,80	3,60	3,62–3,65	3,65–4,65
8	Balikpapan	4,96	6,49	3,23	3,25–3,30	3,30–4,50
9	Samarinda	6,60	8,62	8,66	8,68–8,70	8,68–9,20
10	Bontang	2,46	4,16	-2,51	1,00–1,15	1,15–2,50
Kalimantan Timur		4,48	6,22	6,17	6,20–6,40	6,60–7,20

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.3 PDRB per Kapita

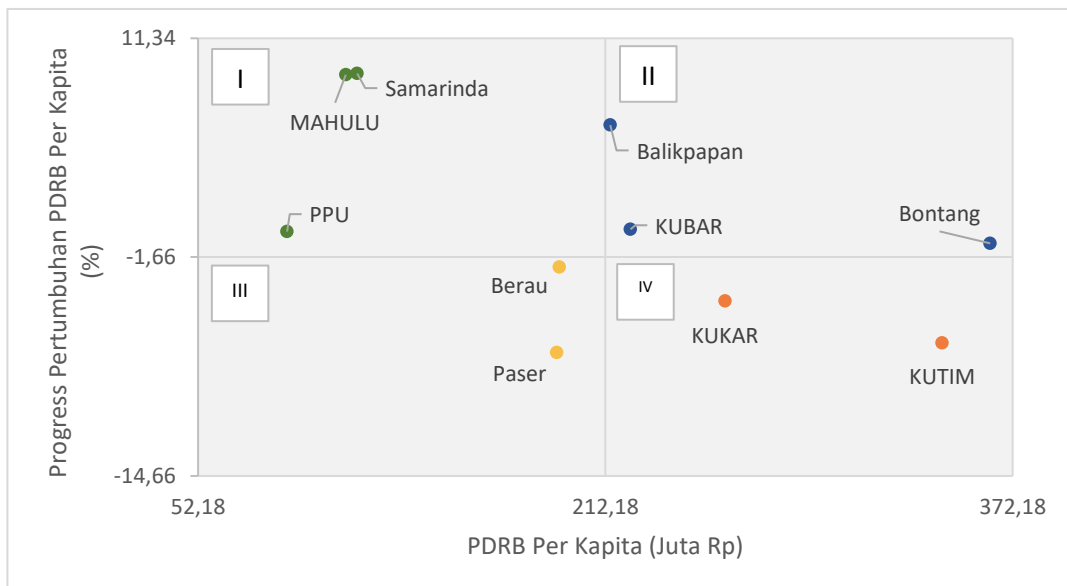
PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator PDRB per kapita umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja PDRB per kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih tinggi, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Barat.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 5.3 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Disparitas kinerja ekonomi antardaerah masih terlihat di Kalimantan Timur. Dua kota yaitu Balikpapan dan Bontang menunjukkan performa positif dari aspek realisasi PDRB per kapita maupun aspek pertumbuhannya, dimana kinerjanya lebih baik dibandingkan provinsi. Namun, sebagian besar kabupaten/kota masih tertinggal dalam satu atau kedua aspek tersebut. Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tinggi tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah menghadapi tantangan dalam menjaga momentum ekonomi. Sementara itu, kabupaten/kota dengan PDRB per kapita rendah dengan pertumbuhan yang cepat menyimpan potensi percepatan pembangunan jika didukung strategi tepat.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi mengisyaratkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis potensi daerah, termasuk penguatan kapasitas fiskal dan daya saing lokal. Oleh karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan mendorong hilirisasi sektor unggulan daerah, memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah tertinggal, serta mengarahkan investasi dan dukungan teknis ke sektor produktif yang potensial di setiap kabupaten/kota secara selektif dan berkelanjutan.

Tabel 5.6 Penetapan Target PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	271,26	208,43	193,14	209,32–217,80	231,08–250,59
2	KUBAR	247,40	222,08	222,07	244,69–245,60	249,81–288,22
3	KUKAR	322,08	270,72	259,19	259,95–260,12	265,00–270,00
4	KUTIM	471,27	369,42	344,49	375,79–389,74	426,26–440,60
5	Berau	236,23	198,53	194,08	219,25–219,27	219,27–255,49
6	PPU	69,50	87,26	87,14	87,14–87,20	87,15–87,50
7	MAHULU	95,12	100,94	110,2	112,31–112,35	112,35–120,48
8	Balikpapan	181,29	201,64	214,11	226,83–226,94	226,93–242,28
9	Samarinda	98,88	104,97	114,68	128,68–128,70	128,70–143,15
10	Bontang	344,15	366,46	363,37	369,96–370,51	370,51–383,12
Kalimantan Timur		238,92	215,76	212,18	219,29–222,74	226,4–233,3





Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan

tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.7 Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

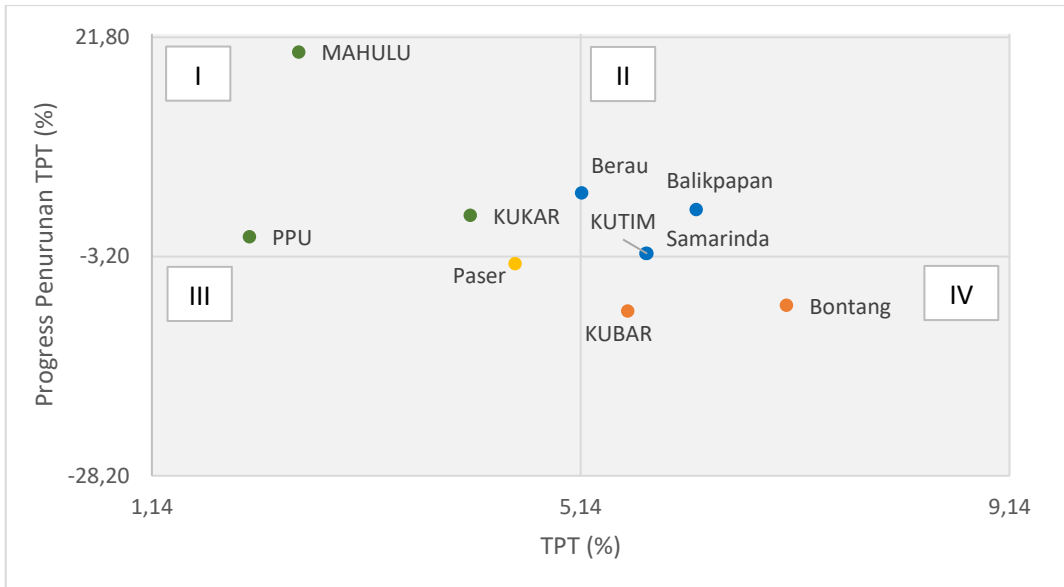
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih

rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.



Gambar 5.4 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Meskipun TPT di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan, namun nilainya masih tergolong cukup tinggi. Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal tersebut juga mengindikasikan rendahnya daya serap tenaga kerja oleh pasar kerja, dimana tingkat daya serap tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menekan angka TPT dengan menciptakan peluang kerja di berbagai sektor dan meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten diharapkan mampu mendorong Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing. Selain itu, penyesuaian target TPT tahun 2026 dengan target kabupaten/kota dilakukan guna memastikan pencapaian yang optimal.

Tabel 5.8 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2026





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	4,88	4,72	4,53	4,16-4,31	3,50-4,20
2	KUBAR	4,62	6,16	5,58	5,11-5,41	4,01-4,51
3	KUKAR	4,14	4,05	4,11	3,85-4,00	3,70-3,90
4	KUTIM	6,48	5,93	5,76	5,44-5,51	5,10-5,30
5	Berau	5,02	4,95	5,15	4,78-4,90	4,50-4,78
6	PPU	2,12	2,07	2,05	2,00-2,02	1,90-2,00
7	MAHULU	2,44	2,09	2,51	2,18-2,25	2,00-2,32
8	Balikpapan	6,90	6,09	6,22	6,03-6,07	5,70-6,03
9	Samarinda	6,78	5,92	5,75	5,60-5,63	5,40-5,50
10	Bontang	7,81	7,74	7,06	6,73-6,78	6,05-6,60
Kalimantan Timur		5,71	5,31	5,14	4,60-5,14	4,54-5,07

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita tiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

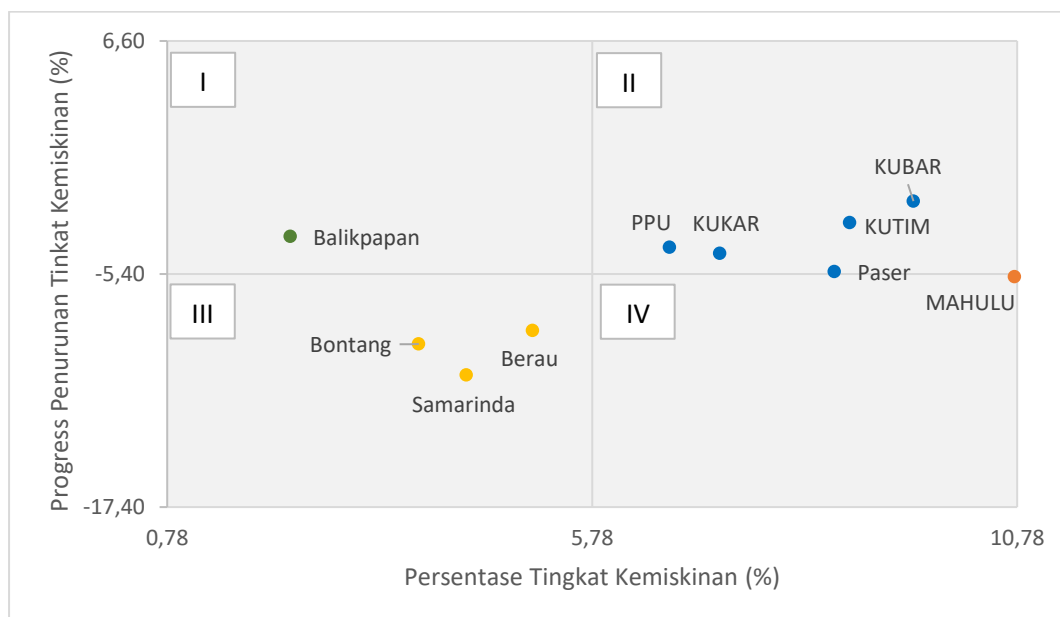
Tabel 5.9 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun

Kuadran	Simbol	Interpretasi
		laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu.



Gambar 5.5 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan yang diiringi pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Ditinjau berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan yang terjadi di perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan intervensi kemiskinan melalui program peningkatan infrastruktur layanan dasar dan perluasan aksesibilitas masyarakat.

Dalam rangka untuk terus mengurangi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur secara konsisten, penetapan target dilakukan dengan menyelaraskan target Kabupaten/Kota tahun 2026 berdasarkan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai berikut.

Tabel 5.10 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	9,43	9,11	8,63	8,18-8,38	7,90-8,30
2	KUBAR	10,20	9,72	9,56	8,50-9,23	8,30-9,00
3	KUKAR	7,96	7,61	7,28	6,68-6,95	6,10-6,60
4	KUTIM	9,28	9,06	8,81	7,93-8,14	7,50-7,87
5	Berau	5,65	5,54	5,08	4,45-4,88	3,88-4,68





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
6	PPU	7,25	6,97	6,69	6,30-6,38	5,70-6,20
7	MAHULU	11,55	11,38	10,75	9,70-10,30	9,49-10,09
8	Balikpapan	2,45	2,31	2,23	2,12-2,17	2,00-2,10
9	Samarinda	4,85	4,81	4,30	4,09-4,20	3,80-4,00
10	Bontang	4,54	4,11	3,74	3,40-3,62	3,15-3,40
Kalimantan Timur		6,31	6,11	5,78	4,24-5,05	3,50-4,30

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.11 Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi

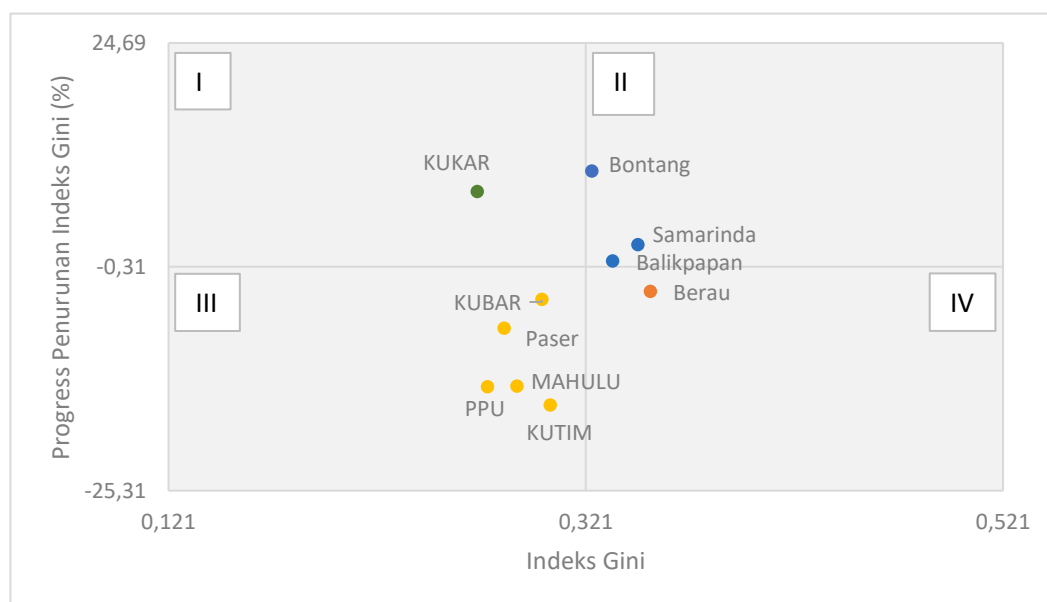
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Berau.



Gambar 5.6 Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Pada tahun 2024 tercatat ketimpangan perkotaan mencapai 0,325 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,289. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang

mengakibatkan *gap* antarlapisan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2026 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel 5.12 Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	0,282	0,292	0,271	0,270-0,271	0,265-0,270
2	KUBAR	0,300	0,277	0,266	0,250-0,266	0,245-0,255
3	KUKAR	0,269	0,284	0,307	0,285-0,307	0,274-0,290
4	KUTIM	0,304	0,336	0,283	0,278-0,283	0,250-0,280
5	Berau	0,352	0,327	0,317	0,312-0,317	0,305-0,312
6	PPU	0,274	0,299	0,258	0,255-0,258	0,230-0,240
7	MAHULU	0,288	0,330	0,285	0,280-0,285	0,236-0,275
8	Balikpapan	0,334	0,323	0,324	0,312-0,324	0,300-0,305
9	Samarinda	0,346	0,323	0,330	0,315-0,330	0,310-0,320
10	Bontang	0,324	0,299	0,330	0,312-0,330	0,310-0,323
Kalimantan Timur		0,327	0,322	0,321	0,310-0,321	0,309-0,318

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota tahun 2026 telah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
1	Paser	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional
2	Kutai Barat	Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
3	Kutai Kartanegara	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi
4	Kutai Timur	Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy
5	Berau	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan
6	Penajam Paser Utara	Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN
7	Mahakam Ulu	Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan perkebunan
8	Balikpapan	Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang di-iringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK
9	Samarinda	Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan
10	Bontang	Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja, yang di-iringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 mencakup penilaian terhadap pencapaian berbagai indikator makro pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota untuk tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Gini	TPT (%)
1	Paser	3,75-5,00	231,08–250,59	76,48	7,90-8,30	0,265-0,270	3,50-4,20
2	Kutai Barat	7,30-8,30	249,81–288,22	75,51	8,30-9,00	0,245-0,255	4,01-4,51
3	Kutai Kartanegara	5,70-6,30	265,00–270,00	77,12	6,10-6,60	0,274-0,290	3,70-3,90
4	Kutai Timur	10,00-10,50	426,26–440,60	76,80	7,50-7,87	0,250-0,280	5,10-5,30
5	Berau	7,30-8,30	219,27–255,49	77,92	3,88-4,68	0,305-0,312	4,50-4,78
6	PPU	7,00-8,00	87,15–87,50	75,60	5,70-6,20	0,230-0,240	1,90-2,00
7	Mahakam Ulu	3,65-4,65	112,35–120,48	71,21	9,49-10,09	0,236-0,275	2,00-2,32
8	Balikpapan	3,30-4,50	226,93–242,28	83,18	2,00-2,10	0,300-0,305	5,70-6,03
9	Samarinda	8,68-9,20	128,70–143,15	83,79	3,80-4,00	0,310-0,320	5,40-5,50
10	Bontang	1,15-2,50	370,51–383,12	83,18	3,15-3,40	0,310-0,323	6,05-6,60

Berdasarkan pertimbangan pada permasalahan utama pembangunan yang diidentifikasi melalui hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2024, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, arah kebijakan juga merujuk pada target sasaran pembangunan daerah serta pengembangan sektor-sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota. Seluruh upaya tersebut selaras dengan tema RKPD Tahun 2026, yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**. Adapun *highlight* intervensi indikasi kebijakan provinsi untuk kabupaten/kota yang mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 5.15 *Highlight* Intervensi Indikasi Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	<i>Highlight</i> Intervensi Indikasi Kebijakan
1.	Kabupaten Paser	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan
		3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
		4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
		5. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
		6. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
		7. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat
		8. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi
		9. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
		10. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi 12. Pengembangan destinasi wisata potensial serta pengembangan desa wisata dan budaya 13. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat 14. Pengembangan pemasaran ekraf berbasis digital 15. Peningkatan daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 16. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 17. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 18. Pengembangan ekonomi maritim 19. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 20. Pembangunan SPAM Regional Sistem Long Kali 21. Pengelolaan kawasan hutan adat Mului 22. Penghijauan lingkungan 23. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial 24. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA 25. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 26. Penanganan kawasan kumuh 27. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 28. Pengendalian banjir 29. Penyelenggaraan jalan provinsi 30. Penyediaan internet gratis di setiap desa 31. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan 32. Pengembangan Diversifikasi Pangan 33. Penyediaan PLTS SHS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)
2.	Kabupaten Kutai Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan 3. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah 4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan 5. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 6. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<p>7. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan</p> <p>8. Pengembangan diversifikasi pangan</p> <p>9. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>10. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi</p> <p>11. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai</p> <p>12. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang</p> <p>13. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat</p> <p>14. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat</p> <p>15. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal</p> <p>16. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</p> <p>17. Pengembangan sentra IKM</p> <p>18. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi</p> <p>19. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi</p> <p>20. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam</p> <p>21. Pengelolaan kawasan hutan adat Hemaq Beniung</p> <p>22. Penghijauan lingkungan</p> <p>23. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial</p> <p>24. Penanganan kawasan kumuh</p> <p>25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>26. Penyediaan PSU permukiman</p> <p>27. Penyediaan internet gratis di setiap desa</p> <p>28. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan</p> <p>29. Pembangunan rumah sakit provinsi</p> <p>30. Pemantauan Kualitas Air Danau Kaskade Mahakam</p> <p>31. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik</p> <p>32. Penyediaan PLTS SHS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)</p>
3.	Kabupaten Kutai Kartanegara	<p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah</p>

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan
		4. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
		5. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat
		6. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting
		7. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
		8. Pengembangan ekonomi maritim
		9. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		10. Pengembangan diversifikasi pangan
		11. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi
		12. Pengelolaan terminal penumpang tipe B
		13. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dan digital
		14. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		15. Pengembangan sentra IKM terintegrasi
		16. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
		17. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi
		18. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi
		19. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam
		20. Penghijauan lingkungan
		21. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial
		22. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA
		23. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
		24. Pemantauan sampah laut
		25. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi
		26. Penyelenggaraan SPAM regional marangkayu
		27. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
		28. Pengendalian banjir
		29. Penyelenggaraan jalan Provinsi
		30. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan
		31. Penyediaan PSU permukiman
		32. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem mahakam
		33. Penyediaan internet gratis di setiap desa

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		34. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 3 Tenggarong Seberang) 35. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Separi Sejahtera 36. Pemantauan Kualitas Air Danau Kaskade Mahakam 37. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik
4.	Kabupaten Kutai Timur	1. Dukungan pengembangan KEK Maloy 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah 4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan 5. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 6. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan 7. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 8. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi 9. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi 10. Optimalisasi destinasi wisata berbasis alam & budaya 11. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat 12. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 13. Pengembangan sentra IKM terintegrasi 14. Pengembangan ekonomi maritim 15. Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Indominco 16. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 17. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kenyamukan 18. Penghijauan lingkungan 19. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial 20. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA 21. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 22. Penyelenggaraan jalan Provinsi 23. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<p>24. Penyediaan PSU permukiman</p> <p>25. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi</p> <p>26. Pengendalian banjir</p> <p>27. Penanganan kawasan kumuh</p> <p>28. Rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>29. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM 46</p> <p>30. Pembangunan Pengaman Pantai Manubar</p> <p>31. Penyediaan internet gratis di setiap desa</p> <p>32. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 2 Sangata Utara)</p> <p>33. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK</p> <p>34. Penyediaan PLTS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)</p> <p>35. Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik</p> <p>36. Pengembangan diversifikasi pangan</p> <p>37. Pemantauan sampah laut</p>
5.	Kabupaten Berau	<p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah</p> <p>3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan</p> <p>4. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>5. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan</p> <p>6. Pengembangan pasar lokal berbasis komoditas unggulan</p> <p>7. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>8. Pengelolaan pelabuhan perikanan Sambaliung</p> <p>9. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi</p> <p>10. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi</p> <p>11. Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya</p> <p>12. Pengembangan ekonomi maritim</p>

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<p>13. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi</p> <p>14. Penyelenggaraan jalan provinsi</p> <p>15. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan</p> <p>16. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</p> <p>17. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat</p> <p>18. Pembinaan koperasi modern</p> <p>19. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</p> <p>20. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan</p> <p>21. Penghijauan lingkungan</p> <p>22. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial</p> <p>23. Pembangunan pengaman pantai</p> <p>24. Penyediaan PSU permukiman</p> <p>25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>26. Penyediaan internet gratis di setiap desa</p> <p>27. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan utamanya di Kawasan perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb</p> <p>28. Pengembangan diversifikasi pangan</p> <p>29. Penyediaan PLTS SHS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)</p>
6.	Kabupaten Penajam Paser Utara	<p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah</p> <p>3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan</p> <p>4. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional</p> <p>5. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>6. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas</p> <p>7. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat</p>

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<p>8. Dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung</p> <p>9. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan</p> <p>10. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>11. Pengembangan pasar modern dan sentra IKM terintegrasi</p> <p>12. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</p> <p>13. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi</p> <p>14. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi</p> <p>15. Optimalisasi destinasi wisata berbasis alam & budaya</p> <p>16. Pengembangan diversifikasi pangan</p> <p>17. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Api-api</p> <p>18. Pembangunan SPAM Regional Sistem Long Kali</p> <p>19. Penghijauan lingkungan</p> <p>20. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial</p> <p>21. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA</p> <p>22. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan</p> <p>23. Pemantauan sampah laut</p> <p>24. Rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>25. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat</p> <p>26. Penyelenggaraan jalan provinsi</p> <p>27. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi</p> <p>28. Pembangunan pengaman pantai</p> <p>29. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem mahakam</p> <p>30. Penyediaan internet gratis di setiap desa</p> <p>31. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan</p>
7.	Kabupaten Mahakam Ulu	<p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan</p>

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas 4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah 5. Penyediaan afirmasi akses pendidikan 6. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 7. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas 8. Pengembangan destinasi wisata berbasis Alam dan Budaya 9. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal 10. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 11. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang 12. Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara) 13. Dukungan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang 14. Penghijauan lingkungan 15. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial 16. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA 17. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 18. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 19. Penyediaan internet gratis di setiap desa 20. Pengembangan diversifikasi pangan
8.	Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau 2. Penyiapan Penyelenggaraan SPAM Regional Sistem Mahakam 3. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo 4. Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau 5. Penguatan UMKM berbasis digital 6. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 8. Pengembangan destinasi wisata & <i>creative hub</i> 9. Penyelenggaraan jalan provinsi

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		<p>10. Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan</p> <p>11. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Manggar</p> <p>12. Pengembangan ekonomi maritim</p> <p>13. Penghijauan lingkungan</p> <p>14. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial</p> <p>15. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA</p> <p>16. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan</p> <p>17. Pemantauan sampah laut</p> <p>18. Penyediaan PSU permukiman</p> <p>19. Rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>20. Penanganan banjir</p> <p>21. Pembangunan pengaman pantai</p> <p>22. Optimalisasi pelayanan air minum</p> <p>23. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah</p> <p>24. Penyediaan afirmasi akses pendidikan</p> <p>25. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi</p> <p>26. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan</p> <p>27. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo</p> <p>28. Pengembangan diversifikasi pangan</p> <p>29. Pemantauan sampah laut</p>
9.	Kota Samarinda	<p>1. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II</p> <p>2. Penyelenggaraan jalan provinsi</p> <p>3. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan</p> <p>4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sei Kunjang dan Lempake</p> <p>5. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai</p> <p>6. Pembangunan pelabuhan tambat</p> <p>7. Pengendalian banjir di Kota Samarinda</p> <p>8. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi</p> <p>9. Pengembangan sentra IKM berbasis teknologi</p> <p>10. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</p>

No	Kabupaten/Kota	Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan
		11. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 12. Pengembangan destinasi wisata & <i>creative hub</i> 13. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Selili 14. Penghijauan lingkungan 15. Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda 16. Rehabilitasi rumah tidak layak huni 17. Penyediaan PSU permukiman 18. Penyiapan Penyelenggaraan SPAM Regional Sistem Mahakam 19. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 10 Samarinda) 20. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah 21. Penyediaan afirmasi akses pendidikan 22. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan 23. Pengembangan diversifikasi pangan
10.	Kota Bontang	1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi 2. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional 3. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 4. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan 5. Pengembangan ekonomi maritim 6. Penyelenggaraan jalan provinsi 7. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan 8. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 9. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tanjung Limau 10. Penyelenggaraan SPAM regional marangkayu 11. Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Indominco 12. Pengembangan destinasi wisata & <i>creative hub</i> 13. Pengembangan sentra IKM berbasis teknologi 14. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 15. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial 16. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

No	Kabupaten/Kota	<i>Highlight</i> Intervensi Indikasi Kebijakan
		17. Pengendalian banjir
		18. Penyediaan PLTS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)
		19. Pengembangan Diversifikasi Pangan
		20. Penghijauan lingkungan
		21. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA
		22. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2026 adalah “Pemantapan Kapasitas Daerah Sebagai Mitra IKN”.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merujuk pada program prioritas

dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2026, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2024 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 21.350.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.425.601.303.696
2	Dinas Kesehatan	669.570.602.000
3	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	987.757.869.000
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	758.420.995.000
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	102.951.646.000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.931.892.915.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	44.612.149.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.667.899.000
9	Dinas Sosial	126.426.721.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85.768.440.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.847.191.000

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	91.839.944.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	38.436.446.000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.384.555.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	37.462.537.000
16	Dinas Perhubungan	154.003.747.000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	121.349.002.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.657.866.000
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	155.582.388.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	34.487.708.000
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	87.790.771.000
22	Dinas Pariwisata	43.101.208.364
23	Dinas Perkebunan	52.745.820.000
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	83.788.529.000
25	Dinas Kehutanan	438.744.661.000
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	107.285.319.000
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	108.920.615.000
28	Sekretariat Daerah	2.203.149.456.793
29	Sekretariat DPRD	375.000.000.000
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53.751.238.000
31	Badan Pendapatan Daerah	202.119.316.333
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.338.620.945.731
33	Badan Kepegawaian Daerah	41.962.538.062
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.100.466.469
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.364.052.000
36	Badan Penghubung Provinsi	18.393.496.000
37	Inspektorat	85.279.257.552
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	155.160.386.000

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan akhir telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Rancangan Akhir RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” Perangkat Daerah.

Tabel 6.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					3.043.628.968.283	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.039.531.110.586	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					3.039.531.110.586	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Indeks 92%			1.709.081.920.053	1.978.028.019.575,00
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang Tersusun	100%			1.491.405.862	244.355.015.235,00
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	512.646.635	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	96.598.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	78.078.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	34.255.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	118.594.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	324 Data	321.598.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.749.164.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	9 Dokumen	329.634.187	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.850.435,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	100%			1.577.329.775.834	1.575.348.985.028,00
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/ Bulan	1.574.253.871.276	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.474.675.701,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.707.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.235.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	548.827.604	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.678.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	219.779.653	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.498.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	243 Laporan	599.457.301	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.638.653.327,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata	90%	1.294.229.114		1.808.747.344,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	870.278.431	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.671.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	423.950.683	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.075.444,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tepat Waktu	100%	297.426.440		1.213.452.202,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	125.626.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.164.704,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	171.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.287.498,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	100%	98.333.340		98.333.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	98.333.340		98.333.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	6.359.860.614		6.670.126.195,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.170.184.874	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.398.071.955,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	97.931.458	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.148.012,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	3.542.376.282	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.921.906.228,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	549.368.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	297.368.235		3.149.522.596,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	297.368.235	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.149.522.596,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	108.613.149.240		124.943.588.448,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.964.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.492.651.203	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.602.157.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	395.820.640	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.403.599,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	95.714.677.397	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.777.063.374,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan	100%	5.374.431.334		7.440.249.187,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.495.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.436.797,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	1.260.295.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.235.577.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	417.088.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.205.090,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.096.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.557.457.134	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.690.180.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	7.925.940.040		13.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.925.940.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpatisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi Membaca	82,57% 71,34% 82,71 % 90,18 % 80,21% 70,95%	1.328.066.734.365		1.715.058.559.307,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi Baik Persentase SMA/MA Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Persentase Siswa SMA/ MA Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	98,82 100 100 84,84 74,88 64,58 78,5 67,03	603.478.193.218		716.568.954.308,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Indeks Inklusivitas SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional					
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	43.466.274.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.001.302.505,60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	3.374.365.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.761.048.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	500.000.000	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	8.977.433.696	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.050.313.127,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	2.500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1.092.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.948.757.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	244.899.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	448.037.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.864.276.186,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	887.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	96.111.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	42.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	7.202.172.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.468.959.294,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	113.662.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.740.423.242,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	686.188.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.648.572.696,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	200 Orang	49.841.020.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	719.140.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	83045 Satuan Pendidikan	150.430.637.163	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.012.444.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	488.384.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.242.808.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	64.144.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.994.942.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	431.066.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	66.715.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20000 Buku	24.460.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.593.229.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	55.937.211.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.607.138.075,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	650.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	63.902.844.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.872.757.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	1.045.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	230 Satuan Pendidikan	682.670.071	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.980.199,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebhinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1	97,94 100 100 72,49 72,69 63,26 74,98 64,64 95 100	687.267.920.569		899.948.016.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	193.510.366.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.362.302.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.584.683.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.063.703.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	16.942.580.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.312.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	10.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	84.137.400.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	2.220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	3.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	37.369.595.932	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	127.090.272.929	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	4.470.272.468	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	200 Orang	41.637.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	650 Orang	1.230.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	217 Satuan Pendidikan	35.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BoS	83701 Satuan Pendidikan	150.464.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.285.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	35.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	283.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	35.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	35.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	602.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1.245.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	2.596.493.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	18.757.580.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,	19.804.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	310.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	523.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	178.326.140	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.043.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMPLB Indeks Inklusivitas SMALB Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	98,58 100 100 81,54 77,83 79,1 74,46 76,74 81 72,14 72,8 74,28 83,29 81,88 82,95 76,13 75,05 73,57	37.320.620.578		98.541.588.599,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP LB Berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional.					
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2.154.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	640 Paket	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	937.631.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	610 Paket	2.284.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.842.768,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	12 Unit	1.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	8.332.654.519,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket	1.911.808.046	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.539.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	3.747.570.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.135.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	2.643.261.597	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.545.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	180 Orang	4.862.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	99.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	165.864.834	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.096.618,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana bOs	3458 Satuan Pendidikan	11.511.570.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.629.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22 Dokumen	271.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.837.056,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	268.933.578	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.166.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	114.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.793.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	109.964.834	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.313.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	164.950.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.596.790.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.093.263,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	95 Ruang	6.964.173.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	36.645.362.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	130.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.774.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	207.554.289	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.373.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	1.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	302.462.068,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	51 Ruang	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.030.776.962,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	2.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	321.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.618.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	23 Ruang	1.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.886.975.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	52%	1.334.251.531		4.661.404.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah SMA yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	238 Satuan Pendidikan 21 Satuan Pendidikan	287.834.071		230.186.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	22 Orang	216.200.071	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.186.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	71.634.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	35 Satuan Pendidikan	1.046.417.460		4.431.217.340,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen	21.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	996.971.640,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	8 Buku	21.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.329.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	280 Orang	327.205.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.216.446.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	4 Buku	21.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	5 Dokumen	327.205.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.234.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	3 Dokumen	327.205.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.234.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	0,60 Indeks 52,52%	848.215.040		15.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi	100 % 50 %	848.215.040		15.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500 Dokumen	516.615.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	550 Laporan	331.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	7,5%	199.989.597		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	199.989.597		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.06.1.01.0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1 Buku	199.989.597	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.097.857.697		34.700.000.000,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.097.857.697		34.700.000.000,00	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	58%	127.000.000		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan	100%	118.000.000		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	20 Objek	109.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	9.000.000		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	100 Sertifikat	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	50%	1.861.334.450		12.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina	112 Kesenian	1.861.334.450		12.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	1.843.334.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mangakses Informasi Sejarah Lokal	30%	8.400.000		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal	939 Orang	8.400.000		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	10 Dokumen	8.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	50% 70%	2.092.123.247	-	7.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar	24%	1.773.355.067		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	1.773.355.067	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	46%	318.768.180		5.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	12 Objek	300.768.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan pengunjung museum	15%	9.000.000		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	89423 Orang	9.000.000		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD TAMAN BUDAYA			9.523.085.153		11.863.360.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.523.085.153		11.863.360.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			9.523.085.153		11.863.360.000,00	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	5.684.776.383		6.963.360.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	190.440.000		192.600.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	190.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.600.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Belanja	4 Dokumen	522.265.083		1.559.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.799.797	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	80.236.416	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.957.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	368.271.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	1.247.830.000		1.500.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.247.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.238.916.100		3.191.760.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.756.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	291.999.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.939.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.879.760.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	70%	485.325.200		520.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	321.824.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	163.501.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan	5%	3.717.534.720		4.100.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni) yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	40%	2.103.000.000		2.300.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	103.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	2.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100%	1.614.534.720		1.800.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.614.534.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
3	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Seni yang Dibina	53,125%	120.774.050		800.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seniman dan Sanggar Seni yang Dibina	55 Orang	120.774.050		800.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	140 Orang	120.774.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN			3.214.195.109		3.204.562.719,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.214.195.109		3.204.562.719,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					3.204.562.719,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	3.197.995.109		3.188.362.719,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	91.200.000		91.200.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	91.200.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	613.913.029		612.077.639,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.434.437	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.385.047,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	96.409.337	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.409.337,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.051.255	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	34.051.255,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	478.018.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.232.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	89.840.011		89.840.011,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	89.840.011	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	89.840.011,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	2.162.896.069		2.162.896.069,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.580.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	7.580.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	893.516.069	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	893.516.069,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.261.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.261.800.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	240.146.000		232.349.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	81.354.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	73.557.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	54.490.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	54.490.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.302.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	104.302.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	80,21% 70,95%	16.200.000		16.200.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	171 Satuan Pendidikan 198 Satuan Pendidikan	8.100.000		8.100.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	2.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	2.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	2.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	132 Satuan Pendidikan 149 Satuan Pendidikan	5.400.000		5.400.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	1.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	1.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	35 % 33 %	2.700.000		2.700.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	33 Orang	900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	22 Konten Digital	900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	33 Orang	900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN			11.166.166.289		15.512.147.527,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.166.166.289		15.512.147.527,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			11.166.166.289		15.512.147.527,00	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	5.192.172.289		8.677.147.527,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	154.560.000		170.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.560.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	170.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%	28.331.492		28.331.492,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28.331.492	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	28.331.492,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1.280.918.123		2.067.270.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.379.302	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	50.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	56.529.934	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	600.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.121.300	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	17.270.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.162.887.587	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	3.133.970.800		2.943.895.035,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.770.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	17.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.120.800	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	848.655.035,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	48.040.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	200.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.021.040.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	1.878.240.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	594.391.874		3.467.651.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	171.287.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	217.651.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	250.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	223.104.874	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	3.000.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
2	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum Mulawarman	10%	5.973.994.000	-	6.835.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pengunjung Museum	65877 Orang	5.973.994.000		6.835.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	587.080.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	587.216.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	23.794.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	962.920.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	962.784.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	250.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	4.150.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	5.000.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I			90.482.590.700		117.891.670.940,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.482.590.700		117.891.670.940,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.482.590.700		117.891.670.940,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	22.585.740.700		22.882.820.940,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	223.800.000		204.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	223.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	897.970.700		1.199.288.240,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	128.330.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.888.240,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	769.640.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	826.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	21.268.980.000		21.263.269.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.220.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.949.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.086.760.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.047.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	194.990.000		216.223.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.270.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.431.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	54.720.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.792.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara	78,61% 39,17% 87,27% 82,12%	67.896.850.000		95.008.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I) persentase satuan pendidikan wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas I)					
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I) Jumlah SMA wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas I) Persentase SMA wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	36 Satuan Pendidikan 34 Satuan Pendidikan 100 %	31.169.880.000		44.598.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13329 Peserta didik	31.169.880.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.598.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I) Jumlah SMK wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I) Jumlah SMK wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I)	100 Satuan Pendidikan 32 Satuan Pendidikan 35 Satuan Pendidikan	35.344.900.000		48.400.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12956 Peserta didik	35.344.900.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen	7 Satuan Pendidikan 7	1.382.070.000		2.009.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I) Persentase SLB wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I)	Satuan Pendidikan 100 %				
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik	1.382.070.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.009.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II			68.330.928.923		99.063.180.361,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.330.928.923		99.063.180.361,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.330.928.923		99.063.180.361,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	24.059.704.923		27.282.809.327,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	217.440.000		239.184.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	217.440.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.184.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	414.587.638		689.069.695,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	99.998.996	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.998.895,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	314.588.642	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.070.800,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	9.960.627		10.956.689,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.960.627	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.956.689,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	23.254.906.658		26.175.731.243,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.043.858	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.483.243,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.199.862.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.570.248.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	162.810.000		167.867.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	149.980.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.754.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.830.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.113.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas II) persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Timur dan Bontang yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas II)	70,5% 41,02% 81,98% 67,16%	44.271.224.000		71.780.371.034,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II) Persentase SMA wilayah Kutai Timur dan Bontang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II) Jumlah SMA wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	31 Satuan Pendidikan 100 % 26 Satuan	21.532.354.000		35.898.758.464,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	224 Peserta didik	21.227.164.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.718.480.400,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	297.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.344.608.161,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	8.190.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.669.903,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK wilayah Kutai Timur dan Bontang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II) Jumlah SMK wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II) Jumlah SMK wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)	100 % 27 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan	22.041.040.000		34.763.662.391,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8135 Peserta didik	21.735.850.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.857.935.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	297.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.164.906.289,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	8.190.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	740.821.102,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II) Persentase SLB wilayah Kutai Timur dan Bontang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II)	10 Satuan Pendidikan 9 Satuan Pendidikan 100 %	697.830.000		1.117.950.179,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	256 Peserta Didik	656.640.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.003.904.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	33.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.847.188,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	8.190.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.198.991,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III			85.056.348.716		120.019.223.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.056.348.716		120.019.223.000,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.056.348.716		120.019.223.000,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	27.317.989.901		29.184.213.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	180.120.000		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.120.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	286.366.001		710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	55.172.001	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.194.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	754.697.500		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	754.697.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	25.947.926.400		27.580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.366.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.798.560.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	148.880.000		124.213.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	125.820.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.213.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas III) persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas III)	78,84% 17,23% 69,39% 62,24%	57.738.358.815		90.835.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III) Persentase SMA wilayah Kutai Kartanegara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III) Jumlah SMA wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)	41 Satuan Pendidikan 100 % 35 Satuan Pendidikan	36.614.058.883		61.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	36.056.470.883	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	557.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III) Persentase SMK wilayah Kutai Kartanegara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III) Jumlah SMK wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	23 Satuan Pendidikan 100 % 24 Satuan Pendidikan	20.621.289.932		29.025.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8765 Peserta didik	20.334.697.932	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	286.592.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III) Persentase SLB wilayah Kutai Kartanegara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)	3 Satuan Pendidikan 100 % 3 Satuan Pendidikan	503.010.000		710.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik	503.010.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV			36.103.872.552		46.690.123.277,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.103.872.552		46.690.123.277,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.103.872.552		46.690.123.277,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	18.591.513.752		18.431.446.958,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	129.560.000		155.093.400,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.488.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	11.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.605.400,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	6.480.000		36.536.850,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	6.480.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.536.850,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	784.200.000		1.321.072.708,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.466.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	105.172.708,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	618.734.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.215.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	17.519.973.752		16.742.607.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.093.752	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.432.880.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.651.152.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	151.300.000		176.137.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	116.960.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.457.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.340.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas IV) persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas IV)	63,08% 11,82% 58,93% 39,28%	17.512.358.800		28.258.676.319,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV) Jumlah SMA wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV) Persentase SMA wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	19 Satuan Pendidikan 16 Satuan Pendidikan 100 %	10.685.990.000		17.895.028.215,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5452 Peserta didik	10.506.290.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.450.428.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	659 Peserta Didik	159.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.423.278.515,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	42 Orang	20.700.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.321.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV) Jumlah SMK wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV) Persentase SMK wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	10 Satuan Pendidikan 7 Satuan Pendidikan 100 %	6.438.206.600		9.785.932.745,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2548 Peserta didik	6.344.520.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.159.295.600,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137 Peserta Didik	80.186.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.732.145,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 Orang	13.500.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.905.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV) Persentase SLB wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 100 %	388.162.200		577.715.359,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	166 Peserta Didik	377.120.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.613.600,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	6.542.200	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.466.759,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4.500.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V			38.524.071.644		40.646.867.102,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.524.071.644		40.646.867.102,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			38.524.071.644		40.646.867.102,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	15.254.466.644		15.341.637.102,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	202.320.000		215.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.320.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	1 Laporan 100 %	825.107.136		942.073.643,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	108.307.136	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.073.643,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	716.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	222.000.000		222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	222.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	13.845.361.508		13.776.565.584,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.601.508	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.805.584,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.715.760.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.715.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	159.678.000		185.159.875,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	134.998.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.159.875,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	24.680.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas V) persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas V)	72,3% 27% 70% 60%	23.269.605.000		25.305.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA wilayah Paser Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V) Jumlah SMA wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)	100 % 1 Satuan Pendidikan 14 Satuan Pendidikan	14.187.730.000		16.045.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah SMA wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)					
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6059 Peserta didik	14.036.720.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Peserta Didik	114.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	37.010.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V) Jumlah SMK wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V) Persentase SMK wilayah Paser Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 100 %	8.791.665.000		8.853.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3193 Peserta didik	8.653.030.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.653.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	101.625.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	37.010.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Khusus Yang wilayah Paser Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V) Persentase SLB wilayah Paser Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)	1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 100 %	290.210.000		407.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	265.200.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	18.050.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	6.960.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI			39.571.076.327		41.471.180.798,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.571.076.327		41.471.180.798,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.571.076.327		41.471.180.798,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 92 Indeks	15.823.916.327		17.486.020.798,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	114.480.000		114.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	11.923.307		74.104.504,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	11.923.307	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.104.504,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	614.125.320		1.849.492.594,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.754.138	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.603.029,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	93.743.488	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.948.348,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	29.863.694	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.125.697,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	480.764.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.454.815.520,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan	1 Laporan	14.912.251.700		15.283.539.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.748.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.991.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.991.700,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.819.760.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.190.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	171.136.000		164.404.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	134.956.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.384.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36.180.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas VI) persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas VI)	76,88% 54,95% 86,11% 63,89%	23.747.160.000		23.985.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA wilayah Berau Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI) Jumlah SMA wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI) Jumlah SMA wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	100 % 20 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan	15.477.060.000		15.477.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	15.348.060.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.348.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	129.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI) Jumlah SMK wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI) Persentase SMK wilayah Berau Penerima Bantuan	9 Satuan Pendidikan 14 Satuan Pendidikan 100 %	7.587.780.000		7.587.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)					
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta didik	7.469.280.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.469.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1652 Peserta Didik	118.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase SLB wilayah Berau Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)	100 % 3 Satuan Pendidikan 3 Satuan Pendidikan	682.320.000		920.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	628.320.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	866.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	54.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
		DINAS KESEHATAN			624.494.284.279		316.539.079.978,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			624.494.284.279		316.539.079.978,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			624.494.284.279		316.539.079.978,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 indeks 100%	102.344.727.594		116.848.317.637,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas Kesehatan)	100%	1.148.751.000		1.878.247.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	762.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.464.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	160.871.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.406.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	224.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.377.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (Dinas Kesehatan)	100%	93.541.115.044		102.868.817.748,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	92.714.947.044	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.986.441.748,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	729.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	674.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.763.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.902.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21.909.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.256.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	65.696.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.697.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dinas Kesehatan)	100%	296.168.000		473.924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	156.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	140.168.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.324.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	2.320.913.288		4.686.729.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.394.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.987.227,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	534.045.288	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.045.676.727,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.931.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.774.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	14.834.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.996.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.675.709.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.401.294.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	3.969.101.262		4.635.600.429,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.781.262	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.885.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.370.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.695.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.590.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.066.019.361,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.068.679.000		2.304.997.706,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	298.728.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	644.317.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	559.587.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.206.953.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	210.364.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.727.406,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Cakupan penemuan kasus TB Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	8,05 2,1% 2 23,4% 80% 85% 2% 88% 88% 91,75% 95,1% 12% 85% 0 100%	481.331.880.251		192.427.374.341,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasarana Alat Kesehatan minimal 60% (Dinas Kesehatan)	20%	227.640.723.311		72.115.301.883,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	12.500.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	28.007.784.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	762.549.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.594.104.600,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	24 Unit	259.110.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.035.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	172.747.012.311	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.032.851.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	9.567.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.636.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	53.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	797.049.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	1.170.351.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.581.780.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	12.131.010.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.917.160.868,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	252.528.200.940		114.887.914.158,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	1.489.975.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.382.319.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	2.238.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.312.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1.993.571.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.338.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	947.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.831.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	749.146.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.522.982.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.861.208.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.214.332.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	613.096.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.110.483.425,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	796.470.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.110.483.425,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	545.067.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.275.282.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	677.880.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.602.134,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2.468.463.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.070.871.293,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	240.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	709.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	433.090.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.423.294.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	231.767.669.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.799.903.929,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	4.333.944.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	229.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	81.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	797.049.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	43.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	234.952.000		1.598.302.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	234.952.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.598.302.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna (Dinas Kesehatan)	100%	928.004.000		3.825.856.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	156.977.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.434.697.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	665.977.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.434.697.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit	105.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.462.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50% 0,0073 80% 60%	39.881.075.434	-	4.317.421.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	21.600.130.000		1.294.398.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1630 Orang	21.600.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.294.398.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	9 Kab/Ktoa	18.280.945.434		3.023.023.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1500 Orang	18.103.146.434	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.251.945.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	177.799.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.078.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100% 100%	250.701.000		1.033.043.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100%	164.637.000		754.982.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	64 Sarana	164.637.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.982.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100%	86.064.000		278.060.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	86.064.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.060.200,00	DINAS KESEHATAN
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100%	685.900.000	-	1.912.923.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	99.980.000		382.584.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	99.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.584.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	100%	405.050.000		956.461.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	183.325.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.230.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	221.725.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.230.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100%	180.870.000		573.877.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	180.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	573.877.700,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN			6.024.295.994		10.660.015.831,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.024.295.994		10.660.015.831,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.024.295.994		10.660.015.831,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 indeks 100%	5.317.695.994		8.460.015.831,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (Bapelkes)	100%	123.480.000		135.828.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	123.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidadadi	135.828.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Bapelkes)	100%	248.732.598		509.056.488,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.532.598	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidadadi	199.846.488,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	190.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.210.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bapelkes)	12 Bulan	1.120.344.696		2.336.540.716,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.922.760	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	57.115.036,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	474.191.254	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	967.168.785,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	101.046.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	327.140.807,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	68.444.682	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	157.865.488,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	424.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.250.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bapelkes)	12 Bulan	2.019.120.000		3.317.689.430,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	13.811.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.110.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.241.377.830,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	897.120.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.062.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Bapelkes)	98%	458.428.700		660.901.197,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	88.986.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	97.884.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 Unit	204.842.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	225.329.797,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	164.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	337.686.800,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di Balai Latihan Kesehatan	90%	1.347.590.000		1.500.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.347.590.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
2	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50% 0,0073 80% 60%	706.600.000		2.200.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	120 Orang	706.600.000		2.200.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	6660 Orang	706.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		17.039.132.600		28.457.066.846,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.039.132.600		28.457.066.846,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			17.039.132.600		28.457.066.846,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 indeks 100%	14.689.887.835		18.272.148.939,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (RS Mata) Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi Keuangan tepat waktu	100 % 100 %	135.000.000		148.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	135.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Rs Mata)	98%	631.731.031		1.074.128.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	505 Orang	631.731.031	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.128.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS Mata)	100%	1.029.586.144		2.005.792.204,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.378.078	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.813.706,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	530.144.066	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	849.749.898,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	449.064.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.102.228.600,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Mata)	100%	76.348.040		85.201.415,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	76.348.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.201.415,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang urusan pemerintahan daerah (RS Mata)	100%	5.522.040.000		6.239.376.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.281.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.445.268.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.241.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.794.108.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (RS Mata)	100%	835.426.220		1.019.151.320,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	308.402.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.883.400,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	527.023.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	667.267.920,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS Mata) Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit Mata	98 % 98 %	6.459.756.400		7.700.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	6.459.756.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.700.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Cakupan penemuan kasus TB Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	8,05 2,1% 2 23,4% 80% 85% 2% 88% 88% 91,75% 95,1% 12% 85% 0 100%	2.349.244.765		10.184.917.907,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	98%	2.222.882.338		9.195.341.945,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	1.703.102.630	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.187.602.689,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	146 Unit	259.476.508	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.345.736,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit	260.303.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.393.520,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan ibu dan anak (Dinkes) Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI) Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan) Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 % 100 % 100 % 80 %	126.362.427		989.575.962,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	121.362.427	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	984.075.962,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN			9.062.764.527		11.775.053.786,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.062.764.527		11.775.053.786,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			9.062.764.527		11.775.053.786,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 indeks 100%	8.616.533.200		11.217.610.570,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Labkes)	12 Bulan	2.179.420.000		2.417.610.570,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	718.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.377.150,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	1.461.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.607.233.420,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium	100%	6.437.113.200		8.800.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.437.113.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi	8,05 2,1% 2 23,4% 80% 85% 2% 88% 88% 91,75% 95,1%	446.231.327		557.443.216,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Cakupan penemuan kasus TB Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	12% 85% 0 100%				
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	12%	446.231.327		557.443.216,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24 Unit	446.231.327	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.443.216,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI			12.950.124.600		25.382.797.483,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.807.779.800		24.949.219.943,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			12.807.779.800		24.949.219.943,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 indeks 100%	10.403.522.220		19.878.764.753,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ANS yang mendapatkan layanan Administrasi keuangan tepat waktu	100%	111.720.000		122.892.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	111.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.892.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	140.083.701		1.268.219.761,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	917.031	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.780.561,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	139.166.670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.031.439.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	12 bulan 100 %	420.012.765		1.694.488.093,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.176.659	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.837.362,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	118.392.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.732.539,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46.899.618	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.245.542,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	229.544.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	924.672.650,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah (RSUD AMS II)	100%	17.970.354		339.442.364,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	17.970.354	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.442.364,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	7.151.220.000		9.099.267.100,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.277.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.444.010.700,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.873.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.655.256.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100%	252.775.000		644.455.435,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	252.775.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	644.455.435,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan (RSUD AMS II)	88%	2.309.740.400		6.710.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.309.740.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.710.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia yang mandiri	8,05 2,1% 2 23,4% 80% 85% 2% 88% 88% 91,75% 95,1% 12% 85% 0 100%	2.265.090.910		4.305.038.505,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Cakupan penemuan kasus TB Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar					
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60% (RSUD AMS II)	75%	2.044.732.510		3.442.380.623,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1.411.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.143.549.209,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	260 Unit	303.479.184	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409.930.290,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.042.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	1.738.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.778.901.124,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD AMS II)	100%	210.358.400		661.580.668,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	40.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.381.180,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	170.318.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.199.488,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi (RSUD AMS II)	100%	10.000.000		201.077.214,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.077.214,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50% 0,0073 80% 60%	139.166.670		765.416.685,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Sesuai dengan Standar RS AMS II	50%	139.166.670		765.416.685,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10 Orang	139.166.670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.416.685,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	X	NON URUSAN			142.344.800		433.577.540,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			142.344.800		433.577.540,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 indeks 100%	142.344.800		433.577.540,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100%	142.344.800		433.577.540,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	142.344.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.577.540,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA			987.757.869.000		1.026.812.719.448,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			987.757.869.000		1.026.812.719.448,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			987.757.869.000		1.026.812.719.448,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	83 Indeks 100%	964.332.644.239		975.985.530.617,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Rumah Sakit yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah dokumen yang direncanakan	100%	0		474.340.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	324.340.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	150.000.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan akuntansi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	85%	384.122.644.239		384.796.388.120,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	2330 Orang/ Bulan	383.813.284.239	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	383.813.429.270,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	309.360.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	309.600.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	114.600.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	355.256.610,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	203.502.240,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku	85%	0		3.870.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3.870.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian sesuai dengan jadwal	85%	0		1.105.805.590,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	987.568.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	35.937.590,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	4.400.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	77.900.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pencapaian seluruh kegiatan administrasi umum Rumah Sakit	85%	0		3.449.835.836,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.294.970.836,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	108.493.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.046.372.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan kebutuhan Rumah Sakit	85%	3.200.000.000		4.540.590.071,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3.200.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	628.317.340,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3.912.272.731,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditentukan	85%	0		1.614.701.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	381.951.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	732.750.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	500.000.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)	75%	577.010.000.000		580.000.000.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	577.010.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.000.000.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%	23.091.224.761		48.162.544.848,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	85%	23.091.224.761		47.062.259.362,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	126 Unit	23.091.224.761	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	46.062.259.362,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.000.000.000,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	85%	0		321.733.600,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	321.733.600,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelesaian dan implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan	85%	0		778.551.886,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	778.551.886,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	50% 0,0073 80% 60%	334.000.000		2.664.643.983,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar					
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	62%	334.000.000		2.664.643.983,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	1392 Orang	334.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidadadi	2.664.643.983,00	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN			758.420.995.000		0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			270.209.754.939		0,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			270.209.754.939		0,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Indeks 100%	250.209.754.939		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	250.209.754.939		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	1496 Orang/ Bulan	250.209.754.939	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Stell	0		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit	0		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	0		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	93%	18.785.000.000		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	30 Unit	18.785.000.000		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	18.785.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen	0		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50% 0,0073 80% 60%	1.215.000.000		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60%	1.215.000.000		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	65 Orang	1.215.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	X	NON URUSAN			488.211.240.061		0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			488.211.240.061		0,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Indeks 100%	488.211.240.061		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Berdasarkan Target Proyeksi Pendapatan BLUD	90%	488.211.240.061		0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 Unit Kerja	488.211.240.061	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM			102.951.646.000		111.631.374.663,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			102.951.646.000		111.631.374.663,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			102.951.646.000		111.631.374.663,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	98,42 Indeks 100%	101.889.457.000		109.874.817.283,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	0%	0		0,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100%	70.408.259.985		76.346.047.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	410 Orang/ Bulan	70.155.179.985	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	76.065.610.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	280.437.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	0%	0		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	0 Dokumen	0		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	0%	0		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	86,12 %	7.036.927.815		7.845.110.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2.023.006.015	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	2.481.527.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.013.921.800	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	5.363.583.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	85,73 %	444.269.200		683.660.283,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.207.198,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.949.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.453.085,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100%	24.000.000.000		25.000.000.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.000.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	25.000.000.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%	1.062.189.000		1.756.557.380,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Nilai Aspek	91,85 %	905.389.000		1.353.957.380,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	512 Unit	341.914.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	747.033.733,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	574 Unit	415.841.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.426.090,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	147.632.900	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	149.497.557,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian jenis layanan yang tersedia	100%	156.800.000		402.600.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	156.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	402.600.000,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	50% 0,0073 80% 60%	0		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat dan atau Penelitian yang dilaksanakan	0 Laporan	0		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0 Orang	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II			71.500.000.000		90.012.505.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			71.500.000.000		90.012.505.900,00	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			71.500.000.000		90.012.505.900,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 77 Indeks	5.128.975.757		13.396.019.653,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	474.485.480		567.020.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	437.880.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.040.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	14.188.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.980.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.629.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.787.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100%	335.301.300		6.028.232.428,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.005.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	316.378.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.998.232.428,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.918.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	472.893.000		1.116.298.250,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	240.450.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	489.860.250,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.336.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.282.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.907.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.756.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	96.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.400.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	120.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.080.298.323		1.613.735.040,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.013.604	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	12.261.532,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	351.519.009	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	484.057.669,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	355.632.993	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	334.879.191,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.116.677	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	37.258.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	13.200.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.188.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.184.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.539.040	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	13.594.648,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.289.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	14.300.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.168.109.604		1.877.376.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	12.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	413.429.604	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	301.482.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	742.680.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.563.894.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100%	1.597.888.050		2.193.357.735,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	223.772.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	337.872.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	989.443.300	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.200.861.735,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	49.520.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	49.520.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	335.152.750	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	605.104.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	11,42%	6.000.000.000		8.249.996.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi Pada wilayah Kerja UPTDII	1 Unit	1.000.000.000		1.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDII	7500 Meter	5.000.000.000		7.249.996.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	25 KM	5.000.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.249.996.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
3	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase primer dalam kondisi baik	12,16%	5.000.000.000		7.999.914.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDII	20000 Meter	5.000.000.000		7.999.914.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.914.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
4	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	89,84%	55.371.024.243	-	60.366.575.747,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD II	22 Km	55.371.024.243		60.366.575.747,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10 KM	32.371.024.243	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.975.761.600,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	12 KM	13.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.820.762.647,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	22000 Meter	10.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.570.051.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI			6.100.000.000		6.193.993.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.100.000.000		6.193.993.000,00	
1,03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			6.100.000.000		6.193.993.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 77 Indeks	5.801.816.000	-	5.518.696.200,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	147.494.570		220.840.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	106.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.840.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.980.534	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.866.242	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	11.168.507	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	30.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	24.039.287	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100%	8.281.740		65.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.448.580	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.916.580	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.916.580	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	612.579.162		317.856.200,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	331.476.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	227.856.200,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.307.277	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.795.885	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	270.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	40.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100%	2.260.302.331		1.715.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.976.441	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	185.855.515	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	40.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	1.318.031.833	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	200.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.316.340	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	132.056.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	95.851.754	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	130.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	402.304.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Anyar	1.100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.256.712	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.653.736	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	733.147.950		500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	62 Unit	733.147.950	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	810.145.142		855.883.600,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.060.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	418.805.142	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	390.123.600,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368.280.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	440.760.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100%	1.229.865.105		1.844.116.400,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	163.950.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	225.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	229.220.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	836.695.105	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.519.116.400,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
2	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	63,34 %	298.184.000	-	675.296.800,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	2 Dokumen	298.184.000		675.296.800,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	110 Bangunan Konstruksi	298.184.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.296.800,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT			2.733.792.915.000		1.243.884.112.058,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.733.792.915.000		1.243.884.112.058,00	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2.599.931.005.418		1.223.607.686.058,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 77 Indeks	142.333.766.461		156.097.442.475,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	100%	849.800.000		1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	339.368.538	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	75.131.532	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	63.152.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	104.609.451	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	267.538.471	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	123.117.558.874		124.378.809.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	11648 Orang/ Bulan	121.960.121.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.960.121.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.097.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.018.688.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.554.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	24.155.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	9.965.684	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.601.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100%	779.131.259		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.459.925	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	764.368.814	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.302.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	712.078.830		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	596.165.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.973.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.716.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	42.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	53.222.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100%	3.780.857.814		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.439.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2.159.742.442	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	93.313.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	261.841.036	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	199.283.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	883.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	23.961.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	65.677.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	129.088.002		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	89.211.002	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.978.129.955		21.318.633.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	56.837.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.012.452.955	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.908.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.168.233.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100%	3.987.121.727		4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.565.472.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	676.681.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	26.894.007	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.277.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	440.084.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kapasitas air baku untuk air bersih Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	11,676 11,42% 16,08% 35,99%	162.894.336.008	-	141.757.569.592,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	1 Unit 16935 Meter 6 Lokasi	113.055.122.293		98.417.642.607,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	16,3 KM	51.795.045.158	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.146.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	367.292.540	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.956.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	7 Lembaga	3.634.757.793	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.816.011.671,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,63 KM	2.001.296.430	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12 Dokumen	6.667.091.520	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.597.339.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	8 Dokumen	4.866.362.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	5.948.712.204	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Kanaan	14.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	1,15 KM	37.305.752.838	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.949.230.886,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	468.811.810	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.995.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	52699 meter	49.839.213.715		43.339.926.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1,07 KM	3.836.512.340	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	12,29 KM	3.853.342.150	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3,82 KM	13.654.875.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	7,03 KM	2.204.752.140	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,89 KM	17.608.593.550	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.709.440.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	24,66 KM	7.577.271.135	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.225.302.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	6 Dokumen	1.103.867.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	1.405.184.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	8,62%	118.224.260.800		125.717.600.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional	34,90 %	118.224.260.800		125.717.600.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupate n/Kota	289.782.220	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	250 Liter/Detik	88.441.478.000	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	96.723.080.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	22.210.249.490	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7 Kabupaten/ Kota	278.841.090	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	364.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dokumen	6.652.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	351.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	0,40%	1.351.410.000		1.279.237.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional	5,70 %	1.351.410.000		1.279.237.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	30 Orang	200.500.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1.150.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.237.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	7,00% 88,23%	3.073.294.900		3.172.911.243,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional	12,10 %	3.073.294.900		3.172.911.243,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	1.795.406.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.586.063.343,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/ kota	65.661.090	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota	848.229.980	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	922.327.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang	363.997.830	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	12,16%	35.020.228.975	-	35.815.804.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik	563,49 Meter	35.020.228.975		35.815.804.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	6 Sistem Drainase Perkotaan	31.814.507.975	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.065.804.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	6 Dokumen	3.205.721.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
7	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	89,88%	48.002.963.500	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	45,45 %	48.002.963.500		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	2 Unit	44.822.128.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.07.1.01.0039	Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	50 Rumah Tangga	3.180.835.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
8	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	79,08%	794.229.456.840	-	720.512.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dilaksanakan	30%	794.229.456.840		720.512.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30 Orang	87.721.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	46 Bangunan Gedung	770.957.717.180	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.812.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	30 Lisensi	281.468.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	49 Dokumen	22.902.549.410	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,	14.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
9	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	20,98%	822.760.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Yang Dilaksanakan	8,57 %	822.760.000		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	735.167.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	10 kabupate n/kota	87.592.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
10	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	89,84%	1.273.274.533.385	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direkonstruksi menjadi mantap Panjang Jalan Prioritas Provinsi yang telah dibangun	843,46 Km 36,3 Km	1.273.274.533.385		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	62,40 KM	530.158.685.453	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	18 Dokumen	31.938.217.684	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	938,85 KM	2.989.624.375	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	4.040.524.375	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	3,5 KM	20.202.701.450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	65,90 KM	48.322.577.522	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	50 Meter	105.807.862.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	24.30 KM	529.814.339.726	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
11	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	51,68 %	3.972.400.000	-	25.155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	500 Orang	2.748.187.938		15.955.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	48 Orang	184.465.546	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	36.800.466	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	500 Orang	1.055.279.720	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga	243.280.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	3 Dokumen	27.800.466	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	500 Orang	1.131.561.232	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	400 Orang	45.400.042	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	23.600.466	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	237.799.838		1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	21.846.838	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	123.537.650	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	32.028.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60.386.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	2 Dokumen	986.412.224		7.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	315.364.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	100 Bangunan Konstruksi	74.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	462.047.260	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	87.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	47.200.134	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
12	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	79,04% 84,94	16.731.594.549		11.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	16,21 %	1.551.300.000		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.352.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	199.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	22,62 %	5.577.713.820		2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	311.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Orang	197.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	203.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	1 Dokumen	3.328.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RdTr kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	428.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0010	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	790.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	318.513.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,35 %	5.609.676.434		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	292.364.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	1.722.290.389	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	320.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2.785.022.045	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	490.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	19,76 %	3.992.904.295		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	1.232.477.817	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	4 Kasus	796.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	480.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	943.848.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	290.228.478	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			133.861.909.582		20.276.426.000,00	
1	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	100 % 100 % 2000 orang	20.970.000.000		970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Provinsi yang terdata untuk memperoleh rumah layak huni	2 Dokumen	200.000.000		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau masyarakat yang terkena relokasi program provinsi yang dibangun dan direhab	4 Unit Rumah	400.000.000		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	1 Unit Rumah	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	1 Unit Rumah	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Provinsi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	20.370.000.000		370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	20.370.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh 10-15 Ha	31,43%	52.397.023.278		19.306.426.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	908.866.300		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	908.866.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	419,19 Ha	51.488.156.978		19.306.426.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	516 Unit Rumah	19.756.426.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.306.426.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13 Laporan	3.584.796.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Unit Rumah	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	16,41 Ha	27.946.934.978	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
3	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	33,27%	60.494.886.304		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	30 Lokasi	60.494.886.304		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi	13.318.779.276	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi	47.176.107.028	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I			54.000.000.000		77.607.767.920,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.000.000.000		77.607.767.920,00	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			54.000.000.000		77.607.767.920,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 77 Indeks	5.459.420.603	-	5.387.335.920,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	430.518.934		302.480.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	410.520.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.480.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4.999.495	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.107	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.999.512	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.999.820	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100%	19.900.575		20.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.263	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.900.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.999.512	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	183.219.402		388.245.527,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.614.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.977.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.999.993	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.005.409	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	55.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.268.027,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100%	599.055.024		1.120.788.473,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.297.725	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.197.473,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	108.042.678	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.200.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.488.181	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	81.947.085	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.277.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.113.855	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.900.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	284.394.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	804.114.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.675.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.196.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	7.434.602		112.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7.434.602	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.843.652.870		1.999.999.920,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	471.172.870	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.808.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.362.480.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.809.191.920,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100%	2.375.639.196		1.443.822.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	500.917.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.902.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	686.300.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.300.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	83.221.081	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.120.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5.483.515	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.099.717.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.500.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	35,22%	6.540.600.300	-	9.824.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDI	12997 Meter	6.540.600.300		9.824.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	764.389.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.5 KM	2.588.669.100	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.177.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	3.187.542.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.647.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	89,84%	41.999.979.097	-	62.396.432.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD I	29 Km	41.999.979.097		62.396.432.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13 KM	13.705.044.195	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	15 KM	25.294.940.666	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.396.432.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	300 Meter	2.999.994.236	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III			66.500.000.000		78.554.386.715,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			66.500.000.000		78.554.386.715,00	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			66.500.000.000		78.554.386.715,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 77 Indeks	4.546.751.260	-	6.896.946.715,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	281.553.860		505.901.980,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	236.520.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	468.990.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.240.140	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	9.240.140,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	12.912.140	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	12.912.140,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	9.688.940	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	9.688.940,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	13.192.640	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	5.070.760,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100%	231.835.530		207.878.760,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.952.140	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.820.760,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	207.125.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	198.033.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.757.790	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	5.025.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	211.769.280		210.717.120,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	122.702.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	38.487.120,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.673.640	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.950.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.473.640	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.950.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	36.960.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	75.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	36.960.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	87.330.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100%	688.614.229		1.014.026.855,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.704.240	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	34.429.600,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	87.572.583	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	63.434.016,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	24.147.230	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	61.776.500,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.080.121	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	48.441.908,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	59.793.845	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	59.298.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.051.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	47.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	385.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.800.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	16.524.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	14.200.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.541.210	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	4.599.831,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.533.648.061		3.515.400.600,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.192.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.319.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234.757.817	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	226.689.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.938.244	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	1.385.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.220.760.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.284.007.200,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100%	1.599.330.300		1.443.021.400,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	67.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	76.300.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	892.120.300	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	802.947.300,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	62.630.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	64.475.100,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	577.580.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	499.299.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	35,22%	7.000.000.000	-	7.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDIII	85300 Meter	7.000.000.000		7.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,5 KM	2.000.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	81,8 KM	5.000.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	89,84%	54.953.248.740	-	64.657.440.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD III	55,95 Km	54.953.248.740		64.657.440.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.25 KM	3.719.270.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.410.440.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	55.7 KM	49.233.978.540	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.247.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	496,5 Meter	2.000.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			44.612.149.000		44.946.222.644,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			44.612.149.000		44.946.222.644,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			44.612.149.000		44.946.222.644,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90 Indeks 100%	41.333.122.932		41.538.172.075,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 Persen	689.543.174		717.070.358,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	303.221.574	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.215.758,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.424.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	12.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.424.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.888.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.380.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	324.433.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.626.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	37.413.560.284		37.416.560.284,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang/ Bulan	36.833.716.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.833.716.620,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	569.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.321.164	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.321.164,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	6.562.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.562.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100 Persen	406.035.700		428.035.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	339.383.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.383.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.660.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.660.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	50.992.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.992.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen	784.151.829		814.151.829,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.875.742	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.875.742,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	284.549.390	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.549.390,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.192.697	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.192.697,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	478.534.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.534.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	204.568.389		266.090.348,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	32.804.931	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.996.134,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	171.763.458	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.094.214,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	1.202.628.227		1.222.628.227,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	644.311.811	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.311.811,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	558.316.416	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.316.416,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen	632.635.329		673.635.329,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.136.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.136.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	332.927.329	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.927.329,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	32.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.910.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	243.662.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100% 100% 100% 100%	2.507.594.358		2.606.618.859,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satlinmas Yang Terlatih dan Dikukuhkan Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/Kota Yang Ditangani	200 Orang 4 Kasus	1.717.593.930		1.786.618.431,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	7 Dokumen	47.116.409	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.744.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	93.758.969	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.758.969,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan	514.840.735	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.237.131,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	2 Laporan	308.062.652	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.062.652,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	200 Orang	134.395.141	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.395.141,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	70 Unit	72.430.674	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.430.674,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	546.989.350	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.989.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	5 Perda/Perkada	668.384.085		688.384.085,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.02.1.02.0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	400.374.085	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.374.085,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	5 Laporan	268.010.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas PPNS	1 Orang	121.616.343		131.616.343,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	121.616.343	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.616.343,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	1.05.04	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%	771.431.710	-	801.431.710,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	616.852.032		636.852.032,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	360.872.230	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.872.230,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	255.979.802	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.979.802,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	154.579.678		164.579.678,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan	154.579.678	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.579.678,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			26.667.899.000		28.256.647.565,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.667.899.000		28.256.647.565,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			26.667.899.000		28.256.647.565,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85 Indeks 80%	21.788.902.779		22.609.825.472,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	699.459.806		1.301.010.520,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	147.204.266	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.944.460,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.907.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.907.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.907.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.907.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.757.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.620.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.757.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.540.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	225.742.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.997.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	269.184.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.093.960,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	17.760.536.279		17.532.175.985,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	90 Orang/ Bulan	17.332.176.279	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	16.953.815.985,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	295.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	378.360.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	38.382.888	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	111.261.140,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	67.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.251.060	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.607.944,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	20.561.760	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	21.253.944,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	2.164.292	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	19.536.972,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	53.560.950		82.271.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.660.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.660.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.848.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.240.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.422.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	121.538.993		117.987.688,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	96.934.493	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	92.741.188,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.932.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.147.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.136.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.694.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.136.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12.005.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	2.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	615.626.702		977.084.219,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	25.630.428	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.204.050,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.246.505	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	154.766.948,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	50.478.274	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	224.366.221,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	40.357.395	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	390.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	13.914.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.747.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	18.665.378		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	18.665.378	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100%	1.805.427.400		1.923.835.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.698.524	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	497.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.008.876	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	429.017.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.365.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.494.320.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100%	714.087.271		665.461.060,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	580.042.098	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	578.228.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	114.941.220	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	81.029.460,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	19.103.953	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6.203.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pra Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pasca Bencana	0,077 Indeks 0,034 Indeks 0,016 Indeks	4.878.996.221		5.646.822.093,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	494.198.220		200.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	334.992.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	200 Orang	159.206.020	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	100 % 100 %	1.480.357.920		1.774.136.008,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	244.701.860	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.450.401,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	423.322.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.971.740,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	130.024.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.097.740,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga	331.777.410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	234.367.960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.283.157,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	116.163.890	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.151.970,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	964.603.481		1.273.215.394,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	53.999.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.155.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	665.661.901	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	808.488.094,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	244.942.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.572.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Legislasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Penanggulangan Bencana Persentase Layanan Pasca Bencana Persentase Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana	100 % 100 % 100 %	1.939.836.600		2.399.170.691,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	79.601.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	477.086.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.259.130.291,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	11.230.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas	12 Laporan	167.616.474	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.274.772,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi					
	1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	18 Lembaga	162.543.994	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.989.728,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	130 Orang	192.753.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.699.480,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	607.372.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.576.420,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	138.858.110	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten/kota	102.774.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL			98.689.629.672		70.440.308.012,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			98.689.629.672		70.440.308.012,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			98.689.629.672		70.440.308.012,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100%	63.374.010.164	-	6.805.308.012,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	500.035.235		1.410.708.012,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	281.332.235	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.708.012,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	55.490.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.490.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	85.834.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	63.889.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	56.409.386.920		208.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	342 Orang/ Bulan	55.703.227.130	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	506.159.790	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	95.991.099	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.046.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	93.602.459	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.360.442	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12.925.358		8.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.122.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.346.318	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.457.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	83.284.000		260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	62.481.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	20.803.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.542.569.054		435.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.193.080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	152.187.654	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	159.425.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	960.785.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	87.688.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	128.290.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	16.059.267		1.057.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	9.519.560	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.539.707	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4.134.597.530		2.306.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.534.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	841.848.800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.994.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.240.220.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	675.152.800		1.119.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	89.103.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	179.560.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	206.562.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	160.719.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.168.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100% 24,26 55 64,49%	1.111.439.025		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	105.800.000		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	105.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.005.639.025		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	73.463.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	831.104.599	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	101.071.426	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	9 warga	5.360.000		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	5.360.000		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	5.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
4	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya Persentase Peningkatan PMKS yang Terpenuhi Kebutuhannya Didalam Panti Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	100%	14.839.145.388		29.405.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang diberikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	80 Orang	2.886.858.241		4.045.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.939.087.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	314.419.318	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	16 Orang	31.594.932	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	13.608.160	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	27.054.248	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	14.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	102.641.792	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	8.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	16.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kabupate n/Kota	42.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	3.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 orang	9.192.498	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 orang	258.659.982	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen	21.499.851	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	6110 Orang	11.952.287.147		25.360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	100.083.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	679.641.680	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AiDs Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	150 Orang	386.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2 Dokumen	289.125.807	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	10.407.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	89.266.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
5	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100% 50% 60%	10.855.500.000		22.920.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	103.499.822		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	94.629.822	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	8.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua	20.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	13500 Orang	10.752.000.178		22.700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	8.083.479.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	2.345.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	323.020.898	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana(%) Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100%	8.160.727.610		11.310.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	12500 Orang	8.160.727.610		11.310.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	12500 Orang	5.748.375.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	345.049.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	302.585.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	550 Orang	545.091.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	777.374.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	257.610.368	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	184.640.432	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
7	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Meningkatkan Tata Kelolanya	1 Makam	343.447.485	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	343.447.485		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	32.903.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	112 Makam	165.584.485	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	144.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS SOSIAL
		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI			6.723.864.146		8.123.804.779,20	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.723.864.146		8.123.804.779,20	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.723.864.146		8.123.804.779,20	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100%	1.450.551.146		2.333.034.806,20	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN (UPTD PSTW-NP)	1 Dokumen	76.680.000		84.348.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	76.680.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	84.348.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	54.768.000		64.204.800,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54.768.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	64.204.800,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSTWNP)	4 Kegiatan	200.559.734		446.327.199,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.794.113	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	49.565.010,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.056.691	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	207.337.364,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.701.950	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	53.967.496,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	129.006.980	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.457.329,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSTWNP)	2 Kegiatan	35.446.512		574.088.887,20	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.771.050	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	156.835.197,20	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.675.462	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	417.253.690,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan (UPTD PSTWNP)	3 Laporan	872.063.500		930.480.850,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.950.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4.356.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	292.113.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	321.324.850,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	576.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	604.800.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya (UPTD PSTWNP)	213 Unit	211.033.400		233.585.070,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	139.347.250	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	146.314.613,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	51.686.150	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	54.270.457,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	33.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	5.273.313.000		5.790.769.973,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP) Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang 126 Orang	5.273.313.000		5.790.769.973,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang	3.512.424.458	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3.065.693.400,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	901.841.170	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.300.264.816,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	279.201.572	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	654.711.231,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	6.235.690	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	194.134.586,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang	105.324.798	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	113.334.210,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	181.479.389	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	168.630.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	32.822.196	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	32.370.800,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	84.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.400.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.555.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	105.713.727	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	94.243.930,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.870.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	21.420.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.562.000,00	UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWARDHA NIRWANA PURI
		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA			5.092.388.636		9.609.493.982,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.092.388.636		9.609.493.982,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.092.388.636		9.609.493.982,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100%	1.784.333.319		4.059.869.606,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN	1 laporan	79.720.000		86.592.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	79.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.592.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 kegiatan	35.088.000		71.659.500,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39 Paket	35.088.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.659.500,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 kegiatan	394.124.532		1.621.120.226,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.078.523	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.275.494,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	305.732.844	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.951.092,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.353.165	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.639.340,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.254.300,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 laporan	20.157.149		248.043.814,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	20.157.149	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.043.814,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disediakan	1 laporan	998.190.320		1.397.063.706,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.614.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.142.306,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.936.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.579.400,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	644.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.342.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara digunakan maksimal	33 Unit	257.053.318		635.390.360,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	180.398.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.013.200,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	35.854.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.777.160,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.600.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	3.308.055.317	-	5.549.624.376,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3.308.055.317		5.549.624.376,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	2.022.734	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.910.818.800,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	622.910.482	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.431.990,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	136.285.956	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.900.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	10.686.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.330.917,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	146.341.545	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.653.078,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	72.032.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.153.696,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	281.404.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.923.400,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.100.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.900.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.846.608.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.006.375.800,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	42.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.200.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	21.100.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.923.500,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	663.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.525.195,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.240.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	16.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.908.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	16.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.240.000,00	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN			6.102.976.539		7.431.513.724,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.102.976.539		7.431.513.724,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.102.976.539		7.431.513.724,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100%	1.756.671.539		2.357.932.924,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN	1 Laporan	76.680.000		84.348.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	84.348.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	44.988.000		74.992.500,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44.988.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	74.992.500,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	334.143.329		604.056.181,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.003.039	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	24.646.581,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.381.470	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	229.115.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.645.820	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	39.659.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	242.113.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	310.635.600,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0 unit	0		166.434.763,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	166.434.763,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.086.748.710		1.140.156.480,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.280.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	10.511.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.810.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.672.480,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	101.497.910	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	113.381.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	809.160.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	812.592.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya (UPTD PSAAH)	33 Unit	214.111.500		287.945.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	193.230.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	223.685.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	12.530.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	21.362.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.351.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	42.898.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	4.346.305.000	-	5.073.580.800,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	4.346.305.000		5.073.580.800,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	7.920.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	852.635.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.244.525.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	260.642.214	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	296.438.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	30.178.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	33.195.800,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	102.730.020	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	186.051.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	45.853.724	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	63.639.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	389.116.760	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	416.241.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	46.200.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	75.600.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	83.160.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2.400.728.082	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2.570.454.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	84.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	83.160.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	13.350.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	14.685.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	2.771.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2.942.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	15 Orang	8.400.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	9.240.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	4.200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4.620.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	18.500.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.870.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	8.400.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	9.240.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA			6.006.916.502		7.515.499.483,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.006.916.502		7.515.499.483,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.006.916.502		7.515.499.483,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100%	1.679.479.502		2.374.401.500,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Laporan	84.840.000		92.840.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.840.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	92.840.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadaan pakaian dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	14.688.000		80.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.688.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSBR)	4 kegiatan	348.070.602		719.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.154.875	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.789.109	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.566.618	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	205.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	1 Unit	520.000		87.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	520.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	87.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan (UPTD PSBR)	3 Laporan	971.360.900		1.018.774.100,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.440.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	216.320.900	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	248.774.100,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	744.600.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	760.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya (UPTD PSBR)	59 Unit	260.000.000		376.787.400,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	136.952.560	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	106.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	66.518.508	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.747.400,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.236.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	195.390.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.292.532	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	4.327.437.000	-	5.141.097.983,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	105 Orang	4.327.437.000		5.141.097.983,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	34.944.101	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	783.880.395	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	201.989.318	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.197.983,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	50.396.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	51.700.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	568.118.170	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	633.300.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	898.361.605	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	12.479.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	21.112.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	33.768.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1.598.307.890	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	1.950.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	14.848.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	28.808.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	3.533.249	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	16.464.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	51.660.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	59.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	4.424.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	4.341.372	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA			3.810.945.505		6.338.055.486,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.810.945.505		6.338.055.486,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3.810.945.505		6.338.055.486,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100%	1.308.951.505		2.657.870.174,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	67.560.000		87.450.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	67.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.450.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Pendidikan Pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	36.853.858		127.606.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	36.853.858	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.606.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	255.492.901		744.319.154,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.968.131	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	88.246.791	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.319.154,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.952.543	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	159.325.436	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	699.030.400		1.408.478.320,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	124.950.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.678.320,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	574.080.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.285.800.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	250.014.346		290.016.700,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	83.540.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.317.275,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	72.922.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93.551.996	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.699.425,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2.501.994.000	-	3.680.185.312,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	45 Orang	2.501.994.000		3.680.185.312,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1.149.930.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.574.062.500,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	291.323.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	190.825.945	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	22.314.779	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	125.784.826	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.328.389,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	49.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	176.422.348	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.087.423,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	6.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	53.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	14.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.295.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	5.950.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.730.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	52.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.182.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	26.880.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	332.256.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1.06.04.1.04.0017	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	4.596.249	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			74.811.241.190		74.465.973.800,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.698.279.716		73.515.973.800,00	
2,07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			74.698.279.716		73.515.973.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85 Indeks 100%	72.254.475.365		61.678.140.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	1.257.529.500		3.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	528.117.520	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	76.200.680	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	653.211.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	50.013.113.353		52.275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	229 Orang/ Bulan	49.237.580.153	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	52.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	559.920.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.360.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	164.443.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.810.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000		320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.829.506.868		1.497.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.920	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	37.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	123.037.348	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	61.110.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.625.357.680	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	18.696.659.400		3.691.140.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.784.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	543.741.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	482.640.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.146.134.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	455.666.244		895.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60.776.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	264.312.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	270.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	110.428.244	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.150.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	714.609.170	-	1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	9 Dokumen	714.609.170		1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	8 Dokumen	375.979.040	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	850.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	40 Orang	338.630.130	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	67% 306.401.936	451.446.262		3.086.803.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	61 Orang	349.753.224		2.847.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	260.470.806	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2.700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan	25 Lembaga	89.282.418	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	147.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n					
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	101.693.038		127.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	101.693.038	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	127.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	0		112.723.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	112.723.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	28,10%	415.818.693	-	2.005.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	360 Orang	112.249.978		1.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	330 Orang	26.689.990	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	360 Orang	21.889.990	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	14.000 Orang	10.250.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	200 Orang	53.419.998	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	17 Lembaga	42.550.000		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	17 Lembaga	42.550.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 event	208.300.000		255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	60.000 Orang	208.300.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	52.718.715		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40 Orang	52.718.715	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	436.418 pekerja	400.661.576		2.346.029.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	110 SK	95.200.142		405.607.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	60 Perusahaan	30.200.071	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	148.968.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	60 Perusahaan	30.200.071	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	136.989.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	34.800.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	119.648.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	60 Perusahaan	144.232.213		1.052.186.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	80.000.213	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	498.469.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	8.400.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	169.449.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	8.400.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	119.137.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	47.432.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	265.129.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	161.229.221		888.236.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	100.129.368	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	638.236.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	30.984.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	12.000 Orang	30.115.853	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	220.500 pekerja	461.268.650	-	3.050.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4060 Perusahaan	461.268.650		3.050.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	339 Perusahaan	167.684.120	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	97.700.410	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547 Perusahaan	195.884.120	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			112.961.474		950.000.000,00	
	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			112.961.474		950.000.000,00	
1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase luas Pembangunan di Kawasan transmigrasi	74%	54.200.000		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	54.200.000		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	31.640.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	9.440.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	3 Lokasi	13.120.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100%	58.761.474		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	58.761.474		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	45.641.474	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	13.120.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN			6.741.508.139		27.118.464.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.741.508.139		27.118.464.500,00	
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.741.508.139		27.118.464.500,00	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85 Indeks 100%	3.694.657.564		4.428.464.500,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	162.460.000		100.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	50.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	72.460.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	50.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	437.088.000		180.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	22.848.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	30.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	414.240.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	150.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	733.565.944		1.482.425.900,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.528.364	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	8.556.500,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	415.834.328	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	588.869.400,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	36.154.104	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	20.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.374.114	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	70.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.275.034	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	195.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	183.400.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	600.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.728.140.500		1.991.038.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.480.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	9.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.820.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	690.641.500,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.284.840.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	1.291.397.100,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	633.403.120		675.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	82.563.120	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	75.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya	300.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.840.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	300.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja	61%	3.046.850.575		22.690.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	85 persen	3.046.850.575		22.690.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	2.635.197.279	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	21.500.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	25 Lembaga	411.653.296	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	270.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	770.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	25 Kesepakatan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	150.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG			4.215.690.671		19.228.796.150,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.215.690.671		19.228.796.150,00	
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.215.690.671		19.228.796.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85 Indeks 100%	2.364.350.743		5.163.981.100,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	85.440.000		124.294.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.440.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	124.294.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	19.560.000		81.800.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	19.560.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	81.800.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	440.934.054		880.019.100,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.210.784	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	99.274.100,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.020.480	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	59.745.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.052.788	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	50.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.118.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	21.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	402.532.002	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	650.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.634.741.189		2.926.868.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.592.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	23.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	396.652.805	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	550.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.416.384	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	553.868.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.219.080.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	1.800.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	183.675.500		1.151.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	42.360.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	31.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	62.918.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	200.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	58.400.000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	420.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.997.500	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	500.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja	65%	1.851.339.928		14.064.815.050,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	85 persen	1.851.339.928		14.064.815.050,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	832 Orang	1.587.702.216	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	12.777.314.800,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	20 Unit	149.514.112	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	1.048.132.750,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	25 Kesepakatan	114.123.600	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	239.367.500,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			22.520.769.305		29.165.144.936,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.520.769.305		29.165.144.936,00	
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			21.647.799.008		27.769.368.904,00	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	91,2 Indeks 87 %	17.777.376.393		22.789.327.035,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50 %	430.000.000		728.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	60.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	136.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	219.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	14.568.985.411		19.009.681.035,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	60 Orang/ Bulan	14.342.145.411	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.644.789.035,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	126.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.892.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	16.250.527		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16.250.527	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86 orang	48.000.000		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	48.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	579.803.825		835.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.026.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	40.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	409.777.225	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	1.676.116.017		1.646.646.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	397.420.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.646.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.258.696.017	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 unit	458.220.613		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	191.220.613	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	67.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	145.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	45.92% 50.20%-51.26%	1.072.180.012		1.351.767.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan	10 Lembaga	286.478.704		372.422.315,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	43.367.918	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.378.293,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	193.842.646	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.995.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	49.268.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.048.582,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan kapasitas LPLPP	1 Lembaga	405.709.606		527.422.488,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	160.661.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.859.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 Orang	93.265.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.245.163,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	151.782.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.317.401,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 Orang	379.991.702		451.922.505,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	1 laporan	43.761.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					
	2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 Orang	101.478.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.922.505,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	234.751.652	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	47 Rasio	818.400.000		1.063.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 lembaga	818.400.000		1.063.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	300 orang	518.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar	12 Lembaga	72.646.788		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga	2 lembaga	72.646.788		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	72.646.788	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	149.326.789		194.124.826,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	149.326.789		194.124.826,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	79.326.789	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.124.826,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	20 Lembaga	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,5 Indeks	757.869.026	-	985.229.735,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	407.772.711		530.104.525,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 Kebijakan	60.945.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.228.916,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	30 Orang	149.255.429	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.032.058,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Laporan	197.571.962	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.843.551,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	350.096.315		455.125.210,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	144.037.102	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.248.233,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	206.059.213	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.876.977,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84 Indeks	1.000.000.000		1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 lembaga	600.000.000		780.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	300 Orang	400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	100 Lembaga	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	1 lembaga	400.000.000		520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	400.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			872.970.297		1.395.776.032,00	
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,12 17,78	98.766.912		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	98.766.912		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan	98.766.912	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	69 % 79,09 %	395.776.032		740.776.032,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,95 %	295.776.032		640.776.032,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	95.776.032	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.776.032,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	persentase kampung KB mandiri	5,10 %	100.000.000		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
		Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	4 Organisasi	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	79,5%	378.427.353		380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	125.000.000		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	3 Organisasi	125.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	50%	253.427.353		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	125.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	127.677.353	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			1.326.421.695		1.191.503.530,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.326.421.695		1.191.503.530,00	
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.326.421.695		1.595.059.079,00	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	90,79 Indeks 100%	394.419.345		404.049.579,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran	95%	52.560.000		68.328.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	52.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.328.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis Jasa	257.867.345		335.227.549,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	257.867.345	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.227.549,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	88 Unit	83.992.000		494.030,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	83.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.030,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	466.436.420		562.809.500,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan UPTD PPA	43 Orang	466.436.420		562.809.500,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang	16.025.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	40.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	164.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.609.500,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	17.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	50.617.567	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	108.570.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	47.122.028	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	21.151.825	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	465.565.930		628.200.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	43 Orang	465.565.930		628.200.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	155.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	108.570.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	60.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	11.182.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	16.320.975	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	47.448.132	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	51.394.823	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			72.200.729.477		77.540.913.850,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.776.229.627		2.330.650.747,00	
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.776.229.627		2.330.650.747,00	
1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100%	134.168.270		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang disediakan	100 Persen	134.168.270		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	47.803.706	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	86.364.564	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,95 skor 97,80 skor	1.153.173.018	-	1.668.919.397,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	738.509.993		92.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	92.432.433	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	305.751.260	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	126.338.744	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	77.428.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	136.558.636	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia	96.61 % 200 Ton	114.780.450		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	114.780.450	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	299.882.575		1.576.919.397,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	164.391.466	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.992.566,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	106.158.699	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714.608.300,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	29.332.410	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.318.531,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1,9%	1.288.973.544	-	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	123.820.494		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	123.820.494	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	1.165.153.050		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	770.654.004	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	254.360.860	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	140.138.186	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	87%	1.199.914.795		661.731.350,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	23 Dokumen	1.199.914.795		661.731.350,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	13 Sertifikat	72.289.155	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.329.444,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen	58.016.199	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.898.130,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	34.324.110	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.352.631,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	305.489.409	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.909.568,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	445.732.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.352.415,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	284.062.972	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.889.162,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			68.424.499.850		75.210.263.103,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			68.424.499.850		75.210.263.103,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82,80 100 %	64.624.554.993		67.587.387.374,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90%	106.114.196		994.421.511,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.481.396	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.624.371,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKpD	2 Dokumen	1.518.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.575.700,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.130.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.199.500,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.212.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.998.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	29.772.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.023.940,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	91,40%	62.083.995.468		62.304.807.561,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 Orang/ Bulan	61.692.790.268	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.569.051.861,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	359.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.480.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.962.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.697.600,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.314.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.239.600,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4.493.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.258.900,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.676.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.079.600,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	48%	4.963.900		56.559.600,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.819.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.613.200,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.325.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.473.200,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.819.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.473.200,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85%	7.408.000		115.674.040,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.387.020,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.604.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.887.020,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.400.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90%	390.218.247		1.072.412.627,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.014.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.340.790,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.448.383	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.190.087,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	16.945.404	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.264.240,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	317.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	855.294.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	9.510.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.323.510,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90%	34.188.410		621.153.881,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.082.688	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.232.589,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.105.722	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.921.292,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)	90%	1.581.475.850		1.593.928.254,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	462.047.776	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.411.200,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.119.428.074	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.136.517.054,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	90%	416.190.922		828.429.900,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	140.176.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.108.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	180.608.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.803.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	39.182.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.840.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	25.524.922	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.078.900,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.600.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman hortikultura Produksi tanaman pangan	493966,02 Ton 347814,02 ton	3.089.013.932		6.214.078.515,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas)	9250 Ha 860 Ha	3.089.013.932		6.214.078.515,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2.089.657.622	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.740.566.615,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	583.601.165	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.835.480,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	3 laporan	65.755.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.497.353,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.179.067,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	199.999.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	16415,06 Ha	710.930.925	-	1.408.797.214,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas) Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas)	220 Unit 3 Unit	710.930.925		1.408.797.214,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	104.830.445	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.215.495,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	8.916.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.780.760,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	8.916.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.780.760,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	350 Ha	88.272.040	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	88.361.839,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	499.996.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.658.360,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			6.535.080.283		0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.535.080.283		0,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6.535.080.283		0,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82,80 Indeks 100%	1.927.245.217		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	91,40%	90.600.000		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)	85%	124.440.000		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	124.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	90%	243.568.534		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.511.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.680.832	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.125.703	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)	90%	278.521.521		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.851.654	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	262.669.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	90%	833.271.162		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	252.612.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	577.158.862	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	90%	356.844.000		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	87.358.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	28.670.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	240.816.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	100%	4.607.835.066		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH) Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	245 Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi i 245 sertifikat	455.134.521		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	125 Sertifikat	109.300.419	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	121.505.985	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	224.328.117	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)	3 Varietas	4.152.700.545		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	6 Varietas Unggul Baru (VUB)	4.152.700.545	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			3.104.186.642		88.560.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.104.186.642		88.560.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.104.186.642		88.560.000,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82,80 Indeks 100%	2.553.444.477		88.560.000,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	88%	78.960.000		88.560.000,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	78.960.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	88.560.000,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83%	14.040.000		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	14.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	83,55%	141.647.462		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.351.650	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.237.830	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.777.984	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	89.299.998	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	84%	729.845.000		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	729.845.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	89,07%	1.407.437.782		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	325.907.492	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.081.530.290	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	88,75%	181.514.233		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	84.970.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	34.035.819	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	11.308.414	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	51.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	50%	446.361.965	-	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi (UPTD PTPH)	50 Kios	59.400.000		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	50 Laporan	59.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)	11 Laporan	386.961.965		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	11 Laporan	386.961.965	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani	90%	104.380.200		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15260 Ha	104.380.200		0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15200 Ha	65.189.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	60 Ha	39.190.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			5.383.749.616		5.638.761.207,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.383.749.616		5.638.761.207,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.383.749.616		5.638.761.207,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82,80 Indeks 100%	3.525.765.330		3.688.800.235,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	100%	105.960.000		105.960.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.960.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	105.960.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD BBITPH)	100%	150.480.000		225.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150.480.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	225.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	100%	269.346.512		306.276.336,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.927.909	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	4.243.155,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.666.587	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	36.036.131,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.103.656	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	4.397.050,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	234.648.360	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	261.600.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100%	971.837.627		1.025.903.187,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	66.131.524	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	147.081.930,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	905.706.103	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	878.821.257,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	100%	1.481.045.811		1.266.497.100,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	5.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	344.045.811	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	382.545.100,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.134.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	878.952.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BBITPH)	100%	547.095.380		759.163.612,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	167.662.400	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	191.080.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	169.432.980	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	228.083.612,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	340.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	53% 100%	1.857.984.286		1.949.960.972,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	985 Ha	1.857.984.286		1.949.960.972,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50000 Batang	1.230.192.610	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	1.230.519.221,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	22 Ton	627.791.676	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	719.441.751,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN			4.616.197.982		5.282.606.516,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.616.197.982		5.282.606.516,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			4.616.197.982		5.282.606.516,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82,80 Indeks 100%	1.958.710.392		2.482.606.516,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	90%	71.760.000		93.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	90%	129.468.866		55.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.413.528	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.685.834	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.969.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	91.400.004	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)	90%	252.863.450		667.317.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.951.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	667.317.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	249.912.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	95%	1.023.750.128		896.640.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.594.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	826.156.128	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.640.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	90%	480.867.948		770.649.516,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	97.563.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.811.500,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	23.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3.681.448	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.560.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	355.973.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.278.016,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
2	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	78%	2.657.487.590		2.800.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	330 Orang	265.977.392		2.215.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Unit	167.939.694	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.500.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	98.037.698	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.345.500.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan	2.391.510.198		585.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	2.293.834.802	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	97.675.396	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			38.436.446.000		13.948.980.131,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.436.446.000		13.948.980.131,00	
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			38.436.446.000		13.948.980.131,00	
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88,25 Indeks 100%	32.096.446.000		7.323.980.131,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100%	385.000.000		340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100%	25.450.525.369		556.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/ Bulan	24.894.525.369	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100%	39.740.000		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	27.740.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100%	252.445.000		288.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	95.445.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	22.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	130.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100%	1.665.535.500		1.762.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	451.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	109.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	991.535.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100%	72.000.000		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	72.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100%	3.696.760.131		3.708.480.131,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.675.480.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.675.480.131,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.018.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.030.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	67%	534.440.000		552.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	180.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	77%	735.855.324	-	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100%	118.744.965		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	118.744.965	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100%	617.110.359		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	554.510.359	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen	62.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah	318.721,20 Ton CO2e	2.349.144.676	-	2.485.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Pencemaran Air	≤ 5				
			Indeks Standar Pencemar Udara	46 (baik)				
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	2.049.104.676		2.185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	860.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	216 Paket	852.515.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	108 Lokasi	82.445.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	254.144.676	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	83%	200.080.000		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	125 Lokasi	200.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	50%	99.960.000		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	18 Kegiatan	99.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	255.429 Ha	100.000.000		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	48%	100.000.000		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	220.000.000		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	220.000.000		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	95.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	3 Dokumen	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	100%	850.000.000		865.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi					
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	70,0 %	850.000.000		865.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	185.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Usaha/Kegiatan	665.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	665.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	71%	350.000.000		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	4%	350.000.000		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11,37%	250.000.000		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	8,33 %	250.000.000		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100%	520.000.000		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100%	520.000.000		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	4 Perkara	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	6 Pengaduan	320.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Emisi GRK dari sektor persampahan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	371.535,10 Ton CO2e 18,75%	965.000.000	-	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71%	965.000.000		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	965.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.384.555.000		15.144.857.200,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.384.555.000		15.144.857.200,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.384.555.000		15.144.857.200,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82 Indeks 100%	9.402.769.033		12.054.857.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	5 Dokumen	91.460.046		129.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	23.972.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.625.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	23.625.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.823.427	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.413.499	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	6 Dokumen	5.636.506.434		7.157.857.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	5.517.704.307	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.857.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.723.477	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	29.473.442	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.295.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.349.804	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	3 Dokumen	48.388.647		46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.227.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22.664.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.497.243	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	164.219.109		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6.559.645	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.333.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	11.251.782	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18.698.981	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	105.374.981	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi	8 Dokumen	1.268.780.594		1.619.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.285.439	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	53.949.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.339	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.728.144	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.590.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	61.380.168	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.073.588.954	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.257.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Paket	605.996.203		700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	228.377.626	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	377.618.577	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	1.152.856.000		1.652.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	710.696.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	440.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi dengan Baik	4 Paket	434.562.000		520.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	76.015.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	38.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	276.267.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase kepemilikan KTP-el	9% 75% 99,7%	1.310.181.017		2.180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	319.490.936		380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	319.490.936	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	1 Dokumen	990.690.081		1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	990.690.081	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100% 100% 100% 100%	264.948.685		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	161.802.280		225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	99.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	61.952.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	1 Dokumen	103.146.405		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	103.146.405	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	297.235.073	-	425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	170.261.296		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	170.261.296	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan	1 Dokumen	126.973.777		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	126.973.777	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	1 Dokumen	109.421.192	-	135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen	109.421.192		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	3 Dokumen	109.421.192	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		37.462.537.000		30.012.730.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		37.462.537.000		30.012.730.000,00		
	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		37.462.537.000		30.012.730.000,00		
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 100 %	25.599.515.591		21.794.079.883,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	550.361.979		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	110.541.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	49.165.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	52.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	72.426.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	265.528.839	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	85 ASN	17.316.946.100		19.267.464.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	85 Orang/ Bulan	16.634.563.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.529.132.327,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	457.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.332.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	89.064.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	51.459.517	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.430.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	57.799.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.308.473	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	37.261.304		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.047.204	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.214.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	28 Orang	359.546.757		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.153.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	241.588.857	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	42.035.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	65.768.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 Buah	1.658.132.506		328.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.504.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.100.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	42.834.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	214.904.804	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	84.491.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.168.148.739	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	40.183.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	27.964.761	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	629.664.154		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	324.030.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit	305.633.424	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3.498.252.121		1.678.615.156,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	860.065.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	205.271.121	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.432.916.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.173.615.156,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	6 Jenis	1.549.350.670		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	117.804.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	325.899.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	275.772.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	155.436.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	674.439.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0,35%	171.555.740	-	1.017.468.617,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	3 Desa	171.555.740		1.017.468.617,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	85.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	85.515.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Unit	200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.468.617,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	28,57%	1.361.999.900	-	464.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Kerjasama	1.361.999.900		464.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.025.768.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	178.111.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	158.120.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2,97% 2,97%	2.513.051.839		837.181.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25 Desa	2.513.051.839		837.181.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	70.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	50.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	70.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	70.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	205 Orang	60.407.870	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	120.815.739	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	1500 Orang	1.020.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	170.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	706.118.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	170.815.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.181.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang maju	3,56% 5%	7.816.413.930		5.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ; Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	30 Desa	7.816.413.930		5.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	215.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	212.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	40 Lembaga	358.658.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	447.039.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	752.039.350	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	17.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	40.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	5.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	34 Keluarga	28.219.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	40 Keluarga	45.437.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN			149.659.587.960		50.514.680.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			149.659.587.960		50.514.680.000,00	
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			149.659.587.960		50.514.680.000,00	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76 Indeks 75%	32.324.928.801		33.489.680.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	90,5%	345.763.868		540.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	126.417.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	24.087.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	14.708.084	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	70.997.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	109.553.484	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	96%	27.164.977.676		27.017.180.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan	26.502.877.142	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.300.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	566.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45.850.978	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.821.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.678.892	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.989.664	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	93%	78.644.614		85.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	26.344.440	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	45.241.354	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.058.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100%	37.122.150		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	37.122.150	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi >20JP	25%	114.139.466		113.088.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.162.820	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	46.976.646	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.888.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	60.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	93%	1.171.957.984		1.025.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.807.607	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	363.484.061	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	196.536.745	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	545.538.834	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.672.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9.917.887	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	3.046.728.319		3.029.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.990.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.004.651.237	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.017.087.082	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.004.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik	92,5%	365.594.724		1.645.202.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.016.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.390.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	97.928.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.487.059,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.840.724	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.312.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	149 Unit	200.810.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.429.012.941,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan Persentase Perengkapan Jalan Terpasang	0,44 Angka 55,00 % 35%	23.048.453.169		1.425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan	2 Dokumen	87.639.980		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	2 Dokumen	87.639.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	55%	20.566.099.885		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	751 Unit	20.566.099.885	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLI Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	230.066.577		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	101.999.659	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	53.067.147	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	74.999.771	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check	1100 Unit	485.196.349		530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	255.196.439	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	159.999.931	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	69.999.979	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Beroperasi	565 Unit	40.205.589		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	40.205.589	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Keputusan)	1 Dokumen	1.199.998.908		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	199.998.908	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	130 Unit	260.712.908		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	130 Unit	79.999.791	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	180.713.117	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	325 Unit	178.532.973		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	89.533.076	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	325 Unit	88.999.897	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran Rasio Konektivitas Laut dan SDP	48,21 Indeks 0,917 Angka	94.286.205.990		15.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan	85 Unit	262.899.252		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	85 Unit	153.198.544	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	1 Laporan	109.700.708	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi			Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	65 Badan Usaha	173.306.738		174.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	61.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	111.506.738	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan laut	41%	1.500.000.000		426.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	1.500.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP	53%	92.350.000.000		14.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	2 Unit	19.192.234.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	24 Unit	73.157.765.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TERMINAL			4.344.159.040		4.248.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.344.159.040		4.248.000.000,00	
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			4.344.159.040		4.248.000.000,00	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76 Indeks 75%	3.100.667.815		3.728.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	70%	380.906.135		795.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.992.927	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49.929.229	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.999.979	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.984.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	2.664.795.880		2.749.000.000,00	UPTD TERMINAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.044.466	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.483.751.414	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik	50%	54.965.800		184.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	29.995.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	24.970.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD TERMINAL
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat	0,44 Angka	1.243.491.225	-	520.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B	73%	1.243.491.225		520.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	7 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	99.902.704	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	20.499.781	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	99.912.740	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD TERMINAL
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	873.176.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD TERMINAL
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			121.349.002.000		85.157.150.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			121.349.002.000		85.157.150.000,00	
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			120.052.916.365		76.397.150.000,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	100 indeks 100%	48.310.173.355		34.405.195.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	23.690.308		23.640.308,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.560.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.560.308,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 persen	29.539.194.182		30.043.840.308,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	140 Orang/ Bulan	28.995.353.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	524.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	524.280.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.560.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.560.308,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 persen	2.998.494		2.998.494,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	999.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.498,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	999.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.498,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	999.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.498,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 persen	2.994.933		501.764.454,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.083.937	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.853.458,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	455.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.498,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	455.498	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.498,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	1.029.600.152		1.091.404.152,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.767.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.767.390,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.464.185	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.464.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.584.577	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.584.577,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	838.196.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.588.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 persen	15.353.164.145		383.646.243,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	418.499	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.499,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	14.970.451.622	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	933.720,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	382.294.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.294.024,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.154.296.813		1.154.296.813,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	517.776.813	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517.776.813,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	184.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	440.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 persen	1.204.234.328		1.203.604.328,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	350.758.774	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.128.774,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	94.354	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.354,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	354.301.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.301.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.080.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	63%	43.764.774.624		1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	90 persen	43.764.774.624		1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	130.663.608	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.663.608,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	9.064.506.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.470.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	9.760.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.660.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	417.160.789	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.119.606,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	99.073.831	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.673.831,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1.100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.673.831,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	90 Komunitas	54.764.212	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.164.212,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	2.174.516.302	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.965.721,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	201.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	30.512.729.722	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.009.031,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	85%	27.977.968.386		16.001.151.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 persen	42.063.780		42.063.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	42.063.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.063.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kematangan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	60 persen	27.935.904.606		15.959.088.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	90.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupate n/kota	997.463.122	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.088.113.959,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	99.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	3.066.151.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.066.151.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	202.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	45 perangkat daerah	1.242.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	45 Perangkat Daerah	18.216.226.103	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	1.342.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.342.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	385.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	90.910.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.910.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	2.029.052.701	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.961.481,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			799.830.000		950.000.000,00	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang berkualitas pada portal satu data Kalimantan Timur	55%	799.830.000		950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	90 persen	799.830.000		950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70%	120.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.410.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	531.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.680.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	1.534.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.210.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	143.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	150 Orang	1.508.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1.508.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			496.255.635		900.000.000,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	44%	496.255.635		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	357.214.303		738.613.429,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	146.014.303	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.147.107,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	38 Perangkat Daerah	105.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.332.107,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	75.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.122.107,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	4 Dokumen	30.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.012.108,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	90 persen	139.041.332		161.386.571,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	37 Kegiatan	139.041.332	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.386.571,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			31.657.866.000		48.437.734.907,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.657.866.000		48.437.734.907,00	
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			31.657.866.000		48.437.734.907,00	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	94 Indeks 100%	22.657.866.218	-	32.157.364.907,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%	339.528.180		725.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	169.723.090	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	325.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	32.086.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.982.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	11.080.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	114.657.090	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	17.363.752.079		12.793.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	16.742.188.981	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	11.879.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	352.560.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	142.604.767	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	410.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.561.473	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	124.836.858	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat	100 Persen	119.012.000		16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.504.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	85.504.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.004.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14%	117.113.652		435.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.285.650	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.904.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.924.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	92.000.002	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	56 Laporan	977.413.997		2.755.034.722,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.576.800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	71.630.287	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	936.847.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.408.789	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.880.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	719.448.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.368.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	71.726.936	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	144.187.092,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	28.743.185	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	17 Unit/ Tahun	154.172.212		4.986.781.331,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	8.456.806	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.014.920.180,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	145.715.406	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.971.861.151,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	16 Laporan	2.676.809.848		5.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.448.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	740.304.872	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	257.272.976	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.673.784.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	4.090.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	910.064.250		5.446.298.854,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	271.932.050	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	309.011.500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	29.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	480.534.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.120.700	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3.925.764.354,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realiasi total terhadap target investasi	100 %	2.250.000.000	-	3.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	1 Potensi Investasi	2.250.000.000		3.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	2 Dokumen	426.892.433	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1.823.107.567	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berinvestasi	2489 Investor	2.250.000.000	-	3.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengawasan Kepeminatan Investasi	15 Calon Investor	2.250.000.000		3.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	974.378.100	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	1.275.621.900	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	2.400.000.000		5.080.370.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	300 NIB	367.500.000		511.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	367.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	511.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	9500 Izin & Non Izin	2.032.500.000		4.569.090.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	549.293.400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	264.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	880.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	559.507.500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	7 Kegiatan Usaha	659.699.100	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.389.090.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Menurunnya jumlah pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM	404 pelaku usaha	1.379.999.782		3.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM	80 Persen	1.379.999.782		3.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan usah	400.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan usaha	700.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	279.999.782	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	82%	720.000.000	-	1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan data dan Informasi yang Dibutuhkan	100 Persen	720.000.000		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	720.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			136.851.693.698		189.900.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			136.851.693.698		189.900.000.000,00	
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			136.851.693.698		189.900.000.000,00	
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76 Indeks 100%	47.165.880.621		55.950.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	95%	383.444.000		1.370.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	99.670.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	58.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	66.456.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	67.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	91.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	30.523.325.482		32.560.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag aSn	175 Orang/ Bulan	29.687.395.482	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	31.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	586.020.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	49.970.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	199.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	119.331.040		230.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	39.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.760.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	49.850.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	533.188.000		1.340.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	342.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	47.908.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	46.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	47.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	49.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	3.077.320.359		6.960.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.995.626	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	168.243.005	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.988.228	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	423.396.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	191.513.500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	320.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.004.366.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	49.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	99.903.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	95%	69.903.024		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	7 Unit	69.903.024	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	9.971.478.996		10.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.030.599.620	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.940.879.376	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	8.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	2.487.889.720		2.490.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	118.966.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	321.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	55.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	160.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	601.618.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	900.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	115.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	926.680.920	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	249.798.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98.716.800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	1,45 Rasio	13.482.886.439	-	24.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	9020 Orang	11.418.184.439		20.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2100 Orang	1.000.000.596	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	49.996.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	30 Orang	549.017.456	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	950.000.342	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	0,08 Persentase	2.089.730.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	555.166.339	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	4840 Orang	1.999.999.392	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2000 Orang	4.224.273.214	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti	100 Organisasi	2.064.702.000		4.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	2.064.702.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Persentase Peningkatan Pretasi Olahraga	75% 11,11%	72.181.926.638		102.950.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	7 Orang	397.119.400		16.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	397.119.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	500 Orang	3.613.063.400		15.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200 Orang	2.162.863.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	1 Kegiatan	1.447.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	500 Orang	59.458.905.592		19.750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	1.970.328.778	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1.251.661.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	3 Dokumen	1.410.447.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	54.326.468.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	100 Orang	8.712.838.246		52.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	10 Dokumen	8.501.802.926	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	1 Dokumen	211.035.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100%	4.021.000.000	-	7.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	5000 Orang	4.021.000.000		7.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	4.021.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA			18.730.694.302		28.450.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.730.694.302		28.450.000.000,00	
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			18.730.694.302		28.450.000.000,00	
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76 Indeks 100%	18.730.694.302		28.450.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	2.119.812.472		2.200.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	116.726.581	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	199.857.573	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	114.040.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	78.388.218	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.610.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	15.168.451.830		11.100.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.732.928.550	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4.500.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	634.023.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.801.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	1.442.430.000		15.150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	148.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.293.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			34.487.708.000		43.728.032.012,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34.487.708.000		43.728.032.012,00	
	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			33.320.562.327		42.037.282.012,00	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	84,5 Indeks 92 %	31.520.560.320		35.868.282.012,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, perencanaan, dan evaluasi kinerja	17 Dokumen	203.860.525		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	103.295.004	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.434.545	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.130.976	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan	12 Bulan	27.566.177.699		29.773.196.425,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	108 Orang/ Bulan	27.207.432.158	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.384.026.730,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Dokumen	222.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.889.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.432.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.648.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.512.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	37.577.541	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.335.295,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	36.082.000		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	36.082.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	162.720.909		178.970.999,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	112.729.448	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.002.392,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.179.461	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.697.407,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	24.812.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.271.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	736.474.036		815.161.762,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.699.412	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.669.353,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	148.674.163	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.541.579,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	12.923.476	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.215.823,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	24.678.345	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.136.703,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.923.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.005.564,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	394.575.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.592.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan dan Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	12 Bulan	2.272.994.611		2.723.966.476,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.639.214	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	957.305.397	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.148.766.476,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.298.050.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.555.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	12 Bulan	542.250.540		1.926.986.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	300.214.540	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.556.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	92.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.986.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,00 Nilai	1.758.002.007		6.123.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP	600 Eksemplar 71000 Orang 15 Perpustakaan	1.308.002.007		4.425.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	10 Perpustakaan	200.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	108.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	718 Eksemplar	350.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen	200.017.435	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	199.984.434	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.138	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	3 Kegiatan	450.000.000		1.698.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	90.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Perpustakaan	72.270.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9 Orang	217.730.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	70.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	80 %	42.000.000		46.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang dilestarikan	600 Eksemplar	21.000.000		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	600 Eksemplar	21.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	8 Eksemplar	21.000.000		21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	16 Eksemplar	21.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1.167.145.673		1.690.750.000,00	
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	75,25 Indeks	937.379.260		1.373.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	85%	363.794.701		690.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	13.794.701	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	25 Orang	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	10 Laporan	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	39 Lembaga	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Peningkatan Khasanah Arsip Statis Provinsi	300 Arsip	248.589.796		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	300 Arsip	248.589.796	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	17%	324.994.763		383.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	149.994.763	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	175.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	78 %	229.766.413		317.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	300 Arsip	55.784.679		67.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	220 Berkas	18.284.679	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Arsip	37.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Pelaksanaan Penilaian Arsip Statis dan alih media	5 Kegiatan	69.950.953		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	34.974.111	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	34.976.842	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang Sesuai NSPK	1 Laporan	104.030.781		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	5 Arsip	34.036.454	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	34.998.327	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	34.996.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			81.738.462.595		75.870.600.096,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			81.738.462.595		75.870.600.096,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			81.738.462.595		75.870.600.096,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,4 indeks 100 %	55.007.683.810		54.459.704.650	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	968.600.000		1.566.230.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	316.760.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.790.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	57.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.210.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	39.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.410.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	332.920.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.670.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	222.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.150.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100%	47.583.503.621		48.011.940.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag aSn	284 Orang/ Bulan	46.615.419.621	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.781.892.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	581.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.097.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.320.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	80.378.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.227.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	81.406.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.301.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua	21.796.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	58.890.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.710.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	67.370.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.597.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20%	108.876.000		184.755.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.386.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	42.816.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.649.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.620.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.720.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	636.863.000		629.850.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	229.823.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.432.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	56.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.695.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	56.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.695.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	293.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.028.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.413.488.647		796.580.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.596.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.570.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.099.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.797.648	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.174.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.454.179	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.745.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.221.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.238.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.771.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100%	38.095.385		35.400.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.554.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.240.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.541.385	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.160.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	3.010.706.740		2.034.789.250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.610.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.559.250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.787.216.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.076.600.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.214.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.630.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	1.247.550.417		1.200.160.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	567.556.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.160.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	136.456.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	43.538.417	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	85,71%	1.200.000.000		387.372.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 Kawasan	587.565.490		270.480.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	42698.30 Ha	269.008.978	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.458.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30 Orang	31.560.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	32.010.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen	183.635.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	30 Pelaku Usaha	37.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.012.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	65.600.712	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Peraturan Teknis	326.014.186		251.950.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	129.044.200	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.170.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	196.969.986	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,	100.780.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok Masyarakat	286.420.324		125.563.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	88.835.842	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.744.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	67.118.486	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.285.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	71.036.694	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.430.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	59.429.302	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.104.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	223.367,8 Ton	5.555.000.000	-	7.872.603.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan didalam pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai 12 mil laut (KUB)	10 KUB	3.602.000.000		1.634.027.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	107.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.005.554.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	185 Unit	3.494.200.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	628.473.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekome ndasi	113.630.300		565.627.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	100 Dokumen	113.630.300	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.627.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200 Dokumen	273.321.049		754.169.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	200 Dokumen	273.321.049	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.169.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	5 Pelabuhan Perikanan	1.526.500.000		3.846.257.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	1.329.980.428	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua	2.809.275.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	196.519.572	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.036.982.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	30 Rekomendasi	39.548.651		188.543.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	39.548.651	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.543.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	258.945,5 Ton	18.375.778.785	-	883.980.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pokdakan laut yang mendapatkan manfaat	2 Pokdakan	724.617.279		306.161.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.940.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.708.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	16.299.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.112.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	308.318.279	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.578.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	60 Orang	116.330.521	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.690.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70 Dokumen	193.729.479	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.073.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pokdakan PUD yang mendapatkan manfaat	1 Pokdakan	17.651.161.506		577.819.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	17.622.185.506	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.569.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	28.976.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100%	950.000.000		270.424.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha KP sampai dengan 12 mil yang Diperiksa Kepatuhan	123 Pelaku Usaha	735.280.479		579.445.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	270.540.448	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.102.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	100.850.032	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.431.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	70 Pelaku Usaha	199.410.276	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.561.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	108.905.967	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.741.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	8 Kelompok Masyarakat	55.573.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.610.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhannya	46 Pelaku Usaha	214.719.521		170.555.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	76.817.804	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.322.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	68.960.313	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.537.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	68.941.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.696.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produk olahan hasil perikanan Jumlah produk olahan hasil perikanan	1.680.270.182.290 Rupiah 44.289 Ton	650.000.000		750.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Perolehan Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	10 Lokasi	108.019.894		91.836.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	108.019.894	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.836.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10 Pelaku Usaha	541.980.106		658.164.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	541.980.106	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658.164.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN			1.095.625.000		1.410.898.778,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.410.898.778,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.410.898.778,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,4 Indeks 100%	607.552.939		1.002.832.640,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100%	71.520.000		69.480.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.480.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	23.520.000		139.251.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	23.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.251.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	197.275.014		427.465.465,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.714.463	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.950.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.304.342	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.800.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.112.685	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.371.524	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.035.975,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.434.320,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	141.792.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.745.170,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100%	19.006.201		23.830.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	19.006.201	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.830.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	224.747.364		214.287.175,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.487.175,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	147.467.364	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.800.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	71.484.360		128.519.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	32.998.360	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.519.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	38.486.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	83%	488.072.061		408.066.138,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besa	2 Unit Usaha	488.072.061		408.066.138,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	488.072.061	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.066.138,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR			1.884.282.800		2.944.542.650,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.884.282.800		2.944.542.650,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.884.282.800		2.944.542.650,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,4 Indeks 100%	893.008.060		1.770.256.800,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100%	81.720.000		98.760.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	81.720.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.760.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	244.041.876		654.426.200,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.008.826	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.146.950,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.375.312	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.475.388	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.156.150,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.483.150	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.741.500,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.032.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.349.600,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	476.361.394		600.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	476.361.394	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	90.884.790		417.070.600,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	34.149.790	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.323.950,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	31.735.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.746.650,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Ketersediaan Benih Udang/lkan Air Laut	1100000000 ekor	991.274.740		1.174.285.850,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pembenihan Ikan yang difasilitasi	2 Unit	991.274.740		1.174.285.850,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	991.274.740	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.174.285.850,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU			1.629.859.805		2.655.196.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.629.859.805		2.655.196.000,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.629.859.805		2.655.196.000,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,4 Indeks 100%	736.288.683		1.755.196.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100%	77.640.000		99.280.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77.640.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.280.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	4.200.000		231.201.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.201.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	249.817.344		877.775.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.850.010	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.165.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.259.476	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.450.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.383.648	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.500.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.892.210	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	228.432.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.660.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100%	31.785.472		50.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.785.472	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	262.074.616		300.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	262.074.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	110.771.251		196.940.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	74.004.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.160.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAQ-SEBULU
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	36.767.251	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.780.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
2	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Ketersediaan Benih Udang/lkan Air Laut/Payau/Tawar	4732250 ekor	893.571.122		900.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/lkan Air Laut/Payau/Tawar (UPTD SPAPAL Muara Badak -Sebulu)	4732250 Ekor	893.571.122		900.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	893.571.122	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU			1.028.550.000		486.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.028.550.000		486.000.000,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.028.550.000		486.000.000,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,4 Indeks 100%	988.550.000		486.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100%	73.560.000		300.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaag dan Pengujiag/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	73.560.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	136.200.000		150.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	136.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	623.230.416		20.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	623.230.416	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	155.559.584		16.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	45.559.584	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan	583,7 Ton	40.000.000		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Pelabuhan Perikanan	40.000.000		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	40.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU
		UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)			413.990.800		687.200.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			413.990.800		687.200.000,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			413.990.800		687.200.000,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,4 Indeks 100%	163.990.800		187.200.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100%	60.600.000		100.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	93.205.800		62.200.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.525.030	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.013.603	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.987.167	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	9.685.000		15.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.685.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	500.000		10.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
2	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	250.000.000		500.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	250.000.000		500.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	285548.95 Ha	250.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)
		DINAS PARIWISATA			43.101.208.364		32.625.588,000	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			43.101.208.364		32.625.588,000	
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			43.101.208.364		32.625.588,000	
1	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82 Indeks 100%	18.917.009.763		19,075,588,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90%	800.000.000		1,000,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	365.343.287	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	166.369.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	268.287.393	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	82%	14.275.928.578		14,333,287,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	13.879.208.578	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13,861,287,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	396.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70%	31.296.000		-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 Paket	31.296.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	459.013.266		305,601,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.909.699	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	142.254.345	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	26.111.545	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.750.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	80.017.097	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.860.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	19.376.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	138.734.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305,601,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	22.381.288		200,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	22.381.288	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	200,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.688.598.600		2,716,700,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	719.108.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	716,700,000	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.969.490.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	80%	639.792.031		520.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	290.238.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	21.503.531	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	328.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	160.000.000	DINAS PARIWISATA
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0,5%	5.100.000.000	-	5.250.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Meningkatkan Daya Tariknya	4 Destinasi	3.376.667.200		1.650.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi	2.976.667.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tank Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	90 Orang	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tank Wisata di KSPP yang dikelola	4 DTW	1.223.332.800		2.800.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Unit	873.332.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	90 Orang	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola	2 Destinasi	250.000.000		350.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	60 Orang	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Berstandar	100%	250.000.000		450.000.000	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200,000,000	DINAS PARIWISATA
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	29,1%	2.200.000.000	-	1,500,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Berhasil dipromosikan	30 Destinasi	2.200.000.000		1,500,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Dokumen	1.300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	600.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350,000,000	DINAS PARIWISATA
4	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5,07%	15.105.601.579		5,300,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Presentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang disediakan	11%	5.514.850.851		3,450,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Laporan	151.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	5 Laporan	72.930.513	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Dokumen Promosi yang dilakukan Dalam Rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	5.290.100.338	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,000,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10%	9.590.750.728		1,850,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.584.485	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	43.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Terlaksanakannya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Promosi	268.581.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Lembaga/Asosiasi yang Mendapatkan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Lembaga	2.192.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,000,000	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	6.913.485.243	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,000,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	25 Produk	72.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,000,000	DINAS PARIWISATA
5	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	1,16%	1.778.597.022		1,500,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Kerjasama Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berjalan dengan Baik	0,85 %	1.478.597.022		1,200,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang	728.597.022	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	90 Orang	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Wisata (Parekraf) yang Terfasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Sertifikasi	0,31 %	300.000.000		300,000,000	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90 Orang	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300,000,000	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERKEBUNAN			40.921.988.094		39.839.542.800,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			40.921.988.094		39.839.542.800,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			40.921.988.094		39.839.542.800,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	95,09 Indeks 100%	32.462.512.891		31.701.343.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	878.222.058		762.477.100,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	362.240.410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.303.504,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	246.966.744	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.232.744,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	269.014.904	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.940.852,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	27.255.327.949		27.184.848.765,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	26.665.713.412	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	26.597.852.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	457.320.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	465.600.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.902.031	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.950.310,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	42.392.506	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.446.455,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	30%	63.546.854		46.196.570,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	63.546.854	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.196.570,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100%	17.704.978		9.269.635,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.704.978	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.269.635,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	131.582.560		125.358.560,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	85.182.560	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.058.560,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	46.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.300.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	1.098.217.668		1.268.295.270,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.943.222	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	45.943.222,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	160.138.951	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	90.459.801,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	222.060.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	242.330.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	90.225.495	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	83.339.784,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	579.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	806.222.463,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	1 Jenis	14.126.156		-	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.126.156	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	-	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	2.448.298.548		1.994.938.700,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	631.317.648	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	592.017.648,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.300.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.300.900,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.785.680.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.371.620.152,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	61,73%	555.486.120		309.958.400,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	333.434.120	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	208.906.400,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	133.342.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	60.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	88.710.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	40.552.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas Perkebunan Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	20004096 Ton 13,33%	3.686.927.115	-	4.026.566.366,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	5 Jenis	3.686.927.115		4.026.566.366,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	3.632.479.289	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.972.118.466,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	27.223.913	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.223.950,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	27.223.913	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.223.950,00	DINAS PERKEBUNAN
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani	44525 Ha 12%	996.382.221	-	426.381.548,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Data Prasarana Pertanian Perkebunan Jumlah Kelompok Tani yang memanfaatkan prasana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Jenis 2 Kelompok Tani	996.382.221		426.381.548,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	756.997.461	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	143.003.595	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.228,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	27.235.694	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.235.731,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	69.145.471	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.145.589,00	DINAS PERKEBUNAN
4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan	100%	1.509.943.943		1.311.677.615,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	94 Pelaku Usaha	1.509.943.943		1.311.677.615,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	95000 Ha	856.999.890	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.087.315,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	700 Ha	652.944.053	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.590.300,00	DINAS PERKEBUNAN
5	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	33,05% 19,62%	717.847.091		623.722.985,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan	35 Pelaku Usaha 7 Pelaku Usaha	717.847.091		623.722.985,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	717.847.091	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.722.985,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	36,17% 25,39%	1.548.374.833	-	1.749.851.286,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaku perkebunan yang dikembangkan kompetensinya Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan	130 Orang 19 Produk	1.438.418.092		1.682.499.691,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.238.428.496	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.082.334.685,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	199.989.596	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.165.006,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	1 Lembaga	109.956.741		67.351.595,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	109.956.741	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.351.595,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN			2.329.277.174		2.122.945.500,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.329.277.174		2.122.945.500,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.329.277.174		2.122.945.500,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	95 Indeks 100%	1.405.796.283		1.367.455.946,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100%	74.640.000		74.640.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	74.640.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	74.640.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100%	14.953.576		41.353.576,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	14.953.576	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	41.353.576,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66%	150.000.000		130.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	255.099.248		259.468.670,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.010.274	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	4.010.274,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57.774.633	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	55.774.633,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69.212.244	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	69.392.244,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.802.097	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	17.113.519,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.178.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	3 Jenis	794.141.459		794.141.459,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	6.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	145.421.459	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	145.421.459,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	642.720.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	642.720.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	68,50%	116.962.000		67.852.241,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	27.052.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	24.406.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	24.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	39.910.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	19.446.241,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	8000000 benih	923.480.891	-	755.489.554,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang beredar	7000000 Benih	812.922.441		668.932.059,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	200 Sertifikat	458.832.623	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.270.702,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan	1 Laporan	354.089.818	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.661.357,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga					
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola	2 SDG	110.558.450		86.557.495,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	110.558.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.557.495,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN			6.250.552.220		5.920.421.100,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.250.552.220		5.920.421.100,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6.250.552.220		5.920.421.100,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82,75 Indeks 100%	1.750.552.220		1.420.421.100,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100%	96.240.000		96.240.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	96.240.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	96.240.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	100%	1.113.500		1.003.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.113.500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	1.003.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UpTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	30%	45.000.000		15.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	45.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	15.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	nit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	297.354.708		253.561.200,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.028.783	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	9.085.366,00	UPTDPENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	83.438.639	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	48.884.470,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.177.936	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	31.795.325,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.101.350	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	18.523.740,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	3.878.400,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	133.648.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.393.899,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	2 Jenis	43.001.852		25.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	43.001.852	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	25.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	3 Jenis	877.223.400		877.223.400,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	5.200.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	227.383.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	227.383.400,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	644.640.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	644.640.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	60%	390.618.760		152.393.500,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	17.036.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	16.031.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	341.541.760	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	106.391.500,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir		
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	32.041.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	29.971.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
2	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	90%	4.500.000.000		4.500.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan teknologi pengembangan dan perbanyak bio pestisida dan APH	67 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha	4.500.000.000		4.500.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2840 Ha	4.500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN			3.244.002.512		2.817.783.600,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.244.002.512		2.817.783.600,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.244.002.512		2.817.783.600,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	79,90 Indeks 100%	1.601.773.797		1.319.933.138,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100%	84.960.000		84.960.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	84.960.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100%	17.400.000		17.400.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	17.400.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UpTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	38%	90.000.000		60.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	90.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	60.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	311.240.517		242.312.738,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.168.774	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	7.168.774,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	112.375.166	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	50.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.180.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	43.875.244,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.136.577	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	19.329.520,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	1.939.200,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	128.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	3 Jenis	883.866.200		801.160.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	5.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	156.586.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	200.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	722.280.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	596.160.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	68%	214.307.080		114.100.400,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	46.967.080	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	45.676.300,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	120.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	39.174.100,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	47.340.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	29.250.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD	3,32%	1.642.228.715		1.497.850.462,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu	1100000 Benih	1.642.228.715		1.497.850.462,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	20000 Batang	1.642.228.715	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.497.850.462,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			71.355.528.082		90.756.652.116,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			71.355.528.082		90.756.652.116,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			71.355.528.082		90.756.652.116,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,57 Indeks 100%	35.915.484.985		43.734.147.116,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	88.89 % 100 % 100 %	914.216.667		2.106.085.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	233.646.865	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.130.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.240.182	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.458.506	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	73.023.373	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.217.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	582.847.741	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.130.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi Persentase ketepatan realisasi angka per triwulan	3.75 % 93.50 %	31.727.498.078		35.415.115.116,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	222 Orang/ Bulan	31.194.643.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.730.249.116,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.815.112	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	842.433.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.958.667	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.095.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	59.976.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.869.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.008.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.956.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi Persentase inventarisasi BMD	82 % 82 %	42.460.000		526.520.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.830.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.230.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.912.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	77 Skor	111.883.000		579.172.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.298.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	57.185.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.956.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	44.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.912.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan	83%	730.385.785		1.790.172.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.773.098	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.652.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.239.360	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.217.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	104.773.327	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	19.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.652.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	488.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.158.347.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	96.30 % 95.10 %	93.028.703		105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	93.028.703	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	1.765.554.360		1.895.476.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.304.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.011.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.521.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.313.862.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.263.651.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	96%	530.458.392		1.316.303.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	279.333.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.139.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit	128.115.342	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.869.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	55.556.175	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.078.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.453.075	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.217.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan	90,54 skor 85,57 skor	25.825.264.115		26.902.554.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	5%	293.402.156		3.843.221.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	80.249.904	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.690.255.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Dokumen	213.152.252	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.152.966.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba Jumlah usaha peternak unggas Non Ras Persentase pertumbuhan closed house Jumlah kelahiran sapi hasil IB Persentase peredaran DOC dibawah standar Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB Angka kelahiran sapi Jumlah usaha peternak petelur	3398 RT 37661 RT 64 % 1500 Ekor 1.8 % 275 Ekor 61.50 % 335 RT 3754 RT	23.952.900.103		14.389.024.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)					
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	21.410.992.943	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.194.512.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	5 laporan	2.541.907.160	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.194.512.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	100 Ha 95 Unit/Klpk 65 Unit/Klpk 82 %	1.210.643.602		7.747.936.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	961.480.975	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.597.256.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	2 Dokumen	249.162.627	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.680.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	96,09%	368.318.254		922.373.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	368.318.254	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	922.373.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kawasan Untuk Peternakan	500 Ha	2.030.051.143	-	2.137.289.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah investor usaha peternakan	5 Unit	2.030.051.143		2.137.289.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.835.406.058	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.537.289.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	74.935.210	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	10 Ha	119.709.875	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/AKH	91,08 Skor 94,97 Skor	4.804.391.633		11.833.509.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak Persentase wilayah yang terkendali rabies dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	35 Kecamatan 280 Kelompok 96.30 % 82.52 % 51.13 %	2.800.243.568		5.764.832.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	886.338.600	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.856.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	40 Wilayah	141.993.308	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	807.076.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	1.586.913.506	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.767.120.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	184.998.154	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.780.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	98.15 % 54.48 %	407.350.000		1.844.746.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	2 Laporan	407.350.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua	1.844.746.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Tingkat kesadaran masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	26.37 % 86.47 % 50 % 4.74 %	1.579.277.884		3.532.151.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	649.999.871	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.130.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	94.280.203	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.593.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	254.999.584	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,	726.369.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	10 Unit Usaha	479.999.769	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.152.966.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	74.998.577	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.593.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	24.999.880	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	80,47%	17.520.181		691.780.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	856 Dokumen	17.520.181	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	691.780.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	86,96 skor	249.474.106	-	768.643.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada Jumlah Akses Pembiayaan	2.90 % 63 Milyar, Rupiah	249.474.106		768.643.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	141.185.232	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.915.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	108.288.874	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.728.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	82,02 skor	2.530.862.100	-	5.380.510.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	14 Dokumen 3 Unit/Klpk	537.982.421		2.152.204.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	146.575.377	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,	538.051.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	8 Kelompok	391.407.044	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.614.153.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Peningkatan Kompetensi Peternak Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	83 % 1.21 % 12 Dokumen	1.992.879.679		3.228.306.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	1.684.225.402	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	2.152.204.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	3 Unit	308.654.277	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.076.102.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK			9.611.988.891		7.036.161.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.611.988.891		7.036.161.000,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			9.611.988.891		7.036.161.000,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,57 Indeks 100 %	2.105.505.858		2.962.346.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	134.762.000		289.009.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	132.720.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	234.820.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.042.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.189.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD Persentase Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi	83.5 % 83.5 %	17.420.000		361.262.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.042.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.252.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.316.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.505.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.062.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.505.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83,5%	25.800.000		180.631.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.631.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan	83,50%	353.749.052		650.271.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.425.094	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.252.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	37.070.158	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.378.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.157.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.252.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.096.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.389.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	96.3 % 95.10 %	18.198.941		216.757.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.198.941	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.757.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	1.082.252.044		722.524.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	13.110.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.252.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.102.044	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.010.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	839.040.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.262.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	83,50%	473.323.821		541.892.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	113.785.360	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.252.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	210.838.461	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.820.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	148.700.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.820.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	85,95 Skor	7.506.483.033		4.073.815.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah pupuk KOHE Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan Persentase Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	160 ST 25 Ton 2300 Ton 3.10 % 5.5 % 155000 Stek/Pols 41 %	7.506.483.033		4.073.815.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Angka Kelahiran					
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	6.321.606.225	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.240.598.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.184.876.808	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.833.217.000,00	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			2.821.012.027		4.702.559.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.821.012.027		4.702.559.000,00	
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.821.012.027		4.702.559.000,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,57 Indeks 100 %	1.303.609.669		2.550.355.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	118.405.500		258.263.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.839.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.085.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.424.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	83.5 % 83.5 %	17.068.677		322.830.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.869.609	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.396.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.132.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.802.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.132.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan kehumasan	83,00%	156.755.129		581.094.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.476.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.001.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.849.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.348.759	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.968.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.547.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	96.30 % 95.10 %	170.363.453		193.698.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	170.363.453	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.698.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	655.721.400		645.660.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	15.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.681.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.264.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.830.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	96%	185.295.510		548.810.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	101.331.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	69.978.598	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.839.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.566.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.545.712	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.839.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,28 Skor	1.517.402.358		2.152.204.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab Persentase kesalahan hasil uji	2 % 98.20 % 1 %	1.517.402.358		2.152.204.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	1.517.402.358	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.152.204.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
		DINAS KEHUTANAN			231.044.676.152		270.929.348.338,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			231.044.676.152		270.929.348.338,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			231.044.676.152		270.929.348.338,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	163.526.310.440		173.690.757.304,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100%	750.000.000		2.589.238.804,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	248.447.385	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	783.653.644,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	87.892.615	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.904.762,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	63.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.138.682,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	150.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	527.476.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	200.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua	1.013.065.716,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100%	153.836.369.761		154.206.518.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	724 Orang/ Bulan	153.030.059.280	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	153.386.518.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	506.310.481	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	39.350.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	70.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	28.550.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	203.550.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	170.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	28.550.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100%	209.600.000		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	209.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100%	917.575.660		1.175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	665.975.660	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	110.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	141.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.169.461.996		4.955.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.476.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.404.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.441.621	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.795.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	110.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	110.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	43.239.703		1.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	43.239.703	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	4.808.886.250		3.710.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	879.091.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	422.688.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.507.106.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	791.177.070		5.355.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	205.914.624	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	97.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.612.446	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	376.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit <0,5 % 4,45 Ha 6.402.024 M3/Tahun 1.645 Ton	37.548.255.712		48.363.041.674,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	19 Unit	369.766.000		921.613.539,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	369.766.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	921.613.539,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 hektare	4.172.567.822		7.098.990.076,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	635.216.076	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua	635.216.076,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	376.035.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.035.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	30 Dokumen	648.742.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2.512.574.566	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.087.739.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	300 Hektar	11.450.928.135		11.012.283.169,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	372.093.918	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	447 Ha	9.176.131.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.650.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	1.902.703.169	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.912.283.169,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	7.592.619 Ha	18.178.515.690		24.700.154.890,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8.039.210.362	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.326.112.800,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	7.500.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.352.300.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2544784 Ha	1.349.556.696	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,	1.621.742.090,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.289.748.632	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.645 Ton	94.450.000		400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	20 Unit Manajemen	94.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6000m3 per tahun yang aktif	16.499 M3	708.293.000		1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneraan Sanksi Admnsitratif	20 Unit Manajemen	318.518.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	25 Unit Manajemen	389.775.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	35 Sertifikat	2.573.735.065		3.130.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	10 Sertifikat	397.636.800	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,	530.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	467.430.902	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30.000 Batang	1.207.291.418	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	25 Unit Usaha	501.375.945	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,	450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	0,540 Indeks 95.337 Ha	2.500.000.000		3.250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	504.080.000		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	504.080.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA yang dikelola	30.523 Ha	1.995.920.000		2.250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	240 Orang	1.196.552.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua	1.250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	30523 Ha	799.368.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	3,25 Milyar Rupiah 370.184 Ha 10 % 6 %	22.108.500.000	-	42.314.549.360,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20 Kelompok	22.108.500.000		42.314.549.360,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	791.200.431	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.060.450.204,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	903.540.839	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	1.931.639.548,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	1018 Orang	17.433.439.681	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.787.731.057,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	1.116.350.998	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.580.446.285,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1.863.968.051	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.954.282.266,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	544.821 Ha 0,23 %	5.361.610.000		3.311.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	5.361.610.000		3.311.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.428.275.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	300.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	2.983.335.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.411.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO			9.878.839.380		12.108.728.591,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.878.839.380		12.108.728.591,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.878.839.380		12.108.728.591,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	950.950.600		1.478.136.311,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	64.440.000		140.640.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64.440.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	140.640.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	17.260.000		66.111.781,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.260.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	21.572.146,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	44.539.635,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	826.930.600		907.742.600,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	231.730.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	245.650.600,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	595.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	662.092.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100%	42.320.000		363.641.930,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	35.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	336.401.930,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	27.240.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	0,5%	61.668.024	-	50.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Dokumen	61.668.024		50.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	61.668.024	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	64.814 Ha	8.607.763.759		10.001.896.729,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Ha	8.607.763.759		10.001.896.729,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	212.569.105	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	35 Ha	87.840.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	412 Ha	6.548.040.662	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.551.896.729,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64814,98 Ha	1.759.313.992	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,03 Milyar Rupiah 10 Ha 0,3%	258.456.997		578.695.551,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	258.456.997		578.695.551,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	187.030.355	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10 Hektar	71.426.642	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.695.551,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT			9.464.450.100		0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.464.450.100		0,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.464.450.100		0,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.858.305.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	67.320.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.320.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.240.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.240.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	909.595.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	909.595.000	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	810.350.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	181.550.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	628.800.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100%	60.800.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	60.800.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,207%	4.880.720.577		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	1.971.355.677		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1.971.355.677	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	167 Hektar	1.788.543.466		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha	1.637.244.077	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Tumbit Dayak Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	151.299.389	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	771406,25 Hektar	1.120.821.434		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250.965.924	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	336.883.740	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	242.327 Ha	195.997.150	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	4 Operasi	336.974.620	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,1 Milyar Rupiah 1.000 Ha 0,53% 0,03%	2.414.630.803	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	2.414.630.803		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	543.727.867	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	102.888.000	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	283.323.815	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	407.212.464	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	1.077.478.657	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,01%	310.793.720	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	310.793.720		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	310.793.720	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN			9.379.363.350		11.625.120.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.379.363.350		11.625.120.000,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.379.363.350		11.625.120.000,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.186.803.600		1.925.120.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	65.460.000		148.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.460.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100%	165.630.000		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	165.630.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	895.713.600		901.320.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	174.393.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	721.320.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721.320.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		650.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	< 0,5% 0,203%	5.585.053.368		6.700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	157.052.700		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	157.052.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	160 Ha	3.270.186.389		3.100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	53.793.500	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	55 Ha	3.216.392.889	Kab. Kutai Barat, Bongon, Deraya Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	3.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	332.993,46 Ha	2.157.814.279		3.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	179.714.558	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.664.130.706	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	332.993,46 Ha	313.969.015	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,05 Milyar Rupiah 200 Ha 0,53% 0,3%	2.286.467.721	-	2.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	2.286.467.721		2.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	197.160.415	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	12 Orang	181.314.145	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	221.493.776	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.686.499.385	Kab. Kutai Barat, Bongon, Tanjung Soke Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	1.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,01%	321.038.661	-	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	321.038.661		500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	321.038.661	Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS			9.033.643.365		8.110.717.450,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.033.643.365		8.110.717.450,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.033.643.365		8.110.717.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.192.595.050		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	65.460.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.460.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	1.067.135.050		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	170.015.050	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	897.120.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	7.077.368.500		5.900.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	1.729.243.074		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1.729.243.074	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	178 Ha	4.218.833.426		4.300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	246.479.346	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	178 Ha	3.972.354.080	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	330.344 Hektar	1.129.292.000		1.400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	449.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	370.992.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	330344 Ha	308.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	0,03 Milyar Rupiah 50 Ha 0,53% 0,30%	563.935.295	-	1.910.717.450,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)					
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	563.935.295		1.910.717.450,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	7 Kelompok	163.417.962	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	310.717.450,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	92.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	100.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	207.717.333	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	11%	199.744.520	-	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	199.744.520		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	199.744.520	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO			9.541.183.125		14.513.317.670,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.541.183.125		14.513.317.670,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.541.183.125		14.513.317.670,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.020.890.198		1.593.317.670,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100%	63.060.000		141.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	63.060.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	141.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	769.124.000		773.160.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	216.164.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	220.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	552.960.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	552.960.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	178.706.198		628.917.670,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	128.706.198	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.917.670,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,207%	6.133.660.515		7.670.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	220.498.510		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	220.498.510	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	215 Ha	5.132.416.815		6.070.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	30.588.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	5.101.828.015	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	135.680 Ha	780.745.190		1.300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	386.257.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	343.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	135680 Ha	51.367.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,2 Milyar Rupiah 2.000 Ha 0,53% 0,3%	2.146.492.652	-	4.750.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	11 Kelompok	2.146.492.652		4.750.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	70.729.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	6 Orang	25.327.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	53.275.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1.997.161.652	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,01%	240.139.760	-	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	240.139.760		500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	240.139.760	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN			11.387.354.460		16.791.564.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.387.354.460		16.791.564.000,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11.387.354.460		16.791.564.000,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.372.116.000		1.891.564.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	69.113.600		154.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.113.600	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	154.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 % 100 %	1.244.976.000		1.256.160.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	288.816.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	956.160.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	956.160.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 % 100 %	48.026.400		381.204.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	37.876.400	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	281.204.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.150.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	8.354.508.220		12.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	531.708.110		500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	531.708.110	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	626 Ha	6.429.211.900		8.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	55 Ha	6.429.211.900	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	261.679 Ha	1.393.588.210		3.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	505.868.920	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	802.379.290	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	261.646,90 Ha	85.340.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,5 Milyar Rupiah 100 Ha 0,53% 0,3%	1.269.369.120	-	2.400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	8 Kelompok	1.269.369.120		2.400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	264.728.050	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	7 Orang	120.285.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	107.010.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	777.346.070	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	11%	391.361.120	-	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	391.361.120		500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	391.361.120	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN			9.717.863.400		12.135.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.717.863.400		12.135.000.000,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.717.863.400		12.135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	2.900.576.164		3.535.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	59.970.000		141.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.970.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.880.500		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.880.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	1.163.717.664		1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.163.717.664	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	1.108.297.000		1.143.760.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	213.097.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	895.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	893.760.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	557.711.000		950.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	134.776.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	20.870.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	402.065.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	5.463.847.141		5.400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	596.152.921		500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	596.152.921	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Ha	3.266.264.506		3.600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	122.055.232	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	3.144.209.274	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	982.043 Ha	1.601.429.714		1.300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	46.364.481	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.384.035.233	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	982043 Ha	171.030.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,1 Milyar Rupiah 630 Ha 0,53% 0,3%	1.129.841.438	-	2.800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.129.841.438		2.800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	343.813.936	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	197.522.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	650 Hektar	125.667.859	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	462.837.643	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,01%	223.598.657	-	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	223.598.657		400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	223.598.657	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON			12.778.153.920		8.018.317.822,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.778.153.920		8.018.317.822,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12.778.153.920		8.018.317.822,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	2.678.810.738		2.135.169.185,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	60.660.000		141.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	60.660.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	141.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		127.012.424,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	127.012.424,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	1.366.745.938		565.713.661,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	386.977.913	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	80.535.425	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	103.089.661,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	899.232.600	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	462.624.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	805.400.000		805.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	212.240.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	212.240.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	593.160.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	593.160.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100%	436.004.800		495.803.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	42.728.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	429.613.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.272.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.190.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	386.004.800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,207%	7.770.376.139		4.983.172.477,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	616.522.884		357.589.217,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	616.522.884	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.589.217,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	236 Hektar	5.767.673.225		3.437.963.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75.507.700	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.704.900,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	86 Ha	5.692.165.525	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.381.258.600,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	655874,58 Hektar	1.386.180.030		1.187.619.760,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	43.341.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.619.760,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	689.228.626	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.365.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	655.874,58 Ha	653.610.404	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.634.900,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,1 Milyar Rupiah 1.100 Ha 0,53% 0,3%	1.874.325.383	-	899.976.160,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	1.874.325.383		899.976.160,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	239.769.689	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.400.766,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	51.650.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.440.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1100 Hektar	301.813.024	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.329.348,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	1.281.092.670	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.806.046,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	454.641.660	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	454.641.660		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	454.641.660	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU			9.512.900.685		0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.512.900.685		0,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.512.900.685		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 100 %	1.020.102.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	70.920.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.920.000	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	889.182.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	195.702.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	693.480.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,193%	7.043.201.820		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	723.141.908		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	723.141.908	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	190 Hektar	5.447.533.184		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha	5.179.113.168	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan	268.420.016	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	194.381 Hektar	872.526.728		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15 Dokumen	373.992.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	365.378.800	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	194381 Ha	133.155.928	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,05 Milyar Rupiah 1.500 Ha 0,53% 0,3%	743.518.180		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	743.518.180		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	161.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	1 Orang	138.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	111.329.980	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	331.768.200	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	706.078.685	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	706.078.685		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	10 Orang	706.078.685	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA			8.949.036.575		12.092.015.707,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.949.036.575		12.092.015.707,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8.949.036.575		12.092.015.707,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	2.768.627.530		2.981.201.261,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	67.140.000		77.140.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.140.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.140.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		62.573.731,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.573.731,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	1.972.968.280		1.982.968.280,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.972.968.280	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.982.968.280,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	668.519.250		778.519.250,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	118.799.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.799.250,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	549.720.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.720.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	30.050.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	9.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.950.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	4.882.482.337		6.296.505.162,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Dokumen	167.378.664		189.992.970,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	167.378.664	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.992.970,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	195 Ha	3.989.420.145		4.038.859.675,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	71.969.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.409.030,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	70 Ha	3.917.450.645	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.927.450.645,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	260.147 Hektar	725.683.528		2.067.652.517,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	105.019.990	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	317.772.538	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.106.117,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	260147 Ha	177.479.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.555.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	4 Operasi	125.412.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.991.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54 Indeks	48.521.660		314.603.591,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	48.521.660		314.603.591,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	48.521.660	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.603.591,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha	0,1 Milyar Rupiah 1.000 Ha 0,53% 0,3%	946.688.708	-	1.799.705.693,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)					
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	946.688.708		1.799.705.693,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	354.473.015	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.880.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	42.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.034.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	1 Orang	42.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.976.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	138.417.413	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.817.413,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	369.798.280	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.998.280,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
5	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	302.716.340	-	700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	302.716.340		700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	302.716.340	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH			8.771.809.220		10.450.500.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.771.809.220		10.450.500.000,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8.771.809.220		10.450.500.000,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.001.718.000		1.455.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	60.040.000		150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.040.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	11.520.317		50.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.520.317	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	880.160.683		955.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	155.480.683	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	724.680.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen	49.997.000		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	49.997.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	4.781.978.948		5.990.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	188.399.988		550.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	188.399.988	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	180 Ha	3.545.191.000		4.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	3.545.191.000	Kab. Berau, Sambaliung, Pijanau Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	4.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	334.455,70 Ha	1.048.387.960		1.440.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	190.968.000	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Sambaliung, Pılanjau Kab. Berau, Tabalar, Semurut Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	776.283.300	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	334.455,7 Ha	81.136.660	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	90.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,05 Milyar Rupiah 1.000 Ha 0,53% 0,3%	2.670.828.262	-	2.705.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.670.828.262		2.705.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	77.580.000	Kab. Berau, Sambaliung, Pılanjau Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	75.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	51.191.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	5 Orang	51.890.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	134.280.000	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	2.355.887.122	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Pılanjau Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk	2.200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	317.284.010	-	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	317.284.010		300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	317.284.010	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI			8.966.382.470		9.858.221.296,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.966.382.470		9.858.221.296,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8.966.382.470		9.858.221.296,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.558.128.800		1.918.040.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	58.320.000		58.320.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.320.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	750.451.200		1.100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	750.451.200	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	689.357.600		689.720.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	139.637.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	549.720.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.720.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	50.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	< 0,5% 0,203%	5.076.509.936		5.210.044.636,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	332.606.656		399.806.656,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	332.606.656	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	399.806.656,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	140 Ha	3.264.345.040		3.770.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	94.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha	3.170.345.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	3.600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	149.826 Ha	1.479.558.240		1.040.237.980,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	587.517.080	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	749.995.320	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	149826 Ha	84.822.920	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	4 Operasi	57.222.920	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	89.587.980,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,205 Milyar Rupiah 500 Ha 0,53% 0,3%	2.086.607.074	-	2.485.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.086.607.074		2.485.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	128.635.920	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	78.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	4 Orang	162.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	80.070.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.636.461.154	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	245.136.660	-	245.136.660,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	245.136.660		245.136.660,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	245.136.660	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	245.136.660,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR			9.243.311.050		10.980.108.086,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.243.311.050		10.980.108.086,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.243.311.050		10.980.108.086,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	996.510.000		1.103.569.390,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	60.600.000		139.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.600.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	139.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		84.569.390,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	84.569.390,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	871.080.740		879.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	221.280.740	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru	230.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	649.800.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru	649.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	54.829.260		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	54.829.260	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	6.952.960.969		7.819.998.920,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	443.051.377		479.631.810,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	443.051.377	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	479.631.810,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	191 Hektar	4.236.838.225		5.150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	135.443.810	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	65 Ha	4.101.394.415	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	239.248 Hektar	2.273.071.367		2.190.367.110,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	488.060.325	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	490.367.110,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	605.490.988	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239.248 Ha	557.199.760	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	4 Operasi	622.320.294	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54 Indeks	68.373.270		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	68.373.270		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	68.373.270	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,03 Milyar Rupiah 300 Ha 0,53% 0,3%	914.935.231	-	1.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	914.935.231		1.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	83.905.719	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	94.080.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	1 Orang	137.804.782	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Hektar	102.492.945	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	496.651.785	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
5	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	310.531.580	-	356.539.776,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	310.531.580		356.539.776,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	310.531.580	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa	356.539.776,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU			9.114.958.970		10.148.043.594,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.114.958.970		10.148.043.594,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.114.958.970		10.148.043.594,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.031.719.400		1.501.850.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	65.460.000		148.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	65.460.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		173.070.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.070.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	906.259.400		849.594.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	240.259.400	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.848.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	666.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	609.746.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		330.386.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.386.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,207%	6.602.021.290		7.361.193.332,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	500.000.000		499.999.694,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	500.000.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	499.999.694,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	230 Hektar	5.252.021.290		5.061.193.638,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	5.252.021.290	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	5.061.193.638,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	939.988,166 043245 Hektar	850.000.000		1.800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	276.347.570,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa		
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	350.000.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	559.976.408,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	939.988,17 Ha	100.000.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	163.676.022,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	4 Operasi	200.000.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,03 Milyar Rupiah 1.500 Ha 0,53% 0,3%	1.218.941.000	-	1.084.999.862,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.218.941.000		1.084.999.862,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	75.000.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	50.200.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	2 Orang	50.200.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	516.900.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	249.999.862,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	526.641.000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	262.277.280		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	262.277.280		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	262.277.280	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM			10.947.095.670		12.080.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.947.095.670		12.080.000.000,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10.947.095.670		12.080.000.000,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.061.377.200		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	65.460.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.460.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	935.917.200		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	204.157.200	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	731.760.000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	4.496.823.100		5.130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	244.080.000		280.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	244.080.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	280.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 ha	2.096.519.800		3.200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	156.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	369.519.800	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	1.571.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	108.707,95 ha	2.156.223.300		1.650.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	931.743.100	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.199.480.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	108707.29 Ha	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,6 Milyar Rupiah 500 Ha 0,53% 0,3%	5.342.415.370	-	6.850.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	5.342.415.370		6.850.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	403.968.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	30 Orang	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	191.109.700	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	4.597.337.670	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	5.800.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	46.480.000	-	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	46.480.000		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	46.480.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI			9.148.117.280		1.600.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.148.117.280		1.600.000.000,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.148.117.280		1.600.000.000,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.959.675.600		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	65.460.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.460.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	866.124.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	107.004.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	759.120.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	1.018.091.600		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	968.091.600	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	5.584.308.060		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	670.002.528		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	670.002.528	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	175 Hektar	3.831.831.270		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	85 Ha	3.831.831.270	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	516.533 Ha	1.082.474.262		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	239.368.272	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	592.622.300	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	516533 Ha	171.022.790	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	4 Operasi	79.460.900	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54 Indeks	63.480.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	63.480.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	63.480.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,125 Milyar Rupiah 200 Ha 0,53% 0,3%	1.202.309.820	-	1.600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.202.309.820		1.600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	93.671.820	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	7 Orang	102.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	328.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	97.259.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	580.698.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
5	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	338.343.800	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	338.343.800		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	338.343.800	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN			9.584.055.800		0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.584.055.800		0,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.584.055.800		0,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.300.639.532		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100%	60.660.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.660.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	377.919.532		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	377.919.532	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	802.060.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	117.700.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	684.360.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	45.570.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.430.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,203%	5.669.398.048		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH/L yang dikelola	1 Unit	991.883.608		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	991.883.608	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	145 Hektar	3.592.562.100		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	180.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	65 Ha	3.412.562.100	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	410.738 Hektare	1.084.952.340		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	168.060.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	754.732.340	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738 Ha	162.160.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,15 Milyar Rupiah 2.000 Ha 0,53% 0,3%	2.355.984.520		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.355.984.520		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	259.533.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	15 Orang	93.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Hektar	200.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	1.803.450.770	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	258.033.700		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	258.033.700		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	258.033.700	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE			9.355.216.000		10.729.794.830,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.355.216.000		10.729.794.830,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9.355.216.000		10.729.794.830,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	1.508.381.500		2.114.453.300,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	70.320.000		163.680.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	70.320.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	163.680.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	350.000.000		350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	1.028.061.500		1.330.262.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	165.861.500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	160.862.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	862.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1.169.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%	50.000.000		260.511.300,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	42.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	235.571.300,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	8.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	24.940.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,207%	5.614.334.500		5.874.341.530,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	750.000.000		750.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	750.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	750.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	145 Ha	3.484.341.420		3.744.348.450,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	122.746.920	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	122.746.920,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha	3.188.334.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.448.341.530,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	173.260.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.260.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	245.390 Ha	1.379.993.080		1.379.993.080,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	229.993.080	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.993.080,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	950.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	249.694 Ha	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
3	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,05 Milyar Rupiah 100 Ha 0,53% 0,3%	1.924.000.000	-	2.432.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	1.924.000.000		2.432.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	300.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	124.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	1.500.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.008.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
4	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	308.500.000	-	308.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	308.500.000		308.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	15 Orang	308.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN			12.306.809.594		17.658.826.274,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.031.373.594		17.658.826.274,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12.031.373.594		17.658.826.274,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	2.418.312.392		2.016.004.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan 12 Dokumen	61.200.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	61.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Paket 8 Paket 50 Paket 20 Paket 12 Laporan	1.107.388.392		1.600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	397.578.392	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	700.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	709.810.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	900.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit 5 Paket	416.004.000		416.004.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	416.004.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	416.004.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	783.720.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	783.720.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit 50 Unit	50.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	47.970.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.030.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,184 %	3.924.279.484		4.700.920.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	1.200.920.400		1.200.920.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1.200.920.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.200.920.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	57 Ha	1.723.359.084		2.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	37 Ha	1.723.359.084	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	16.115 Ha	1.000.000.000		1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	450.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.115 Ha	400.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54 Indeks	100.000.000		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	100.000.000		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,7 Milyar Rupiah 50 Ha 0,53% 0,3%	5.177.811.718	-	10.341.901.874,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	5.177.811.718		10.341.901.874,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	200.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	4.877.811.718	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	9.991.901.874,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
5	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	410.970.000	-	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	410.970.000		500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	410.970.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	500.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	X	NON URUSAN			275.436.000		0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			275.436.000		0,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	275.436.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	275.436.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	275.436.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK			20.619.440.434		13.068.022.800,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			20.619.440.434		13.068.022.800,00	
	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			20.619.440.434		13.068.022.800,00	
1	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85,84 Indeks 100 %	6.041.363.260		554.973.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	58.800.000		137.160.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.800.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.160.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%	5.465.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.890.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	575.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100%	457.563.260		314.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	152.763.260	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.800.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100%	50.000.000		103.013.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	50.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.013.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	<0,5% 0,193%	11.264.362.468		9.822.826.494,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPHP/L yang dikelola	1 Unit	985.000.000		250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	985.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	138 Hektar	7.549.826.494		7.349.826.494,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	7 Dokumen	300.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	86 Ha	6.649.826.494	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	6.649.826.494,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Laporan	600.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	644.456 Hektar	2.729.535.974		2.223.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	890.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	890.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.506.535.974	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	644.456 Ha	333.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	333.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
3	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54 Indeks	450.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	450.000.000		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi						
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Laporan	450.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
4	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan Luas kawasan yang dikelola masyarakat Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,05 Milyar Rupiah 5.000 Ha 0,53% 0,3%	2.357.925.000	-	2.184.433.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.357.925.000		2.184.433.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	502.498.933	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.380.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	63.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.920.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	1 Orang	113.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	123.325.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	123.325.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.555.701.067	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.498.808.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
5	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	0,011 %	505.789.706	-	505.789.706,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	505.789.706		505.789.706,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	7 Orang	505.789.706	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	505.789.706,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			107.285.319.000		115.852.450.000,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			107.285.319.000		115.852.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3,29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					115.852.450.000,00	
1	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	89.12 Indeks 100%	27.961.715.559		38.753.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%	880.512.476		2.050.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.200.345	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.794.267	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.119.545	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.765.256	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.793.008	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	681.040.055	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90,00 %	23.100.547.992		25.253.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	123 Orang/ Bulan	22.741.107.992	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	24.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	355.440.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100%	8.000.000		2.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	68,49 %	208.600.000		535.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	204.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	1.256.207.747		5.213.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47.286.116	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.940.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.152.161.631	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	1.955.754.804		4.750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	421.834.804	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.513.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	552.092.540		950.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	311.284.640	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	63.337.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	177.470.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	12.939.254,38 M3 3197,08 Km2	1.232.885.350		2.450.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	1 CAT	1.182.775.350		1.750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	315.707.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	654.208.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	212.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.110.000		700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	50.110.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	20 Ha 4 Rekomendasi	1.075.884.000		4.600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	50.040.000		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	1 Laporan	50.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	181.828.000		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	90.903.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	90.925.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	363.200.000		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Dokumen	363.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	36.720.000		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	36.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	120.816.000		1.200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	41.816.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	79.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen	206.550.000		1.050.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	58.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	148.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	79.065.000		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	79.065.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Dokumen	37.665.000		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Laporan	16.865.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	1 Dokumen	20.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT	0,4996% 15,73% 9388542,39 SBM	47.549.390.215		23.749.050.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Dokumen	300.600.000		2.380.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	75.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	75.225.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	100.080.000		205.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	100.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	46.840.360.215		20.575.450.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	269.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.450.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1591 unit	46.571.200.215	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	100.000.000		183.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	100.160.000		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1 Unit	100.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	108.190.000		305.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	108.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	97,06%	29.465.443.876		46.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	12 Perusahaan	86.678.000		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	86.678.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan	383.700.000		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	383.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun	5 km	28.995.065.876		45.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	144.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Unit	28.850.405.876	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				104.944.086.928	98.377.054.864,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				64.272.177.615	67.892.820.021,00	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				64.272.177.615	67.892.820.021,00	
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88,9 Indeks 100%		41.311.935.615	41.892.820.021,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%		850.163.358	1.028.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		506.792.956	580.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		21.688.000	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		21.810.000	23.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		208.840.412	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		91.031.990	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%		32.600.328.350	32.947.601.590,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	191 Orang/ Bulan		32.076.648.350	32.397.414.834,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	522.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	527.704.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.481.956,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Dengan Baik	85%	1.200.000		1.212.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	30%	232.300.000		234.623.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	232.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.623.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85%	1.360.844.556		1.373.833.087,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	54.113.467	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.113.467,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	294.280.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.223.386,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	190.476.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.302.788,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.482.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	132.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.320.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	567.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.670.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	48.733.709	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.221.046,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	161.391.588		140.785.504,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	147.539.588	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.794.984,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.852.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.990.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	4.988.495.820		5.038.380.778,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.097.198.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.108.169.980,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.881.297.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.920.110.798,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85%	1.117.211.943		1.128.384.062,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	41.709.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.126.797,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	218.034.843	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.215.191,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	299.882.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.880.820,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	97.835.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.813.754,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	88.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.688.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	308.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.635.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	62.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.024.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	55%	242.000.000	-	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat (melaksanakan RAT)	44 Unit Usaha	122.000.000		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	44 Unit Usaha	122.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Pengawasan	28 Unit Usaha	120.000.000		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	44 Unit Usaha	120.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	60%	758.000.000	-	2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi sektor riil yang dilakukan pembinaan	60 Unit Usaha	758.000.000		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	96 Unit Usaha	758.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha Baru	2,91%	21.710.242.000	-	21.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk)	2000 Unit Usaha	21.710.242.000		21.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2000 Unit Usaha	21.710.242.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	28%	250.000.000	-	2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi untuk memanfaatkan teknologi digital Jumlah UKM yang difasilitasi utk menjadi UKM potensi ekspor	290 UKM 120 UKM	250.000.000		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	410 Unit Usaha	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			40.671.909.313		30.484.234.843,00	
	3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			20.582.185.244		6.000.000.000,00	
1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100%	300.000.000		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi yang tepat waktu	100%	100.000.000		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	3 Dokumen	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	270 Eksportir	200.000.000		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3900 Dokumen	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	57,1%	17.200.000.000		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	1 Kegiatan	17.200.000.000		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Unit	17.200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1,06%	600.000.000		1.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi Kemendag	100%	150.000.000		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapakting yang di pantau	85%	450.000.000		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk yang masuk pasar ekspor baru Negara Tujuan baru produk ekspor daerah	19 Produk 12 Daerah	599.925.820		1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	599.925.820		1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	199.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	45.096.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	49.946.144	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	304.903.676	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100%	1.683.268.000	-	1.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	500 Pelaku usaha	1.213.580.000		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	1.213.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5%	469.688.000		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	469.688.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	80%	198.991.424		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	37,5 %	49.880.000		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	9 UMKM	49.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	24,29 %	49.952.000		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	49.952.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta sosialisasi P3DN	100 Orang	99.159.424		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Laporan	99.159.424	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			20.089.724.069		24.484.234.843,00	
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri	40,81%	19.339.880.969	-	23.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	6 Dokumen	19.339.880.969		23.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	49.981.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	49.981.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	49.981.326	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	15.179.560.333	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	2.203.616.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	56.951.992	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3 Rekomendasi	1.749.808.666	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100%	399.957.342	-	820.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan	25,5 %	399.957.342		820.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	289.980.192	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri	3 Dokumen	109.977.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			(PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.					
3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100%	349.885.758	-	564.234.843,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	175 Industri	349.885.758		564.234.843,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	149.913.982	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.234.843,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	199.971.776	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			1.856.094.984		2.701.930.200,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.856.094.984		2.701.930.200,00	
	3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.856.094.984		2.701.930.200,00	
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88,9 Indeks 100%	1.271.983.447		1.301.930.200,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	74.400.000		84.120.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.400.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	84.120.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	2.248.000		2.500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	470.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	470.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	470.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	470.400	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	366.400	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	90%	47.160.000		45.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	47.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85%	136.613.779		169.993.800,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.013.208	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.697.775	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.587.600,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.999.996	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.510.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.392.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.806.200,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	95%	20.248.916		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	20.248.916	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	933.036.752		940.316.400,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.948.400,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	181.900.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	186.168.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	742.096.752	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	742.200.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85%	58.276.000		40.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.506.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	32.770.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	8%	584.111.537		1.400.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pendampingan HACCP Jumlah Keluhan Pelanggan Jumlah Laporan Mutu Akreditasi Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Layanan	5 IKM 100 % 11 Laporan 100 %	584.111.537		1.400.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2600 Sertifikat	272.649.285	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	180 laporan	189.551.452	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	121.910.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		UPTD PELATIHAN KOPERASI			2.120.433.088		2.971.599.690,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.120.433.088	2.971.599.690,00	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.120.433.088	2.971.599.690,00	
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88,9 Indeks 100%		1.478.726.139	1.471.599.690,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%		72.360.000	72.360.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		72.360.000	72.360.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen		14.130.883	6.784.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		902.700	1.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen		976.500	1.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		2.851.981	2.784.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen		8.400.000	1.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		999.702	1.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	90%		45.480.000	50.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		45.480.000	50.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85%		123.321.164	120.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10.219.920	10.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		16.168.960	10.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		9.932.284	10.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		87.000.000	90.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	95%		44.379.385	39.991.790,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		44.379.385	39.991.790,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	1.087.079.188		1.104.463.900,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.849.188	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	869.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	884.463.900,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	85%	91.975.519		78.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	27.288.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.100.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.018.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.900.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.616.719	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.054.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	3%	641.706.949	-	1.500.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan	600 Orang	641.706.949		1.500.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600 Orang	641.706.949	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	UPTD PELATIHAN KOPERASI
		BIRO UMUM			360.448.340.000		245.123.893.001,40	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			360.448.340.000		245.123.893.001,40	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			360.448.340.000		245.123.893.001,40	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	360.448.340.000	-	245.123.893.001,40	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum)	100%	129.746.035.493		118.974.316.647,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	683 Orang/ Bulan	127.531.930.492	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.596.019.394,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.214.105.001	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.378.297.253,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	1.327.219.334		1.413.572.077,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	672.055.704	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.988.816,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	655.163.630	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.583.261,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	3.129.732.000		3.603.762.800,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	910.356.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.655.400,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.688.376.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.780.286.200,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	531.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.821.200,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	49.663.003.086		30.312.165.195,40	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	494.919.126	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.125.970,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	486.242.399	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.642.017,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	321 Paket	21.700.320.894	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.960.480.760,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	772.471.805	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	587.112.695,40	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.499.307.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.781.714.919,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.503.473.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.949.670.320,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	904.944.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.125.204,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	301.323.252	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.293.310,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	17.645.733.849		4.273.712.739,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	6.155.453.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.919.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	330 Unit	9.990.486.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.864.049.562,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	1.499.793.826	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.028.744.177,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	57.563.921.014		37.508.056.377,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.516.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.667.948.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.457.620.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.136.705.850	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.613.121.412,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.709.706.564	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.382.798.965,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	100%	42.155.222.470		17.997.294.660,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit	1.369.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.002.600,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	262 Unit	4.821.094.390	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.625.715.600,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	187.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.167.404.550,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	33.585.117.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.541.186.910,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	147 Unit	2.192.111.080	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.985.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	17.889.134.675		13.850.233.577,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.236	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.277.455,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	452.928.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.550.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	869.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	931.392.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	16.316.914.439	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.434.014.122,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	100%	41.328.338.079		17.190.778.929,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	26.001.840.575	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.555.262.843,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	11.512.130.851	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.604.664.138,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	3.814.366.653	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.030.851.948,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			21.418.239.000		19.360.715.133,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			21.418.239.000		19.360.715.133,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			21.418.239.000		19.360.715.133,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 84%	21.418.239.000		19.360.715.133,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan	90%	1.507.234.673		1.206.525.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha					
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	916.684.673	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.531.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	590.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.994.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	179.880.000		4.741.229.973,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	179.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.741.229.973,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	1.820.604.000		630.118.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	673.404.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.118.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	1.147.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	2.255.900.362		2.042.860.626,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	240.561.182	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.648.626,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	177.955.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.384.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.362.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.797.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.540.350.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	369.910.186		407.042.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	369.910.186	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.042.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	16.329.600		21.328.210,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.329.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.328.210,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90%	245.400.848		179.530.870,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	198.260.848	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.586.050,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	47.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.944.820,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	11.529.870.845		7.444.081.339,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	2 Dokumen	596.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.141.140,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	5.258.967.725	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.629.293.234,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3 Laporan	5.674.743.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.172.646.965,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	3.493.108.486		2.687.998.040,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.352.526.605	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.533.134.920,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan	1.152.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	747.820.620,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	987.981.881	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.042.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO HUKUM			3.951.487.000		4.944.704.988,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.936.487.000		4.872.704.988,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			3.936.487.000		4.872.704.988,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	421.775.838	-	1.357.993.706,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100%	95.760.000		95.760.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.760.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.680.000		8.122.808,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.122.808,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	306.775.718		306.775.718,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	8.635.718	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.635.718,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	268.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.140.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	120		134.693.884,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.693.884,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3.000.000		804.081.296,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	801.081.296,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	8.560.000		8.560.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	BIRO HUKUM
2	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1. Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum 2. Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan	100% 100%	3.514.711.162		3.514.711.282,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	1.899.496.202		1.899.496.322,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	640.315.554	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.315.554,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	205.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.400.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	800 Dokumen	400.342.888	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.342.888,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	653.437.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.437.880,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100%	1.615.214.960		1.615.214.960,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.149.982.232	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.149.982.232,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	465.232.728	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	465.232.728,00	BIRO HUKUM
	X	NON URUSAN			15.000.000		72.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			15.000.000		72.000.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	15.000.000		72.000.000,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	15.000.000		72.000.000,00	BIRO HUKUM
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI			4.343.462.000		6.912.156.447,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4.343.462.000		6.912.156.447,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			4.343.462.000		6.912.156.447,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Indeks	886.478.489	-	1.439.914.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100%	103.329.510		115.440.200,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.329.510	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.440.200,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	100%	3.600.000		10.230.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.230.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	95%	662.939.199		1.039.573.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	72.153.331	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.473.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	78.089.248	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.350.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.096.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	495.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.250.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	100%	43.797.780		194.076.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.797.780	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.076.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	100%	72.812.000		80.594.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	52.312.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.812.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	20.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.782.000,00	BIRO ORGANISASI
2	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi 2. Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik) 3. Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik)	63% 82% 86%	3.456.983.511		5.472.242.447,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi	40 PD	1.744.304.631		2.122.242.447,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	410.840.997	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.840.997,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	911.401.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.401.450,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	422.062.184	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya	40 PD 40 PD	1.712.678.880		3.350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	300.004.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	341.170.330	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	175.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	307.336.881	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	589.167.669	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			9.026.204.000		14.264.348.411,00	
4		UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			9.026.204.000		14.264.348.411,00	
4,01		SEKRETARIAT DAERAH			9.026.204.000		14.264.348.411,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks	1.337.161.880		2.477.112.725,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95%	122.400.000		140.520.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.520.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD	100%	17.180.100		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	17.180.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Biro POD	100%	1.009.672.780		2.211.346.725,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	63.822.130	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.093.925,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	43.650.650	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.452.800,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	902.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.042.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100%	123.820.000		8.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	100%	64.089.000		67.246.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.269.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.312.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.820.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.934.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan 2. Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan 3. Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah 4. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan 5. Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti	100% 100% 100% 100% 100%	7.689.042.120	-	11.787.235.686,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	2.687.202.120		5.265.524.620,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	2.286.329.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.765.524.620,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	400.872.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	3.801.840.000		4.256.557.018,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	417.665.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2.682.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.106.557.018,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	701.475.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.200.000.000		2.265.154.048,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	623.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.998.340,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	239.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.239.568,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	338.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.916.140,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.772.971.544.000		3.469.000.000,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.772.971.544.000		3.469.000.000,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			1.772.971.544.000		3.469.000.000,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	1.376.265.139		1.769.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)	95%	427.760.000		330.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	406.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	21.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)	100%	32.178.000		37.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.178.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)	12 Bulan	785.912.539		1.208.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	139.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.260.929	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	617.651.610	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat)	12 Bulan	10.000.000		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)	100%	120.414.600		174.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	100.322.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20.092.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra 2. Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra 3. Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi	5.715 Penerima 19.900 Penerima 100%	1.771.595.278.861		1.700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	138.185.860.000		1.700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit	11.242.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	126.943.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	1.631.809.418.861		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	1.631.409.418.861	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	1.600.000.000		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO PEREKONOMIAN			3.283.479.000		29.572.350.224,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.283.479.000		29.572.350.224,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			3.283.479.000		29.572.350.224,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	1.000.182.496		1.631.423.656,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian)	95%	99.816.000		162.712.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.816.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.712.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)	100%	109.301.000		243.735.800,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	37.811.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.804.450,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.489.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.278.450,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	66.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.652.900,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)	90%	550.905.130		1.026.211.308,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	48.091.904	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.588.458,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.024.890	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.062.450,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.935.654	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.298.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	469.852.682	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.262.400,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100%	194.129.716		113.039.887,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	194.129.716	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.039.887,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100%	7.661.650		22.086.361,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.661.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.086.361,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100%	38.369.000		63.638.300,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.369.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.091.300,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.547.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
2	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi 2. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi 3. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi	100% 100% 100%	2.283.296.504		27.940.926.568,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	620.616.406		1.143.710.152,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	385.523.048	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.710.152,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	235.093.358	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	410.939.483		24.162.287.173,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokumen	220.506.796	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.456.860.916,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	108.327.314	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.597.780,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	82.105.373	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.828.477,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 % 100 %	1.251.740.615		2.634.929.243,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	801.871.572	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.585.562.728,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	150.103.842	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.366.515,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	299.765.201	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			21.602.256.793		13.130.645.915,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			21.602.256.793		13.130.645.915,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			21.602.256.793		13.130.645.915,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	1.327.927.000		5.025.311.764,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100%	187.360.000		260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	187.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	749.704.600		4.148.594.464,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.594.464,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	719.704.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.005.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	279.326.400		284.941.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.366.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.981.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.960.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85%	111.536.000		331.776.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.968.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.136.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	54.168.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.240.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	28.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.400.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1. Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah 2. Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan 3. Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	86% 85% 85%	20.274.329.793		8.105.334.151,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	90 % 90 %	18.874.329.793		4.885.363.160,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.665.400,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.697.760,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	18.124.329.793	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%	1.400.000.000		3.219.970.991,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.970.991,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			6.104.445.000		13.340.731.757,00	
4		UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			6.104.445.000		13.340.731.757,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH			6.104.445.000		13.340.731.757,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	1.839.292.522		4.408.781.054,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	90 Persen	120.600.000		136.554.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.554.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)	70%	102.400.560		184.900.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	81.900.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.900.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	86 Persen	765.942.942		944.013.830,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	140.976.918	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.735.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.369.730,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	597.766.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.908.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	90 Persen	81.599.440		2.436.208.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	81.599.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.436.208.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	86 Persen	660.663.780		514.476.324,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.884.424,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.507.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.184.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	472.656.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.407.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86 Persen	108.085.800		192.628.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.568.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	68.025.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.260.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	38.060.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.800.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	3 Level	4.265.152.478	-	8.931.950.703,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	1.839.604.000		3.911.195.488,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	202.732.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.849.176,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	1.215.090.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.495.400.312,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	421.782.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.946.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	1.339.277.200		2.259.112.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3 Laporan	342.619.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.673.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	603.670.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	604.086.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	392.988.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	839.352.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	1.086.271.278		2.761.642.615,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	483.858.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.315.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	273.224.638	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.185.339.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	329.188.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.987.315,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		SEKRETARIAT DPRD			375.000.000.000		401.569.930.610,00	
	4	UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			375.000.000.000		401.569.930.610,00	
	4,02	SEKRETARIAT DPRD			375.000.000.000		401.569.930.610,00	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	89 Indeks 100%	199.809.924.551		214.359.164.681,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	1.976.370.679		1.771.953.724,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	446.332.862	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.686.157,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	470.488.408	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.398.455,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.098.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.107.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	9 Laporan	534.800.795	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.561.257,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	504.650.614	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.200.055,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu Perangkat Daerah	100%	37.639.860.318		41.831.302.685,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	238 Orang/ Bulan	35.993.770.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.593.147.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	481.785.932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.184.042.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	367.046.546	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.831.355,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen	176.343.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.060.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	620.914.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.220.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%	1.195.267.709		1.456.030.499,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	133.087.108	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.136.099,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	811.669.223	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.194.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	151.586.066	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	98.925.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.546.152.118		2.679.148.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	238 Unit	67.904.076	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.907.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	938.759.568	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.730.165,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	309.440.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.572.605,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	62.894.886	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.185.783,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	335.747.799	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.680.465,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	362.179.058	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.973.493,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	219 Orang	314.594.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.426.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	154.632.177	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.671.970,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu Umum Perangkat Daerah	100%	5.270.528.262		6.887.016.167,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	249.732.612	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.667.765.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.834.837.863,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	900.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.271.860.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	940.550.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.047.885.629,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	674.331.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.072.510,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	592.777.281	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.066.557,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	245.370.908	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.293.058,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	21.145.899.385		25.851.991.264,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	8.289.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit	5.855.846.679	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.191.991.264,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.000.230.706	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	20.351.957.225		21.319.081.478,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	72.744.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.253.731,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.036.595.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.940.115.747,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	149.438.025	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.093.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.074.712.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	21.441.257.178		15.854.629.562,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.227.664.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.344.785.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 Unit	2.392.336.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.631.813.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	59.999.986	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1500 Unit	3.293.758.692	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.623.424.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.929.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.322.038.738,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	63.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.994.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	1.813.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.994.719.404,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.238.995.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.583.853.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.422.632.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan Layanan Keuangan dan tepat waktu Kesejahteraan DPRD	100%	56.800.892.607		62.427.809.208,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	55.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1.184.567.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.232.570.932,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	616.325.107	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.238.276,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	31.441.739.070		34.280.201.314,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	841.625.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.476.466,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	201.004.530	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.105.653,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	15.369.192.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.579.602.325,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	15.029.916.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.534.016.870,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 70% 80%	175.190.075.449		187.210.765.929,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	34.147.978.494		37.959.956.790,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.055.878.578	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.131.715.009,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	601.407.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.405.060.185,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	573.515.344	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.422.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	588.167.472	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.173.964,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	340.035.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.016.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	27.988.974.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.595.568.682,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	5.203.332.187		6.072.189.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.012.473.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.225.934.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	328.213.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.173.447.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.797.273.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.334.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.012.473.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.170.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	7.123.437	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.728.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.045.773.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.262.564.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100%	25.304.814.243		16.765.330.654,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3.607.624.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.303.917.201,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	4.332.399.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.303.917.201,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3.864.399.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.955.437.201,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3.747.399.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.868.317.201,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1.026.358.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	886.030.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	6.311.630.543	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.204.951.848,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2.415.004.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.242.759.802,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100%	55.820.311.106		51.656.944.107,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.088.604.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.728.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	3.221.577.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.223.186.217,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	684.894.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.436.217,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	28.334.700.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.934.592.082,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.905.167.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.651.368.332,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	17.585.367.276	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.362.681.259,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100%	32.544.680.758		37.834.284.841,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	5.449.625.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.003.079.817,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2.464.629.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.587.125.827,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	22.656.942.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.393.210.898,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3200 Orang	1.973.483.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.850.868.299,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100%	1.974.281.560		2.919.825.332,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	303.797.410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.702.700,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1.670.484.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.506.122.632,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas	100%	1.263.784.157		1.256.267.258,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	396.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	867.784.157	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	919.667.258,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	18.930.892.944		32.745.967.747,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	6.594.425.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.900.493.017,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	65.506.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.244.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	4.045.625.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.548.949.808,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	740.825.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	817.479.617,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	7.484.509.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.406.800.605,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			53.751.238.000		46.986.446.944,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			53.751.238.000		46.986.446.944,00	
	5,01	PERENCANAAN			53.751.238.000		46.986.446.944,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	85 Indeks 100%	42.908.920.945		33.874.394.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Ditetapkan Tepat Waktu	100%	577.000.000		862.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	321.562.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dadi Mulya	410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	24.999.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	128.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.126.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	35.972.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	33.043.444.944		33.012.394.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/ Bulan	31.904.444.944	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.904.444.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.129.094.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.905.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu	7 Dokumen	71.500.160		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.806.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.296.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.148.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.250.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun	100%	651.202.160		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.536.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	43.850.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.840.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	35.636.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	13.440.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	417.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Disediakan Tepat Waktu	99%	1.672.670.765		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	143.959.947	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	140.195.605	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.582.170	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	288.036.473	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.974.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.135.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.204.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.640.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	85.942.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	857.448.603		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	37.526.003	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	819.922.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	3.851.488.415		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.240.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.119.329.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.716.918.735	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	98%	2.184.165.898		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.656.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	600.036.294	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	18.740.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	155.301.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	14 Unit	109.320.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	998.763.564	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	236.348.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKP Tingkat Keselarasan RKP dengan RKP	100% 100%	4.256.000.000		3.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	2 Dokumen	2.128.558.000		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	329.581.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.698.977.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	125 Data	706.000.000		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	56.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3 Dokumen	1.421.442.000		3.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	350.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	650.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	20 Dokumen	421.442.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	100%	6.586.317.055		9.712.052.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.569.783.574		4.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	290.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	290.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	290.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	11 Laporan	290.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	317.622.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	375.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	286.631.996	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	430.529.238	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.640.533.481		1.712.052.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen	460.283.476	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.078.047,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	185.152.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.709.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	153.719.058	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.746.611,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	499.028.947	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.517.582,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	280.908.324	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	95.154.644	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	100.893.169	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	865.393.863	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.376.000.000		3.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	423.511.803	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	213.860.928	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	494.138.978	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	244.488.291	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH			144.677.800.939		270.126.005.809,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			144.175.511.996		268.460.505.809,00	
	5.02	KEUANGAN			144.175.511.996		268.460.505.809,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 Indeks	126.885.825.596	-	249.741.371.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	915.653.518		966.805.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	278.970.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	266.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	139.928.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	155.660.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	21.216.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	21.229.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	365.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	381.131.850,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	110.539.518	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	142.583.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	103.586.585.624		209.616.886.532,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/ Bulan	102.718.619.304	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	208.712.508.265,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	585.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	623.779.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	63.389.720	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	218.976.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	190.599.067,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	365.400.000		369.006.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	209.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	211.948.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	156.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	157.058.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2.383.148.000		2.510.285.965,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	401.150.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	561.735.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	492.158.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	450.377.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	555.340.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	563.545.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	340.932.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	341.002.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	307.440.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	307.461.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	286.128.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	286.165.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	71 Persen	1.945.668.660		2.168.742.048,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	644.166.612	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	681.472.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	250.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	364.134.048	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	364.134.048,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	250.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	436.568.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	436.568.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	436.568.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100 Persen	7.302.422.120		9.568.685.445,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.819.546	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	133.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.198.450.924	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.331.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.266.299.650	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.417.030.245,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	19.392.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25.555.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.315.140.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.662.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	411.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100 Persen	2.764.638.177		8.921.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	249 Unit	1.458.008.177	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.989.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.306.630.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.931.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen 100 Persen	5.458.162.677		12.541.811.889,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	13.310.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.049.741.840	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2.262.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.397.020.837	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.265.801.889,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	2.164.146.820		3.077.947.612,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	354.164.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	504.438.352,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	749.982.020	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	915.009.260,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.060.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.658.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase penerimaan lain-lain	100 %	1.796.674.000		1.796.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Lain-lain	921,69 Miliar Rupiah	465.684.000		465.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	465.684.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	465.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Transfer	9,334 Triliun Rupiah	1.330.990.000		1.331.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	1.330.990.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.331.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,94%	15.493.012.400	-	16.922.284.753,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu Persentase Realisasi Pajak Daerah Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan Persentase Penyelesaian Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.493.012.400		16.922.284.753,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	309.048.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	903.359.017,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	911.826.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	870.074.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	693.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	696.645.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	2.495.902.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.065.170.018,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	1.330.715.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.331.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	7.218.526.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	8.954.968.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	328.645.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	328.757.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	197.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	197.520.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	1.120.120.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.120.169.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	388.740.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	389.450.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	498.450.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.065.170.018,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X	NON URUSAN			502.288.943		1.665.500.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			502.288.943		1.665.500.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 Indeks	502.288.943		1.665.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100 Persen	502.288.943		1.665.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	502.288.943	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.665.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA			10.627.324.932		10.344.205.001,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.627.324.932		10.344.205.001,00	
	5,02	KEUANGAN			10.627.324.932		10.344.205.001,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,03 Indeks	8.613.589.932	-	9.535.468.105,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	46.550.000		70.276.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	46.550.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	70.276.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	127.320.000		121.822.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	121.822.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	75.316.000		84.076.608,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.208.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	24.149.664,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	5.208.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	24.149.664,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	64.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	35.777.280,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	34 Persen	259.200.000		35.138.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	259.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	35.138.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	1.280.486.784		740.935.543,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.247.044	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	9.208.657,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	641.347.380	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	341.658.915,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	222.812.360	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	69.420.488,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2.581.075,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	374.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	318.066.408,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	996.932.018		586.294.320,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	379.652.485	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	368.722.937,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	617.279.533	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	217.571.383,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	4.864.211.852		7.296.309.218,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	3.993.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.345.846.852	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.346.523.852,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.511.365.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.945.792.366,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	963.573.278		600.614.416,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	436.713.278	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	207.253.338,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	181.740.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	160.500.339,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	345.120.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	232.860.739,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	2.013.735.000	-	808.736.896,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Samarinda Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	2.013.735.000		808.736.896,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	233.300.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	192.283.900,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	946.450.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	244.494.744,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	833.985.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	371.958.252,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA			9.085.188.208		9.104.556.001,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.085.188.208		9.104.556.001,00	
	5,02	KEUANGAN			9.085.188.208		9.104.556.001,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77 Indeks	7.758.328.208	-	8.392.146.769,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	18.000.000		27.951.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	18.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	27.951.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	109.080.000		122.113.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	109.080.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	122.113.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	67.200.000		92.637.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	18.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	34.339.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	23.159.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	35.138.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Persen	96.600.000		46.318.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	96.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	46.318.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	1.468.575.254		1.133.910.178,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.690.477	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	8.055.212,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	316.275.890	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	741.731.960,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	244.204.487	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	33.039.280,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.258.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	5.162.150,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	891.146.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	345.921.576,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	965.188.490		280.069.686,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44.694.720	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	85.464.309,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	920.493.770	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	194.605.377,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	4.141.009.888		5.921.403.410,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.450.500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3.364.901,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.379.159.388	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1.421.660.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	2.750.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4.496.378.509,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	892.674.576		767.742.895,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	513.311.700	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	522.735.343,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	118.002.876	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	111.335.222,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.360.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	133.672.330,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	1.326.860.000	-	712.409.232,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Kutai Kartanegara Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	1.326.860.000		712.409.232,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	364.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	211.030.050,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	660.520.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	75.867.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	301.540.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	425.512.182,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR			5.206.417.646		5.282.263.002,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.206.417.646		5.282.263.002,00	
	5,02	KEUANGAN			5.206.417.646		5.282.263.002,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83,34 Indeks	4.550.083.646	-	4.963.022.652,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	153.199.965		55.236.500,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	153.199.965	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	55.236.500,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	106.440.000		108.609.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	106.440.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	108.609.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	221.471.565		205.985.560,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	93.651.895	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	80.392.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	73.003.670	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	61.705.160,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	54.816.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	63.888.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40,5 Persen	136.800.000		58.297.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	136.800.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	58.297.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	1.251.466.791		572.499.703,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.680.202	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	29.408.445,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	128.759.179	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	192.612.338,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.947.410	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	42.174.066,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.940.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	13.335.555,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.075.140.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	294.969.299,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	137.878.859		499.998.802,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	48.086.880	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	130.530.638,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	89.791.979	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	369.468.164,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.639.261.900		2.718.807.712,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	6.655.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	681.711.900	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	975.949.894,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	951.550.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1.736.202.818,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	903.564.566		743.586.975,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	470.606.066	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	373.336.849,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	234.518.500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	168.936.376,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.440.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	201.313.750,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	656.334.000	-	319.240.350,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wil. Kutai Timur Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	656.334.000		319.240.350,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	486.172.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	177.888.150,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	74.904.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	43.590.250,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	95.258.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	97.761.950,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT			5.528.638.664		5.454.923.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.528.638.664		5.454.923.000,00	
	5,02	KEUANGAN			5.528.638.664		5.454.923.000,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	4.729.755.664	-	4.889.530.172,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	40.464.000		40.462.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	40.464.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	40.462.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	106.440.000		108.609.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	106.440.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	108.609.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	101.304.000		108.609.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	41.544.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	50.311.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	23.760.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	23.958.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	36.000.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	34.339.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	32,4 Persen	50.400.000		55.902.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	50.400.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	55.902.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	951.175.640		575.175.146,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.671.650	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	7.986.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	184.243.940	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	200.794.660,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	243.700.050	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	26.914.018,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	4.731.971,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	486.600.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	334.748.497,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	253.674.082		299.049.443,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	33.044.328	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	90.385.790,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	220.629.754	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	208.663.653,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.337.124.270		3.097.118.310,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.200.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	6.655.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	771.813.300	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	766.591.582,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.544.110.970	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	2.323.871.728,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	889.173.672		604.603.673,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	515.247.672	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	306.129.585,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	117.600.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	99.092.950,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	256.326.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	199.381.138,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	798.883.000	-	565.392.828,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Kutai Barat Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	798.883.000		565.392.828,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	228.088.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	232.765.280,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	248.120.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	99.718.520,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	322.675.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	232.909.028,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN			6.535.664.957		8.375.846.999,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.535.664.957		8.375.846.999,00	
	5,02	KEUANGAN			6.535.664.957		8.375.846.999,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	73 Indeks	5.671.194.957	-	7.949.168.329,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	23.720.000		23.802.326,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.720.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	23.802.326,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	108.480.000		134.455.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.480.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	134.455.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	89.050.000		55.103.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	59.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	31.145.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	15.150.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	12.777.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	14.300.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24,48 Persen	38.400.000		27.152.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	38.400.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	27.152.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	925.330.354		891.418.882,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.931.284	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	7.793.005,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	184.215.610	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	231.293.460,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	96.524.260	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	24.324.025,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	13.310.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	624.720.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	614.698.392,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	522.973.443		598.867.744,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	103.768.340	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	66.550.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	419.205.103	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	532.317.744,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.044.241.160		4.939.623.171,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.668.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	1.996.500,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.272.068.960	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	1.589.019.674,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.766.504.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	3.348.606.997,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	919.000.000		1.278.745.206,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	322.750.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	586.878.096,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	216.250.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	160.398.810,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	380.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	531.468.300,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	864.470.000	-	426.678.670,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Balikpapan Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	864.470.000		426.678.670,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	71.400.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	51.869.070,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	376.030.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	100.224.300,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	417.040.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	274.585.300,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG			5.032.290.936		5.068.302.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.032.290.936		5.068.302.000,00	
	5,02	KEUANGAN			5.032.290.936		5.068.302.000,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	4.220.865.936	-	4.596.675.460,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	35.136.000		35.138.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	35.136.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	35.138.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	106.440.000		109.190.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	106.440.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	109.190.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	34.160.000		33.541.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.920.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.120.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.120.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	76,92 Persen	130.800.000		59.096.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	130.800.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	59.096.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	1.016.198.058		1.039.588.065,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.787.420	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	8.310.764,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	277.236.388	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	378.676.155,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	177.015.850	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	72.063.668,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	5.162.150,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	545.280.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	575.375.328,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	469.823.862		260.312.308,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	189.373.880	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	33.275.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	280.449.982	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	227.037.308,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.543.920.016		2.428.279.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.560.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	3.993.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.108.813	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	420.020.076,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.094.251.203	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	2.004.266.724,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	884.388.000		631.528.887,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	255.358.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	243.675.487,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	83.720.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	48.581.500,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	545.310.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	339.271.900,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	811.425.000	-	471.626.540,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Bontang	100 Persen 1,760 Triliun Rupiah	811.425.000		471.626.540,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	66.600.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	131.111.140,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	455.600.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	122.497.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	289.225.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	218.017.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA			5.044.913.000		5.044.913.001,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.044.913.000		5.044.913.001,00	
	5,02	KEUANGAN			5.044.913.000		5.044.913.001,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks	4.267.414.000	-	4.407.100.463,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	18.120.000		34.499.520,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	18.120.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	34.499.520,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	106.440.000		121.968.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	106.440.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	121.968.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	41.792.000		51.270.120,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.442.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	17.090.040,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	14.102.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	17.090.040,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.248.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	17.090.040,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	51,51 Persen	76.320.000		67.881.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	76.320.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	67.881.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	609.439.868		953.622.833,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.331.453	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	19.102.113,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	153.873.364	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	448.783.717,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	127.952.051	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	24.733.973,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	5.162.150,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	309.323.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	455.840.880,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	848.264.715		92.930.953,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28.457.280	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	7.286.693,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	819.807.435	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	85.644.260,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.644.412.324		2.467.187.112,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.970.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	12.544.675,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	421.301.024	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	525.197.054,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.211.141.300	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1.929.445.383,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	922.625.093		617.740.925,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	304.701.200	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	298.535.048,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	94.439.293	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	80.078.417,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	523.484.600	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	239.127.460,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	777.499.000	-	637.812.538,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Penajam Paser Utara Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	777.499.000		637.812.538,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	122.404.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	148.007.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	346.935.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	157.140.868,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	308.160.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	332.664.470,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER			5.159.700.000		5.159.705.001,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.159.700.000		5.159.705.001,00	
	5,02	KEUANGAN			5.159.700.000		5.159.705.001,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	4.360.230.000	-	4.466.493.581,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	33.600.000		27.684.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	33.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	27.684.800,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	106.440.000		121.968.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	106.440.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	121.968.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	67.200.000		33.541.200,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	16.800.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	16.800.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	33.600.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	11.180.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,3 Persen	49.200.000		55.103.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	49.200.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	55.103.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	864.642.119		1.192.599.958,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.802.379	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	21.563.531,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	165.488.952	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	400.660.016,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	124.370.788	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	137.842.087,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.980.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	2.758.364,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	539.000.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	629.775.960,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	702.541.567		93.965.273,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	49.810.217	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	27.415.273,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	652.731.350	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	66.550.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.969.277.692		2.381.269.036,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.560.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	6.602.825,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	785.561.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	806.034.700,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.171.156.692	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1.568.631.511,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	567.328.622		560.361.914,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	267.786.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	219.373.956,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	99.502.622	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	81.442.958,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.040.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	259.545.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	799.470.000	-	693.211.420,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Paser Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	799.470.000		693.211.420,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	167.040.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	192.024.600,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	352.740.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	157.660.650,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	279.690.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	343.526.170,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU			5.221.377.051		5.235.293.002,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.221.377.051		5.235.293.002,00	
	5,02	KEUANGAN			5.221.377.051		5.235.293.002,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	4.467.367.051	-	4.669.628.650,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	51.360.000		55.199.232,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.360.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	55.199.232,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	111.120.000		109.190.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	111.120.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	109.190.400,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	99.030.000		133.078.704,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	36.360.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	53.226.690,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	23.080.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	39.922.014,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	39.590.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	39.930.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	31,2 Persen	43.440.000		53.240.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	43.440.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	53.240.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	783.437.486		688.795.695,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.287.266	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	7.983.338,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	151.369.420	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	166.375.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	92.670.800	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	109.563.661,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.960.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	4.516.882,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	526.150.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	400.356.814,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BmD	100 Persen	651.906.915		620.342.099,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	554.966.477	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	93.263.969,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	96.940.438	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	527.078.130,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.794.678.650		2.333.594.856,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.400.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	21.284.820,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	779.291.200	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	435.452.755,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	986.987.450	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1.876.857.281,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	932.394.000		676.187.664,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	288.334.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	236.441.236,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	244.560.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	99.798.380,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	399.500.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	339.948.048,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB	100 %	754.010.000	-	565.664.352,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Berau Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan	1,760 Triliun Rupiah 100 Persen	754.010.000		565.664.352,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	80.100.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	232.925.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	439.360.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	99.825.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	234.550.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	232.914.352,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			7.338.620.945.731		6.644.401.710.379,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.338.620.945.731		6.644.401.710.379,00	
	5,02	KEUANGAN			7.338.620.945.731		6.644.401.710.379,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	92,13 Indeks 100%	65.299.625.733		73.365.955.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.444.793.681		1.858.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	429.092.571	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	121.373.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	66.121.446	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	159.703.542	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	75.321.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	295.320.810	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	297.859.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100%	37.779.143.305		38.167.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/ Bulan	35.005.026.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	1.955.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	467.374.855	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	99.936.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.616.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	61.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	58.704.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	33.376.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100%	493.176.000		900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	493.176.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100%	963.021.868		1.890.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	251.325.285	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	89.924.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	416.708.392	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.215.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	205.063.391	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	100%	7.354.609.005		9.645.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	244.835.851	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.916.638.013	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	521.717.573	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	479.240.993	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	353.776.575	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	574.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.264.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	877.330.718		1.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	95.301.127	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	782.029.591	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.061.110.816		8.578.955.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	132.299.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.907.855.218	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.594.308	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.955.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.886.362.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	100%	6.326.440.340		10.427.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	119.589.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	903.639.442	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.348.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	740.372.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.562.839.018	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	93 %	7.262.834.468.067		6.560.369.255.379,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100%	6.482.744.599		6.423.254.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	212.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.982.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	208.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	808.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	667.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	380.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	412.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	468.118.019	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.970.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	217.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	175.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.975.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	2.872.816.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	59.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100%	1.154.351.390		1.327.894.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	427.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.973.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	427.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.973.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	30.671.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	269.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.948.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100%	4.649.946.153		6.060.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	751.428.341	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	740.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	72.351.858	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	442 Dokumen	108.584.874	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	73.420.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	208.915.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	10 Dokumen	308.305.895	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1.223.597.860	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	288.110.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	32000 Dokumen	1.236.350.209	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	585.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	101.981.206	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	276.900.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	3.686.118.567		5.881.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	33.287.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	138 Dokumen	1.414.242.574	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.790.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	63.552.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	51 Laporan	179.955.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	4 Dokumen	314.019.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	176.556.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	158.672.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	153.022.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	325.021.373	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	576.686.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.169.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	28 Lembaga	291.104.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	7.246.406.796.078		6.540.188.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	96.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1.944.294.638.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	70.218.949.370	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	5.231.796.378.408	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.410.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100%	454.511.280		489.107.379,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	454.511.280	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.107.379,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks pengelolaan barang milik daerah	2,4 Indeks	10.486.851.931		10.666.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100%	10.486.851.931		10.666.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	741.453.474	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	994.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	61.241.904	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	243.042.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	175.252.586	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	354.649.952	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	321.578.662	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	4.159.823.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.332.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	1.105.053.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.261.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	282.722.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	1.998.995.004	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.146.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	519.686.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	28 Laporan	379.732.679	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	143.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			38.799.400.722		52.549.103.987,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			38.799.400.722		52.549.103.987,00	
	5,03	KEPEGAWAIAN			38.799.400.722		52.549.103.987,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	98,05 Indeks 100 %	29.281.814.210		28.064.735.853,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	237.578.492		643.656.717,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.244.446	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	138.489.144,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.420.516	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	56.138.853,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	33.757.042	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	50.954.746,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	97.452.244	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	317.259.931,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	40.704.244	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	80.814.043,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,24 Persentase	24.022.360.783		21.002.932.096,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag aSn	106 Orang/ Bulan	23.601.786.024	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	20.237.988.828,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	390.120.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	701.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	30.454.759	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	63.663.268,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (%)	98,55 %	3.492.000		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.492.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	98,29%	651.241.952		1.560.384.021,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	79.244.577	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	629.566.932,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	17.147.585	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	27.997.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	554.849.790	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	902.820.024,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	100%	3.016.077.841		3.851.671.646,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.952.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	19.999.692,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.010.166.117	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.156.372.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.990.959.724	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	2.675.298.979,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	98,55 %	1.351.063.142		996.091.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	289.738.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	349.999.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.061.324.642	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	646.091.873,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai perencanaan Persentase pengembangan karir ASN sesuai	89,21 % 94,29 %	9.517.586.512	-	24.484.368.134,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			dengan kompetensinya Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	88,13 % 97,43 %				
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesaikan pada masing-masing Perangkat Daerah Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti	100 Persen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen	1.446.053.396		6.290.538.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	95.392.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	944.463.433,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	62.100.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	569.016.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	124.973.796	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	892.239.402,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1.028.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	3.349.999.889,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	44.297.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	134.822.845,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	90.690.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	399.996.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Jabatan Managerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Managerial sesuai dengan kebutuhan Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit SKnya	95,89 Persen 92,86 Persen 94,32 Persen	655.988.889		1.456.982.023,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	3 Dokumen	104.025.611	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	349.990.026,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Laporan	118.212.778	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	359.999.033,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	433.750.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	746.992.964,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN Persentase Fasilitasi	95,79 Persen 86,92 Persen 88,00 Persen	7.036.944.588		6.675.686.624,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional					
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	137.678.364	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	896.865.199,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	6.621.469.300	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	5.205.999.834,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	109.162.964	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	241.518.813,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	168.633.960	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	331.302.778,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik Persentase Kepatuhan Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN	100 Persen 99,08 Persen 97,57 Persen	378.599.639		10.061.161.462,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	54.982.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	299.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	58.255.759	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	9.072.087.349,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	55.060.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	160.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	136.315.880	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	248.306.113,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	35.398.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	38.588.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	119.988.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI			3.163.137.340		4.955.966.073,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.163.137.340		4.955.966.073,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN			3.163.137.340		4.955.966.073,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	95,55 Indeks 100 %	2.763.137.878		3.124.366.973,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	100 Persen	42.000.000		116.049.200,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	116.049.200,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	99,20 Persen	164.096.901		1.161.067.603,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	28.435.919	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	573.133.321,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	3 Paket	31.380.982	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	91.214.282,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	104.280.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	496.720.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.083.513.968		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.083.513.968	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	100%	1.061.892.915		1.213.164.100,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.672.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	3.680.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	397.340.915	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	510.886.100,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	659.880.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	698.598.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)	99,20 Persen	411.634.094		634.086.070,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	67.751.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	63.479.750,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	343.883.094	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	570.606.320,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	74,00 %	399.999.462	-	1.831.599.100,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai Laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai	1 laporan 1 laporan	399.999.462		1.831.599.100,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	399.999.462	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.831.599.100,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			70.100.466.469		35.518.436.770,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			70.100.466.469		35.518.436.770,00	
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			70.100.466.469		35.518.436.770,00	
1	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86 Indeks 89 %	36.565.917.645	-	1.983.887.946,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	87 Persen	580.166.946		417.491.946,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	404.547.946	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.547.946,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.944.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.944.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	162.675.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	88 Persen	18.508.069.575		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	74 Orang/ Bulan	18.100.000.986	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	401.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.728.589	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	90 Persen	6.427.120		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.427.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	17.771.582		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.771.582	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	72 Persen	619.708.606		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	298.143.706	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	321.564.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	6.147.377.775		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	405.330.845	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.773.334	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.158.124.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.736.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.225.659.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	22.037.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	195.716.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	1.191.733.645		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	571.697.066	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	620.036.579	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	85 Persen	6.937.615.596		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.743.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.812.180.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.119.692.296	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.557.046.800		1.566.396.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.753.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	187.426.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	281 Unit	702.751.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	40.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1.566.396.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.566.396.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	90 % 91 % 89 % 88 %	33.534.548.824		33.534.548.824,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional					
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	90 Persen	10.934.548.824		10.934.548.824,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2160 Orang	10.934.548.824	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.934.548.824,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Jabatan Fungsional dan Pemerintahan Persentase dokumen hasil penyusunan AKPK organisasi dan individu dari masing-masing perangkat daerah pemprov kaltim Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LPPBJ Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP-PDN Provinsi	88 Persen 91 Persen 85 Persen 85 Persen	22.600.000.000		22.600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	140.560.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.560.720,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	5 Dokumen	117.290.516	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.290.516,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	140 Orang	2.668.398.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.668.398.940,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	58 Laporan	3.950.318.704	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.318.704,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	15 Dokumen	23.431.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.431.120,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15000 Orang	15.700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			24.364.052.000		35.113.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					35.061.000.000,00	
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					35.061.000.000,00	
1	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76 Indeks 100%	19.074.717.408		25.061.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85%	264.921.600		975.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	160.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	92.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase menurunnya pergeseran anggaran belanja	3,80%	15.037.605.556		14.660.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	50 Orang/ Bulan	14.826.117.176	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	14.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	209.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	480.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian keberadaan barang milik daerah terhadap catatan dokumen administrasi barang milik daerah	85,08%	2.568.300		92.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi pegawai	13,24%	7.200.000		10.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor	80%	1.277.539.083		4.512.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.348.018	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.060.745	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	56.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.402.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.871.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.068.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	17.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan penunjang riset dan inovasi	85,98%	2.157.844.869		3.537.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	555.504.869	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1.563.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kembali berfungsi baik	11,26%	327.038.000		1.275.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.456.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	46.090.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah Persentase Hasil Riset yang dipublikasikan Nasional dan Internasional (%) Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (%)	75,76% 75,76% 75,76%	5.078.554.592		10.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Sasaran : Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dari hasil riset	64,29%	603.560.000		1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	252.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	100.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	250.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, sasaran : Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan dari hasil riset	58,33%	1.041.282.000		1.600.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	251.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	185.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	302.651.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	302.031.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah bidang ekonomi dan Pembangunan dari hasil riset	60%	1.641.396.744		3.500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	140.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	140.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	140.118.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	140.904.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	152.563.774	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	147.763.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	145.693.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	196.121.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	144.353.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	146.480.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	146.466.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi inovasi baru berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten	60%	1.792.315.848		3.900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	168.075.932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	23.000.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.194.996.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	188.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	218.242.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan (%) Persentase Pengembangan Hasil Invensi dan Inovasi	52,94% 45,71%	200.000.000		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah (RIPJPID)	41,18 %	200.000.000		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	5 Naskah	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	NON URUSAN			10.780.000		52.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			10.780.000		52.000.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	76 Indeks 100%	10.780.000		52.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kembali berfungsi baik	11,26%	10.780.000		52.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI			18.393.496.000		22.868.040.453,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			18.393.496.000		22.868.040.453,00	
	5,07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG			18.393.496.000		22.868.040.453,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	74,34 Indeks 100%	17.273.496.000		17.840.657.054,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	244.974.965		521.660.700,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	97.972.433	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.187.400,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	37.105.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	37.105.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	19.105.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	19.105.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	12.642.088	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.192.050,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	21.940.444	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.401.250,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	8.912.401.954		3.475.097.700,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	61 Orang/ Bulan	8.545.730.845	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.965.137.700,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	161.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.960.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	112.831.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	91.959.369	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19,67%	54.240.000		234.982.400,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	54.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.982.400,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	735.127.479		1.507.269.975,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.895.269	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.686.975,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	242.616.573	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504.873.100,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	51.451.794	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	61.518.396	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.622.900,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	300.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.887.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.685.447	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	105.922.002		1.611.401.436,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	85.514.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.691.936,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.407.262	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.046.709.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	4.156.162.600		5.897.723.600,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.560.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.829.162.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.834.512.800,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.315.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.051.650.800,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	93%	3.064.667.000		4.592.521.243,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	589.806.111	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.047.635,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	876.735.909	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	744.804.478,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	116.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	445.815.050,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	60.756.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.831.703,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1.086.329.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.719.022.377,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	334.179.180	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
2	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase kerja sama antar lembaga yang difasilitasi Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya, dan media digital Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	100% 100% 0,26%	1.120.000.000		5.027.383.399,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100%	1.120.000.000		5.027.383.399,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.033.216.200,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	319.029.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	824.844.410,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	3 Laporan	197.883.027	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.209.789,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	72.116.973	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.728.024.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2 Laporan	30.970.360	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.089.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
		INSPEKTORAT			85.279.257.552		83.744.000.000,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			84.531.649.632		82.564.000.000,00	
	6,01	INSPEKTORAT DAERAH			84.531.649.632		82.564.000.000,00	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Indeks 100%	66.683.220.555		67.114.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.018.285.920		800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	438.374.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	151.205.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	83.492.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	345.213.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	38.198.278.356		39.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn	147 Orang/ Bulan	37.150.023.098	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	792.795.408	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.210.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	32.835.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	72.413.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100%	302.693.040		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.897.680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100.897.680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.897.680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100%	13.768.448.742		11.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	588 Paket	909.304.956	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	255.630.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	122.170.384	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	147 Orang	11.854.984.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	147 Orang	626.357.722	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100%	3.216.453.986		2.850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	204.000.356	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	1.153.224.147	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	52.414.480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	13.332.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	145.871.590	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	1.573.370.960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	74.240.453	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	1.063.070.521		2.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1.019.000.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	14.562.015	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	29.508.106	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100%	4.692.500.240		5.114.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.833.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.275.733.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.465.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.305.468.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100%	4.423.489.750		4.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	41.296.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	220.950.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	787.859.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.373.384.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100%	15.019.916.378		10.324.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BpK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	100 % 85 % 100 %	3.784.058.885		3.730.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	353.429.385	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	556.657.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	24 Laporan	673.580.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	20 Laporan	990.649.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	880.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	1.209.743.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	11.235.857.493		6.594.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	504.953.626	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	10.730.903.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	INSPEKTORAT
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	100%	2.828.512.699		5.126.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.828.512.699		5.126.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 Perangkat Daerah	506.903.599	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	164.112.283	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	1.650.570.217	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 Perangkat Daerah	506.926.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	X	NON URUSAN			747.607.920		1.180.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			747.607.920		1.180.000.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Indeks 100%	747.607.920		1.180.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	694.327.920		680.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	694.327.920	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100%	53.280.000		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	53.280.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			155.160.386.000		0,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			155.160.386.000		0,00	
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			155.160.386.000		0,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 Indeks 100%	15.139.316.522		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	250.860.740		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24.973.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	141.333.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	84.554.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97,00 %	12.634.477.964		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag aSn	49 Orang/ Bulan	12.206.950.364	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penaujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	426.386.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	12 Laporan	1.141.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	40%	733.076.600		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.264.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	731.812.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	35%	81.583.450		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	54.196.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.074.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.312.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	97%	1.060.996.468		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	85.992.065	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.990.630	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.880.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	871.196.238	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	34.937.535	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	27.397.200		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	56.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	27.341.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	135.152.000		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	114.030.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.122.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	215.772.100		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.726.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	136.090.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	25.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	12.556.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan edukasi dan literasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	4.292.461.704		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen	4.292.461.704		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	1.274.623.794	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	280.048.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	37.579.310	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	601.236.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1.684.736.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	414.236.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	122.842.148.590		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	2 Dokumen	122.842.148.590		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	122.561.705.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	280.443.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi masyarakat	79%	3.600.889.923	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	3.600.889.923		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	3.505.698.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	95.191.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	1.224.576.613		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	1.224.576.613		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	1.163.265.613	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	61.311.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	100%	8.060.992.648		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Dokumen	8.060.992.648		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	1.135.872.648	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	180.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	6.744.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H					21.350.000.000.000		17.023.019.738.031,10	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 menjadi komitmen pemerintah daerah yang diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Baseline 2024	Target 2026
INDIKATOR KINERJA TUJUAN				
1	Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional	Persen	3,90	4,00
2	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56*	0,60
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16	86,53
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS				
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,17	6,60-7,20
5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,26	18,84
6	Tingkat Inflasi	Persen	1,47	2,5 ± 1
7	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,37	3,44
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	3,50-4,30
9	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,309-0,318
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	5,94	6,73
11	Indonesia <i>Blue Economy Index</i>	Indeks	29,07*	38,81
12	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,04*	63,84
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,61	80,47
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,36
15	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	75,55	55,00-60,70
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	12,80	14,85
17	PDRB Per Kapita	Juta Rp	212,18	226,40-233,30
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,54-5,07
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19	78,86
20	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,74	64,00
21	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,75	4,10

Ket : *) data tahun 2023; Sumber : Hasil proyeksi, 2025

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk juga didalamnya adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,61	80,47
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	7,40	5,79
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679	2,043
4	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	100,94	165,75
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	83,71	85,81
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,63	80,36
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	2,40	4,50
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	9,70	16,00
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,77	18,75
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	78,75**	80,77
11	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	a. Kumulatif	%	36,04	14,97
	b. Tahunan	%	49,19	31,48
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	75,55	55,00-60,70
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	136,11	129,05
14	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,51	0,55
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	2,54
16	Rasio Penduduk	%	107,27	106,46
17	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	32	35,98
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17	6,60 - 7,20
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	3,50-4,30
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	212,18	226,40-233,30
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14	4,54-5,07
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	55,33	59,6
6	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,309-0,318
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56*	0,60
8	Umur Harapan Hidup	tahun	74,94	75,04
9	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286*	0,318

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
10	Prevalensi Stunting	%	22,2	18,4
11	Angka Literasi/Numerasi			
	Hasil Pembelajaran:			
	a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	1) Literasi Membaca	%	57,83	55,00 - 55,00
	2) Numerasi	%	43,53	2,50 - 12,50
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	1) Literasi Membaca	%	67,51	62,64 - 63,47
	2) Numerasi	%	0	47,46 - 47,83
12	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,02	10,48
13	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,03	14,22
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	79,25
15	Indeks Literasi Digital	Indeks	3,62*	3,79
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	66,54	80,19
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19	78,86
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,56*	59,36
19	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,04*	68,15
20	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	65,5	68,9
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	74,32	78,33
22	Indeks Pembangunan Gender	indeks	87,45	87,48
23	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,441	0,387
24	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59,17*	63,09
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	41,16	39,57
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	n/a	72,67
3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	7,30	42,5
	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	94	300
	b) Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	6	8
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,26	18,84
	a) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,38	2,47
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,12	1,24
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	2,87	3,70
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	55,00	56,65
8	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	%	4,92	5,20

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,047	13,37
10	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	0,990	2,58
11	Rasio Kewirausahaan	%	3,61	3,92
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,40	0,40
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,38	1,54
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,07	70,07
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	49,07	50,20-51,26
16	Indeks Inovasi Daerah	indeks	61,74	64,00
17	Indeks Ekonomi Hijau	indeks	63,04*	63,84
18	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	indeks	29,07*	38,81
19	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,14	15,73
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	6,66*	6,8
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35,72	35,93-36,03
22	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40,44	49,07-50,18
23	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	5,94	6,73
24	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi	%	37,36	24,53
25	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,77	81,85
26	Persentase Desa Mandiri	%	31,15	26,4
27	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1	1,42
28	Tingkat Inflasi	%	1,47	2,5 ± 1
29	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	%	n/a	10,45
30	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	19,74	25,54
31	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,26	0,91
32	Nilai transaksi saham per kapita per provinsi	Rupiah	4.497.142,76	5.320.738,88
33	Total Kredit/PDRB	%	11,30	17,10
34	Inklusi Keuangan	%	93,25**	98,52
35	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	27.481	25.061
36	Indeks Zakat	Indeks	0,53	0,59
37	Aset Perbankan Syariah per PDRB	%	1,75	2,04
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	indeks	97,08	91,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,79	3,91
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,75	4,10
4	Indeks Integritas Nasional	indeks	72,75	76,62
5	Persentase Penegakan Perda	%	n/a	71,4
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,3	66,6
7	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	82,28*	85,28-88,53
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	58,95*	64,4
9	Indeks Rasa Aman	indeks	n/a	62
10	Indeks Penyelenggaraan Tibumtranmas	indeks	n/a	52,22

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
11	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemerintah	dokumen	44	16
12	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,37	3,44
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	136,11	129,05
14	Nilai AKIP	nilai	78,74	79,78
15	Nilai Sistem Merit	skor	271*	286
16	Indeks Pengelolaan Aset	indeks	2,26	2,33–2,40
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A	PENDIDIKAN			
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	81,84	82,57
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	53,75	71,34
3	Kemampuan literasi SMA	Nilai	77,3	78,5
4	Kemampuan numerasi SMA	Nilai	63,83	67,03
5	Indeks iklim keamanan SMA	Nilai	73,05	84,84
6	Indeks iklim kebinekaan SMA	Nilai	72,88	74,88
7	Indeks iklim inklusivitas SMA	Nilai	61,58	64,58
8	Kemampuan literasi SMK	Nilai	72,38	74,98
9	Kemampuan numerasi SMK	Nilai	60,24	64,64
10	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	81,63	82,71
11	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	88,2	90,18
12	Indeks iklim keamanan SMK	Nilai	70,09	72,49
13	Indeks iklim kebinekaan SMK	Nilai	70,09	72,69
14	Indeks iklim inklusivitas SMK	Nilai	58,66	63,26
15	Kemampuan literasi SDLB	Nilai	80,09	83,29
16	Kemampuan numerasi SDLB	Nilai	74,93	76,13
17	Indeks iklim keamanan SDLB	Nilai	80,54	81,54
18	Indeks iklim kebinekaan SDLB	Nilai	72,46	74,46
19	Indeks iklim inklusivitas SDLB	Nilai	69,54	72,14
20	Kemampuan literasi SMPLB	Nilai	80,88	81,88
21	Kemampuan numerasi SMPLB	Nilai	74,55	75,05
22	Indeks iklim keamanan SMPLB	Nilai	75,43	77,83
23	Indeks iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73,14	76,74
24	Indeks iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	70	72,8
25	Kemampuan literasi SMALB	Nilai	81,95	82,95
26	Kemampuan numerasi SMALB	Nilai	72,57	73,57
27	Indeks iklim keamanan SMALB	Nilai	76,5	79,1
28	Indeks iklim kebinekaan SMALB	Nilai	77	81
29	Indeks iklim inklusivitas SMALB	Nilai	71,08	74,28
B	KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	1,83	1,78
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	177	150
5	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	18,04	14,74
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	N/a	46
7	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	75,38	85
8	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	85	85,65
9	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	1,89	20
10	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	57,10	60
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			
	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	58,80	85
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,30	90
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	107,03	98,7
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	2,41	17,62
2	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	0,4	14,5
3	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	29,25	37,12
4	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	%	6,54	16,31
5	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	0	0,6
6	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	84,23	88,23
7	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	0,0938	0,2213
8	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	87,88	89,88
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	74,47	79,08
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	18,18	23,48
11	Tingkat kemantapan jalan	%	82,21	89,84
12	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	45	51,68
13	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	74,76	79,04
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	15,16	39,42
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	n/a	20

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
E	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100
3	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	100	100
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	100
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	n/a	100
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	100	100
9	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
F	SOSIAL			
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	100	100
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	45	55
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	61,49	64,49
4	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/A	24,26
5	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100
6	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	orang	10	10
7	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
11	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
12	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
13	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
14	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	50	60
15	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100
16	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,46	6,78
17	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100
18	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100
19	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100
20	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100
G	TENAGA KERJA			
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	80	90
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	65	67
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	27,1	28,1
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28,67	30
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100
3	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Lembaga	9	12
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100
I	PANGAN			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	372,73	100
2	Skor pola pangan harapan	skor	89,1	89,95
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,81	1,9
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78,2	87
J	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	75	77
2	Indeks kualitas air	Indeks	52,64	71,61
3	Indeks kualitas udara	Indeks	91,43	84,88
4	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,91	100
6	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	8,44	11,37
8	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100
9	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	53,77	55,00
K	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	5,6	9
2	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100
L	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	42,86 (3 Kerjasama)	28,57 (2 Kerjasama)
2	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25 (212 Desa)	2,97 (25 Desa)
3	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	2,73 (23 Desa)	3,56 (30 Desa)
M	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Absolute	2,17	2,11
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Spesific Fertility</i>)/ASFR 15-19	Absolute	18,20	17,78
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (<i>demand satisfied</i>)	%	77,37	79,09
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	21,91	20
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,8	68,69
6	Indeks pengasuhan keluarga remaja	Indeks	90,06	91,04
7	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,85	58,10
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17,24	27,24
9	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15,01	14,03
N	PERHUBUNGAN			
1	Rasio Konektivitas Darat	Angka Rasio	0,41	0,44
2	Persentase perlengkapan jalan terpasang	%	25	35
3	Rasio Konektivitas Laut dan SDP	Angka Rasio	0,917	0,917
4	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	%	50,74	55,00
5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran	%	45,45	48,21
O	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80	85
P	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	44	55
2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	50	60
3	Pertumbuhan wirausaha baru	%	n/a	2,91
4	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	24,5	28

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
5	Persentase koperasi dan UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	2	3
Q	PENANAMAN MODAL			
1	Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara	Rp	49,86 T	50,46 T
2	Persentase peningkatan investasi	%	2,7	4
3	Nilai Realisasi Investasi	Rp	76,33 T	79,41 T
R	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Rasio wirausaha pemuda	%	0,33	0,5
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	0,12	0,4
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	50,79	66,67
S	STATISTIK			
1	Indeks Pembangunan Statistik	indeks	2,68	2,75
T	PERSANDIAN			
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	67	80
U	KEBUDAYAAN			
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	50	62,96
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	37	46
V	PERPUSTAKAAN			
1	Nilai kegemaran membaca masyarakat	skor	69,53	71,00
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	%	N/A	80
W	KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	74,95	75,25
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	N/A	78
X	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,37	1,41
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	214.694,00	223.367,80
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	241.728,40	258.945,50
4	Luas kawasan konservasi	Ha	327.819,31	328.247,25
5	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	36,72	36,75
Y	PARIWISATA			
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	1,69	0,50
2	Persentase peningkatan jumlah tayangan media pemasaran pariwisata	%	28,06	29,10
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	3,55	5,07
4	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	2,83	1,16
Z	PERTANIAN			
1	Produktivitas tanaman pangan	Ton/ha	4,88	4,95
2	Produktivitas tanaman hortikultura	Ton/ha	17,32	18,86
3	Produksi komoditas peternakan	Ton	89.493,54	91.030,14
4	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus hewan penyakit menular	%	370,3	-3,64
5	Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	10.195,06	16.415,06

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
6	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Skor	91,25	94,97
7	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,33	4,74
8	Persentase penanganan bencana pertanian	%	74,5	90
9	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	N/A	100
10	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	77	78
11	Persentase kelembagaan koperasi tani (korporasi) yang dibentuk dan beroperasi	%	0,5	1,21
AA	KEHUTANAN			
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,49	1,51
2	Indeks keanekaragaman hayati	Indeks	n/a	0,54
3	Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH)	%	1	6
4	Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	%	10	10
5	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	%	n/a	0,23
BB	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	M3	12.939.254,38	12.939.254,38
2	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Km2	2.307,00	3.197,08
3	Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah	Ha	N/A	20
4	Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR	Rekomendasi	N/A	4
5	Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	Rumah Tangga	5.147	5.247
6	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,14	15,73
7	Rasio elektrifikasi	%	96,17	97,06
CC	PERDAGANGAN			
1	Produk yang masuk pasar ekspor baru	Produk	17	19
2	Negara (daerah) tujuan baru produk ekspor	Daerah	11	12
3	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	100
4	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	75	80
5	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	1,06	1,06
6	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	21,4	57,1
7	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100
8	Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan	%	7	8
DD	PERINDUSTRIAN			
1	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	37,81	40,81

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
2	Persentase rekomendasi izin usaha industri yang diterbitkan	%	100	100
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	100	100
EE	TRANSMIGRASI			
1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	70	70
2	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	100	100
3	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	100	100
FF	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Indeks kematangan organisasi	Indeks	47,43	49
2	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a	100
3	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	Level 3	Level 3
GG	SEKRETARIAT DPRD			
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n	%	n/a	100
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n	%	n/a	70
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	n/a	80
HH	PERENCANAAN			
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100
II	KEUANGAN			
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	16,94	16,95
2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	40,46	57,19
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	92,52	93,52
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	indeks	2,26	2,40
5	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	46,32	51,94
JJ	KEPEGAWAIAN			
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	%	60,87	89,21
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	86,54	88,13
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	94,23	94,29
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	97,29	97,43
5	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	%	56,01	74,00
KK	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan	%	86	88
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	N/A	91
3	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	%	87	89
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	86	90
LL	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	N/A	73
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	N/A	63
MM	PENGAWASAN			
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	%	72	90
NN	Pemerintahan Umum			
1	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	100	100
2	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	100	100

Ket : *) Data Tahun 2023; **) Data Tahun 2022

BAB VIII PENUTUP

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun penuh pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2026 berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dilakukan melalui berbagai tahapan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik dengan Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 juga bergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat dokumen ini disusun. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan terwujud apabila seluruh pelaku pembangunan berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing serta turut mengawal melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

5. Gubernur melalui Kepala Bappeda mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur periode berikutnya;
6. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 selanjutnya dapat disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 melalui mekanisme Perubahan RKPD;
7. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
8. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

